PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

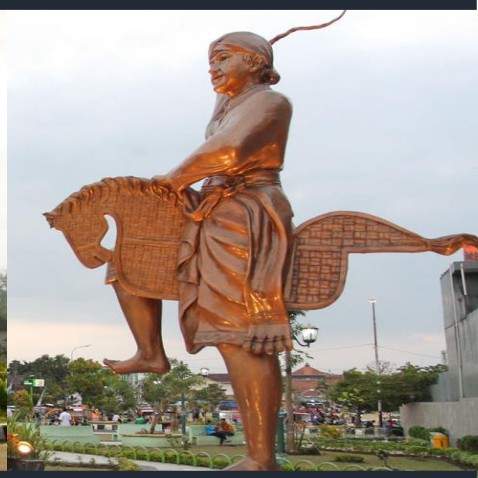

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-205 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD Tahun 2006-2025.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Sistematika RPJM Daerah Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
i. BAB IX : PENUTUP
j. Lampiran Matriks RPJMD Tahun 2016-2021.

(2) Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (19,50 /2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

I. UMUM

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Bhakti Tahun 2016-2021, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

RPJMD Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016-2021, dan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Tahun 2016-2021 telah dilakukan pengendalian dan evaluasi, dan terdapat substansi yang harus disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kebijakan Pemerintah Pusat, antara lain :

a. Penyesuaian numenklatur perangkat daerah;

9

b. Penyesuaian target kinerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah, tugas pokok dan fungsi;

c. Penyesuaian beberapa target kinerja sasaran daerah (Indikator Kinerja Utama/IKU Bupati) berdasarkan realisasi tahun 2016 dan tahun 2017;

d. Penyesuaian sistematika RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

e. Penyesuaian isu-isu strategis nasional, provinsi dan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen perencanaan, sistematika penulisan, maksud dan tujuan, serta tata cara penyusunan.

Huruf b

Gambaran Umum dan Kondisi Daerah memuat gambaran umum kondisi berbagai sumber daya pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dan/atau prediksinya 5 (lima) tahun kedepan, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasaranadan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum.

Huruf c

Gambaran Keuangan Daerah memuat pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan pembiayaan daerah dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Huruf d

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah memuat berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis pembangunan pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta hasil analisis kombinasi isu-isu strategis dalam

pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2021).

Huruf e

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, menjelaskan visi dan misi pembangunan di Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, serta menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan secara kualitatif.

Huruf f

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah memuat strategi, arah pembangunan di Daerah dan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2016-2021, serta Kebijakan Umum Pembangunan Daerah dan Program Utama Pembangunan Daerah

Huruf g

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah memuat rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan di Daerah, yang meliputi Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan kewilayahan, serta rencana kerja program dan kegiatan prioritas dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Huruf h

Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Daerah memuat Indikator Kinerja Pembangunan Daerah menurut sasaran pembangunan di Daerah Tahun 2016-2021.

Huruf i

Penutup memuat kesimpulan mengenai perlunya disusun dokumen RPJMD Tahun 2016-2021.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI ..... *i*

DAFTAR TABEL ..... *vi*

DAFTAR GAMBAR ..... *xiii*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen I-6

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-6

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah I-7

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan KLHS I-8

1.4. Maksud dan Tujuan I-9

1.5. Sistematika Penulisan I-10

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1

2.1.1.1. Luas dan Batas Administrasi II-1

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis II-4

2.1.1.3. Topografi II-8

2.1.1.4. Geologi II-11

2.1.1.5. Hidrologi II-12

2.1.1.6. Klimatologi II-13

2.1.1.7. Penggunaan Lahan II-14

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-18

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-19

2.1.4. Demografi II-20
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-27
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-27
2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-27
2.2.1.2. Laju Inflasi II-33
2.2.1.3. PDRB Perkapita II-34
2.2.1.4. Koefisien Gini II-35
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-36
2.2.2.1. Pendidikan II-36
2.2.2.2. Kesehatan II-41
2.2.2.3. Kemiskinan II-50
2.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-51
2.2.2.5. Tenaga Kerja II-54
2.2.2.5.1. Peluang Kerja II-54
2.2.2.5.2. Tingkat Pengangguran II-55
2.2.2.6. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Berkerja) II-55
2.2.2.7. Kriminalitas II-56
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-58
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-60
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-63
2.3.1.1. Pendidikan II-63
2.3.1.2. Kesehatan II-69
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-80
2.3.1.3.1. Pekerjaan Umum II-80
2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-89
2.3.1.5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri II-93
2.3.1.6. Sosial II-97
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-98
2.3.2.1. Ketenagakerjaan II-98
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-102
2.3.2.3. Ketahanan Pangan II-105
2.3.2.4. Pertanahan II-110
2.3.2.5. Lingkungan Hidup II-111
2.3.2.6. Kependudukan dan Catatan Sipil II-114

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-117
2.3.2.8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera II-119
2.3.2.9. Perhubungan II-121
2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika II-127
2.3.2.11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah II-140
2.3.2.12. Penanaman Modal II-142
2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga II-145
2.3.2.14. Statistik II-148
2.3.2.15. Persandian II-149
2.3.2.16. Kebudayaan II-150
2.3.2.17. Perpustakaan II-154
2.3.2.18. Kearsipan II-155
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan II-157
2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan II-157
2.3.3.2. Pariwisata II-160
2.3.3.3. Pertanian II-164
2.3.3.4. Kehutanan II-168
2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral II-170
2.3.3.6. Perdagangan II-170
2.3.3.7. Perindustrian II-173
2.3.3.8. Ketransmigrasian II-174
2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan II-175
2.3.4.1. Perencanaan II-175
2.3.4.2. Keuangan II-176
2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan II-178
2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan II-179
2.3.4.5. Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan II-180
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-184
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-184
2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita II-184
2.4.1.2. Produktivitas Total Daerah II-185
2.4.1.3. Nilai Tukar Petani II-185
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-186
2.4.2.1. Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap II-186

2.4.2.2. Jumlah Bank atau Perusahaan yang Mendukung CSR II-186
2.4.2.3. Ketersediaan Penginapan II-187
2.4.2.4. Ketersediaan Restoran II-188
2.4.2.5. Fasilitas Listrik dan Air Bersih II-188
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II-189
2.4.3.1. Angka Kriminalitas II-190
2.4.3.2. Jumlah Demonstrasi II-191
2.4.3.3. Lama Proses Perijinan II-191
2.4.3.4. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha II-195
2.4.4. Status Desa II-196
2.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia II-202
2.4.51. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) II-202
2.4.5.2. Rasio Ketergantungan II-203
2.4.6. Capaian SPM 2017 ..... II-204

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.2. Neraca Daerah III-9
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-16
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-17
3.2.2. Analisa Pembiayaan III-29
3.3. Kerangka Pendanaan III-30
3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah III-30
3.3.2. Proyeksi SILPA III-34
3.3.3. Proyeksi Belanja III-35
3.3.4. Proyeksi Pembiayaan III-37
3.3.5. Perhitungan Kerangka Pendanaan III-39

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan IV-1
4.2. Isu Strategis IV-13
4.2.1. Kajian Isu Internasional dan Isu/Kebijakan Pembangunan Nasional IV-13
4.2.2. Kebijakan Provinsi IV-21
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya IV-23

4.2.4. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul IV-25
4.2.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Bantul IV-35
4.2.5.1. Kesimpulan IV-36
4.2.5.2. Rekomendasi IV-36
4.2.6. Penetapan Isu Strategis IV-38

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi V-2
5.2. Misi V-4
5.3. Tujuan dan Sasaran V-5

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan VI-1
6.1.1. Analisa SWOT VI-2
6.1.2. Kebijakan Sektoral VI-6
6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan VI-11
6.2. Program Perangkat Daerah VI-16

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1

BAB IX. PENUTUP IX-1

DAFTAR TABEL

NO **HALAMAN**

2.1. Klasifikasi Wilayah Desa di Kabupaten Bantul II-3
2.2. Sungai yang Melalui Wilayah Kabupaten Bantul II-5
2.3. Luas Daerah di Kabupaten Bantul menurut Tingkat Kemiringan Tanah II-9
2.4. Luas Daerah di Kabupaten Bantul menurut Ketinggian dari Permukaan Laut II-10
2.5. Jenis dan Luas Formasi Geologi di Kabupaten Bantul II-11
2.6. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul II-13
2.7. Rata-rata Curah Hujan dari 12 Titik Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-14
2.8. Penggunaan Lahan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul. II-14
2.9. Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bantul II-20
2.10. Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2013-2017 ..... II-21
2.11. Perkembangan Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2013-2017 ..... II-22
2.12. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2017 ..... II-23
2.13. Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-24
2.14. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Bantul II-29
2.15. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantul II-30
2.16. Laju Pertumbuhan Sektor/Lapangan Usaha PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-31
2.17. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bantul II-35
2.18. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bantul II-40
2.19. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bantul II-40
2.20. Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017 ..... II-42
2.21. Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bantul II-43
2.22. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bantul II-44
2.23. Angka Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-50
2.24. Perkembangan IPM Kabupaten Bantul dan DIY II-52

2.25. Tingkat Pengangguran Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-55
2.26. Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2013-2017..... II-57
2.27. Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-57
2.28. Tabel Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2017..... II-57
2.29. Data Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten Bantul..... II-59
2.30. Sumberdaya Manusia Olahraga Kabupaten Bantul II-60
2.31. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2013-2017
di Kabupaten Bantul II-63
2.32. Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul..... II-64
2.33. Sebaran Jumlah SD/MI di Kabupaten Bantul Tahun 2013 - 2017..... II-65
2.34. Sebaran Jumlah SMP/MTs di Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017..... II-66
2.35. Data Perkembangan Nilai UN SD/MI di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017..... II-67
2.36. Data Perkembangan Nilai UN SMP/MTs di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 II-67
2.37. Rasio Guru Murid Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul II-68
2.38. Data BOS Da dan BOS Nas tingkat SD dan SMP di Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2017 ..... II-68
2.39. Rasio Posyandu per 1000 Balita Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul..... II-69
2.40. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017.. II-70
2.41. Penilaian Akreditasi Puskesmas Tahun 2015-2017 ..... II-71
2.42. Kelas Rumah Sakit Tahun 2017..... II-72
2.43. Puskesmas dengan Kegiatan Inovasi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) II-72
2.44. Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2017..... II-74
2.45. Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Tahun 2013-2017..... II-75
2.46. Jumlah Dokter per 1000 Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017..... II-76
2.47. Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD di Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2017 ..... II-77
2.48. Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2017..... II-83
2.49. Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2013-2017..... II-83
2.50. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul II-85
2.51. Data Penanganan Banjir Tahun 2015-2017 ..... II-86
2.52. Produk Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Bantul..... II-86
2.53. Rencana Tata Ruang yang Disusun Tahun 2011-2017 ..... II-87
2.54. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Bantul..... II-89
2.55. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2018..... II-91
2.56. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul Tahun 2017..... II-92

2.57. Pembangunan Rusunawa di KPY II-93
2.58. Jumlah Ormas/Orsos/LSM Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-94
2.59. Kegiatan Sosialisasi Pemilos II-94
2.60. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul II-95
2.61. Tingkat Waktu Tanggap Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-96
2.62. Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-97
2.63. Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-98
2.64. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-99
2.65. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-99
2.66. Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-100
2.67. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-101
2.68. Besaran Sengketa Hubungan Industrial Yang TerselesaikanTahun 2013-2016 Kabupaten Bantul II-101
2.69. Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2012-2016 di Kabupaten Bantul II-103
2.70. Rasio KDRT Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-103
2.71. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2011-2015 ..... II-104
2.72. Ketersediaan Energi dan Protein (KEP) untuk dikonsumsi Tahun 2012-2017 ..... II-106
2.73. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2014-2017 ..... II-109
2.74. Desa Rawan Pangan Tahun 2013-2017 ..... II-110
2.75. Persentase Jumlah Izin Lokasi Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-110
2.76. Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan HAT II-111
2.77. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-112
2.78. Cakupan Penerbitan KTP Tahun 2013-2017 ..... II-115
2.79. Data Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2017 ..... II-116
2.80. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-117
2.81. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul II-118
2.82. Kelompok Binaan PKK Tahun 2015-2017 ..... II-118
2.83. Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun Kabupaten Bantul Tahun 2012-2016 ..... II-119

2.84. Kesertaan KB Kabupaten BantulTahun 2013-2017 ..... II-120
2.85. Cakupan Anggota BKB ber-KB Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul..... II-120
2.86. Jumlah Ijin Trayek di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-122
2.87. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul..... II-123
2.88. Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum Yang Masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017..... II-124
2.89. Laporan Pelaksanaan PPNS Dinas Perhubungan di Kabupaten Bantul Tahun 2016..... II-125
2.90. Laporan Pelaksanaan PPNS Dinas Perhubungan di Kabupaten Bantul Tahun 2017..... II-126
2.91. Data Kecelakaan Tahun 2016..... II-126
2.92. Data Kecelakaan Tahun 2017..... II-127
2.93. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul..... II-128
2.94. Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul..... II-129
2.95. Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017..... II-130
2.96. Aplikasi Sistem Informasi Tahun 2001-2017..... II-132
2.97. Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat..... II-136
2.98. IKM Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul..... II-137
2.99. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan..... II-137
2.100. Rekap IKM Kabupaten Bantul pada Tahun 2013 - 2017..... II-139
2.101. Koperasi Berbadan Hukum Tahun 2014-2017..... II-140
2.102. Pertumbuhan UMKM Tahun 2014-2017..... II-141
2.103. Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM Tahun 2014-2017..... II-142
2.104. Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM Tahun 2014-2017..... II-142
2.105. Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul..... II-142
2.106. Nilai Investasi PMA/PMDN Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul..... II-143
2.107. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul..... II-144
2.108. Cabang Olahraga yang Menjalankan Kompetisi Secara Teratur Tahun 2015-2018 di Kabupaten Bantul..... II-146
2.109. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2015-2017 di Kabupaten Bantul..... II-150
2.110. Data Warisan/Cagar Budaya Kabupaten Bantul..... II-152
2.111. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012-2017 Kabupaten Bantul..... II-154
2.112. Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-155

2.113. Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-158
2.114. Produksi Benih Ikan dari UPR dan BBI Tahun 2013-2017 ..... II-158
2.115. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-159
2.116. Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2013-2017 ..... II-160
2.117. Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata Tahun 2016-2017 ..... II-161
2.118. Desa Wisata Tahun 2017 ..... II-162
2.119. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan ProduktivitasPadi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kacang Tanah dan Kedelai Tahun 2013-2017 ..... II-164
2.120. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah, Cabai Merah, dan Pisang Tahun 2013-2017 ..... II-167
2.121. Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul. II-167
2.122. Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-168
2.123. Kawasan Hutan Negara 2016 ..... II-169
2.124. Data Pasar Kondisi Baik Tahun 2017 di Kabupaten Bantul II-171
2.125. Perkembangan Ekspor Tahun 2013-2017 ..... II-172
2.126. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2008-2017 ..... II-173
2.127. Pertumbuhan Industri II-173
2.128. Jumlah Transmigran di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-175
2.129. Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan II-181
2.130. Persentase Pengeluaran Konsumsi Tahun 2012-2016 di Kabupaten Bantul II-185
2.131. Produktivitas Per Sektor Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-185
2.132. Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap Tahun 2013-2017 ..... II-186
2.133. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2016 ..... II-187
2.134. Jumlah Restoran di Kabupaten Bantul Tahun 2012-2016 ..... II-188
2.135. Jumlah Pelanggan dan Air Bersih yang disalurkan PDAM 2012-2016 ..... II-189
2.136. Angka Kriminalitas Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-190
2.137. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah II-191
2.138. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-191
2.139. Jenis Pelayanan Ijin dan Non Ijin Kabupaten Bantul II-192
2.140. Lama Proses Perijinan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 ..... II-193
2.141. Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul II-194
2.142. Penetapan IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan di Tahun 2017 Kabupaten Bantul II-194

2.143. Daftar Perda yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi Kabupaten Bantul II-195
2.144. Status Desa di Kabupaten Bantul Menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) II-199
2.145. Pencari Kerja yang Terdaftar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-203
2.146. Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-204
2.147. Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2017 ..... II-204
2.148. Capaian SPM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2017 ..... II-221
2.149. Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-221
2.150. Capaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2017 ..... II-223
2.151. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2017 ..... II-224
2.152. Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2017 ..... II-226
2.153. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2017 ..... II-226
2.154. Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2017 ..... II-226
2.155. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2017 ..... II-227
2.156. Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2017 ..... II-227
2.157. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2017 ..... II-228
2.158. Capaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2017 ..... II-229
2.159. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Bantul II-230
3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul III-3
3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul III-4
3.3 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul III-7
3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul III-8
3.5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2013-2017 Kab. Bantul III-9
3.6 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul III-14
3.7. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran BelanjaTahun 2013-2017

Kabupaten Bantul III-24
3.8. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul III-25
3.9. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul III-28
3.10. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Bantul III-31
3.11 Realisasi Dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016-2021 Kabupaten Bantul..... III-34
3.12. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Bantul III-35
3.13. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun Anggaran 2016-2021 Kabupaten Bantul III-35
3.14. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Bantul III-37
3.15. Penyertaan Modal pada BUMD III-38
3.16. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Bantul III-41
4.1. Identifikasi Permasalahan Penentuan Program Prioritas di Kab. Bantul..... IV-2
4.2. Identifikasi RPJMD Daerah Lain IV-24
4.3. Prioritas Lima Tahun Tahap Ketiga RPJPD di Kabupaten Bantul 2006-2025 ..... IV-26
5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangaka Menengah Kabupaten Bantul V-7
6.1. Fokus Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Bantul (RUPMK Bantul) .. VI-8
6.2. Indikator Kinerja Utama RADPG VI-11
6.3. Strategi dan Arah Kebijakan VI-11
6.4. Rancangan Peningakatan BOP Jenjang PAUD VI-17
6.5. Rancangan Peningkatan BOP Jenjang SD/MI VI-17
6.6. Rancangan Peningkatan BOP Jenjang SMP/MTs VI-18
6.7. Rancangan Pentahapan Transformasi Jaminan Kesehatan Daerah ke BPJS VI-21
6.8. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 ..... VI-26
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Bantul VII-3
7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 ..... VII-4
8.1. Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021..... VIII-3
8.2. Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum per Kecamatan Tahun 2016-2021 ..... VIII-25

DAFTAR GAMBAR

NO **HALAMAN**

1.1. Diagram Perubahan Sistematika RPJMD sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 I-3

1.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Dokumen Perencanaan Lainnya… I-7

1.3. Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD dan Renstra OPD I-8

2.1. Peta Administrasi Kabupaten Bantul..... II-2

2.2. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul..... II-3

2.3. Peta Kontur Topografi di Kabupaten Bantul II-9

2.4. Jenis Tanah dan Luas Penyebarannya di Kabupaten Bantul..... II-12

2.5. Peta Pengunaan Lahan II-18

2.6. Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul II-25

2.7. Kepadatan Penduduk Agraris Kabupaten Bantul..... II-26

2.8. Perkembangan Nilai PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-28

2.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-28

2.10. Pergeseran Struktur Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-32

2.11. Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2012-2017 II-34

2.12. Pertumbuhan PDRB Perkapita di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-35

2.13. Koefisien Gini di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017..... II-36

2.14. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-37

2.15. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017..... II-38

2.16. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014-2016..... II-39

2.17. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu di Provinsi DIY Tahun 2013-2017 ..... II-44

2.18. Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017 ..... II-46

2.19. Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2012-2017 ..... II-47

2.20. Penyebaran kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2017 ..... II-47

2.21. Grafik Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul

Tahun 2013 -2017 ..... II-49
2.22. Grafik Distribusi 10 Besar Penyakit di Puskesmas se- Kab. Bantul II-50
2.23. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014-2016 ..... II-53
2.24. Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul (Bantul Dalam Angka) II-56
2.25. Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Bantul tahun 2012-2016 ..... II-90
2.26. Persentase Jumlah PNS Perempuan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-102
2.27. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 ..... II-104
2.28. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2011-2015 ..... II-105
2.29. Cadangan Pangan Tahun 2012-2016 di Kabupaten Bantul II-107
2.30. Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-108
2.31. Grafik Jumlah Penumpang Umum Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul II-121
2.32. Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2012-2016 di Kabupaten Bantul II-145
2.33. Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2010-2014 di Kabupaten Bantul II-146
2.34. Peta Sebaran Cagar Budaya di Kabupaten Bantul II-153
2.35. Luas Lahan Kritis Tahun 2012-2017 di Kabupaten Bantul II-169

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006–2025 sebagaimana dituangkan dalam

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025. Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2017-2022.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Kemudian pada tahun 2017 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut maka ada klausul untuk Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar (pasal 342:1). Perubahan mendasar yang dimaksud adalah: bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (Pasal 342:3)

Berkaitan dengan hal tersebut maka RPJMD Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan/penyesuaian, yakni berkaitan dengan:

a. Adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan sehingga diperlukan adanya perubahan terhadap perangkat daerah dan target indikator kinerja;
b. Perubahan substansi dan sistematika RPJMD sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017; dan
c. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara rinci perubahan sistematika RPJMD sesuai Permendagri No.86 Tahun 2017 adalah seperti disampaikan pada gambar berikut:

Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017, Bappeda 2018, diolah

Gambar 1.1. Diagram Perubahan Sistematika RPJMD sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017

Sedangkan perubahan RPJMD Kabupaten Bantul berkaitan dengan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan mengingat hasil evaluasi menunjukkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) harus disesuaikan berdasarkan realisasi pada tahun anggaran 2016 dan 2017, serta penyesuaian dengan target kinerja RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan dan penyesuaian dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017 – 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bantul Tahun 2015-2025; dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul disusun dengan mengacu, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten Bantul, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen Perubahan RPJMD dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Keterkaitan antara Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul dengan dokumen lainnya selengkapnya disajikan dalam Gambar 1.2.

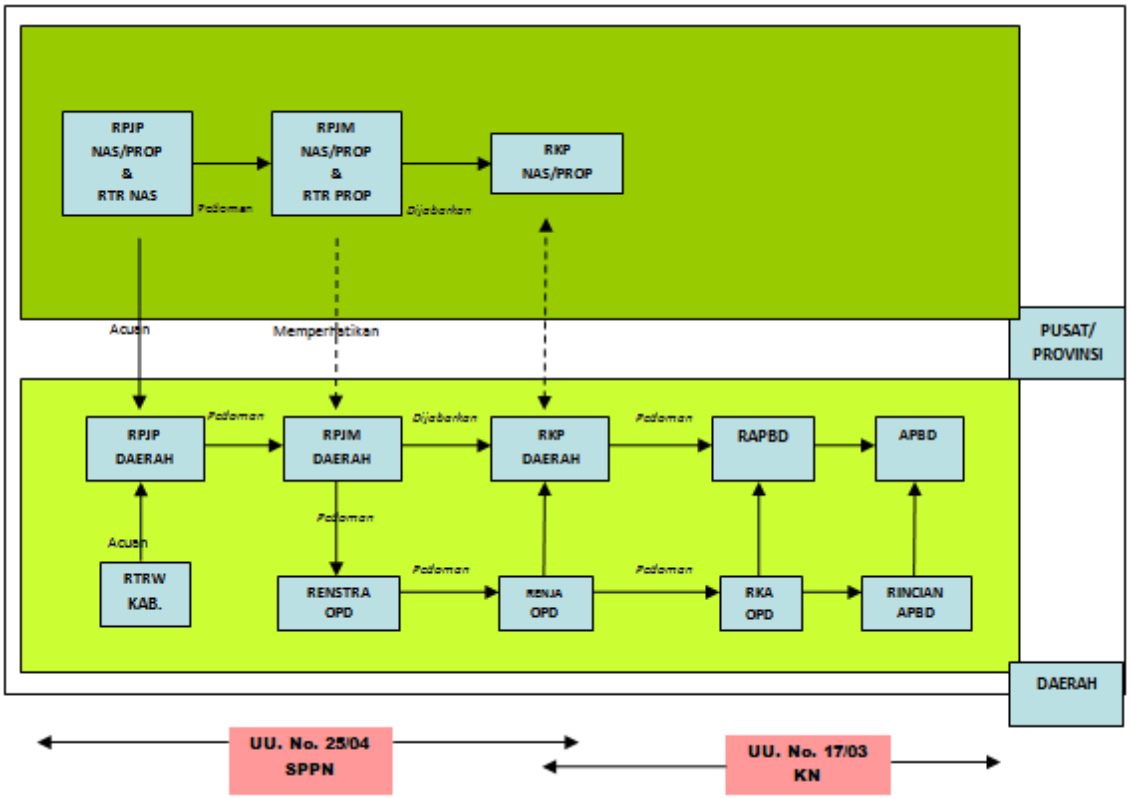

Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Gambar 1.2.
Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerahdan Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul 2006-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III RPJPD Kabupaten Bantul 2006-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang dijabarkan ke dalam perencanaan kerja tahunan PD (Renja PD) untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Penjabaran rencana tahunan RKPD termuat dalam Rencana Kerja (Renja) PD.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun rencana kerja (Renja PD) tahunannya. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini:

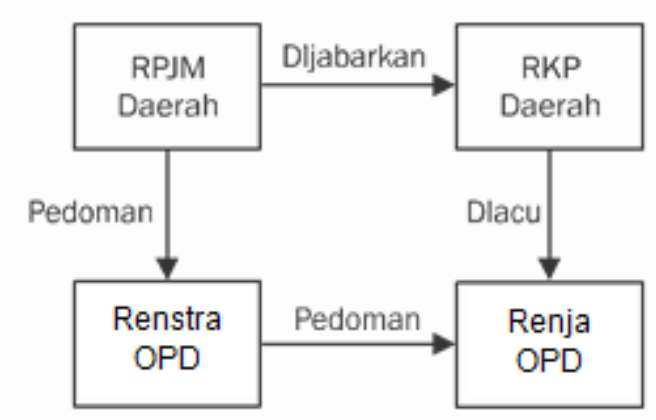

Sumber: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Gambar 1.3.
Keterkaitan antara Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja PD

Sesuai dengan keterkaitan tersebut di atas maka Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 secara substansif akan mempengaruhi dan memberi perubahan terhadap dokumen RKPD dan Renstra PD dan Renja PD.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS sebagai instrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terhadap kebijakan, rencana, dan program.

RPJMD sebagai Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) juga wajib dilakukan KLHS.

Oleh karenanya, Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 didasarkan pada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kabupaten Bantul untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul. Selengkapnya keterkaitan RPJMD dengan KLHS diuraikan pada Bab IV.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah memberikan rancangan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul tiga tahun kedepan (2019-2021) berdasarkan capaian pembangunan terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Menelaah capaian dan target kinerja pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016 sampai dengan rencana kinerja Tahun 2021.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis perubahan kerangka pendanaan daerah.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dan perubahannya dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Bantul.
5. Merumuskan rancangan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah periode 2016-2021.
6. Menyesuaikan terhadap perubahan Perangkat Daerah dan Sasaran Perangkat Daerah serta Program Pembangunan Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 terdiri atas 9 (sembilan) bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan
- 6.2. Program Perangkat Daerah

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX. PENUTUP

BAB II.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir (2013 – 2017) dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, maupun daya saing daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan potensi pengembangan wilayah. Sementara gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk serta komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Bantul tiga tahun ke depan.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

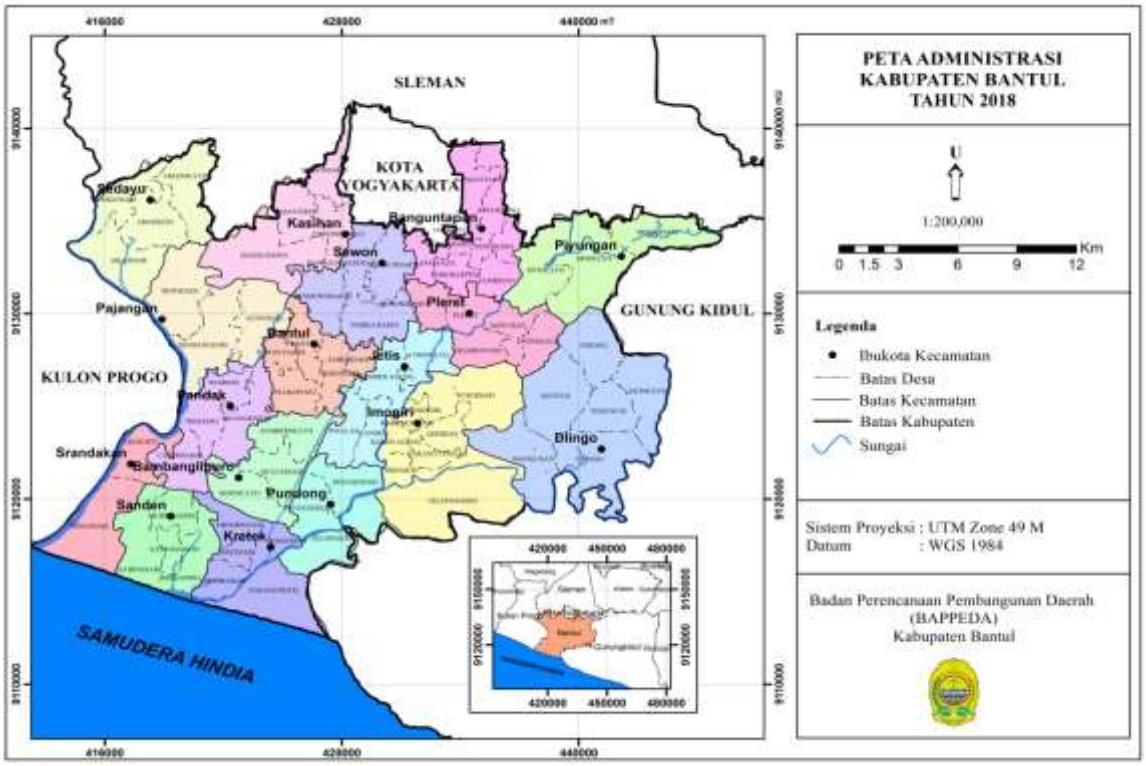

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Bantul

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 ha (15,91% dari luas DIY) dan terbagi atas 17 kecamatan. Kecamatan Dlingo merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 5.587 ha (11,02%) sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Srandakan yaitu 1.832 ha (3,61%). Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantul disajikan pada Gambar 2.2.

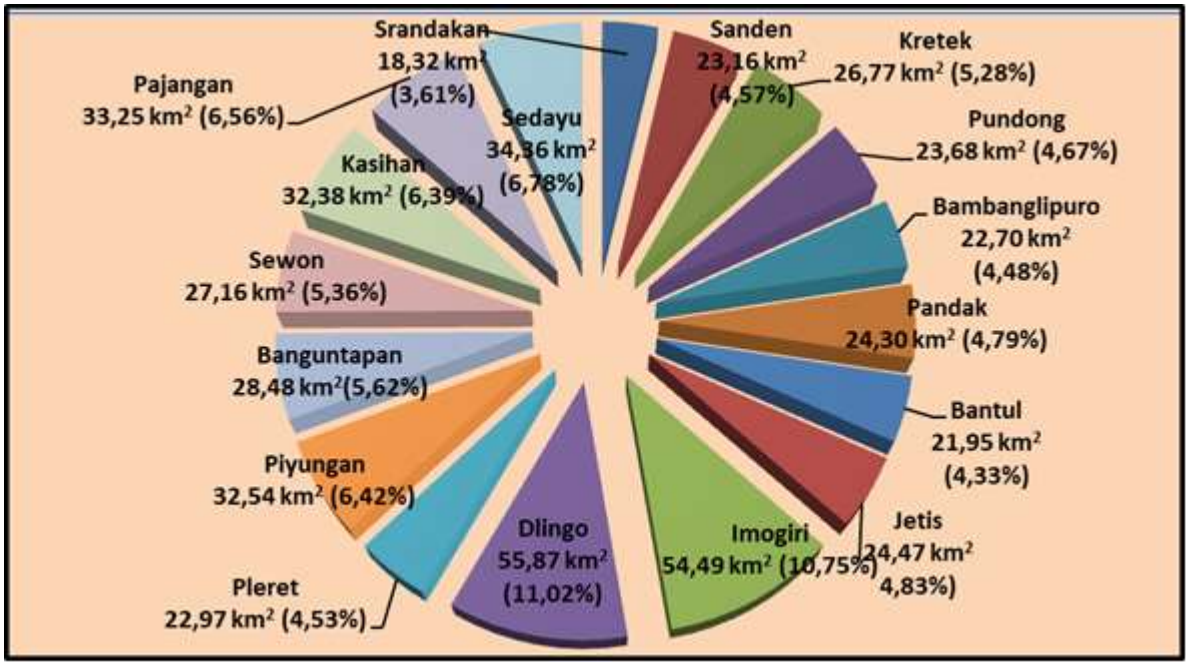

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.2.
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul

Selain itu, wilayah Kabupaten Bantul juga terbagi atas 75 desa dan 933 pedukuhan dengan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terletak di Kecamatan Imogiri, yaitu 8 desa dan 72 pedukuhan. Sementara kecamatan dengan jumlah desa dan pedukuhan paling sedikit adalah Kecamatan Srandakan, yaitu 2 desa dan 43 pedukuhan. Berdasarkan klasifikasi wilayah, desa di Kabupaten Bantul dibagi menjadi desa pedesaan *(rural area)* sebanyak 41 desa dan desa perkotaan *(urban area)* sebanyak 34 desa. Secara rinci klasifikasi wilayah desa di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.
Klasifikasi Wilayah Desa di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Klasifikasi Wilayah			
		Desa Perdesaan	Luas (km²)	Desa Perkotaan	Luas (km²)
1	Srandakan	Poncosari (24 dusun)	11,86	Trimurti (19 dusun)	6,46
2	Sanden	Sri Gading(20 dusun)	7,57	Gadingsari (18 dusun)	8,12
				Gadingharjo (6 dusun)	3,08
				Murtigading (18dusun)	4,39
3	Kretek	Tirtohargo (6 dusun)	3,62	Donotirto (13dusun)	4,70
		Parangtritis (11 dusun)	11,87		
		Tirtosari(7 dusun)	2,39		
		Tirtomulyo (15 dusun)	4,19		
4	Pundong	Seloharjo (16 dusun)	11,10	Srihardono (17 dusun)	6,87
		Panjangrejo(16 dusun)	5,71		
5	Bambanglipuro	Sumbermulyo (16 dusun)	8,19	Sidomulyo (15 dusun)	8,05
				Mulyodadi (14dusun)	6,45

No.	Kecamatan	Klasifikasi Wilayah			
		Desa Perdesaan	Luas (km^2)	Desa Perkotaan	Luas (km^2)
6	Pandak	Caturharjo (14dusun)	5,93	Wijirejo (10dusun)	4,68
		Triharjo (10dusun)	6,43		
		Gilangharjo (15dusun)	7,26		
7	Pajangan	Guwosari (15 dusun)	8,78	Triwidadi (22 dusun)	12,71
				Sendangsari (18 dusun)	11,76
8	Bantul	Sabdodadi (5 dusun)	2,32	Palbapang (10 dusun)	5,53
				Ringinharjo (6 dusun)	2,77
				Bantul (12 dusun)	5,24
				Trirenggo (17 dusun)	6,10
9	Jetis	Patalan (20 dusun)	5,65	Trimulyo (12 dusun)	7,11
		Canden (15 dusun)	5,36	Sumberagung (17 dusun)	6,35
10	Imogiri	Selopamioro(18 dusun)	22,75	Kebonagung (5 dusun)	1,87
		Sriharjo (13 dusun)	6,32	Karangtalun (5 dusun)	1,21
		Karangtengah (6 dusun)	2,88	Imogiri (4 dusun)	0,83
				Wukirsari (16 dusun)	15,39
				Girirejo (5 dusun)	3,24
11	Dlingo	Mangunan (6 dusun)	9,52	Dlingo (10 dusun)	9,16
		Muntuk (11 dusun)	12,85		
		Temuwuh (12 dusun)	7,67		
		Jatimulyo (10 dusun)	8,91		
		Terong (9 dusun)	7,76		
12	Banguntapan	Tamanan (9 dusun)	3,75	Baturetno (8 dusun)	3,94
		Jagalan (2 dusun)	0,27	Banguntapan (11 dusun)	8,33
		Singosaren (5 dusun)	0,67		
		Wirokerten (8 dusun)	3,86		
		Jambidan (7 dusun)	3,76		
		Potorono (9 dusun)	3,90		
13	Pleret	Bawuran (7 dusun)	4,97	Wonokromo (12 dusun)	4,34
		Wonolelo (8 dusun)	4,54	Pleret (11 dusun)	4,25
		Segoroyoso (9 dusun)	4,87		
14	Piyungan	Sitimulyo (21 dusun)	9,40	Srimulyo (22 dusun)	14,56
				Srimartani(17 dusun)	8,58
15	Sewon	Pendowoharjo (16 dusun)	6,98	Bangunharjo (17 dusun)	6,79
		Timbulharjo (16 dusun)	7,78	Panggungharjo (14 dusun)	5,61
16	Kasihan	Tamantirto (10 dusun)	6,72	Tirtonirmolo (12 dusun)	5,13
		Ngestiharjo (12 dusun)	5,10		
		Bangunjiwo (19 dusun)	15,43		
17	Sedayu	Argodadi (14 dusun)	11,21	Argosari (13 dusun)	6,37
		Argomulyo (14 dusun)	9,55	Argorejo (13 dusun)	7,23
	Jumlah	**41 desa**	**289,65 (28.965 ha)**	**34 desa**	**217,20 (21.720 ha)**

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul (diolah), 2018

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 110o12'34"-110o31'08" Bujur Timur dan 07o44'04"- 08o00'27" Lintang Selatan. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam

tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil. Sungai kecil terdiri dari sungai kecil lintas kabupaten dan sungai kecil dalam kabupaten. Sungai yang melalui wilayah Kabupaten Bantul tersebut disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2.
Sungai yang Melalui Wilayah Kabupaten Bantul

No.	Nama Sungai	Panjang (M)	Hulu	Hilir	Kecamatan	Desa
I.	**Sungai Besar** (Lintas Provinsi)					
1	Opak	36.140	Srimulyo, Piyungan	Samudera Indonesia, Parangtritis Kretek	Banguntapan	Jambidan
					Imogiri	Imogiri
						Karangtalun
						Kebonagung
						Selopamioro
						Sriharjo
						Wukirsari
					Jetis	Canden
						Sumberagung
						Trimulyo
					Kretek	Donotirto
						Parangtritis
						Tirtohargo
						Tirtosari
					Piyungan	Sitimulyo
						Srimulyo
					Pleret	Bawuran
						Pleret
						Segoroyoso
						Wonokromo
					Pundong	Panjangrejo
						Seloharjo
						Srihardono
					Sanden	Srigading
2	Oyo	22.850	Jatimulyo, Dlingo	Sungai Opak, Selopamioro Imogiri	Dlingo	Dlingo
						Jatimulyo
						Mangunan
						Mutuk
					Imogiri	Selopamioro
						Sriharjo
3	Progo	26.440	Argosari, Sedayu	Samudera Indonesia, Poncosari Srandakan	Pajangan	Sendangsari
						Triwidadi
					Pandak	Triharjo
					Sedayu	Argodadi
						Argosari
					Srandakan	Poncosari

No.	Nama Sungai	Panjang (M)	Hulu	Hilir	Kecamatan	Desa
						Trimurti
II. Sungai Kecil (Lintas Kabupaten)						
1	Bedog	2.700	Tirtonirmolo, Kasihan	Sungai Progo, Triharjo Pandak	Bantul	Bantul
						Ringinharjo
					Kasihan	Bangunjiwo
						Tamantirto
						Tirtonirmolo
						Ngestiharjo
					Pajangan	Guwosari
						Sendangsari
					Pandak	Gilangharjo
						Triharjo
						Wijirejo
					Sewon	Pendowoharjo
2	Buntung	1.950	Srimartani, Piyungan	Kali Gawe, Srimulyo Piyungan	Piyungan	Srimartani
						Srimulyo
3	Code	9.440	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis	Banguntapan	Tamanan
					Jetis	Trimulyo
					Pleret	Wonokromo
					Sewon	Bangunharjo
						Timbulharjo
4	Gadjahwong	5.520	Singosaren, Banguntapan	Sungai Opak, Wonokromo Pleret	Banguntapan	Singosaren
						Tamanan
						Wirokerten
					Pleret	Pleret
						Wonokromo
5	Gawe	8.200	Srimartani, Piyungan	Sungai Opak, Srimulyo Piyungan	Piyungan	Srimartani
						Srimulyo
6	Kedung Semerangan	9.860	Baturetno, Banguntapan	Sungai Gadjahwong, Pleret	Banguntapan	Banguntapan
						Baturetno
						Potorono
						Wirokerten
						Singosaren
					Pleret	Pleret
						Wonokromo
7	Kenteng	5.040	Srimartani, Piyungan	Sungai Gawe, Srimartani, Piyungan	Piyungan	Srimartani
8	Konteng	5.570	Argomulyo, Sedayu	Sungai Progo, Argodadi Sedayu	Sedayu	Argomulyo
						Argorejo
						Argosari
9	Krusuk	5.740	Argosari, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu	Sedayu	Argorejo
						Argosari
10	Kuning	1.940	Sitimulyo,	Sungai Opak,	Piyungan	Sitimulyo

No.	Nama Sungai	Panjang (M)	Hulu	Hilir	Kecamatan	Desa
			Piyungan	Sitimulyo Piyungan		
11	Mruwe	7.910	Baturetno, Banguntapan	Sungai Opak, Jambidan Banguntapan	Banguntapan	Baturetno
						Jambidan
						Potorono
					Piyungan	Sitimulyo
12	Timoho	11.960	Argomulyo, Sedayu	Sungai Konteng, Argorejo Sedayu	Sedayu	Argodadi
						Argomulyo
						Argorejo
						Argosari
13	Winongo	20.080	Ngestiharjo, Kasihan	Sungai Opak, Donotirto Kretek	Bambanglipuro	Mulyodadi
						Sidomulyo
						Sumbermulyo
					Bantul	Sabdodadi
						Trigenggo
					Jetis	Patalan
					Kasihan	Tirtonirmolo
						Ngestiharjo
					Kretek	Donotirto
					Pundong	Panjangrejo
						Srihardono
					Sewon	Panggungharjo
						Pendowoharjo
						Timbulharjo
III. Sungai Kecil (Dalam Kabupaten)						
1	Belik	5.130	Tamanan, Banguntapan	Sungai Opak, Trimulyo Jetis	Banguntapan	Tamanan
						Wirokerten
					Bantul	Sabdodadi
					Jetis	Trimulyo
						Canden
						Sumberagung
					Pleret	Wonokromo
					Sewon	Bangunharjo
						Panggungharjo
						Timbulharjo
2	Celeng	10.370	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Sriharjo Imogiri	Dlingo	Muntuk
					Imogiri	Girirejo
						Imogiri
						Karangtalun
						Karangtengah
						Selopamioro
						Sriharjo
						Wukirsari
3	Kedung miri	6.280	Terong, Dlingo	Sungai Oyo,	Dlingo	Jatimulyo

No.	Nama Sungai	Panjang (M)	Hulu	Hilir	Kecamatan	Desa
				Terong Dlingo		Terong
4	Kramat	5.230	Bangunjiwo, Kasihan	Sungai Progo, Triwidadi Pajangan	Kasihan	Bangunjiwo
					Pajangan	Sendangsari
						Triwidadi
5	Pesing	8.500	Srimulyo, Piyungan	Sungai Opak, Segoroyoso Pleret	Piyungan	Srimulyo
					Pleret	Bawuran
						Pleret
						Segoroyoso
						Wonolelo
6	Plilan	3.570	Selopamioro, Imogiri	Sungai Kajor, Selopamioro Imogiri	Imogiri	Selopamioro
7	Urang	5.670	Muntuk, Dlingo	Sungai Oyo, Dlingo	Dlingo	Dlingo
						Muntuk
8	Winongo lama	2.200	Tirtohargo Kretek	Sungai Opak, Tirtohargo Kretek	Kretek	Tirtohargo
					Sanden	Srigading

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, 2018

2.1.1.3. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran, daerah perbukitan serta daerah pantai. Satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial *(Fluvio Volcanic Plain),* perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Daerah di bagian timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari;
b. Daerah di bagian selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (*fluviomarine*) dengan kemiringan lereng datar-landai. Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal;
c. Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi;
d. Daerah di bagian barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut, daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

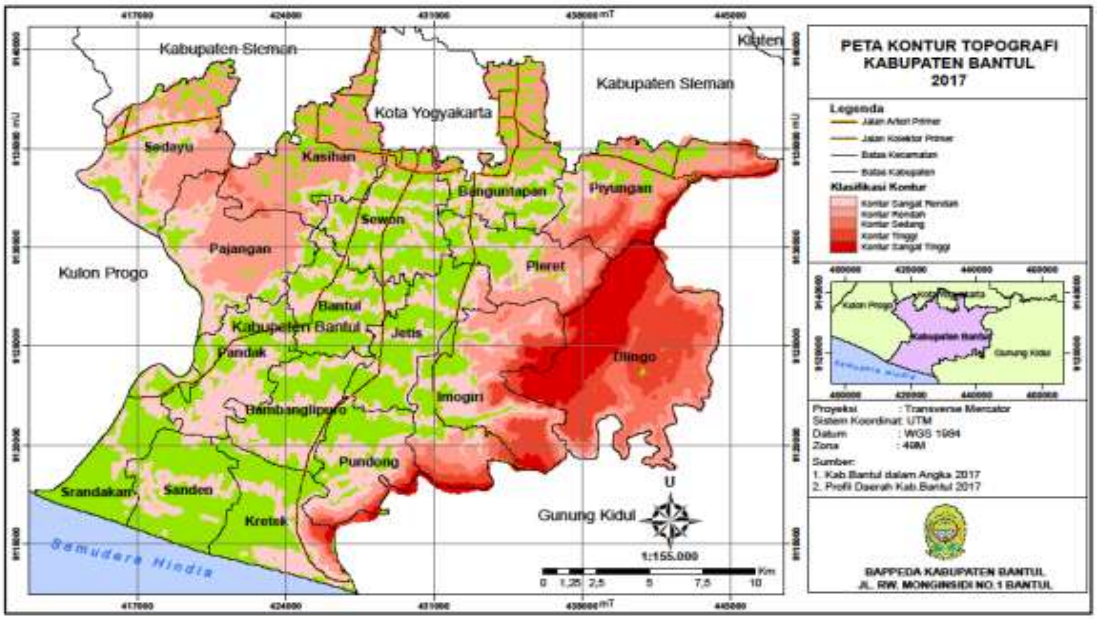

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.3.
Peta Kontur Topografi di Kabupaten Bantul

Ditinjau dari tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Bantul sebagian besar memiliki kemiringan 0-2% (seluas 31.425 ha atau 62% dari luas wilayah Kabupaten Bantul) yang tersebar di wilayah selatan, tengah, dan utara. Wilayah timur dan barat umumnya memiliki kemiringan 2% hingga 40% dengan luas sebesar 15.251 ha (30,09%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.009 ha (7,9%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40%. Wilayah yang memiliki lahan miring di atas 40% paling luas adalah Kecamatan Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar dengan kemiringan kurang dari 2% terletak di Kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Sedayu. Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Bantul, secara rinci disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.3.
Luas Daerah di Kabupaten Bantul menurut Tingkat Kemiringan Tanah

No.	Kecamatan	Luas kemiringan tanah/lereng (ha)						Jumlah (ha)
		0 – 2%	2 - 8%	8-15%	15–25%	25–40%	>40%	
1	Srandakan	1.680	152	-	-	-	-	1.832
2	Sanden	2.100	216	-	-	-	-	2.316
3	Kretek	1.883	288	-	27	11	468	2.677
4	Pundong	1.387	171	-	90	108	612	2.368
5	Bambanglipuro	2.198	72	-	-	-	-	2.270
6	Pandak	2.124	306	-	-	-	-	2.430

No.	Kecamatan	Luas kemiringan tanah/lereng (ha)						Jumlah (ha)
		0 – 2%	2 - 8%	8-15%	15–25%	25–40%	>40%	
7	Pajangan	815	661	1.046	162	394	247	3.325
8	Bantul	2.180	-	-	15	-	-	2.195
9	Jetis	2.192	81	-	144	-	30	2.447
10	Imogiri	1.436	585	279	900	954	1.295	5.449
11	Dlingo	72	1.946	268	572	1.433	1.296	5.587
12	Banguntapan	2.848	-	-	-	-	-	2.848
13	Pleret	873	431	365	55	547	26	2.297
14	Piyungan	2.129	702	-	-	423	-	3.254
15	Sewon	2.708	-	-	8	-	-	2.716
16	Kasihan	2.262	-	598	182	161	35	3.238
17	Sedayu	2.538	227	300	138	233	-	3.436
T o t a l		**31.425**	**5.838**	**2.856**	**2.293**	**4.264**	**4.009**	**50.685**

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, 2018

Selanjutnya, ditinjau dari tingkat ketinggian lahan, sebagian besar wilayah Kabupaten Bantul kurang dari 100 meter dari permukaan laut, yaitu seluas 39.932 ha, dan sisanya (10.753 ha) memiliki ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut yang sebagian besar terletak di Kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Piyungan. Wilayah di Kabupaten Bantul yang didominasi dengan ketinggian 100-500 m adalah Kecamatan Dlingo, sedangkan Kecamatan Imogiri dan Piyungan memiliki ketinggian kurang dari 100 m dan 100-500 m dengan luas yang hampir sama. Data ketinggian lahan di Kabupaten Bantul, secara rinci disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Luas Daerah di Kabupaten Bantul Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut

No.	Kecamatan	Luas (Ha) dan Ketinggian tempat (dpl)					Jumlah
		0 – 7m	7 – 25m	25–100m	100-500m	>500m	
1.	Srandakan	1.056	776	-	-	-	1.832
2.	Sanden	1.235	1.081	-	-	-	2.316
3.	Kretek	924	1.462	190	101	-	2.677
4.	Pundong	-	1.930	239	199	-	2.368
5.	Bambanglipuro	-	1.482	788	-	-	2.270
6.	Pandak	-	1.312	1.118	-	-	2.430
7.	Pajangan	-	221	2.652	452	-	3.325
8.	Bantul	-	-	2.195	-	-	2.195
9.	Jetis	-	-	2.436	11	-	2.447
10.	Imogiri	-	791	2.386	2.272	-	5.449
11.	Dlingo	-	-	815	4.772	-	5.587
12.	Banguntapan	-	-	2.373	475	-	2.848
13.	Pleret	-	-	1.952	345	-	2.297

No.	Kecamatan	Luas (Ha) dan Ketinggian tempat (dpl)					Jumlah
		0 – 7m	7 – 25m	25–100m	100-500m	>500m	
14.	Piyungan	-	-	1.907	1.347	-	3.254
15.	Sewon	-	-	2.716	-	-	2.716
16.	Kasihan	-	-	2.608	630	-	3.238
17.	Sedayu	-	-	3.287	149	-	3.436
T o t a l		**3.215**	**9.055**	**27.662**	**10.753**	**-**	**50.685**

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, 2018

2.1.1.4. Geologi

Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan. Geologi menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan endapan. Berdasarkan sifat-sifat batuannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi dengan formasi terluas adalah Endapan Gunung Merapi Muda dengan jenis batuan pasir vulkanik klastik, lanau, dan gravel. Jenis dan luas formasi geologi di Kabupaten Bantul secara keseluruhan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.5.
Jenis dan Luas Formasi Geologi di Kabupaten Bantul

No.	Formasi Geologi	Jenis Batuan	Luas (ha)
1.	Endapan Gunung Merapi Muda	Pasir vulkanik klastik, lanau, gravel	23.316
2.	Semilir-Nglanggran	Breksi, batupasir, tuff	12.164
3.	Sentolo	Batu gamping berlapis, napal, tuff	9.123
4.	Wonosari	Batugamping, karang, lagoon	4.055
5.	Sambipitu	Konglomerat, batupasir	1.520
6.	Endapan Aluvium	Pasir tersortasi	507
Jumlah			**50.685**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, 2018

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah Renzina, Alluvial, Grumusol, Latosol, Mediteran, Regosol, dan Lithosol. Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini tersebar pada Kecamatan

Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro. Tanah Lithosol berasal dari batuan induk batu gamping, batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kecamatan Pajangan, Kasihan, dan Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kecamatan Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan. Jenis tanah dan luas penyebarannya di Kabupaten Bantul disajikan pada Gambar berikut:

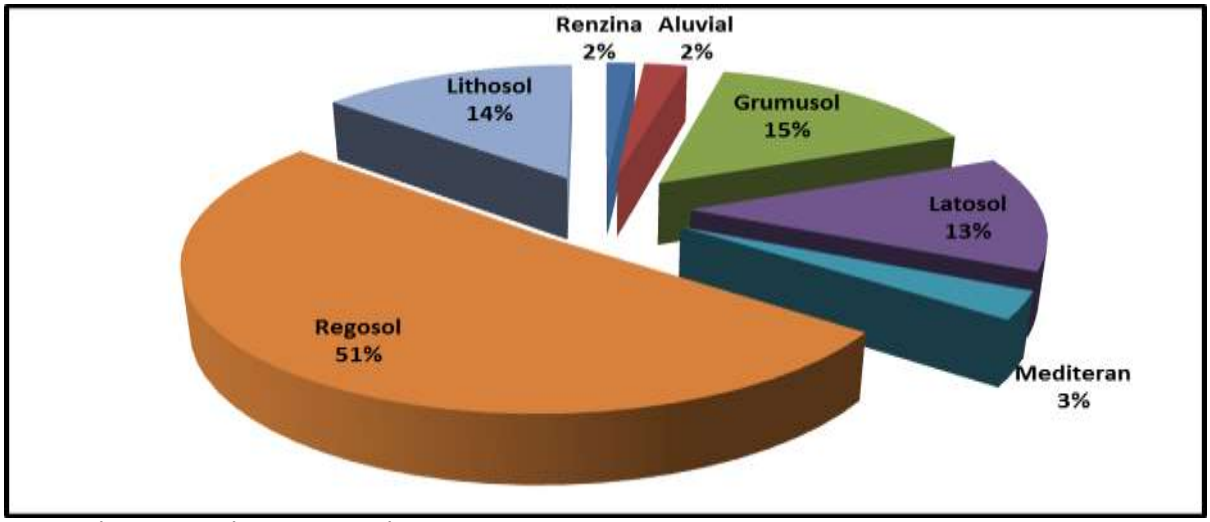

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.4.
Jenis Tanah dan Luas Penyebarannya di Kabupaten Bantul

2.1.1.5. Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Bantul terdapat tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Oyo. DAS di wilayah Kabupaten Bantul menempati lahan seluas 49.039,50 ha dengan luas oncoran mencapai 16.133,05 sawah-ha. Sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang berair sepanjang tahun (permanen), meskipun untuk sungai yang kecil pada musim kemarau debit airnya relatif sedikit. Salah satu fungsi dari masing-masing DAS adalah untuk mengairi areal pertanian. Di samping itu air sungai juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kebutuhan air persawahan di wilayah Kabupaten Bantul relatif dapat terpenuhi.

Tabel 2.6.
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul

No.	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)	Sub Luas DAS(Ha)	Luas Lahan yang Diairi (Ha)	Sub Luas Oncoran (Sawah-Ha)
1	Progo	Progo	3.952,79		1.459,20	
		Bedog	7.111,44		1.108,36	
		Timoho	3.392,12		894,89	
				14.456,35		**3.462,45**
2	Opak	Opak	7.044,72		2.059,02	
		Buntung	888,43		251,28	
		Code	144,50		754,13	
		Gadjahwong	1.966,03		867,73	
		Gawe	981,80		199,34	
		Kuning	282,83		165,23	
		Bulus	1.927,40		1.247,36	
		Belik	532,60		354,65	
		Tambakbayan	958,61		611,29	
		Winongo Kecil	4.346,25		2.700,72	
		Winongo	5.594,68		2.753,70	
				24.667,85		**11.964,45**
3	Oyo	Oyo	3.923,72		103,97	
		Plilan	791,35		337,00	
		Celeng	2.526,90		176,53	
		Kedungmiri	916,15		88,65	
		Dlingo	1.757,18		-	
				9.915,30		**706,15**
Jumlah				**49.039,50**		**16.133,05**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, 2018

2.1.1.6. Klimatologi

Di Kabupaten Bantul terdapat 12 titik stasiun pemantau curah hujan, yaitu Stasiun Pemantau Ringinharjo, Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngetal, Gedongan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo, dan Dlingo. Data rata-rata curah hujan dari di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.7. Data yang ditampilkan pada tabel tersebut merupakan curah hujan dan hari hujan terendah dan tertinggi yang terpantau di 12 titik stasiun pemantau yang ada di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.7 menunjukkan curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Bantul yang terpantau oleh stasiun pencatat curah hujan. Dalam tahun 2013-2017 curah hujan tertinggi cenderung terjadi pada bulan Desember sampai Mei, sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sampai September. Pada tahun 2017 intensitas hujan cukup tinggi pada bulan Oktober sampai Desember. Hal ini

karena adanya anomali iklim dan fenomena La Nina moderat. Bulan November-Desember terjadi pergerakan angin baratan dan terbentuknya pola siklonik yang memicu pertumbuhan awan hujan di sepanjang pesisir selatan pulau Jawa. Pada bulan tersebut terjadi cuaca ekstrim dengan terjadinya curah hujan yang bersifat diatas normal pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Tabel 2.7.
Rata-rata Curah Hujan dari 12 Titik Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No.	Bulan	2013		2014		2015		2016		2017	
		mm	HH	mm	HH	Mm	HH	mm	HH	mm	HH
1	Januari	517,50	19,83	354,50	20,83	484,33	19,08	164,08	12,42	295,5	20,83
2	Februari	343,67	16,25	287,92	16,58	225,92	11,33	351,75	16	460,5	17,5
3	Maret	176,25	10,08	171,58	9,33	484,42	16	373,17	14,50	370,33	15,42
4	April	163,08	10,17	174,25	9	462,00	16,33	192,67	9,83	243,83	12,5
5	Mei	154,00	9,58	50,58	4,17	83,92	5,83	119,25	9,42	428,67	16
6	Juni	170,83	11,17	61,42	3,67	14,50	1,42	182,25	6,67	0	0
7	Juli	77,42	6,42	64,33	3,42	0	0	70,67	6,42	2	1
8	Agustus	0,50	0,25	0	0	0	0	73,75	3,67	4	1
9	September	1,75	0,50	0	0	0	0	206,83	10,17	71,33	2,92
10	Oktober	51,25	4,58	0	0	0	0	259,58	13,08	119,5	10,17
11	November	325,25	15,5	296,58	13,58	110,33	8,25	401,17	16,08	620,42	17,67
12	Desember	400,17	14,92	375,33	19,17	299,75	15,25	209,92	8,17	460,67	15,83
Jumlah		**2.381,67**	**119,25**	**1.836,50**	**99,75**	**2.165,17**	**93,50**	**2.605,09**	**126,43**	**3.076,75**	**130,84**
Rata-rata		**198,47**	**9,94**	**153,04**	**8,31**	**180,43**	**7,79**	**217,09**	**10,53**	**256,40**	**10,90**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, 2018
Keterangan:
- Bulan basah: curah hujan lebih dari 100 mm
- Bulan lembab: curah hujan antara 60-100 mm
- Bulan kering: curah hujan kurang dari 60 mm

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 50.685 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur. Data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.8.
Penggunaan Lahan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Klasifikasi penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Permukiman	3.928,7358 **(7,75%)**	3.963,1758 **(7,82%)**	3.997,3018 **(7,88%)**	4.022,3897 **(7,94%)**	4.061,5542 **(8,01%)**

No.	Klasifikasi penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.	Sawah	15.868,8039 **(31,63%)**	15.831,6239 **(31,24%)**	15.786,7911 **(31,15%)**	15.757,8323 **(31,09%)**	15.713,2745 **(31,00%)**
3.	Tegal	6.630,8352 **(13,09%)**	6.626,6348 **(13,07%)**	6.621,5972 **(13,06%)**	6.485,7696 **(12,80%)**	6.484,0135 **(12,79%)**
4.	Kebun Campur	16.597,0431 **(32,75%)**	16.593,9278 **(32,74%)**	16.581,1645 **(32,73%)**	16.958,2259 **(33,46%)**	16.943,8098 **(33,42%)**
5.	Kebun Rakyat	-	-		-	-
6.	Hutan	1.385 **(2,73%)**	1.385 **(2,73%)**	1.385 **(2,73%)**	1.136,185 **(2,24%)**	1.136,185 **(2,24%)**
7.	Tanah Tandus	543 **(1,07%)**	543 **(1,07%)**	543 **(1,07%)**	543 **(1,07%)**	543 **(1,07%)**
8.	Waduk	-	-	-	-	-
9.	Tambak	30 **(0,06%)**	30 **(0,06%)**	30 **(0,06%)**	30 **(0,06%)**	30 **(0,06%)**
10.	Lainnya	5.701,582 **(11,11%)**	5.711,6377 **(11,27%)**	5.740,1485 **(11,32%)**	5.751,5975 **(11,35%)**	5.773,163 **(11,39%)**
Jumlah		**50,685 (100%)**	**50,685 (100%)**	**50,685 (100%)**	**50,685 (100%)**	**50,685 (100%)**

Sumber: BPN, 2014- 2018

Dari data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2013-2017 pada Tabel 2.8 di atas, dapat diketahui bahwa pada kurun waktu tersebut terjadi pengurangan luas lahan sawah, tegal, dan kebun campur. Namun, di sisi lain pada kurun waktu yang sama terjadi penambahan luas lahan permukiman dan lahan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul terjadi proses alih fungsi lahan sawah, tegal, dan kebun campur menjadi lahan permukiman dan lahan lainnya.

Adanya alih fungsi lahan sawah, tegal, dan kebun campur serta hutan menjadi lahan permukiman dan lahan lainnya ini tentunya akan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan strategis dari Pemerintah Bantul guna mengendalikan pengurangan alih fungsi lahan sawah, tegal, dan kebun campur serta hutan menjadi lahan permukiman.Dalam hal ini, kebijakan pengendalian atau pengurangan alih fungsi lahan tersebut dilakukan dengan penetapan RDTR sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang dan pengetatan pemberian izin alih fungsi lahan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas:

1. Kawasan Lindung Kabupaten

   Rencana pengembangan Kawasan Lindung Kabupaten meliputi:

   a. Kawasan hutan lindung

      Penyebaran kawasan hutan lindung meliputi Desa Dlingo, Desa Mangunan, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo, Desa Temuwuh, Desa Terong Kecamatan Dlingo, Desa Wonolelo Kecamatan Pleret, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, dan Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

   b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

      Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air.

   c. Kawasan perlindungan setempat

      Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan kabupaten.

   d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

   e. Kawasan rawan bencana

      Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan.

2. Kawasan Budidaya Kabupaten

   Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten terdiri atas:

   a. Kawasan peruntukan hutan rakyat,

      Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 Hektar atau 16,86% dari luas wilayah Kabupaten Bantul.

   b. Kawasan peruntukan pertanian,

      Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah direncanakan seluas kurang lebih 13.324 hektar atau 26,29%. Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan

seluas kurang lebih 5.247 hektar atau 10,35% dari luas wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan sebagai berikut:

1) Peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden;
2) Peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sedayu;
3) Peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh kecamatan;
4) Peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan;
5) Peternakan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan;
6) Peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan;
7) Peternakan kelinci di Kecamatan Sanden.

c. Kawasan peruntukan perikanan,
d. Kawasan peruntukan pertambangan,
e. Kawasan peruntukan industri,
f. Kawasan peruntukan pariwisata,
g. Kawasan peruntukan permukiman,
h. Kawasan peruntukan lainnya.

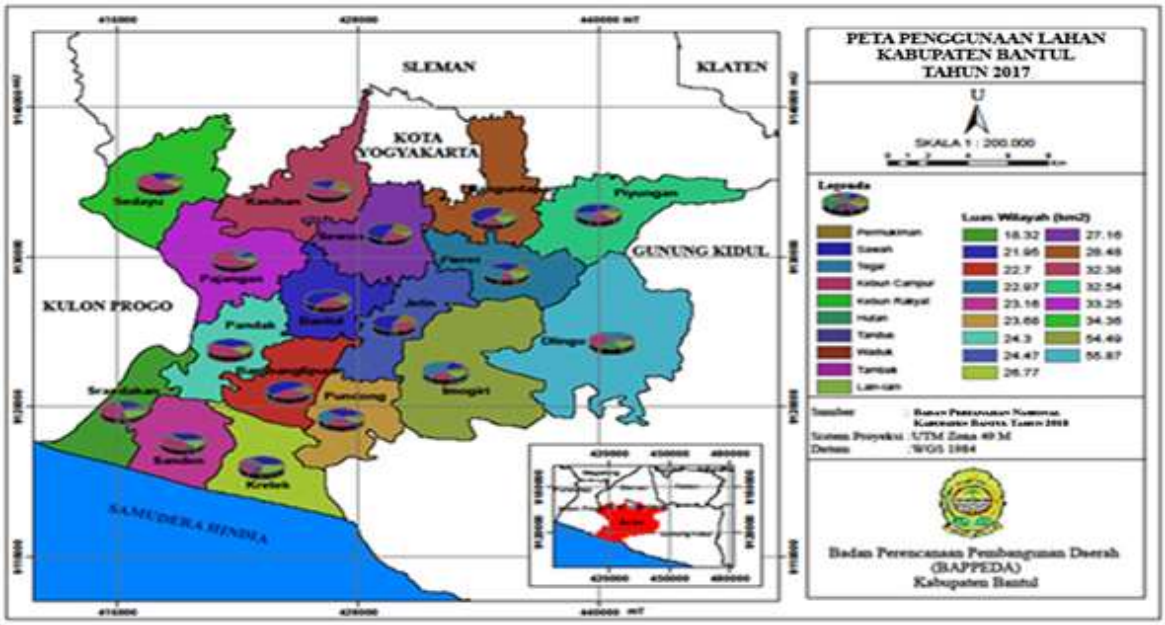

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018 (data diolah)

Gambar 2.5.
Peta Penggunaan Lahan

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara geografis dan administratif Kabupaten Bantul memiliki potensi pengembangan wilayah yang perlu direncanakan lebih lanjut. Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Bantul diperlukan karena:

- batas wilayah yang tidak berbatas secara fisik, meski terdapat *ring road* namun perkembangan saat ini telah melewati batas tersebut;
- topografi kawasan yang relatif datar;
- tidak terdapat kendala terhadap kawasan resapan air;
- banyaknya daerah wisata yang belum tergarap secara optimal untuk pengembangan sektor hotel dan restoran.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio-kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup. Kawasan strategis ekonomi kabupaten meliputi:

1. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);

2. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
3. Kawasan Strategis Pantai Selatan, Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
4. Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan
5. Kawasan Strategis Industri Piyungan.

Sementara itu, kawasan strategis sosio-kultural kabupaten meliputi kawasan strategis desa wisata dan kerajinan Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem). Sementara kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten meliputi:

1. Kawasan strategis agrowisata di Kecamatan Dlingo dan agropolitan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
2. Kawasan strategis gumuk pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bagian wilayah yang rawan bencana khususnya gempa bumi karena wilayah ini terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indonesia-Australia. Selain itu, wilayah Kabupaten Bantul juga terletak pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami, terutama wilayah bagian selatan.

Bencana gempa tanggal 27 Mei 2006 terjadi hampir di seluruh Kabupaten Bantul. Bencana air pasang merupakan bencana yang mengikuti bencana gempa bumi Tahun 2006 dan terjadi di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, kawasan rawan bencana di Kabupaten Bantul meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan.

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, *droping* air, dan sebagainya. Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana juga dilakukan pada:

1. Daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum,
2. Daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko,
3. Daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan sekolah siaga bencana, desa siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.

Tabel 2.9.
Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Bencana	Lokasi Yang Berpotensi
1.	Kawasan rawan gempa bumi	Di seluruh kecamatan
2.	Kawasan rawan longsor	Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong, Sedayu, dan Pajangan.
3.	Kawasan rawan banjir	Srandakan, Pandak, Kretek, Bambanglipuro, Sanden, Pundong, Bantul, Jetis, Imogiri, Banguntapan, Pleret, Piyungan, Sewon, Kasihan
4.	Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi	Kretek, Srandakan, dan Sanden
5.	Kawasan rawan kekeringan	Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.
6.	Kawasan rawan Cuaca Ekstrim	Dlingo, Piyungan Imogiri, Banguntapan, Sewon, Kasihan.
7.	Kawasan rawan Tsunami	Srandakan, Sanden, Kretek
8.	Kawasan rawan Kebakaran	Di seluruh kecamatan
9.	Kawasan rawan Epidemi dan Wabah Penyakit	Kasihan, Pandak, Kretek, Pundong

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018

2.1.4. Demografi

Kondisi demografi memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010 jumlah penduduk di Kabupaten Bantul mencapai

911.503 jiwa dengan komposisi sebanyak 454.491 jiwa penduduk laki-laki dan 457.012 jiwa penduduk perempuan.

Jumlah penduduk terus meningkat setiap tahun, berikut disajikan jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2013-2017 pada Tabel berikut:

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2013-2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2013*	2014*	2015**	2016**	2017**
1	Srandakan	28.832	29.022	31.301	31.244	31.276
2	Sanden	29.876	29.995	32.702	32.494	31.924
3	Kretek	29.6	30.014	31.101	31.082	30.837
4	Pundong	31.971	32.201	35.202	35.484	35.448
5	Bambanglipuro	37.737	38.071	41.165	41.385	41.201
6	Pandak	48.278	48.786	51.307	51.77	51.492
7	Bantul	60.583	61.96	63.161	63.124	62.788
8	Jetis	52.985	54.083	57.573	57.474	57.408
9	Imogiri	57.081	57.901	62.299	62.419	62.531
10	Dlingo	35.95	36.342	39.129	38.666	38.502
11	Pleret	44.536	45.949	46.609	46.663	46.825
12	Piyungan	50.782	53.282	50.517	50.846	51.051
13	Banguntapan	126.971	135.42	107.318	107.548	107.596
14	Sewon	108.039	112.245	96.937	97.42	97.034
15	Kasihan	115.961	121.995	95.719	100.33	100.222
16	Pajangan	33.85	34.968	34.264	34.674	34.894
17	Sedayu	45.401	46.398	43.136	46.053	46.152
Jumlah		**938.433**	**968.632**	**919.44**	**928.676**	**927.181**

Sumber: BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, 2018
Keterangan: * Data BPS
** Data Disdukcapil semeter 2

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2017 menurut data Disdukcapil sebanyak 927.181 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 462.449 jiwa dan perempuan sebanyak 464.732 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan masih seimbang. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bantul masih didominasi adanya mutasi masuk sebesar 13.074 jiwa.

Selain itu ada peningkatan angka kelahiran dari 12.198 jiwa pada tahun 2016 menjadi 12.818 jiwa pada tahun 2017. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dengan luas lahan yang terbatas maka akan mempengaruhi tingkat

kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis dan kepadatan penduduk agraris.Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah.

a. Komposisi penduduk menurut usia

Komposisi penduduk menurut usia sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok usia dominan di suatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.11.
Perkembangan Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2013-2017

No.	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2013 *	2014 *	2015 *	2016 **	2017 **
1	0 – 4 tahun	144.152	150.433	60.565	60.708	58.920
2	5 – 9 tahun	NA	NA	69.841	70.339	70.557
3	10 – 14 tahun	66.595	70.073	67.506	66.261	66.964
4	15 – 19 tahun	71.361	68.884	65.108	66.141	65.710
5	20 – 24 tahun	77.178	75.494	63.581	63.811	64.096
6	25 – 29 tahun	220.508	232.868	63.013	63.577	64.489
7	30 – 34 tahun	NA	NA	73.975	71.990	68.746
8	35 – 39 tahun	NA	NA	72.719	73.112	74.094
9	40 – 44 tahun	358.639	370.880	69.214	70.090	60.799
10	45 – 49 tahun	NA	NA	69.856	69.466	69.025
11	50 – 54 tahun	NA	NA	62.829	64.417	63.492
12	55 – 59 tahun	NA	NA	55.947	56.973	57.649
13	60 – 64 tahun	NA	NA	38.082	41.241	42.972
14	65 – 69 tahun	NA	NA	25.689	27.340	28.941
15	70 – 74 tahun	NA	NA	23.005	23.402	21.439
16	> 75 tahun	NA	NA	38.510	39.808	42.288
Jumlah		**938.433**	**968.632**	**919.440**	**928.676**	**927.181**

Sumber: BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Keterangan: * Data BPS 2013-2018
** Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2016-2018

Berdasarkan komposisi penduduk menurut usia pada Tabel 2.11, dapat diketahui bahwa kelompok usia sekolah dan usia produktif merupakan kelompok usia dominan sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pendidikan dan tenaga kerja.

Jumlah penduduk terbesar Kabupaten Bantul pada tahun 2017 adalah kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 68,82% dan penduduk pada kelompok usia muda (0-14 tahun) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 21,19%. Sementara proporsi terendah adalah kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 9,99%. Jumlah penduduk muda (0-14 tahun) dan jumlah penduduk tua (65 tahun ke atas) disebut jumlah penduduk non-produktif. Dengan demikian dapat dihitung rasio ketergantungan penduduk Bantul tahun 2017 yaitu sebesar 46,69%.

b. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berprespektif gender. Kebijakan pada komposisi penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.12.
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2013-2017

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2013 *	2014 *	2015 **	2016 **	2017 **
1	Laki-laki	467.504	482.805	460.075	464.860	462.449
2	Perempuan	470.929	485.827	459.365	463.816	464.732
Jumlah		**938.433**	**968.632**	**919.440**	**928.676**	**927.181**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, 2014-2018
Keterangan: ** Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semester 2

Berdasarkan komposisi penduduk menurut usia pada Tabel 2.12, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bantul hampir seimbang. Tetapi dengan melihat *trend* jumlah penduduk perempuan dalam kurun waktu lima tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan kesetaraan gender misalnya

memberikan peluang bagi perempuan untuk turut serta berperan aktif dalam pemerintahan.

c. Kepadatan penduduk geografis

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Kepadatan penduduk geografis di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 2.13. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk geografis tinggi adalah Kecamatan Sewon, Banguntapan, dan Kasihan, sedangkan kepadatan penduduk geografis rendah adalah Kecamatan Dlingo.

Tabel 2.13.
Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2017

No.	Kecamatan	Kepadatan (jiwa/km^2)				
		2013 *	2014 *	2015 **	2016 **	2017 **
1	Srandakan	1.574	1.584	1.708,57	1.705,46	1.707,21
2	Sanden	1.290	1.295	1.412,00	1.403,02	1.378,41
3	Kretek	1.106	1.121	1.161,79	1.161,08	1.151,92
4	Pundong	1.350	1.360	1.486,57	1.498,48	1.496,96
5	Bambanglipuro	1.662	1.677	1.813,44	1.823,13	1.815,02
6	Pandak	1.987	2.008	2.111,40	2.130,45	2.119,01
7	Bantul	2.760	2.823	2.877,49	2.875,81	2.860,50
8	Jetis	2.165	2.210	2.352,80	2.348,75	2.346,06
9	Imogiri	1.048	1.063	1.143,31	1.145,51	1.147,57
10	Dlingo	643	650	700,36	692,07	689,14
11	Pleret	1.938	2.000	2.029,12	2.031,48	2.038,53
12	Piyungan	1.561	1.637	1.552,46	1.562,57	1.568,87
13	Banguntapan	4.458	4.755	3.768,19	3.776,26	3.777,95
14	Sewon	3.978	4.133	3.569,11	3.586,89	3.572,68
15	Kasihan	3.581	3.768	2.956,11	3.098,52	3.095,18
16	Pajangan	1.018	1.052	1.030,50	1.042,83	1.049,44
17	Sedayu	1.321	1.350	1.255,41	1.340,31	1.343,19
Rata-rata		**1.852**	**1.911**	**1.814,03**	**1.832,25**	**1.829,30**

Sumber: BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, 2018
Keterangan: Data Disdukcapil semester 2

Pada Gambar 2.6 terlihat bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Bantul tidak merata, daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Banguntapan (3.777,95 jiwa/km2), Sewon (3.572,68 jiwa/km2), dan Kasihan (3.095,18 jiwa/km2), sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (689,14 jiwa/km2). Kepadatan penduduk geografis Kabupaten Bantul Tahun 2017 mencapai 1.829,30 jiwa/km2.

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018 (data diolah)

Gambar 2.6.
Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul

d. Kepadatan penduduk agraris

Selain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk dapat pula ditinjau dari kepadatan penduduk agraris. Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu diketahui agar tercapai akurasi kebijakan. Secara rinci kepadatan penduduk agraris dapat dilihat pada Gambar 2.7. Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Berdasarkan data kepadatan penduduk agraris yang ada diketahui bahwa setiap tahun terjadi penyusutan

lahan pertanian yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dengan melihat kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian, maka perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya langkah-langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju penyusutannya. Penyusutan lahan banyak terjadi di daerah aglomerasi perkotaan seperti di Sewon, Banguntapan, dan Kasihan. Hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota Yogyakarta dan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

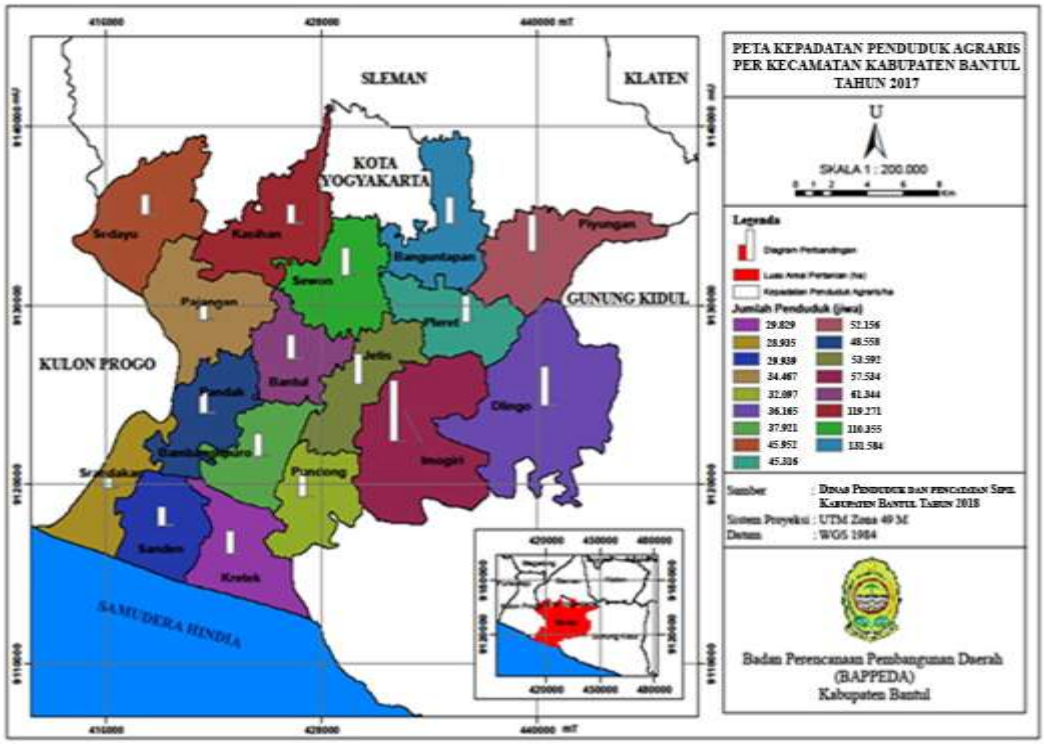

Sumber: Dari berbagai sumber (diolah), 2018

Gambar 2.7.
Kepadatan Penduduk Agraris Kabupaten Bantul

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB dihitung dengan metode yang sama sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. PDRB dibedakan dalam dua jenis penilaian, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 5,10% (angka sangat sementara) atau mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2016 yang mampu tumbuh sebesar 5,06%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan beberapa kegiatan sektor ekonomi, utamanya kegiatan sektor pertanian, industri pengolahan, pengadaan air, konstruksi dan jasa pendidikan.

Nilai PDRB Kabupaten Bantul tahun 2017 atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 17,212 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 5,10 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai 16,377 triliun rupiah. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi seluruh sektor ekonomi dan sudah terbebas dari pengaruh inflasi.

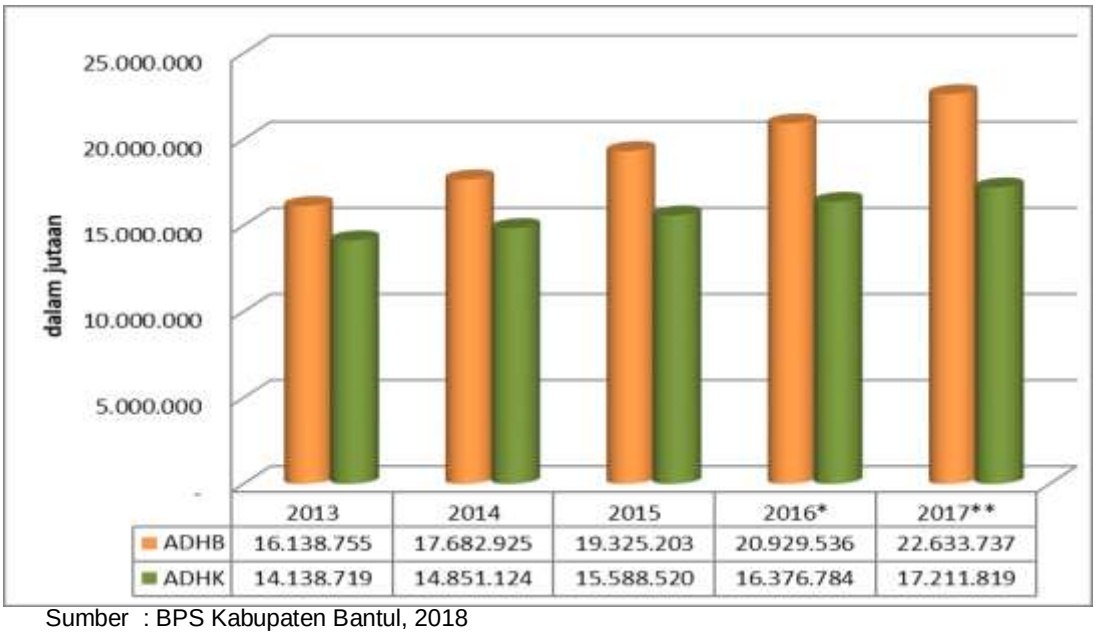

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018
Ket. : * Angka sementara,
**Angka sangat sementara

Gambar 2.8.
Perkembangan Nilai PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018
Ket. : * Angka Sementara,
**Angka sangat sementara

Gambar 2.9.
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul sebesar 5,10% atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang mampu tumbuh

5,06%. Hal ini dikarenakan kategori industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Industri Kabupaten Bantul didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Industri skala kecil yang terkonsentrasi di lokasi tertentu membentuk sentra-sentra produk-produk tradisional (gerabah/keramik, batik, keris, wayang, dan sebagainya), yang produknya untuk pasar ekspor serta mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2017 masih dibawah pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,26% namun diatas Nasional sebesar 5,07%.

Apabila dilihat dari sisi kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2017 belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Tiga besar sektor penyusun perekonomian Kabupaten Bantul yaitu sektor industri pengolahan sebesar 15,24%; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,91%; dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,74%. Sementara keempat belas sektor lainnya hanya mampu menyumbang pembentukan PDRB Kabupaten Bantul kurang dari sepuluh persen dan secara keseluruhan, ketiga sektor tersebut menyumbang PDRB sekitar 41,23 persen.

Tabel 2.14.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Bantul

Sektor	2013		2014		2015		2016*		2017**	
	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.964.026	13,89	1.912.488	12,88	1.952.983	12,53	1.982.709	12,11	2.032.344	11,81
Pertambangan dan Penggalian	100.263	0,71	101.805	0,69	102.423	0,66	102.781	0,63	102.845	0,60
Industri Pengolahan	2.138.364	15,12	2.224.275	14,98	2.283.703	14,65	2.405.767	14,69	2.558.218	14,86
Pengadaan Listrik dan Gas	21.911	0,15	23.520	0,16	24.244	0,16	27.905	0,17	29.023	0,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.222	0,09	12.649	0,09	13.022	0,08	13.408	0,08	13.835	0,08
Konstruksi	1.368.231	9,68	1.447.564	9,75	1.506.241	9,66	1.567.472	9,57	1.660.497	9,65
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.156.442	8,18	1.232.188	8,30	1.315.611	8,44	1.403.008	8,57	1.482.797	8,61
Transportasi dan Pergudangan	721.870	5,11	749.086	5,04	777.542	4,99	807.461	4,93	841.692	4,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.443.508	10,21	1.555.098	10,47	1.646.727	10,56	1.750.671	10,69	1.851.038	10,75

Sektor	2013		2014		2015		2016*		2017**	
	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
Informasi dan Komunikasi	1.358.557	9,61	1.454.258	9,79	1.536.407	9,86	1.664.675	10,16	1.762.378	10,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	351.945	2,49	385.477	2,60	418.450	2,68	438.490	2,68	450.881	2,62
Real Estate	910.010	6,44	989.905	6,67	1.057.942	6,79	1.119.537	6,84	1.175.156	6,83
Jasa Perusahaan	76.405	0,54	81.441	0,55	87.194	0,56	90.911	0,56	94.797	0,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	959.447	6,79	1.010.099	6,80	1.063.245	6,82	1.125.301	6,87	1.181.301	6,86
Jasa Pendidikan	996.812	7,05	1.073.654	7,23	1.157.438	7,42	1.194.995	7,30	1.256.613	7,30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	262.487	1,86	281.683	1,90	302.837	1,94	318.578	1,95	334.918	1,95
Jasa lainnya	296.219	2,10	315.933	2,13	342.511	2,20	363.114	2,22	383.486	2,23
PDRB	**14.138.719**	100,00	**14,.851.124**	100,00	**15.588.520**	100,00	**16.376.784**	100,00	**17.211.819**	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018
Ket. * Angka sementara
**Angka sangat sementara

Tabel 2.15.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantul

SEKTOR	2013		2014		2015		2016*		2017**	
	(JUTA RP)	%	(JUTA RP)	%	(JUTA RP)	%	(JUTA RP)	%	(JUTA RP)	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.476.292	15,34	2.556.406	14,46	2.821.403	14,60	3.010.874	14,39	3.148.389	13,91
Pertambangan dan Penggalian	106.879	0,66	116.953	0,66	125.530	0,65	128.516	0,61	129.076	0,57
Industri Pengolahan	2.491.084	15,44	2.741.392	15,50	2.909.864	15,06	3.176.266	15,18	3.449.821	15,24
Pengadaan Listrik dan Gas	15.919	0,10	18.774	0,11	21.882	0,11	26.436	0,13	32.303	0,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.242	0,08	15.153	0,09	16.193	0,08	17.044	0,08	17.976	0,08
Konstruksi	1.511.937	9,37	1.654.150	9,35	1.803.228	9,33	1.943.455	9,29	2.118.975	9,36
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.347.850	8,35	1.473.263	8,33	1.585.613	8,20	1.771.632	8,46	1.945.840	8,60
Transportasi dan Pergudangan	789.918	4,89	874.461	4,95	940.531	4,87	1.000.984	4,78	1.070.507	4,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.770.326	10,97	2.011.871	11,38	2.239.275	11,59	2.442.216	11,67	2.656.392	11,74
Informasi dan Komunikasi	1.283.762	7,95	1.347.206	7,62	1.411.574	7,30	1.529.208	7,31	1.667.177	7,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	416.542	2,58	483.499	2,73	545.349	2,82	585.116	2,80	626.065	2,77
Real Estate	1.008.900	6,25	1.141.509	6,46	1.262.118	6,53	1.376.057	6,57	1.486.180	6,57
Jasa Perusahaan	77.174	0,48	86.887	0,49	94.902	0,49	100.785	0,48	107.585	0,48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.147.990	7,11	1.285.863	7,27	1.432.619	7,41	1.578.240	7,54	1.756.873	7,76
Jasa Pendidikan	1.073.247	6,65	1.208.173	6,83	1.372.466	7,10	1.441.528	6,89	1.547.114	6,84

SEKTOR	2013		2014		2015		2016*		2017**	
	(JUTA RP)	%	(JUTA RP)	%	(JUTA RP)	%	(JUTA RP)	%	(JUTA RP)	%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	290.729	1,80	316.399	1,79	354.915	1,84	387.703	1,85	419.294	1,85
Jasa lainnya	316.965	1,96	350.967	1,98	387.740	2,01	413.475	1,98	454.170	2,01
PDRB	**16.138.755**	100,00	**17.682.925**	100,00	**19.325.203**	100,00	**20.929.535**	100,00	**22.633.737**	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bantul,2018
Ket. *Angka sementara
**Angka sangat sementara

Dalam jangka waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, menunjukkan tren perlambatan dan pertumbuhannya berada di bawah sektor kontruksi dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Perlambatan ini dikarenakan peningkatan produksi pada tahun 2017 lebih rendah dari tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier semakin mempengaruhi aktivitas perekonomian Kabupaten Bantul.

Tabel 2.16.
Laju Pertumbuhan Sektor/Lapangan Usaha
PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,66	-2,62	2,12	1,52	2,50
B	Pertambangan dan Penggalian	2,45	1,54	0,61	0,35	0,06
C	Industri Pengolahan	6,29	4,02	2,67	5,35	6,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,11	7,34	3,08	15,10	4,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,58	3,49	2,95	2,96	3,18
F	Konstruksi	4,84	6,89	4,05	4,07	5,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,61	6,55	6,77	6,53	5,80
H	Transportasi dan Pergudangan	4,96	3,77	3,80	4,17	3,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,54	6,55	5,89	6,31	5,73
J	Informasi dan Komunikasi	6,31	7,04	5,65	8,35	5,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,75	9,53	8,55	4,79	2,83
L	Real Estate	4,52	8,78	6,87	5,82	4,97
M,N	Jasa Perusahaan	4,47	6,59	7,06	4,26	4,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,37	5,28	5,26	5,84	4,98
P	Jasa Pendidikan	5,08	7,71	7,80	3,24	5,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	7,31	7,51	5,20	5,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,35	6,66	8,41	6,02	5,61
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,46	5,04	4,97	5,06	5,10

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (2) pertambangan dan penggalian. Kedua, sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) pengadaan listrik dan gas; (3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan (4) konstruksi. Ketiga, sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; (2) transportasi dan pergudangan; (3) penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) informasi dan komunikasi; (5) jasa keuangan; (6) *real estate*; (7) jasa perusahaan; (8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (9) jasa pendidikan; (10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan (11) jasa lainnya. Peran sektor primer sudah mengalami pergeseran ke arah sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer mempunyai peranan sebesar 14,91% lebih kecil dibandingkan dengan *share* sektor sekunder yang memberikan kontribusi sebesar 22,33% dan sektor tersier sebesar 62,76% (lihat Gambar 2.6). Peran sektor primer dan sekunder mengalami penurunan dan sudah mengalami pergeseran ke arah sektor tersier.

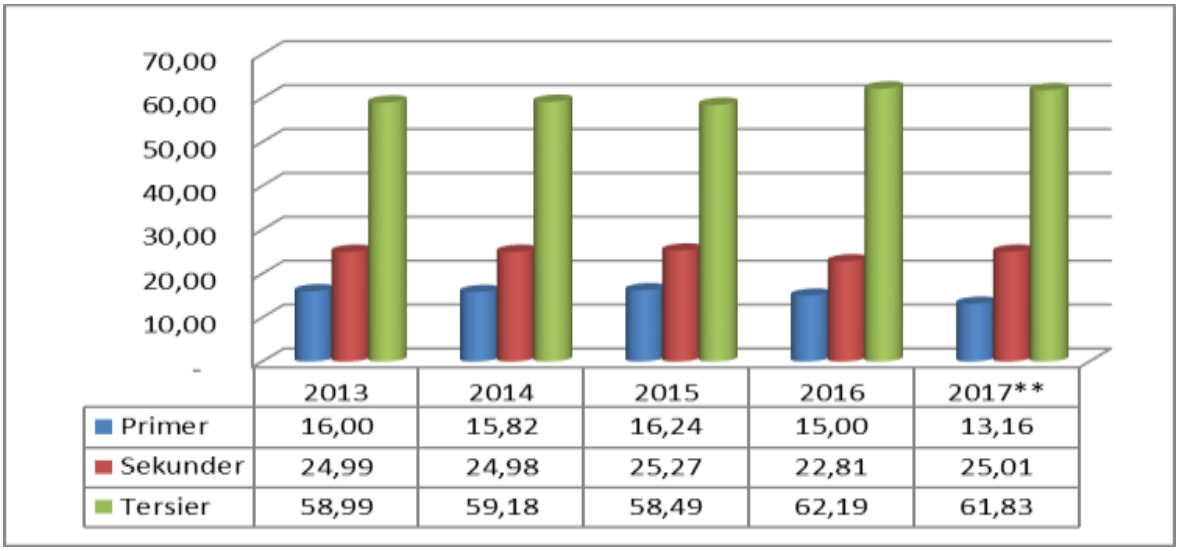

	2013	2014	2015	2016	2017**
Primer	16,00	15,82	16,24	15,00	13,16
Sekunder	24,99	24,98	25,27	22,81	25,01
Tersier	58,99	59,18	58,49	62,19	61,83

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul (data diolah), 2017

Gambar 2.10.
Pergeseran Struktur Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif khususnya pada sektor tersier sebagai sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Bantul. Sementara sektor primer menunjukkan pertumbuhan yang melambat dan terjadinya penurunan kontribusi dari sektor pertanian. Meskipun tetap menjadi sektor unggulan, semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian merupakan situasi yang normal dan terjadi di sebagian besar negara dan daerah yang mengalami transformasi struktural dalam proses pembangunan ekonominya. Dengan tetap menempatkannya sebagai sektor unggulan serta adanya berbagai intervensi kebijakan dan program akan dapat memperlambat penurunan kontribusi sektor pertanian. Hal ini karena sektor pertanian masih menjadi basis ketahanan pangan, penyerap utama tenaga kerja serta jumlah penduduk miskin yang mana ketiga variabel ini sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja perekonomian dan stabilitas sosial-politik disuatu daerah atau negara.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Bantul mengalami peningkatan signifikan dari 2,26% pada tahun 2016 menjadi 3,96% pada tahun 2017. Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 terjadi inflasi sebesar 3,96%. Angka tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Kota Yogyakarta yaitu 4,20%. Akan tetapi, lebih tinggi apabila dibandingkan laju inflasi nasional yaitu sebesar 3,61%.

Selain itu, pada tahun 2017 inflasi Kabupaten Bantul bulan Desember yang dimana ada perayaan Natal kembali lebih tinggi dibandingkan bulan dimana ada perayaan Lebaran. Inflasi bulan Desember 2017 adalah sebesar 0,75 sedangkan inflasi bulan Juli 2017 adalah sebesar 0,40. Hal ini berbeda dengan keadaan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 inflasi di Kabupaten Bantul mencapai yang bisa disebut *Triple Decker*. Berdasarkan keadaan tersebut, maka diperlukan kerja keras melalui pengendalian inflasi secara dinidan sistematis sehingga efektif mengendalikan inflasi baik dari aspek produksi maupun distribusi.

Pendorong inflasi tahun 2017 Kabupaten Bantul diantaranya adalah penyesuaian tarif dasar listrik, kenaikan harga BBM, kelangkaan bahan bakar rumah tangga, dan beberapa komoditas makanan. Beberapa komoditas yang

memiliki andil terhadap inflasi pada kelompok ini, yaitu: beras, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, sayur-sayuran.

Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan, yang mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan pendapatan dan investasi). Laju inflasi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 berada di bawah laju inflasi Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengendalikan inflasi melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPID) dan kebijakan-kebijakan yang diambil walaupun tidak lebih rendah dari laju inflasi nasional.

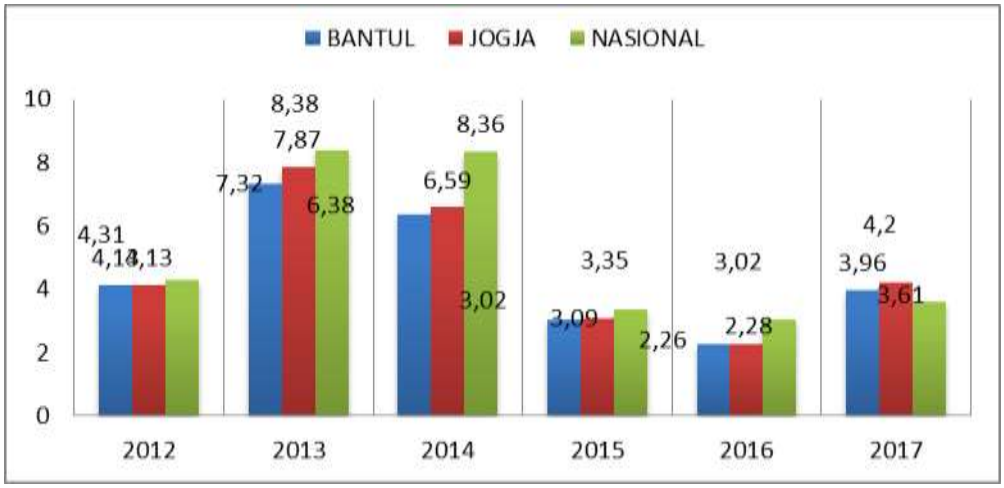

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.11.
Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional
Tahun 2012-2017

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul atas dasar berlaku sejak tahun 2013-2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 nilai PDRB per

kapita tercatat sebesar 20.924.970 dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 mencapai sebesar 22.816.226.

Tabel 2.17.
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bantul

No	Tahun	PDRB Per Kapita Nilai (Rp)
1	2013	17.040.684
2	2014	18.430.369
3	2015	19.891.904
4	2016	21.275.441
5	2017**)	22.816.226

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018
**) angka sangat sementara

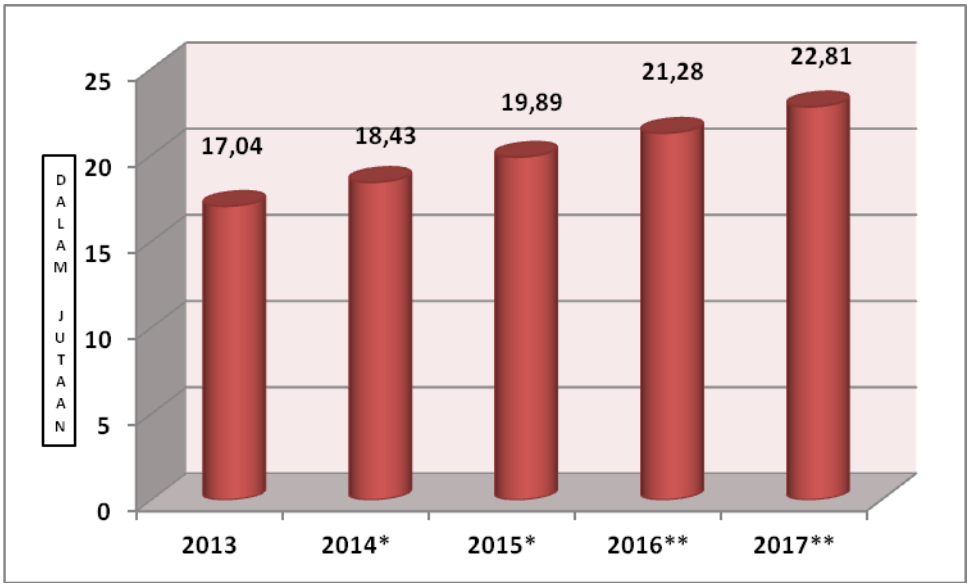

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2018
*Ket. : * Angka sementara,*
*** Angka sangat sementara*

Gambar 2.12.
Pertumbuhan PDRB Perkapita di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

2.2.1.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Koefisien Gini di Kabupaten Bantul pada empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2017 naik menjadi 0,4126; mengalami kenaikan

0,015 poin jika dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar 0,3967. Meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran dan merupakan implikasi dari cepatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang digeluti oleh bukan mayoritas penduduk melampaui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang digeluti mayoritas penduduk. Capaian ini juga merupakan implikasi dari transformasi struktur ekonomi yang masih terus berproses dari sektor primer dan sekunder ke arah tersier. Koefisien gini Kabupaten Bantul masih lebih baik dibanding capaian DIY sebesar 0,4300, namun lebih tinggi dari pada capaian nasional sebesar 0,391.

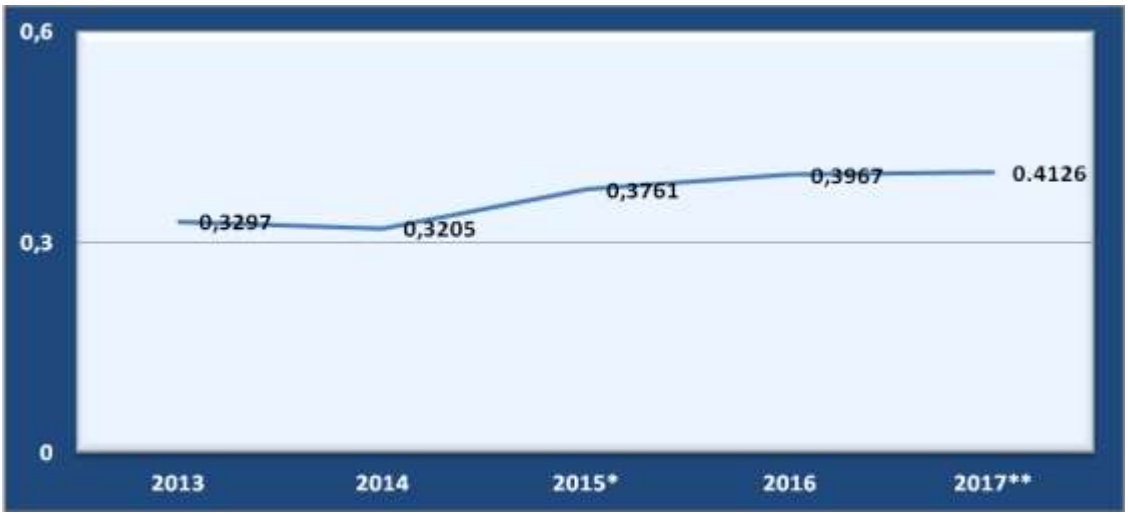

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.13.
Koefisien Gini di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Pendidikan

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 14,75 tahun. Artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa

mendatang adalah selama 14,75 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma II. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul dari tahun 2013 sampai dengan 2017 selalu meningkat sebagaimana disajikan pada Gambar 2.14.

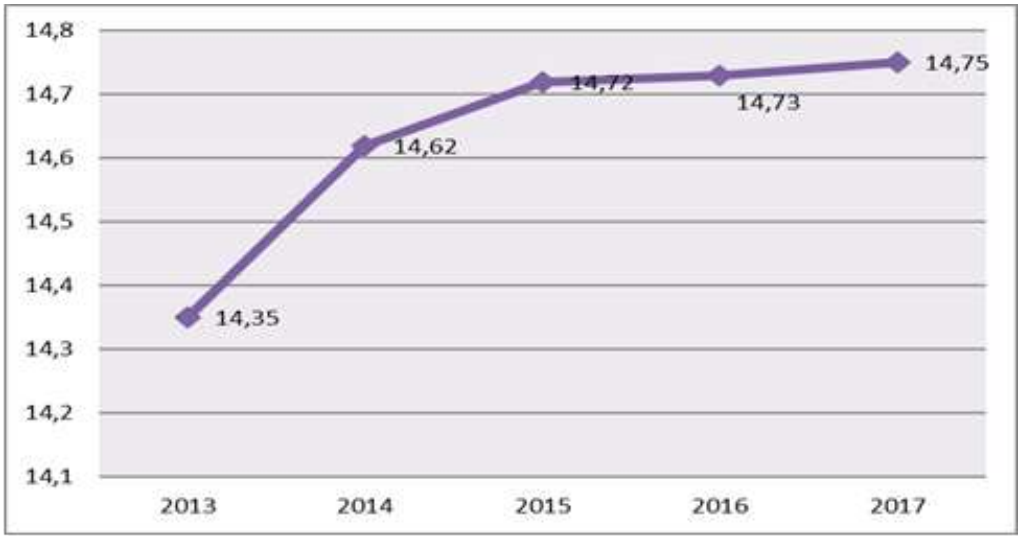

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.14.
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2017

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan, dari 8,72 tahun pada tahun 2013 menjadi 9,2 pada tahun 2017. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah hanya setingkat SLTP.

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah melalui kebijakan Bantuan Operasional Sekolah.

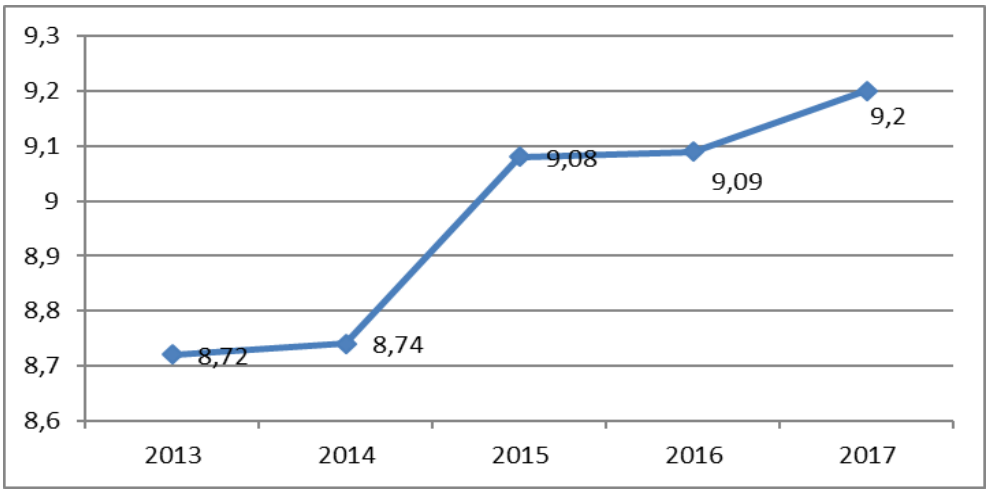

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.15.
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Bantul apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY masih di atas Gunungkidul dan Kulon Progo tetapi di bawah Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2016, Angka RLS Kabupaten Bantul mencapai 9,09 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP. Selama tiga tahun terakhir, perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya peningkatan walaupun peningkatannya tidak terlalu tinggi (lihat Gambar 2.16). Pada tahun 2014 Rata-rata lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bantul sebesar 8,74 tahun dan mengalami peningkatan 0,34 poin pada tahun 2015 menjadi 9,08 dan sedikit meningkat lagi 0,01 poin pada tahun 2016 menjadi 9,09 tahun. Peningkatan indikator tersebut tak lepas dari kebijakan pemerintah dalam menekan Angka Putus Sekolah melalui beberapa program pemerintah. Salah satu program tersebut adalah Program Bantuan Operasional Sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan dana BOS, baik BOS dari pemerintah pusat maupun BOS dari pemerintah daerah. Selain BOS ada juga Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diperuntukkan bagi siswa dari kalangan rumah tangga miskin.

Apabila dibandingkan dengan wilayah di Provinsi D.I Yogyakarta, Angka RLS penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2016 juga menempati urutan ketiga seperti Angka HLS. RLS tertinggi adalah Kota Yogyakarta (11,42 tahun), diikuti Kabupaten Sleman yang sebesar 10,64 tahun. Angka RLS Kabupaten Bantul tahun 2016 sedikit dibawah posisi di bawah Provinsi D.I. Yogyakarta yang sebesar 9,12 tahun.

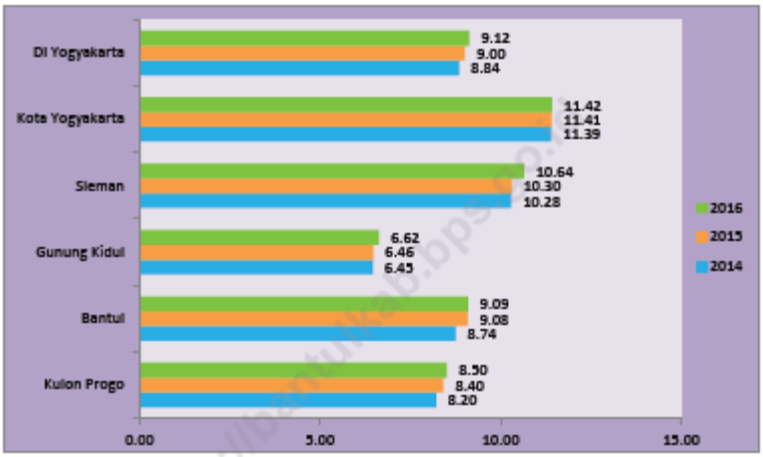

Sumber: IPM Kabupaten Bantul, BPS 2017

Gambar 2.16.
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014-2016

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2017 adalah 88,68% lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 84,10%. Adapun nilai APM SMP/MTs naik di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2016 nilai APM SMP/MTs adalah 66,41%, sedangkan pada tahun 2017 menjadi 76,60%. Untuk SMA/MA/SMK pada tahun 2016 mencapai 65,44% mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 66,41%. Capaian APM bukan berarti menunjukkan bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok usia tersebut ada yang bersekolah di luar Kabupaten Bantul atau sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.18.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bantul

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	APM SD/SDLB/MI	81,37	81,90	84,09	84,10	88,68
2.	APM SMP/MTs	65,46	72,89	67,64	71,09	76,60
3.	APM SMA/MA/SMK	51,57	67,73	59,14	65,44	66,41

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2018

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Pada tahun 2017 APK SMA/MA/SMK sebesar 94,18%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 (sebesar 88,76%), realisasi APK SD/MI tahun 2017 sebesar 98,20%, menunjukan adanya kenaikan sebesar 0,06% dari capaian tahun 2015 sebesar 96,12%. APK SMP/MTs tahun 2017 sebesar 99,23%. mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2016 (sebesar 95,00%). Nilai APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2013 – 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.19.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bantul

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	APK SD/MI	93,80	93,94	96,06	96,12	98,20
2.	APK SMP/MTs	87,86	94,06	93,82	95,00	99,23
3.	APK SMA/MA/SMK	71,04	78,40	88,76	88,76	94,18

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai APK SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2017 mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan tersebut, semakin banyak yang sesuai dengan usia sekolah. Hali ini disebabkan banyak sekolah yang memberlakukan minimal usia sekolah, sedangkan pada tahun-tahun

sebelumnya masih banyaknya siswa yang bersekolah tidak pada usia sekolah.

Mulai bulan Januari 2017, sebagai realisasi dari ketentuan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan setingkat SMA/MA/SMK sudah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DIY.

2.2.2.2 Kesehatan

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah. Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok usia lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi kelompok usia lanjut.

Secara kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk Komda Lansia yang menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan kesehatan bagi kelompok usia lanjut. Lembaga ini merupakan lembaga yang aktif dalam melakukan upaya-upaya promotif, preventif dan juga kuratif di bidang kesehatan lansia. Dengan dukungan dari berbagai stakeholder maka usia harapan hidup di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017, seperti pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Usia Harapan Hidup (UHH)
di Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	Usia Harapan Hidup (Tahun)	
		Bantul	DIY
1	2013	73,22	74,45
2	2014	73,24	74,50
3	2015	73,44	74,58
4	2016	73,50	74,71
5	2017	73,56	74,74

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul masih dibawah DIY. Hal ini perlu upaya pemerintah Kabupaten Bantul untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang kesehatan dalam mendorong peningkatan usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Bantul.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2017 sebesar 8,74 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan peningkatan kematian bayi dibandingkan tahun 2016 sebesar 7,65 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2017 terdapat 108 bayi meninggal dari 12.818 kelahiran hidup sedangkan tahun 2016 tedapat 94 bayi meninggal dari 12.288 kelahiran hidup. Penyebab Kematian Bayi antara lain adanya penyakit seperti kelainan kongenital, asfiksi dan infeksi.

Upaya untuk mempercepat penurunan kematian bayi perlu dilakukan melalui keterpaduan lintas program antara lain Program Pencegahan Penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu gerakan 1000 hari pertama kehidupan, peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI terutama bagi keluarga miskin. Disamping itu perlu

peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas dalam manajemen asfiksia pada neonatal.

Tabel 2.21.
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Bantul

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 th	126	117	105	94	102
2	Jumlah kelahiran hidup	13.425	13.371	12.570	12.288	12.818
3	AKB	9,39	8,75	8,35	7,65	8,74
4	AKHB	990,61	991,25	991,65	992,18	991,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018 Ket: (AKHB = 1000 – AKB)

3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Selain angka kematian bayi, indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Capaian angka kematian ibu pada tahun 2017 sebesar 72,8 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu). Angka ini lebih rendah dibandingkan angka kematian ibu pada tahun 2016 sebesar 96,77 per 100.000 kelahiran hidup (12 kasus kematian ibu). Penyebab kematian ibu adalah karena adanya pendarahan sebanyak dua kasus, infeksi dua kasus dan Pre Eklampsia Berat (PEB) satu kasus, serta penyebab lain-lain sebanyak empat kasus (infeksi paru-paru, *hipertiroid* dan *unclassified*).

Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu program perbaikan gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) ibu hamil, program pencegahan penyakit, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam desa siaga, ambulan desa, dan donor darah, partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia juga melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) yang sudah diintegrasikan dengan kelas ibu, membentuk jejaring Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), dan

peningkatan Puskesmas mampu Penanganan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar (PONED) serta pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal).

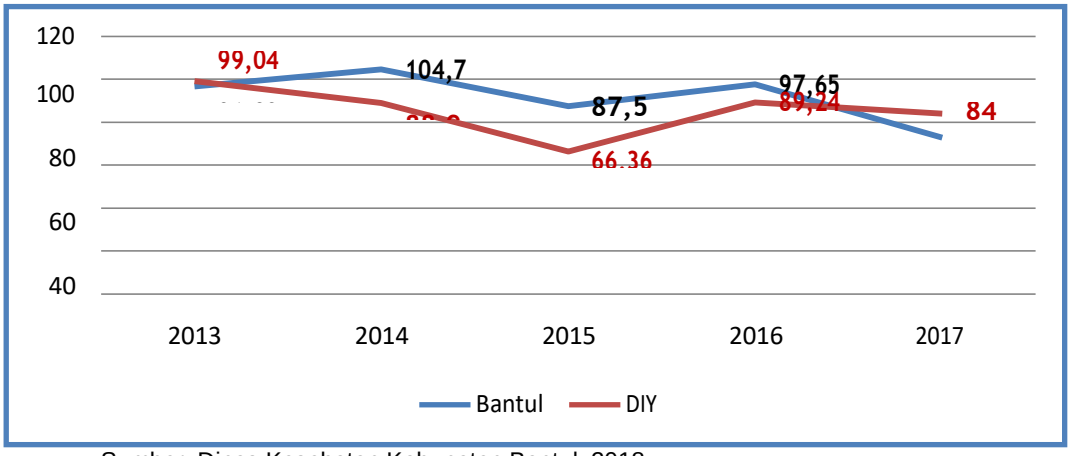

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.17.
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul
dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu di Provinsi DIY Tahun 2013-2017

4. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut usia. Secara sederhana, status gizi balita dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut usia maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017 status gizi buruk pada balita sebesar 0,41% yaitu sebanyak 202 Balita gizi buruk dari 48.865 Balita yang diukur. Adanya kenaikan gizi buruk balita disebabkan karena meningkatnya kejadian penyakit penyerta.

Tabel 2.22.
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bantul

No	Tahun	Balita Gizi Buruk (%)
1	2013	0,42
2	2014	0,38
3	2015	0,38
4	2016	0,40
5	2017	0,41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Penanganan gizi buruk balita harus tetap dilakukan karena masih banyak gizi buruk dengan penyakit yang menyertai dan cukup tingginya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Selain itu, gizi buruk yang terentaskan masuk ke dalam kategori gizi kurang, sehingga masih diperlukan intervensi yang berkelanjutan untuk meningkatkan status gizinya.

Berbagai program perbaikan gizi telah diupayakan untuk meningkatkan status gizi. Kegiatan tersebut mencakup beberapa kegiatan yaitu surveilans gizi, penanggulangan masalah gizi melalui sosialisasi pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), sosialisasi pedoman gizi seimbang, penanggulangan anemia pada remaja melalui program sepekan, bimtek dan peningkatan kapasitas petugas gizi, audit gizi buruk dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi.

5. Kesehatan Lansia

Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia dengan memasyarakatkan pentingnya kesehatan preventif pada kelompok usia lanjut dan pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur serta pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang serta pelayanan kesehatan lansia yaitu lansia mendapatkan pelayanan *skreening* kesehatan sesuai standar yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut telah terbentuk Posyandu Lansia sejumlah 937 unit.

6. Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Pada tahun 2017 jumlah kasus DBD turun bila dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2016 terdapat 2.442 kasus DBD dengan angka kesakitan DBD atau *Incidence Rate* (IR) sebesar 2,62‰, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 538 kasus dengan IR sebesar 0,55‰. Pada tahun 2016 terdapat empat kasus kematian penderita DBD dengan angka kematian atau *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 0,16 ‰.

Sumber: Dinkes Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.18.
Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Kasus demam berdarah terdapat di seluruh wilayah kecamatan. Kejadian paling tinggi terjadi di wilayah Kecamatan Sewon sebanyak 85 penderita di tahun 2017. Berbagai upaya penanggulangan DBD yang telah dilakukan meliputi: pemberantasan sarang nyamuk yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dilakukan rutin, *fogging focus*, larvasidasi, penyuluhan kesehatan masyarakat, jumantik anak sekolah dan pelatihan kader DBD desa serta kemitraan swasta.

7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV-AIDS

Hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2017 ditemukan 48 kasus baru HIV. Jumlah ini turun dibanding tahun 2016 sebanyak 144 penderita HIV. Penderita AIDS tahun 2017 sebanyak 9 kasus, yang semuanya sudah ditangani sesuai tata laksana penanganan HIV dan AIDS. Kasus HIV AIDS mulai tahun 2012 – 2017 digambarkan dalam grafik berikut ini:

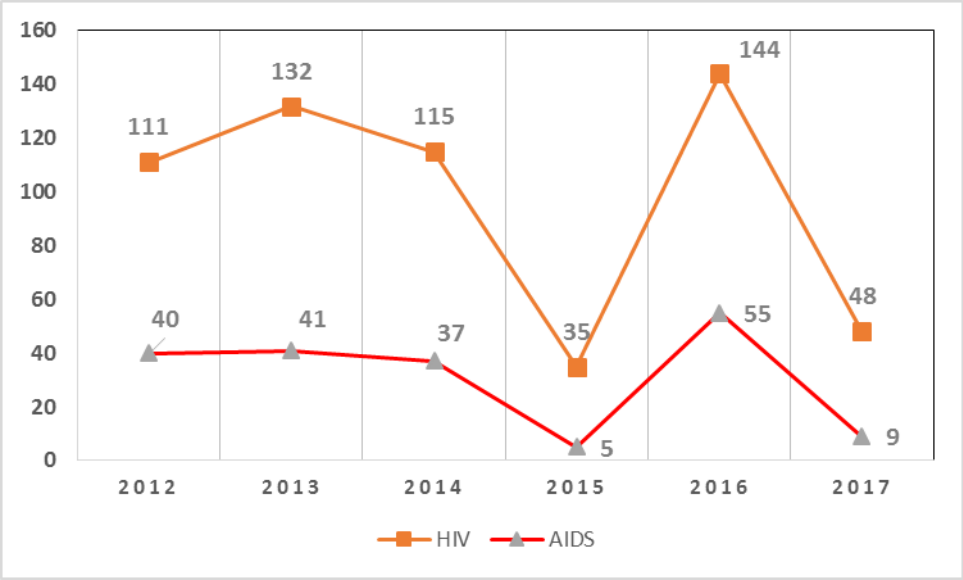

Sumber: Dinkes Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.19.
Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2012-2017

Penyebaran kasus HIV positif terjadi hampir pada semua usia. Usia yang paling banyak terkena kasus HIV-AIDS adalah pada usia 20-59 tahun. Data penyebaran kasus HIV pada golongan usia di Kabupaten Bantul disajikan pada Gambar berikut:

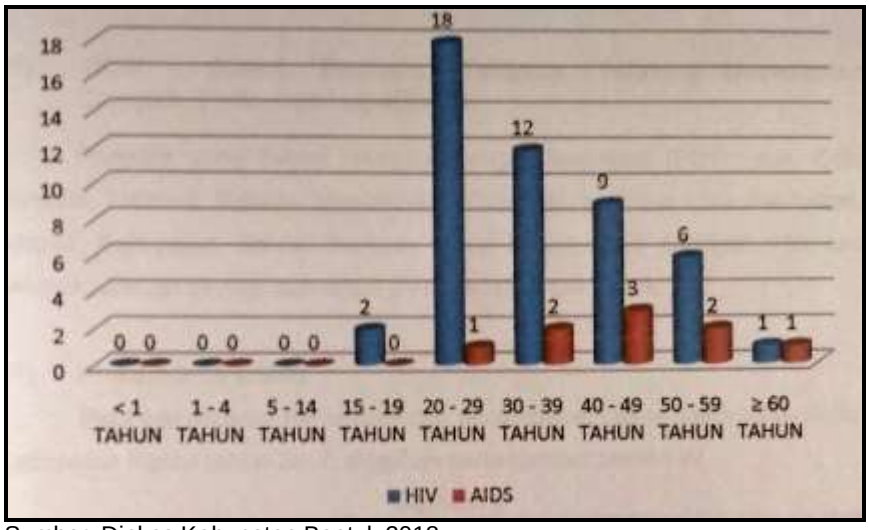

Sumber: Dinkes Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.20.
Penyebaran kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2017

Mencermati grafik di atas, diperlukan pencegahan sejak awal, yaitu pada usia remaja melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi “Aku

Bangga Aku Tahu (ABAT)" HIV AIDS. Akselerasi pengendalian HIV-AIDS dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial (usia 15-24 tahun), dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus, peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV pada kelompok potensial, serta dilakukan pengendalian Pencegahan Penularan Ibu Anak (PPIA) dengan cara konseling dan tes HIV pada semua ibu hamil. Pencapaian kondisi ini dilakukan dengan peningkatan jumlah layanan Konseling dan Tes (KT) HIV di lima Puskesmas, yaitu Puskesmas Banguntapan 2, Puskesmas Pajangan, Puskesmas Sewon 2, Puskesmas Jetis 1, Puskesmas Bambanglipuro, dan satu Rumah Sakit (RS), yaitu RS Respira, serta satuLayanan Pengobatan dan Perawatan (PDP) ODHA di Puskesmas Kretek. Sampai akhir tahun 2016 terdapat 17 Puskesmas layanan dan tiga RS (RSUD Panembahan Senopati, RS Respira, dan RSPAU Harjolukito) sebagai layanan KT HIV, enam Puskesmas Layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), satu Puskesmas Pelayanan Rumatan Metadon (PTRM), satu Puskesmas PDP (Puskesmas Kretek), dan satu RS PDP (RSUD).

8. Tuberkulosis (TBC)

Penemuan kasus TB BTA Positif pada Tahun 2017 sebesar 39,64 % naik dibandingkan Tahun 2016 yang dilaporkan sebesar 34,89 %. Jumlah kematian akibat TB dilaporkan sejumlah 3 orang. Angka kesuksesan (*Success Rate*) terdiri dari angka kesembuhan dan pengobatan lengkap TB Paru. Angka kesuksesan pada tahun 2017 dilaporkan sebesar 65%.

Angka kesembuhan (*Cure rate*) pada tahun 2017 dilaporkan sebesar 76,38%. Angka kesembuhan pengobatan TB di Kabupaten Bantul pada Tahun 2017 naik bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 71% dan angka kesembuhan ini juga berada di bawah target Nasional (85%).

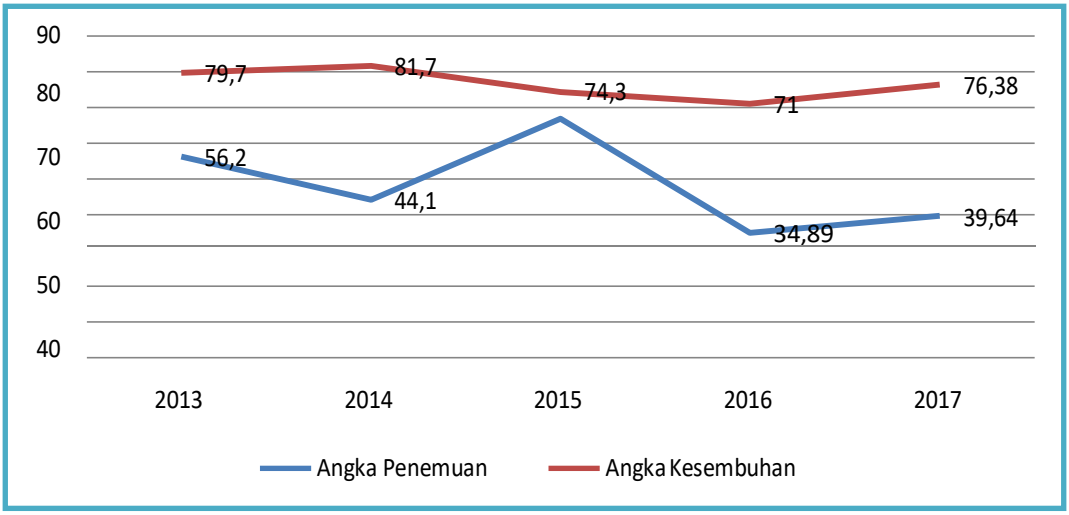

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2018

Gambar 2.21.
Grafik Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul Tahun 2013 -2017

9. 10 Besar Penyakit pada Puskesmas di Kabupaten Bantul

Pola kunjungan rawat jalan Puskesmas dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang hampir sama. Penyakit menular yang selalu masuk dalam sepuluh besar penyakit di Puskesmas selama beberapa tahun terakhir adalah Nasofaringitis dan Hipertensi.

Beberapa catatan penting dikaitkan dengan kunjungan rawat jalan di Puskesmas adalah munculnya berbagai penyakit tidak menular yang semakin meningkat. Nasofaringitis, Hipertensi, Dispepsia dan Myalgia merupakan penyakit yang memperlihatkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir termasuk tahun 2017 ini.

Sepuluh besar penyakit berdasarkan kunjungan rawat jalan yang dilaporkan Puskesmas disajikan pada gambar di bawah ini:

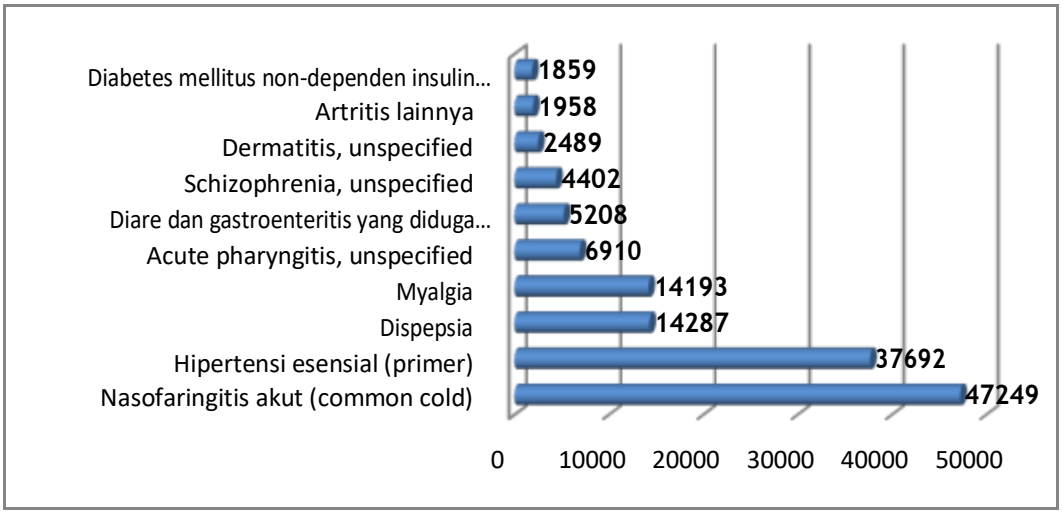

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2018

Gambar 2.22.
Grafik Distribusi 10 Besar Penyakit di Puskesmas se- Kab. Bantul

2.2.2.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 – angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Tabel 2.23.
Angka Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Angka Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin
1	2013	16,48	156.610
2	2014	15,89	153.910
3	2015	16,33	160.200
4	2016	14,55	142.052
5	2017	14,07*	139.670*

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

Dari tahun 2013 angka kemiskinan di Kabupaten Bantul terus mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2015, yang meningkat 0,44% dari 15,89% pada tahun 2014 menjadi 16,33% pada tahun 2015. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah yang menurun (dari 5,04% pada tahun 2014 menjadi 4,97% pada tahun 2015) dan angka pengangguran yang meningkat (dari 2,57% pada tahun 2014 menjadi 2,99% pada tahun 2015). Namun, pada tahun 2016 tingkat kemiskinan kembali menurun dari 16,33% pada tahun 2015 menjadi 14,55% seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian daerah dan menurunnya angka pengangguran; dan di tahun 2017 turun menjadi 14,07%.

Selain itu, pengurangan angka kemiskinan pada tahun 2017 sedikit banyak menunjukkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui pembentukan lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sampai di tingkat pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban penduduk miskin, serta validasi data keluarga miskin. Tambahan pula, program bantuan keuangan khusus ekonomi produktif dari Pemerintah DIY juga memberikan kontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan tersebut.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2017 masih diatas DIY (13,02%) dan masih di urutan ketiga jika dibandingkan kabupaten/kota se-DIY. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul sejalan dengan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dimana wlayah Kabupaten Bantul masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

Tingkat kemiskinan di tentukan oleh besarnya garis kemiskinan sedang penduduk miskin adalah penduduk yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan (jumlah rupiah minimum untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimum makanan dan non makanan). Kenaikan garis kemiskinan didorong oleh peningkatan harga, oleh sebab itu apabila tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli akan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin.

2.2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM dapat digunakan

sebagai ukuran posisi pembangunan manusia dan penentuan kebijakan. Indeks ini memberikan gambaran informasi melalui perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*) dalam mengakses hasil pembangunan.

Titik berat pembangunan daerah adalah upaya untuk memberdayakan penduduk sehingga memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf hidup rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan salah satu indikator yaitu indikator pembangunan manusia dengan melihat perkembangan IPM.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu usia panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi usia panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 2.24.
Perkembangan IPM Kabupaten Bantul dan DIY

No	Tahun	NILAI IPM Kabupaten Bantul	NILAI IPM DIY
1	2013	76,78	76,44
2	2014	77,11	76,81
3	2015	77,99	77,59
4	2016	78,42	78,38
5	2017**	78,67	78,89

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018
**) angka sangat sementara

Dengan adanya perubahan metode penghitungan IPM di tahun 2015, maka untuk tahun 2012-2014 juga dilakukan penghitungan menggunakan metode yang baru. Berdasarkan hasil penghitungan, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 76,13 pada tahun 2012 hingga mencapai 78,42 pada tahun 2016.

Berdasarkan kategori pengelompokkan nilai IPM, IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2016 berada pada kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80). Meskipun capaiannya terus meningkat, tetapi nilai IPM Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir belum mampu meningkatkan level capaiannya menjadi sangat tinggi (IPM ≥ 80). Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun-tahun mendatang mampu memberikan dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk Kabupaten Bantul. Belum mampunya IPM Kabupaten Bantul menembus kategori sangat tinggi bisa disebabkan peningkatan komponen-komponennya yang belum optimal. Lambatnya peningkatan komponen IPM akan terakumulasi pada peningkatan nilai IPM.

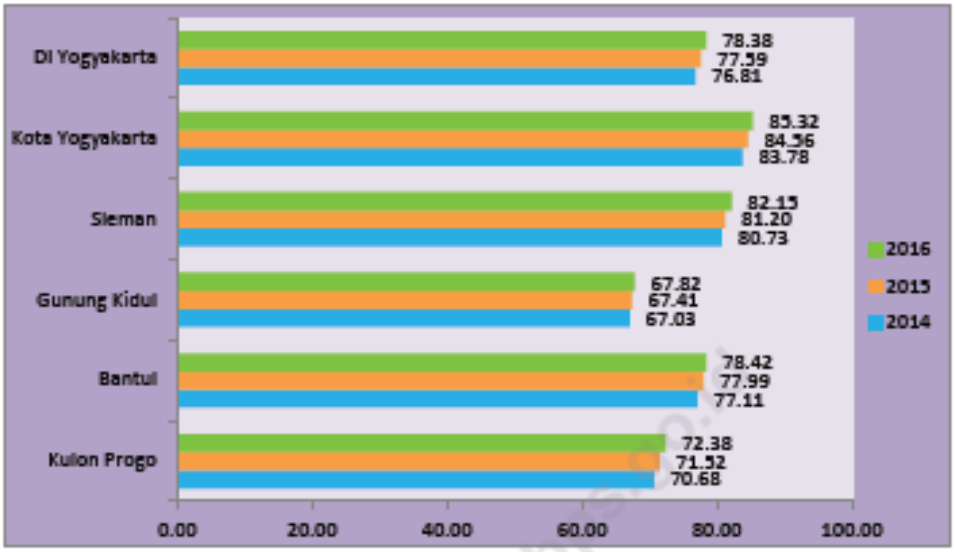

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.23.
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014-2016

Gambar 2.19 menggambarkan perkembangan nilai IPM kabupaten/kota se-Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2014-2016. Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, nilai IPM Kabupaten Bantul menduduki peringkat ketiga (78,42) di

Provinsi D.I Yogyakarta setelah Kota Yogyakarta sebagai peringkat pertama (85,32) disusul Kabupaten Sleman sebagai peringkat kedua (82,15). Peringkat ke empat adalah Kabupaten Kulonprogo (72,38) dan yang terendah di Provinsi D.I Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul (67,82).

Pertumbuhan IPM Kabupaten Bantul tahun 2016 yang sebesar 0,55% ternyata yang terkecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta. Kulon Progo mencapai pertumbuhan tertinggi (1,21%), disusul Sleman (1,17%), Kota Yogyakarta (0,90%) dan Gunung Kidul (0,61%).

2.2.2.5 Tenaga Kerja

2.2.2.5.1. Peluang Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja tersebut. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat. Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri Karena keterbatasan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pencari kerja yang pada umumnya berpendidikan SLTA ke bawah.

Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam

upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan.

2.2.2.5.2. Tingkat Pengangguran

Penanganan pengangguran terbuka *(open unemployment)* merupakan masalah yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Sebagai gambaran tingkat pengangguran di Kabupaten Bantul tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.25 yang menunjukkan bahwa secara proporsional, tingkat pengangguran meningkat dari 2,57% pada Tahun 2014 menjadi 3,12% Tahun 2017.

Tabel 2.25.
Tingkat Pengangguran Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No	Tahun	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah Absolute Pengangguran
1	2013	5,01	26.188
2	2014	2,57	22.516
3	2015	2,99	22.553
4	2016	3,00	20.016
5	2017	3,12	22.178

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2018

2.2.2.6 Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)

Pembangunan bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja tersebut. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, sedangkan rasio penduduk yang

bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Rasio penduduk yang bekerja dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2017 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Pada tahun 2016 rasio penduduk yang bekerja mencapai 98,04. Rasio tersebut berarti bahwa setiap 100 penduduk angkatan kerja ada 98 orang yang terserap dalam lapangan kerja yang tersedia.

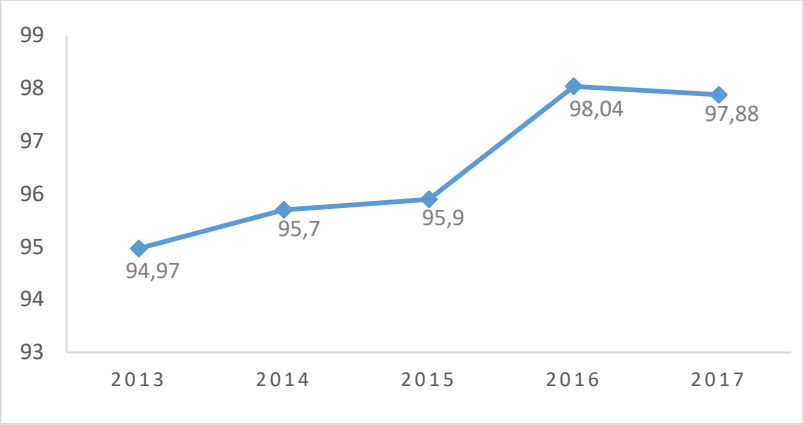

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.24.
Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul (Bantul Dalam Angka)

2.2.2.7 Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.26.
Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2013-2017

No	Tahun	Angka Kriminalitas (%)
1	2013	0,088
2	2014	0,065
3	2015	0,071
4	2016	0,061
5	2017	0,074

Sumber: Polres Kabupaten Bantul, 2018

Tabel 2.27.
Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 th (kasus)	831	562	649	258	683
Jumlah penduduk	938.433	913.407	919.440	928.676	927.181
Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk	8,86	6,15	7,10*	2,77*	0,074%*

Sumber: Polres Kabupaten Bantul, 2018
(*Perhitungan menurut jumlah penduduk versi Disdukcapil)

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas dihitung dari angka absolut kejadian kriminal meliputi:

a. Narkoba;
b. Pembunuhan;
c. Kejahatan seksual;
d. Penganiayaan;
e. Pencurian;
f. Penipuan; dan
g. Pemalsuan uang.

Tabel 2.28.
Tabel Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2017

No.	Jenis Kriminalitas	Jumlah
1	Narkoba	46
2	Pembunuhan	0
3	Kejahatan seksual	29
4	Penganiayaan	135
5	Pencurian	395

No.	Jenis Kriminalitas	Jumlah
6	Penipuan	76
7	Pemalsuan uang	2
Total		683
Jumlah penduduk Bantul		927.181
Angka kriminalitas		0,074%

Sumber: Polres Kabupaten Bantul, 2018 (diolah)

Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama satu tahun terhadap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, angka kriminalitas yang tertangani mencapai 6.15. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 8.86. Tetapi pada tahun 2015, angka kriminalitas yang tertangani kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu 7,10. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan kriminalitas terutama kasus pencurian, perlu peningkatan keamanan dan ketertiban oleh semua pihak dan masyarakat agar lebih waspada dalam bertindak agar tidak tercipta peluang yang dapat memberi kesempatan terjadinya tindakan kriminal khususnya pencurian. Namun pada tahun 2016, angka kriminalitas yang tertangani turun menjadi 2,77. Adapun angka kriminalitas tahun 2017 adalah 0,074.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Fokus Seni budaya mencakup pencapaian pembangunan seni budaya berdasarkan indikator jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian. Jumlah grup kesenian di Kabupaten Bantul tahun 2013 sebanyak 1.032 dan terus meningkat menjadi 2.147 pada tahun 2017, sedangkan jumlah gedung kesenian selama lima tahun masih tetap sebanyak 3 unit.

Kebudayaan merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata di Kabupaten Bantul bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan adanya sejumlah lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian Lembaga budaya yang ada di Kabupaten Bantul. Sayangnya belum diimbangi dengan ketersediaan fasilitas gedung kesenian. Berikut disajikan data kelompok seni dan budaya Kabupaten Bantul.

Tabel 2.29.
Data Kelompok Seni dan Budaya di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bambanglipuro	60
2	Banguntapan	190
3	Bantul	116
4	Dlingo	177
5	Imogiri	109
6	Jetis	165
7	Kasihan	199
8	Kretek	110
9	Pajangan	147
10	Pandak	132
11	Piyungan	146
12	Pleret	59
13	Pundong	85
14	Sanden	83
15	Sedayu	108
16	Sewon	170
17	Srandakan	88
Total		**2.147**

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2018

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga dapat dilihat dari semakin banyak jumlah organisasi kepemudaan yang terus meningkat dari tahun 2013 sebanyak 274 menjadi 280 pada tahun 2017, dan prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul baik tingkat propinsi maupun nasional juga meningkat meskipun jumlah klub dan gedung olahraga yang ada masih terbatas. Sumberdaya manusia olahraga di Kabupaten Bantul tahun 2017 terdiri dari pelatih, wasit, pembina, klub olahraga dan atlet dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.30.
Sumberdaya Manusia Olahraga Kabupaten Bantul

No	SDM Olahraga	Jumlah
1	Pelatih	150
2	Wasit	100
3	Pembina	1
4	Klub Olahraga	45
5	Atlet	805

Sumber: http://www.bpo-diy.or.id/sport/crclib.php

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum mencakup gambaran tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Bantul sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Salah satu indikator tersebut adalah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Materi muatan SPM meliputi:

a. Jenis pelayanan dasar

   Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

   Jenis pelayanan dasar berbeda-beda pada masing-masing jenis SPM (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial).

   Setiap jenis pelayanan dasar memiliki mutu pelayanan dasar yang ditetapkan oleh kementrian teknis.

b. Mutu pelayanan dasar

   Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Terkait.

c. Penerima layanan dasar

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasarnya.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu pada pasal 298 juga menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada enam jenis SPM, yaitu:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Pemerintahan Dalam Negeri); dan
6. Bidang Sosial.

Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala, mencakup:

- Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar.
- Jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

- Perangkat daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar.
- Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun kebutuhan dan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan.

d. Pelaksanan pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM mulai berlaku pada 1 Januari 2019. Dengan diberlakukannya PP tersebut maka PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terkait Kondisi tersebut maka untuk perhitungan pembiayaan dan penentuan target daerah sebelum berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2018 masih menggunakan PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dengan terbitnya PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal semua peraturan perundangan terkait SPM wajib menyesuaikan dengan PP tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penerapan SPM saat ini masih dalam proses penyusunan, sedangkan peraturan dari kementerian

teknis terkait standar teknis SPM yang sudah mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2018 baru satu yang diterbitkan yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

1. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.31.
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2013-2017
di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	0,02	0,02	0,016	0,01	0,01
2	SMP/MTs	0,09	0,13	0,02	0,03	0,02
3	SMA/SMK	0,76	0,20	0,18	0,18	-*

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2018
*: mulai Januari 2017 kewenangannya sudah beralih ke provinsi

Berdasarkan data pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan angka putus sekolah untuk tingkat SD dari tahun 2013 sampai 2017cenderung semakin kecil. Sedang Angka putus sekolah untuk tingkat SMP cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pendampingan orang tua terhadap keberlangsungan pendidikan anak dan kurang optimalnya motivasi guru dalam mengarahkan anak didik.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah dasar. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan

menengah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.32.
Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah gedung sekolah	385	389	391	391	392
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	81.634	81.255	82.212	82.773	83.192
1.3	**Rasio ketersediaan SD/MI**	**47,16**	**47,87**	**47,56**	**47,24**	**47,11**
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah gedung sekolah	111	109	110	110	113
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	39.190	39.455	42.278	39.761	39.622
2.3	**Rasio ketersediaan SMP/MTs**	**28,32**	**27,63**	**26,02**	**27,67**	**28,52**
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1	Jumlah gedung sekolah SMA/MA/SMK	95	96	96	96	96
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	43.125	41.092	40.635	39.718	39.814
3.3	**Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK**	**22,03**	**23,36**	**23,62**	**24,17**	**24,11**

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2018

Berdasarkan standar pendidikan nasional, jumlah rombongan belajar (rombel) untuk setiap SD/MI maksimal 32 siswa per rombel. Rasio ketersediaan sekolah SD/MI menurut standar pendidikan nasional tersebut adalah 13 SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun. Sementara untuk SMP/MTs maksimal 36 siswa per rombel. Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs sesuai standar tersebut adalah 12 SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun. Pada tahun 2017 rasio ketersediaan SD/MI sebesar 47,11 SMP/MTs sebesar 28,52 dan SMA/MA/SMK sebesar 24,11.

3. Sebaran SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bantul

Tabel 2.33. Sebaran Jumlah SD/MI di Kabupaten Bantul Tahun 2013 - 2017

No.	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
		JML SD+MI	JML SD+MI	JML SD+MI	JML SD+MI	JML SD+MI
1	Bantul	25	27	27	27	27
2	Sewon	30	30	30	31	31
3	Kasihan	36	36	36	36	36
4	Sedayu	23	24	24	24	24
5	Pajangan	16	16	16	16	16
6	Pandak	24	24	24	24	24
7	Srandakan	16	16	16	16	16
8	Sanden	16	16	16	16	16
9	Kretek	16	15	15	16	16
10	Bambanglipuro	17	17	18	18	18
11	Pundong	20	20	20	19	19
12	Imogiri	25	25	25	25	25
13	Jetis	22	21	22	22	22
14	Pleret	20	21	21	21	21
15	Piyungan	20	21	21	21	21
16	Banguntapan	32	33	33	33	33
17	Dlingo	27	27	27	27	27
JUMLAH		385	389	391	392	392
Rata-rata		43	43	43	44	44
Standar Deviasi		6,03	6,24	6,17	6,21	6,21

Sumber: Disdikpora Kabupaten Bantul 2018, data diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah SD/MI dan penyebaran di setiap kecamatan relatif tidak banyak mengalami perubahan. Adapun jumlahnya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 7 SD/MI dari tahun 2013 ke tahun 2017.

Tabel 2.34. Sebaran Jumlah SMP/MTs di Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017

No.	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
		SMP + MTs	SMP + MTs	SMP + MTs	SMP + MTs	SMP + MTs
1	Bantul	14	13	13	13	13
2	Sewon	10	10	10	10	10
3	Kasihan	9	8	8	9	10
4	Sedayu	4	4	4	4	4
5	Pajangan	3	3	3	3	3
6	Pandak	6	6	6	6	6
7	Srandakan	3	3	3	3	3
8	Sanden	6	6	6	6	6
9	Kretek	3	3	3	3	3
10	Bambanglipuro	7	7	7	7	7
11	Pundong	4	4	4	4	4
12	Imogiri	6	6	6	6	6
13	Jetis	5	5	5	5	5
14	Pleret	6	6	6	7	7
15	Piyungan	7	7	7	7	7
16	Banguntapan	9	9	10	10	10
17	Dlingo	9	9	9	9	9
JUMLAH		**111**	**109**	**110**	**112**	**113**
Rata-rata		**7**	**6**	**6**	**7**	**7**
Standar Deviasi		**2,96**	**2,76**	**2,83**	**2,87**	**2,94**

Sumber: Disdikpora Kabupaten Bantul 2018, data diolah

Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs jumlah penambahannya lebih kecil yaitu hanya 2 SMP/MTs sepanjang tahun 2013 – 2017. Untuk penyebarannya juga relatif tidak jauh berbeda antar kecamatan yang tergolong daerah perkotaan (Bantul, Sewon, Kasihan, dan Banguntapan) dan daerah perdesaan (13 kecamatan lainnya, kecuali Kecamatan Dlingo yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bantul).

4. Nilai UN SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bantul

Tabel 2.35. Data Perkembangan Nilai UN SD/MI di Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017

NO	Bidang Studi	Lulus Tahun					Rata-rata*	Standar Deviasi*
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	Bahasa Indonesia	8,38	8,4	77,96	81,1	71	76,69	5,17
2	Matematika	7,10	6,96	70,18	61,6	65,7	65,83	4,29
3	I P A	7,82	7,366	78,13	86,6	80,4	81,71	4,38
Jumlah Nilai		23,3	23,02	226,27	229,4	217,1	-	-

Sumber: Disdikpora Kabupaten Bantul 2018, data diolah
Keterangan: * : data Tahun 2015 – 2017

Untuk capaian nilai Ujian Nasional rata-rata tingkat SD/MI terlihat perbedaan yang cukup signifikan antar bidang studi. Fluktuasi nilai Bahasa Indonesia lebih tinggi dibanding Matematika dan IPA, yang cenderung relatif stabil. Secara keseluruhan capaian nilai UN dirasa masih relatif rendah terutama untuk bidang studi Bahasa Indonesia dan Matematika.

Tabel 2.36. Data Perkembangan Nilai UN SMP/MTs di Kabupaten Bantul Tahun 2013 – 2017

NO	Bidang Studi	Lulus Tahun					Rata-rata*	Standar Deviasi*
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	Bahasa Indonesia	7,82	7,77	82,75	80,2	77,3	80,08	2,73
2	Bahasa Inggris	5,61	6,39	60,79	57,5	49,8	56,03	5,64
3	Matematika	6,10	6,17	59,72	56,3	59,9	58,64	2,03
4	I P A	5,93	6,59	62,4	61,9	61,9	62,07	0,29
Jumlah Nilai		25,46	26,92	265,66	255,8	248,8	-	-

Sumber: Disdikpora Kabupaten Bantul 2018, data diolah
Keterangan: * : data Tahun 2015 – 2017

Untuk jenjang SMP/MTs capaian nilai UN rata-rata secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SD/MI. Rata-rata capaian yang cukup baik hanya bidang studi Bahasa Indonesia sedangkan ketiga mata pelajaran yang lain (Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA) capaian nilainya cukup rendah. Selain itu untuk bidang studi Bahasa Inggris nilainya sangat fluktuatif dibandingkan ketiga bidang studi lainnya.

5. Rasio Guru Murid

Rasio guru terhadap murid adalah rata-rata rasio guru kelas tingkat pendidikan dasar atau menengah terhadap jumlah murid pendidikan dasar atau menengah secara keseluruhan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas atau tingkat kecukupan guru per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.37.
Rasio Guru Murid Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

No.	Jenis Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	14.02	14.36	14.78	15.30	15,12
2	SMP/MTs	11.38	12.56	12.44	12.48	12,29
3	SMA/SMK	11.42	11.42	9.00	8.32	-

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2018

6. Biaya Operasional Sekolah Daerah

Tabel 2.38. Data BOS Da dan BOS Nas tingkat SD dan SMP di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No	Tahun	SD		SMP	
		Bos Nas (000)	Bosda (000)	Bos Nas (000)	Bosda (000)
1	2013	580.000	62.500	NA	NA
2	2014	580.000	83.000	710.000	121.000
3	2015	580.000	110.000	580.000	200.000
4	2016	800.000	130.000	1.000.000	220.000
5	2017	800.000	250.000	1.000.000	350.000

Sumber: Disdikpora Kabupaten Bantul 2018, data diolah

Jumlah Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Pusat (BOS Nas) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS Da) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah BOS Nas lebih seragam sedangkan BOS Da lebih variatif. Kenaikan jumlah BOS Da yang demikian mengindikasikan kemampuan keuangan daerah yang penjabaran pemanfaatannya juga cenderung variatif sesuai kebutuhan.

2.3.1.2. Kesehatan

1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar kedekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 Balita (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).

Tabel 2.39.
Rasio Posyandu per 1000 Balita Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah posyandu	1128	1.131	1.137	1.137	1.141
2	Jumlah balita	61.200	60.089	60.565	59.720	58.255
3	Rasio (per 1000 balita)	18.43	18,84	18,77	19,04	19,59

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Dari Tabel 2.39 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 rasio Posyandu per 1000 Balita sebesar 26,91 berarti dalam 1000 Balita terdapat 26 Posyandu. Hal ini dapat diartikan bahwa satu Posyandu melayani 38 Balita.

2. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti rumah sakit umum, rumah sakit khusus (KIA, bedah), Puskesmas, Puskesmas pembantu, sarana Puskesmas keliling, balai pengobatan dan balai pengobatan-rumah bersalin.

Tabel 2.40.
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2017

No.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2013 (Unit)	2014 (Unit)	2015 (Unit)	2016 (Unit)	2017 (Unit)
1	Rumah Sakit Umum	11	10	10	10	11
2	Rumah Sakit Bersalin	0	1	1	0	0
3	Rumah Sakit Khusus (Bedah,Paru dan KIA)	3	3	3	5	5
4	Apotek	102	104	107	123	125
5	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	5	5	5	4	5
6	Toko Obat	1	1	4	4	5
7	Laboratorium	3	4	4	4	3
8	Optik	14	12	11	12	12
9	Posyandu	1.128	1.131	1.137	1.137	1.141
10	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16
11	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11
12	Puskesmas Pembantu	67	67	67	65	65
13	Puskesmas Keliling	27	27	27	27	27
14	Klinik Utama	-	2	2	2	3
15	Klinik Pratama		12	24	NA	55
	- Klinik Pratama Rawat Jalan	-	-	-	38	45
	- Klinik Pratama Rawat Inap	-	-	-	9	10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Secara umum fasilitas kesehatan semakin meningkat, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit rumah sakit sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2017 sebanyak 931.356, berarti minimal harus ada 4 unit rumah sakit. Sampai tahun 2017 jumlah rumah sakit yang tersedia ada 11 unit, hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bantul telah mencukupi.

Jumlah puskesmas sampai tahun 2017 sebanyak 27 unit dan yang melayani rawat inap ada 16 unit. Sejak tanggal 2 Januari 2016, seluruh Puskesmas di Kabupaten Bantul berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Hasil penilaian akreditasi Puskesmas sebanyak 27 Puskesmas telah terakreditasi, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.41.
Penilaian Akreditasi Puskesmas Tahun 2015-2017

No.	Puskesmas	2015	2016	2017	Keterangan
1.	Pajangan		✓		Paripurna
2.	Pleret		✓		Utama
3.	Piyungan		✓		Utama
4.	Banguntapan II		✓		Utama
5.	Srandakan		✓		Madya
6.	Sanden		✓		Madya
7.	Pundong		✓		Madya
8.	Bantul I		✓		Madya
9.	Imogiri I		✓		Madya
10.	Bambanglipuro	✓			Madya
11.	Jetis I		✓		Dasar
12.	Jetis II	✓			Dasar
13.	Kasihan I			✓	Utama
14.	Pandak I			✓	Utama
15.	Pandak II			✓	Utama
16.	Kretek			✓	Utama
17.	Bantul II			✓	Utama
18.	Imogiri II			✓	Madya
19.	Dlingo I			✓	Madya
20.	Dlingo II			✓	Utama
21.	Sewon I			✓	Madya
22.	Sewon II			✓	Utama
23.	Sedayu I			✓	Madya
24.	Sedayu II			✓	Madya
25.	Banguntapan I			✓	Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi
26.	Banguntapan III			✓	Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi
27.	Kasihan II			✓	Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Penetapan kelas dan status akreditasi rumah sakit disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.42.
Kelas Rumah Sakit Tahun 2017

No.	Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
1	RSUD Panembahan Senopati	B	Akreditasi
2	RSPAU dr. Suradji Hardjolukito	B	Akreditasi
3	RSU PKU Muhammadiyah	C	Akreditasi
4	RSU Patmasuri	D	Akreditasi
5	RSU Nur Hidayah	D	Akreditasi
6	RSU Santa Elizabeth	D	Akreditasi
7	RSU Permata Husada	D	-
8	RSU Rahma Husada	D	Akreditasi
9	RSU Rajawali Citra	D	Akreditasi
10	RSU Griya Mahardika	C	-
11	RSK Ibu dan Anak Ummi Kasanah	C	-
12	RSK Bedah Ringroad Selatan	C	Akreditasi
13	RSK Bedah Adelia	D	Akreditasi
14	RSK Paru Respira	C	-
15	RSK Ibu dan Anak Adinda	C	-
16	RSK Ibu dan Anak Kahyangan	C	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Upaya inovatif kesehatan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di Puskesmas disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.43.
Puskesmas dengan Kegiatan Inovasi
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

No.	Puskesmas	Inovasi
1	Srandakan	Posyandu Remaja Srandakan, Satu Jentik Satu Rumah Satu Pemantau Jentik
2	Sanden	Siswa Pemberantas Jentik (Si Petik), Kader Pemantau Batuk
3	Kretek	Siap Kesehatan Bagi Nelayan (Sikabayan)
4	Pundong	Peduli Jiwa Sehat
5	Bambanglipuro	Paguyuban Penderita DM dan Hipertensi, *Zero* Gizi Buruk, Masyarakat Peduli Kesehatan
6	Pandak I	Remaja Peduli Sampah
7	Pandak II	Remaja Peduli Gizi Balita
8	Bantul I	Dusun Sehat Jiwa, *Brain Booster*
9	Bantul II	Warga Sehat Jiwa, Kelompok Curhat Ibu Hamil
10	Jetis I	Kelompok Lansia Peduli Kesehatan, Sapa Sehat

No.	Puskesmas	Inovasi
		Puskesmas (SMS Centre, *Healthy Club* Penderita DM Dan Hipertensi, Paguyuban Kuliner Peduli Sehat
11	Jetis II	Gerakan Peduli Kesehatan Jiwa
12	Imogiri I	Sedekah Sampah, Monitoring ASI *Mobile* Imogiri,
13	Imogiri II	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ)
14	Dlingo I	Kedai Dapur Terapi Untuk Balita Gizi Buruk, Kelas Lansia
15	Dlingo II	Lansia Sehat Mandiri Aktif Produktif, Pendampingan Bumil
16	Pleret	Kawasan Bebas Asap Rokok Di Purworejo dan Bauman (Kabar Purba), Kartu Pemantauan Balita (Tuman Balita)
17	Piyungan	Keluarga Dan Kelompok Peduli Lansia, Dakwah Kreatif Phbs Di Pondok Pesantren, Duta KB, Gerakan Remaja menjadikan Ibu Sehat (Genre Mihat)
18	Banguntapan I	Bantu Penderita Tuberculosis
19	Banguntapan II	Sekolah Peduli Kasus Anemia dan Gizi, Gigi Sehat Untuk Semua, Rencana Untuk Pengamanan Air Minum Masyarakat (Rupamu Manis)
20	Banguntapan III	Gerakan Masyarakat Membasmi Jentik (Gemar Mbatik)
21	Sewon I	Dusun Pemantauan Sarang Nyamuk (PSN)
22	Sewon II	Forum Remaja Sehat (Fresh), Anak-Anak Peduli Demam Berdarah (Adinda)
23	Kasihan I	Dokter Luar Biasa (Dokter Lubis), Dusun Percontohan Germas
24	Kasihan II	Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwa (Gelimas Jiwo), Paguyuban Sehat Bersama Penyehat Tradisional, Gropyokan Omah Lemut (GOL)
25	Pajangan	Sahabat Edukasi Remaja, Pendampingan KDRT
26	Sedayu I	Masyarakat Mandiri Peduli Jentik di Dusun (Mama Petik Dusun), Gerakan Remaja Tangkis TB dan Anemia, Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (Gemas Darling)
27	Sedayu II	Dusun Siaga Beraksi, Karang Taruna Muda dalam Gerakan Masyarakat Sehat (Kamu Germas)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) berbasis komputerisasi telah dilakukan di semua Puskesmas, dilengkapi dengan perangkat keras berupa komputer *server*, komputer *client*, dan jaringan, serta perangkat lunak yang digunakan yaitu sistem *e-Health* ataupun *Integrated Health Information System* (IHIS) di 24 Puskesmas dan Sistem Informasi Puskesmas (Simpus)

di 3 Puskesmas. Beberapa Puskesmas juga mengembangkan Anjungan Pendaftaran Mandiri, sehingga makin mempercepat antri pendaftaran pasien.

Peningkatan SIK di puskesmas dan rumah sakit telah diintegrasikan dengan *Digital Government Services (DGS)* yaitu *Bantul Health Care Digital Government Services*. *Bantul Health Care DGS* merupakan pengaplikasian teknologi informasi dan telekomunikasi di sektor publik untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dalam rangkaian menuju Kabupaten Pintar/*Smart Regency*. Dengan adanya layanan *Bantul Health Care DGS* ini, masyarakat dapat mengakses informasi tentang profil kunjungan puskesmas dan rumah sakit, kondisi 10 besar diagnose penyakit berdasarkan kunjungan rawat jalan dan gawat darurat, kondisi penggunaan tempat tidur di rumah sakit, jumlah rujukan, dan ketersediaan golongan darah.

Pada tahun 2017 pelayanan kesehatan penduduk miskin telah dilakukan integrasi peserta Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai peserta PBI APBD sebanyak 23.500 jiwa. Jumlah peserta Jamkesda pada tahun 2017 sebanyak 85.803 jiwa. Hal ini membantu penanganan masalah kesehatan yaitu biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan kriteria tertentu yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Kriteria tertentu yang mendapat Jamkesda adalah GTT/PTT, kader kesehatan, kaum rohaniwan Islam, relawan dan orang – orang yang berjasa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang sosial dan kemasyarakatan.

Jaminan Kesehatan meliputi beberapa jenis penyelenggaraan jaminan kesehatan dari berbagai sumber biaya. Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 866.981 jiwa (93,09%).

Tabel 2.44.
Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2017

No.	Jenis Jaminan	Jumlah Peserta (jiwa)
1	**Jaminan Kesehatan Nasional**	
1.1	**Penerima Bantuan Iur (PBI)**	
	a. APBN	497.485
	b. PBI APBD	23.500
1.2	**Non PBI**	77.432
	a. PNS	59.807
	b. TNI/Polri	17.728
	c. Pejabat Negara	161
	d. Pegawai Pemerintah Non PNS	5.064
	e. BUMN BUMD	547

No.	Jenis Jaminan	Jumlah Peserta (jiwa)
	f. Swasta Lainnya	63.386
	g. Bukan pegawai	33.461
	h.Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	69.989
2	Jamkesta	
	a. Jamkesta Maskin	4.323
	b. Jamkesus (Khusus Difabel)	5.726
3	Jamkesda	85.803
	Jumlah Penduduk mempunyai Jaminan Kesehatan	**866.980**
	Jumlah Penduduk Bantul	**931.356**
Cakupan Jaminan Kesehatan		**93,09%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

3. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan Sarpras/fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun kondisi ini perlu diimbangi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten dibidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Tabel 2.45.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah
Tahun 2013-2017

No.	Jenis Tenaga	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dokter Spesialis	38	39	46	61	65
2	Dokter Umum	123	106	103	127	154
3	Dokter Gigi Spesialis	3	9	8	6	7
4	Dokter Gigi	56	48	54	42	41
5	Perawat	434	563	562	670	703
6	Perawat Gigi	85	78	78	87	93
7	Bidan	330	310	327	306	317
8	Kefarmasian	79	68	61	85	92
9	Kesehatan Masyarakat	61	59	52	100	113

No.	Jenis Tenaga	2013	2014	2015	2016	2017
10	Sanitarian	57	52	53	58	64
11	Gizi	68	64	62	63	69
12	Keterapian Fisik	30	23	25	30	36
13	Teknis Medis	91	93	90	152	149
14	Tenaga Non Kesehatan	524	567	563	641	697

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2.46.
Jumlah Dokter per 1000 Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Dokter Umum	123	106	103	127	154
2	Jumlah Dokter Spesialis	38	39	46	61	65
3	Jumlah Penduduk	938.433	968.632	919.440	928.676	931.356
4	Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk)	0,13	0,11	0,11	0,14	0,17
5	Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk)	0,040	0,040	0,050	0,065	0,070

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Pada Tahun 2017 rasio dokter per jumlah penduduk mencapai 0,17 per 1000 penduduk atau satu dokter melayani 6.250 penduduk. Hal ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Bantul. Meskipun terdapat peningkatan, namun hal ini masih menunjukkan kurangnya dokter di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan target 1 dokter melayani 4000 penduduk.

4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bertujuan untuk mengendalikan penularan penyakit dan menurunkan angka kesakitan karena penyakit menular.

a. Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Angka kesakitan DBD pada tahun 2017 sebesar 57,34 per 100.000 penduduk (540 kasus) lebih rendah dibanding tahun 2016 yaitu 262,95 per 100.000 penduduk (2442 kasus). Pada tahun 2017 terdapat 2 kematian penderita DBD (angka kematian DBD/CFR DBD 0,38 %), menurun dibandingkan tahun 2016 terdapat 5 kematian.

Tabel 2.47.
Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No	Tahun	Angka Kesakitan (IR)	Angka Kematian (CFR)
1	2013	1,28	0,67
2	2014	0,64	0,16
3	2015	1,48	0,9
4	2016	2,51	0,16
5	2017	0,57	0,38

Sumber: Dinkes Kabupaten Bantul, 2018

Berbagai upaya penanggulangan DBD yang telah dilakukan meliputi: pemberantasan sarang nyamuk yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dilakukan rutin, *fogging focus*, larvasidasi, penyuluhan kesehatan masyarakat, jumantik anak sekolah dan pelatihan kader DBD desa serta kemitraan swasta.

b. Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis (TB)

Angka kesembuhan TB tahun 2017 sebesar 72,8% meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 60,8%. Data ini merupakan hasil dari kesembuhan pasien yang diobati pada tahun 2016. Sedangkan penemuan kasus BTA positif pada tahun 2017 adalah sebanyak 273 kasus. Permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian TB antara lain adalah masih ada stigma/pengucilan pada penderita TB oleh masyarakat yang berakibat penderita enggan atau malu untuk berobat, adanya penderita yang *lost follow up* karena berpindah tempat tanpa bisa terlacak dan terjadinya resistensi obat pada penderita TB.

Berbagai upaya penanggulangan TB dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yaitu mengajak layanan kesehatan swasta untuk meningkatkan perannya, kampanye TB melalui media TV dan radio, bekerjasama dengan LSM PD Aisyah Bantul dan berbagai upaya kesehatan personal melalui *active*

selective case finding, pengembangan Poli Batuk dan Poli TB MDR di puskesmas untuk memisahkan pasien batuk dengan pasien penyakit lain, mendistribusikan alat Tes Cepat Molekuler ke RSPS sebagai RS rujukan TB Kebal Obat (TB-*Multi Drug Resisten*/MDR), melakukan kontrol kualitas pembacaan *slide* dahak melalui uji silang pembacaan di RS Respira.

c. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV-AIDS

Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2017 sebesar 0,09%, terjadi peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 0,083%. Kasus HIV-AIDS banyak ditemukan pada kelompok umur 20-59 tahun. Akselerasi pengendalian HIV-AIDS dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok beresiko rendah (Bumil, penderita TB) dan pada kelompok potensial (umur 15-24 tahun), dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus, peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV pada kelompok potensial, serta dilakukan pengendalian Pencegahan Penularan Ibu Anak (PPIA) dengan cara Konseling dan Tes HIV pada semua ibu hamil.

d. Pemberian Imunisasi

Imunisasi dasar lengkap pada bayi merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit menular yang dapat mengakibatkan kematian bayi. Kabupaten Bantul pada tahun 2017 telah mencapai status *Universal Child Immunization* 100% yaitu seluruh desa di wilayah Kabupaten Bantul telah memenuhi standar imunisasi pada bayi. Imunisasi lanjutan dalam Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dilakukan pada anak usia sekolah dasar kelas 1, 2 dan 3. Kabupaten Bantul telah memenuhi standar nasional cakupan BIAS yaitu Tahap I dengan Antigen Measles and Rubella (MR) sebesar 98,64% serta Tahap II dengan Antigen Difteri dan Tetanus (DT) sebesar 97,83% dan Td (Antigen DT dengan setengah dosis untuk antigen Difteri) sebesar 98,11%. Seluruh tahapan ini telah melampaui target nasional yaitu 95%.

Pada tahun ini, Kabupaten Bantul juga telah melaksanakan *crash programme* nasional pemberian imunisasi *Measles and Rubella* (MR) dengan capaian 98,25% melampaui target nasional yaitu 95%.

Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular ditujukan pada penyakit yang timbul akibat pola atau gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, kurang aktifitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur,

kurang istirahat dan stress. Pola hidup tersebut dapat memicu timbulnya penyakit-penyakit degeneratif yaitu *Hypertensi*, Diabetes Mellitus (DM), Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD), *Stroke*, Gagal Ginjal dan Keganasan (Kanker). Angka kejadian penyakit tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Di sisi lain, berbagai kondisi sosial memicu peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa baik gangguan jiwa berat maupun gangguan mental emosional. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa berat dengan ditemukannya penderita baru sebanyak 427 orang, kasus lama 5.172 kasus. Untuk gangguan mental emosional pada tahun 2017 ditemukan kasus baru sebanyak 701, kasus lama 554. Untuk kejadian bunuh diri di tahun 2017 ada 4 kasus.

Dalam rangka mengendalikan peningkatan jumlah penderita penyakit tidak menular dan pengendalian peningkatan kasus masalah kesehatan jiwa (Keswa) tersebut, telah dilakukan upaya yang meliputi sosialisasi program PTM dan Keswa, *update knowledge* PTM dan masalah Keswa, Validasi data PTM dan Keswa, pelatihan kader posbindu PTM, pelatihan kader Keswa, Seminar PTM dan *Workshop Community Mental Health Nurshing* (CMHN). Kegiatan tersebut bertujuan untuk peningkatan kapasitas petugas kesehatan, kader Posbindu PTM dan kader kesehatan jiwa dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan masalah kesehatan jiwa di masyarakat.

5. Sanitasi

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

6. Akses Jamban

Akses jamban tahun 2017 sebesar 100% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 97,0%, hal ini berarti semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses jamban.

7. Pengawasan Kualitas Air

Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi pengawasan kualitas air baik secara internal maupun eksternal serta pembinaan DAM dan pengelola air minum pedesaan Yogyakarta. Pengawasan dilakukan terhadap air bersih maupun air minum. Pengawasan dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan Depot Air Minum (DAM), Pengelola Air Minum Pedesaan (Pamdes), dan sumber air bersih masyarakat (sumur gali, mata air, dan lain-lain). Kegiatan pengawasan eksternal dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air bagi masyarakat dan dunia usaha. Pengawasan kualitas air yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui laboratorium pengawasan kualitas air. Pengawasan kualitas mencakup sampel sejumlah 2.573 sampel, yang terdiri dari sampel air minum yang bersumber dari PDAM adalah lima sampel tiap kecamatan dan jumlah sampel air bersih sebanyak lima sampel tiap desa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan air bersih dan air minum yang berkualitas.

Cakupan air bersih pada tahun 2017 sebesar 100%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 98,0%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas dan kuantitas. Pada beberapa rumah tangga di kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan yang mendasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan seperti sumberdaya air, jalan, air minum, sanitasi lingkungan (air limbah, drainase, dan persampahan), dan penataan ruang (informasi penataan tata ruang, ruang terbuka hijau) yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pelayanan dasar yang disediakan oleh pemerintah di bidang pekerjaan umum diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014

tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pelayananan dasar yang diutamakan adalah air minum, kawasan kumuh, dan sanitasi. Prioritas tersebut untuk mewujudkan *Universal Access* 2019 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, 100% layanan sanitasi).

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi.

Total panjang jaringan jalan kabupaten (beraspal) dalam kondisi mantap menjadi 452,10 km (74,18%) dari 609,44 km, naik dari tahun sebelumnya sepanjang 341,22 km pada tahun 2016.

Dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 disebutkan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai 21 ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi dengan panjang ruas 162.150 km. Kondisi jalan provinsi di Kabupaten Bantul hampir seluruhnya dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang), sehingga sangat mendukung peningkatan perekonomian dan akses hubungan antar wilayah. Adapun jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul antara lain Jalan Palbapang-Samas, Jalan Sedayu-Pandak, Jalur Jalan Pantai Selatan, dan lainnya.

Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas kewilayahan maupun sektoral. Fungsi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) membuka potensi daerah di selatan DIY. Pembangunan JJLS pada tahun 2017 terdapat 66,02 km segmen jalan dari total JJLS sepanjang 121,69 km yang belum terhubung yaitu Segmen Ngremang-Srandakan 3-Pandansimo (4,48 km), Segmen Samas-Parangtritis (5 km), dan Segmen Parangtritis-Girijati (5 km).

Fungsi Jogjakarta *Outer Ringroad* (JORR) direncanakan sebagai jaringan lintas barang terutama kendaraan dengan tonase besar. Rute JORR sepanjang

110 km dan yang masuk wilayah Kabupaten Bantul sepanjang 47,48 km yaitu ruas Sentolo-Imogiri, Imogiri-Piyungan dan Piyungan Kalasan.

2. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI (DI Permukaan:100 dan DI Air Tanah: 18) dengan luas 9.368 Ha.

Target kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2017 (DI kewenangan Kabupaten Bantul) adalah 80% (188.071,20m) dan terealisasi 80,20% (188.541,38 m) atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,20%. Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.48.
Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik
Tahun 2013-2017

Tahun	Saluran Irigasi (Primer dan Sekunder) Dalam Konsisi baik			
	Target (m)	%	Realisai (m)	%
2013	353.741,99	86,00	365.460,06	88,39
2014	181.523,40	87,00	184.632,25	88,49
2015	183.521,40	88,00	186.754,37	89,55
2016	190.422,09	81,00	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20

Sumber: DPUP&KP Kabupaten Bantul, 2018

Luas sawah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik sebesar 80% (6.907,20ha) dan terealisasi sebesar 81,16% (7.007,35 ha) atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 1,16%. Data target dan capaian DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terlayani air irigasi selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.49.
Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi
Tahun 2013-2017

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Rencana (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2013	5.794,32	84	6.002,64	87,02
2014	7.425,24	86	7.552,16	87,47
2015	7.511,58	87	7.565,97	87,63
2016	6.820,86	79	7.004	81,12
2017	6.907,20	80	7.007,35	81,16

Sumber: DPUP&KP Kabupaten Bantul, 2018

3. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Penyediaan dan Pengelolaan Air minum dilaksanakan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam rangka penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di IKK

Pajangan. Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan PDAM. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur gali, mencapai lebih dari 77,57% dan hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 22,43%). Upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di daerah yang rawan air bersih. Instalasi SIPAS yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara.

Cakupan air bersih pada tahun 2017 menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebesar 100%,mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 98,0%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas dan kuantitas. Pada beberapa rumah tangga di kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Salah satu prioritas pemerintah yang termuat didalam RPJMN 2015-2019 yaitu *Universal Access* pada tahun 2019 dimana layanan sanitasi 100%, bebas kawasan kumuh, dan layanan air minum 100%. Dalam rangka percepatan pencapaian target tersebut perlu dilakukan berbagai inovasi program/kegiatan dengan berbagai sumber pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta.

Akses jamban tahun 2017 menurut data Dinas Kesehatan sebesar 100% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 97,0%, hal ini berarti semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses jamban.

5. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Jumlah TPS di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dari jumlah tersebut baru tersebar di 16 kecamatan. Untuk Kecamatan Dlingo belum terjangkau oleh TPS. Pengolahan sampah di Kecamatan tersebut masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Tabel 2.50.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah TPS (unit)	135	150	165	231	245
Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	142	158	173	1.386	1.470
Jumlah Penduduk (Jiwa)	938.433	968.632	919.440	968.632	927.181
Rasio Daya Tampung TPS per 1000 penduduk (m3/1000 penduduk)	0.151	0.163	0.188	1.431	1.585

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2018

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah TPS sebesar 245 unit dengan rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk 1.585 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yang sebesar 231 unit dengan rasio 1.431.

6. Rasio Tempat Pemakaman Umum

Pesatnya pembangunan perumahan tidak sebanding dengan ketersediaan pemakaman umum, hal ini memicu terjadinya permasalahan konflik sosial antara warga perumahan dengan masyarakat sekitar. Penyediaan areal pemakaman umum di Kecamatan Imogiri salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pemakaman khususnya bagi masyarakat yang tinggal di perumahan.

7. Drainase dalam Kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan,

menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, dimana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik.

Tabel 2.51.
Data Penanganan Banjir Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Target Penanganan Banjir		Realisasi Penanganan Banjir		Potensi Banjir Yang Belum Tertangani
		HA	(%)	HA	(%)	HA
1	2015	120.81	13.52	120.8	13.52	806.5
2	2016	123.13	13.78	181.37	20.29	745.93
3	2017	183,71	20,56	222,49	24,90	NA

Sumber: DPUP&KP Kabupaten Bantul, 2018

Potensi banjir semakin menurun dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa kondisi drainase semakin baik dari tahun ke tahun. Pontensi banjir tahun 2015 seluas 806,5 ha dapat ditangani 60,57 ha sehingga luas yang masih perlu ditangani seluas 745,93 ha terutama di enam kecamatan (Sanden, Srandakan, Kretek, Pundong, Imogiri, dan Jetis).

8. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.52.
Produk Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang
1.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Kabupaten Bantul tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perumahan
2.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
3.	Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
4.	Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan

No.	Produk Perencanaan Tata Ruang
	Sewon
5.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan
6.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan
7.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul
8.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengaturan Bangunan Bukan Gedung
9.	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), 17 Kecamatan
10.	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Paseban Bantul
11.	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Gabusan-Manding-Tembi (GMT)
12.	Dokumen Rencana Tindak Kawasan GMT
13.	Studi Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
14.	DED Kawasan Paseban Bantul
15.	DED Kawasan Pantai Kuwaru
16.	DED Kawasan Kotagede
17.	Masterplan Bantul Kota Mandiri
18.	RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018

Meskipun dokumen RDTR seluruh kecamatan telah disusun, namun sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan RDTR dan peraturan zonasi, RDTR harus disertai dengan peraturan zonasi dan peta skala 1:5000, sedangkan RDTR yang telah disusun belum dilengkapi peraturan zonasi dan peta yang dibuat masih skala 1:25.000 sehingga perlu dilakukan review RDTR. Hal ini dikarenakan hampir seluruh dokumen RDTR disusun sebelum terbitnya Permen PU tersebut.

Tabel 2.53.
Rencana Tata Ruang yang Disusun Tahun 2011-2017

Tahun	Rencana tata ruang yang disusun
2011	RTRW ditetapkan dengan Perda 4/2011
2012	RDTR Kec. Dlingo dan Sanden (belum dilengkapi PZ)
2013	RDTR dan PZ Kec. Kasihan, Sewon, Banguntapan, dan Bantul
2014	RDTR dan PZ Kec. Pajangan, Imogiri, Pleret, Pandak, dan Sedayu
2015	RDTR dan PZ Kec. Piyungan, dan Pantai Selatan (Sanden, Kretek, Srandakan)
2016	RDTR dan PZ Kec. Pundong dan Jetis
2017	RDTR dan PZ Kec. Bambanglipuro, Dlingo
2017	KLHS Kec. Bambanglipuro, Dlingo
2017	Raperda RDTR dan PZ Piyungan, Pansela, Jetis, Pundong
2017	Desain Citra Kota Bantul, Jalan Jenderal Sudirman

Sumber: Bappeda dan Dipertaru Kabupaten Bantul, 2018

9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dalam rangka menyerasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang, membentuk BKPRD Kab/Kota. Kabupaten Bantul telah membentuk BKPRD dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bantul nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Peraturan Ruang Daerah, Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penataan Ruang Daerah. BKPRD Kabupaten Bantul rutin melakukan koordinasi dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang.

Tahun 2017 telah menghasilkan Kajian Platform Layanan Dinas, Kajian Kematangan Masyarakat, Aplikasi *Broadcast*, dan Pengawasan yang tertangani sebanyak 545 bidang.

10. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terdiri dari RTH publik (taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku/mata air, pemakaman) dan RTH privat (pekarangan rumah tinggal; halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; serta taman atap bangunan).

Pada tahun 2017, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul tercatat sebesar 45,10. Indeks ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bantul masih berada dalam status “waspada”. Hal ini terjadi karena adanya penurunan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. Rendahnya kualitas air di Kabupaten Bantul terutama disebabkan oleh semakin tingginya konsentrasi *Fecal Coli* dan Total *Coli* di 5 sungai yang mengalir melalui wilayah Kabupaten Bantul (telah melampaui baku mutu). Sedangkan untuk kualitas udara walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi belum melampaui baku mutu. Hal ini antara lain akibat penambahan tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau

yang sangat minim belum mampu mengimbangi penambahan sumber emisi gas pencemar udara (industri, transportasi dan kebutuhan energi lainnya) sehingga kualitas udara juga semakin menurun.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan luasan RTH yang secara ekologis dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan untuk memberikan fungsi sebagai ruang publik, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (*landmark*) kota. Pemeliharaan RTH dilakukan dengan melakukan pemupukan, penambahan tanaman dan perbaikan pada taman-taman yang sudah ada di wilayah Kabupaten Bantul. Pembuatan Taman Hijau dilakukan dengan pembangunan Taman Kota di Jl. Parangtritis (depan PLN dan samping SD Timbulharjo), Jl. Wakhid Hasyim, Simpang Lima Bejen, serta penataan ulang Taman Kantor DLH Kabupaten Bantul.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Instalasi SIPAS yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air bersih disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.54.
Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Bantul

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih	857.728	900.828	882.663	910.103	927.181
2	Jumlah penduduk	938.433	968.632	919.44	928.676	927.181
3	Persentase penduduk berakses air bersih (%)	91,4	93	96	98	100

Sumber: Dinkes Kabupaten Bantul, 2018

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Penyediaan listrik di Kabupaten Bantul dilakukan oleh PLN Kabupaten Bantul. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2012 yaitu mencapai 14,34% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah pelanggan listrik tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2015, peningkatan pelanggan listrik PLN meningkat cukup drastis pada angka 279.298 pelanggan. Tahun 2016 meningkat menjadi 294.613 pelanggan. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bantul tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar berikut:

Sumber: PLN Kabupaten Bantul, 2017

Gambar 2.25.
Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Bantul tahun 2012-2016

Berdasarkan data berbasis dusun, semua dusun (933 dusun) telah terlayani listrik. Namun, belum seluruh rumah dalam satu dusun terjangkau oleh pelayanan listrik, hal ini disebabkan oleh letak geografis rumah tersebut jauh dari jaringan listrik. Dengan demikian, diperlukan alternatif sumber energi listrik selain listrik PLN untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh PLN.

3. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan pada

tahun 2014 dengan SK Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi seluas 79,58 Ha.

Tabel 2.55.
Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2018

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administratif	
			Kelurahan/Desa	Kecamatan/Distrik
1	Gandekan	1,27	Bantul	Bantul
2	Deresan	2,76	Ringinharjo	Bantul
3	Mandingan	2,31	Ringinharjo	Bantul
4	Soropaten	0,71	Ringinharjo	Bantul
5	Karangmojo	2,96	Trirenggo	Bantul
6	Kweden	0,91	Trirenggo	Bantul
7	Jaranan	0,34	Banguntapan	Banguntapan
8	Jomblang	3,60	Banguntapan	Banguntapan
9	Blado	15,77	Potorono	Banguntapan
10	Semoyan	1,91	Singosaren	Banguntapan
11	Dladan	2,70	Tamanan	Banguntapan
12	Ngewotan	16,97	Ngestiharjo	Kasihan
13	Gonjen	3,92	Tamantirto	Kasihan
14	Kalipakis	1,11	Tirtonirmolo	Kasihan
15	Salakan	2,45	Bangunharjo	Sewon
16	Glugo	4,37	Panggungharjo	Sewon
17	Cepit	11,71	Pendowoharjo	Sewon
18	Pacetan	2,18	Pendowoharjo	Sewon
19	Pendowo	1,66	Pendowoharjo	Sewon
	Total	79,58		

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018

Penanganan kawasan kumuh dengan gerakan nasional 100-0-100 diantaranya tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%.

Tahun 2017 dilakukan penataan kawasan kumuh di Pacetan, Pendowoharjo, Sewon untuk mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bantul.

4. Rumah Layak Huni

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemerintah berperan dalam menyediakan dan

memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat untuk dapat menempati rumah layak huni. Data rumah tidak layak huni yang dihimpun oleh Forum Pendataan Sejuta Rumah pada tahun 2017 untuk wilayah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 2.56.
Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah RTLH	
			Versi BDT (Unit)	Verifikasi Pemda (Unit)
1	Srandakan	9.310	46	222
2	Sanden	10.315	113	233
3	Kretek	9.697	26	81
4	Pundong	11.007	65	146
5	Bambanglipuro	12.842	73	122
6	Pandak	15.859	144	230
7	Pajangan	9.918	369	578
8	Bantul	18.284	84	83
9	Jetis	16.964	81	277
10	Imogiri	19.376	305	1.484
11	Dlingo	12.200	117	717
12	Banguntapan	31.470	142	213
13	Pleret	14.366	156	254
14	Piyungan	15.838	218	354
15	Sewon	28.818	134	151
16	Kasihan	28.580	202	261
17	Sedayu	14.807	88	297

Sumber: Forum Pendataan Sejuta Rumah DIY, 2018

Pada tahun 2017, rumah tidak layak huni dapat tertangani 557 unit dari dana BKK Propinsi DIY.

5. Fasilitasi Rumah Bagi MBR

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menempuh berbagai upaya antara lain pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan.

Rusunawa telah dibangun di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) di wilayah Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Banguntapan. Pada tahun 2009 telah dibangun Rusunawa Panggungharjo sebanyak 2 Twin Blok (TB) atau 198 unit. Pada tahun 2011 di Dusun Tambak, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, sebanyak satu TB atau 98 unit. Pada tahun 2012 di Dusun Pringgolayan, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan sebanyak dua TB atau 198 unit. Pada tahun 2016 di Tamanan Banguntapan dibangun Rusunawa pekerja sebanyak dua TB. Tahun 2017 Operasional 4 unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana pendukung Rusunawa Banguntapan yaitu pembangunan pos satpam dan *landscape*.

Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi MBR.

Tabel 2.57. Pembangunan Rusunawa di KPY

No.	Lokasi Rusunawa	Tahun		Kapasitas	
		Pembangunan	Operasional	Twin blok	Unit
1.	Panggungharjo, Sewon	2008	2010	2	198
2.	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	2011	2012	1	96
3.	Pringgolayan, Banguntapan	2012	2013	2	198
4.	Tamanan, Banguntapan (Rusunawa Pekerja)	2015 (Pematangan lahan)	2017	2	190 (66 pekerja keluarga, 104 pekerja lajang)

Sumber: DPUP&KP Kabupaten Bantul, 2018

2.3.1.5. Kesatuan Bangsa dan Poltik Dalam Negeri

1. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP

Kegiatan pembinaan terhadap LSM/Ormas/Orsos di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pendaftaran, pendataan dan verifikasi organisasi masyarakat, organisasi sosial dan LSM sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 dengan hasil kegiatan terlayaninya permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Selain itu, ada pula kegiatan rutin yang menjadi tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik yang dilaksanakan setiap tahun yaitu forum komunikasi Ormas, Orsos, dan LSM dalam rangka meningkatkan pemahaman Ormas, Orsos, dan LSM berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

Pendataan Ormas, Orsos, dan LSM yang yang terdaftar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.58.
Jumlah Ormas/Orsos/LSM
Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Jumlah Ormas/LSM
1	2013	128
2	2014	139
3	2015	152
4	2016	165
5	2017	169

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Bantul, 2018

2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Bantul juga dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di Kabupaten Bantul. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan politik daerah antara lain berupa verifikasi bantuan partai politik, pendampingan pengurus partai politik, sosialisasi undang-undang pemilu dan politik bagi pemilih pemula dan perempuan, forum komunikasi generasi muda, serta sosialisasi pemilih pemula melalui pemilihan OSIS.

Tabel 2.59.
Kegiatan Sosialisasi Pemilos

No.	Kegiatan	Sasaran				Narasumber
		2014	2015	2016	2017	
1	Sosialisasi	91 Sekolah	93 Sekolah	93 sekolah	93 sekolah	1. Komisioner KPU 2. Kakan Kesbangpol
2	TOT	78 Sekolah	65 Sekolah	70 sekolah	67 sekolah	1. KPU 2. Dikmenof 3. Pemda

No.	Kegiatan	Sasaran				Narasumber
		2014	2015	2016	2017	
3	Bimtek	78 Sekolah	65 Sekolah	70 Sekolah	-	1. KPU 2. Pemda
4	Pelaksanaan Pemilos	75 Sekolah	65 Sekolah	70 Sekolah	67 Sekolah	Tim: 1. Kemenag, 2. Dikmenof, 3. Kesbangpol, 4. KPU
5	Monitoring Evaluasi	75 Sekolah	65 Sekolah	70 sekolah	67 sekolah	Tim: 1. Kemenag, 2. Dikmenof, 3. Kesbangpol, 4. KPU

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Bantul, 2018

3. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bantul memiliki tugas pokok antara lain meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap gangguan keamanan seperti demonstrasi, perselisihan kegiatan usaha, peredaran minuman keras, PSK, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.60.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah polisi pamong praja	65	64	64	62	59
2	Jumlah penduduk	938.433	913.407	919.440	928.676	927.181
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,693	0,701	0,696	0,668	0,636

Sumber: Satuan Pol PP Kabupaten Bantul, 2018

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk selama lima tahun terakhir cenderung terus mengalami penurunan karena berkurangnya petugas polisi pamong praja dan jumlah penduduk yang semakin meningkat.

4. Rasio Jumlah Linmas dan Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Rasio jumlah petugas linmas dan jumlah RT di Kabupaten Bantul pada tahun 2017, tercapai 95.3 %, yaitu jumlah Linmas 5001 dan jumlah RT 5775.

5. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dapat dinyatakan dengan perbandingan jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terhadap jumlah luas potensi kebakaran. Pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahun 2017 jumlah luas WMK sebesar 176,62 Ha masih sama dengan tahun 2016 sebesar 176,62 Ha. Sementara jumlah luas potensi kebakaran tercatat sebesar 506,85 Ha, dan masih sama dari tahun sebelumnya yaitu 508,85 Ha.

Sementara itu, cakupan pelayanan kebakaran sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter yang dimiliki pada tahun 2017 adalah delapan unit. Mengingat luasnya WMK dan potensi terjadinya musibah kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul ini, maka telah dilakukan upaya menambah tiga unit pos pemadam di Kecamatan Kasihan, Banguntapan dan Imogiri.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan salah satu indikator SPM dalam penanggulangan bencana kebakaran. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

Tabel 2.61.
Tingkat Waktu Tanggap Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap.	24	40	58	39	93
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	29	40	62	39	93

3	Jumlah total terjadi kebakaran	53	75	99	48	111
4	Jumlah kebakaran di luar jangkauan WMK	24	35	27	9	18
5	Tingkat waktu tanggap	82,7%	100%	93,5%	100%	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2018

Secara nasional, tingkat waktu tanggap ditargetkan sebesar 75% dengan batas waktu pencapaian tahun 2015. Tingkat waktu tanggap di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sudah melebihi target SPM yang ditetapkan nasional. Namun demikian, masih terdapat kasus kebakaran yang terjadi diluar jangkauan WMK sehingga belum dapat tertangani dalam waktu tanggap. Hal ini sangat terkait dengan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kebakaran yang belum memadai sehingga cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bantul belum dapat optimal.

2.3.1.6. Sosial

1. Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)

Kabupaten Bantul memiliki beberapa sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi. Tabel di bawah ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah panti di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2013 terjadi penambahan jumlah panti asuhan sebanyak tujuh panti. Jumlah ini tetap sampai pada tahun 2014. Sementara pada tahun 2015 jumlah panti asuhan bertambah tiga panti. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62.
Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah
2	2013	24
3	2014	24
4	2015	27
5	2016	27
6	2017	26

Sumber: Dinsos Kabupaten Bantu, 2018

2. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Tabel 2.63.
Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No.	Jenis PMKS	2013	2014	2015	2016	2017
1	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	40	72	35	43	29
2	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	11	5	0	0	14
3	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0
4	Korban Trafficking	0	2	0	0	0
5	Fakir Miskin	112.300	112.300	112.300	112.300	98.604
6	Anak Dengan Kedisabilitasan	1.191	996	947	821	625
7	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	65	52	55	70	54
8	Pemulung	19	23	99	145	153
Jumlah		**138.565**	**113.655**	**113.450**	**113.357**	**99.425**

Sumber: Dinsos Kabupaten Bantul, 2018

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Ketenagakerjaan

1. Angka Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bantul cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 72,21%.

Tabel 2.64.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah
1	2013	70,73
2	2014	68,91
3	2015	70,09
4	2016	69,27
5	2017	72,21*

Sumber: Disnakertrans dan dan BPS (*), 2018

2. Pengangguran

Angka pengguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat. Pada tahun 2015, angka pengangguran di Kabupaten Bantul mencapai angka 2,99% dan turun menjadi 1,95 pada tahun 2016. Pada Tahun 2017, naik menjadi 3,12%.

Tabel 2.65.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No.	Tahun	TPT
1	2013	3,36
2	2014	2,57
3	2015	2,99
4	2016	1,95
5	2017	3,12*

Sumber: Disnakertrans dan BPS (*), 2018

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan merupakan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan merupakan indikator SPM bidang ketenagakerjaan pelayanan penempatan tenaga kerja. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Secara nasional, batas waktu pencapaian indikator ini adalah tahun 2016 dengan target sebesar 70%. Sementara target yang ditetapkan Kabupaten Bantul pada akhir periode RPJMD

(tahun 2015) sebesar 75%. Capaian besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.66.
Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Pembilang: Pencari kerja yang ditempatkan	2.019	2.316	2.531	2.107	2.650
Penyebut: Pencari kerja yang terdaftar	6.803	4.169	3.291	2.797	4.188
Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	29,68%	55,55%	77%	75,3%	63,27%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2018

Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2013 hingga 2017 cenderung berfluktuatif. Hal ini karena jumlah pencari kerja yang terdaftar juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, besaran pencari kerja yang ditempatkan baru mencapai 29,68% sehingga terdapat *gap expectation* yang cukup besar terhadap target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD. Oleh karena itu, pada tahun 2015 dilakukan intervensi besar pada program peningkatan kesempatan kerja, sehingga pencari kerja yang ditempatkan mencapai 77%, turun sebesar 75,3% di tahun 2016 dan 63,27% di tahun 2017.

4. Perlindungan Tenaga Kerja

Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja dilakukan melalui program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta program peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (kepesertaan BPJS ketenagakerjaan) dan besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial. Indikator besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek tersebut merupakan indikator SPM bidang ketenagakerjaan jenis layanan dasar pelayanan kepesertaan jamsostek. Capaian besaran

pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul ditampilkan pada Tabel 2.67.

Secara nasional, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/kepesertaan BPJS ketenagakerjaan memiliki batas waktu pencapaian pada tahun 2016 dengan target sebesar 50%. Sementara di Kabupaten Bantul menetapkan target sebesar 60% pada akhir periode RPJMD (tahun 2015).

Tabel 2.67.
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek
Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Pembilang: Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek	20.673	23.654	23.906	25.325	23.753
Penyebut: Jumlah pekerja/buruh	33.124	39.386	40.932	40.484	42.842
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	62,41%	60,06%	58,40%	62,55%	55,44%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2018

Besaran pekerja/buruh di Kabupaten Bantul yang menjadi peserta Jamsostek/kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tahun 2013-2017 rata-rata mencapai 59,77%. Dengan demikian, jika ditinjau secara nasional besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek sudah melebihi target yang ditetapkan secara nasional. Indikator besaran penyelesaian sengketa hubungan industri merupakan indikator SPM bidang ketenagakerjaan jenis layanan dasar pelayanan penyelesaian hubungan industrial. Capaian besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.68.
Besaran Sengketa Hubungan Industrial Yang Terselesaikan
Tahun 2013-2016 Kabupaten Bantul

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Besaran sengketa yang terselesaikan	95%	95%	95%	97%	97%

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2018

Target besaran kasus yang terselesaikan adalah 50% dari jumlah kasus yang ada. Sementara realisasi dari tahun ke tahun 95%, dan di akhir tahun 2017 mencapai 97%.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Bantul diwakili dengan persentase pegawai negeri sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang disajikan pada Gambar berikut:

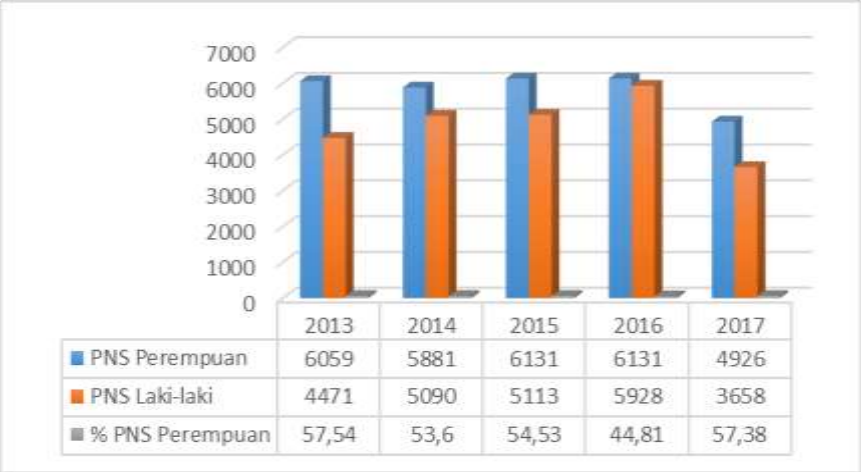

Sumber: BKPP Kabupaten Bantul 2018

Gambar 2.26.
Persentase Jumlah PNS Perempuan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

Berdasarkan data pilah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lembaga pemerintah semakin meningkat. Dan dari jumlah PNS perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut sejumlah 263 pegawai menduduki jabatan eselon II-IV pada tahun 2016. Jumlah PNS perempuan tersebut mengalami penurunan dari tahun 2015 dikarenakan ada beberapa sudah pensiun, dan tidak ada pelantikan pejabat struktural di tahun 2016 dikarenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 162 ayat 2, bahwa mutasi pejabat baru bisa dilakukan setelah enam bulan sejak pelantikan.

Tabel 2.69.
Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon
Tahun 2012-2016 di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	3	3	3	4
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	37	37	37	37	40
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	222	233	223	223	242
4	Jumlah Pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon II -IV	262	273	273	263	286
5	Jumlah PNS perempuan	6.059	5.881	6.131	5.928	4.926
6	Persentase PNS perempuan yang menempati jabatan eselon II – IV (4/5)	4.32	4.64	4.45	4.44	5,80

Sumber: BKPP Kabupaten Bantul, 2018

2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT di Kabupaten Bantul belum dapat dipantau secara keseluruhan dikarenakan belum semua korban KDRT mau melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Diharapkan dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindak kekerasan/KDRT akan menjadi solusi yang tepat.

Tabel 2.70.
Rasio KDRT Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah KDRT	155	93	112	111	124
2	Jumlah KK	276.804	277.366	293.658	314.535	NA
3	Rasio KDRT	0,59: 1000	0,33: 1000	0,38: 1000	0,35: 1000	NA

Sumber: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Bantul, 2018

3. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam

proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bantul semakin meningkat. Peningkatan pada tahun 2014-2015 cukup signifikan yang mencapai 94,41 – 94,42 dari 71,71 pada tahun 2013.

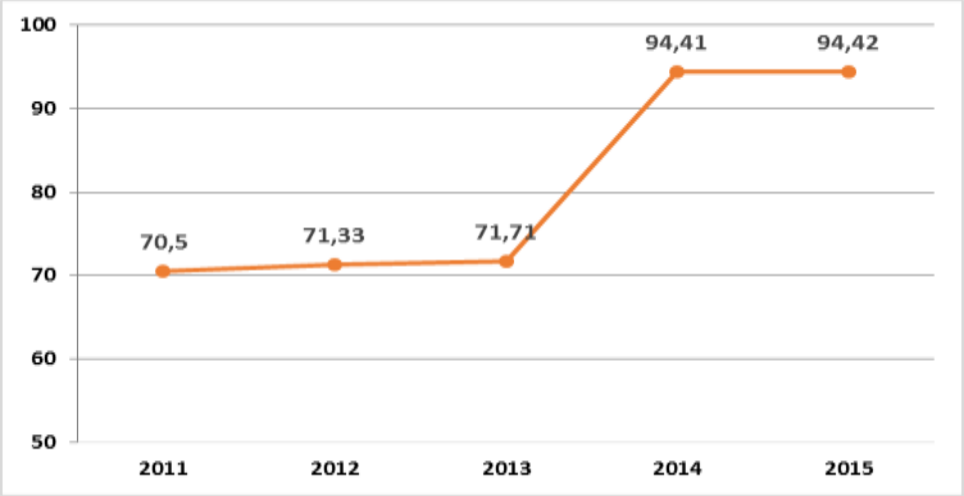

Sumber: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Bantul, 2016

Gambar 2.27. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Angka tingkat partispasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan persentase angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.71.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2011-2015

No	Tahun	Angkatan Kerja
1	2011	**59,77**
2	2012	**60,53**
3	2013	**58,44**
4	2014	**56,71**
5	2015	**57,58**

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul, BPS 2011-2016

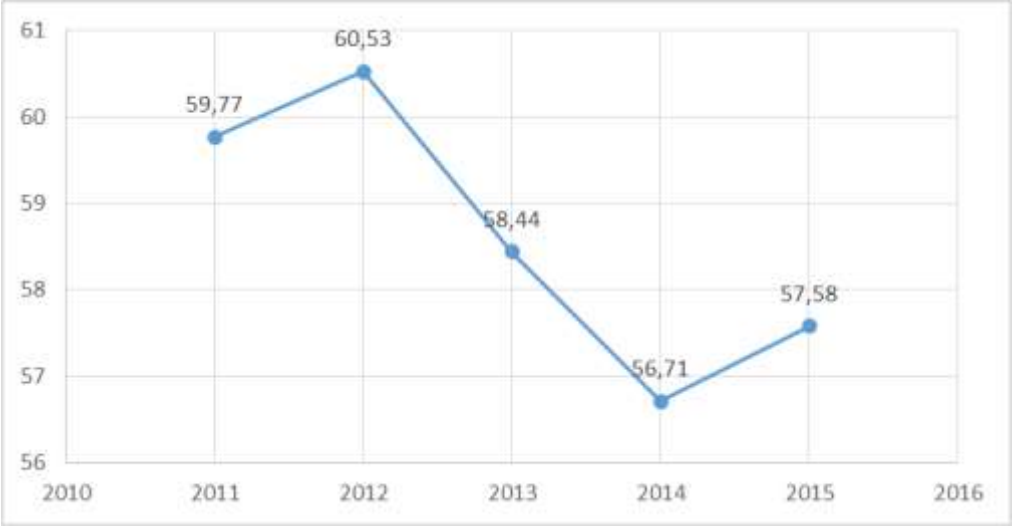

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Bantul

Gambar 2.28.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2011-2015

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan tren menurun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya jumlah perempuan di Kabupaten Bantul yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi yang antara lain disebabkan oleh semakin terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dengan semakin sedikitnya angka pengangguran dan semakin meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang memperlihatkan trend yang meningkat sejak tahun 2013 yang mencapai 74,99 menjadi 78,75 pada tahun 2014.

2.3.2.3. Ketahanan Pangan

1. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-

rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori per kapita per hari dan 57 gram per kapita per hari pada tingkat konsumsi.

Ketersediaan pangan dapat dilihat dari ketersediaan energi dan protein. Agar lebih memudahkan dalam mengukur keberhasilan ketersediaan pangan dapat dilihat melalui tingkat ketersediaan energi dan protein. Sejak tahun 2012 sampai 2017 tingkat ketersediaan energi mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan oleh penurunan budidaya umbi-umbian dan sayuran karena adanya program nasional untuk swasembada pangan melalui komoditas padi. Sedangkan pada aspek ketersediaan protein mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari angka 66,51 Gram/Kap/Hr pada tahun 2012 menjadi 78,36 Gram/Kap/Hr pada tahun 2017. Hal ini didorong oleh peningkatan pada sumber protein nabati. Sedangkan sumber protein dari hewani mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan jumlah ternak sebagai akibat dari banyaknya ternak yang keluar dari wilayah Bantul, serta ternak yang mati akibat penyakit dan banjir yang disebabkan oleh badai Cempaka.

Tabel 2.72.
Ketersediaan Energi dan Protein (KEP) untuk dikonsumsi Tahun 2012-2017

No	Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan Energi (%)	Protein (Gram/Kap/Hr)		
				Nabati	Hewani	Total
1	2012	2.769	121,27	49,52	16,99	66,51
2	2013	2.950	131,49	55,41	18,05	73,46
3	2014	3.050	139,28	55,98	18,99	74,97
4	2015	3.072	142,88	54,61	23,20	77,80
5	2016	3.079	139,95	56,93	18,80	75,73
6	2017	2.993	97,18	66,73	11,63	78,36

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2018

2. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri. Capaian penguatan cadangan pangan Kabupaten Bantul tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar berikut:

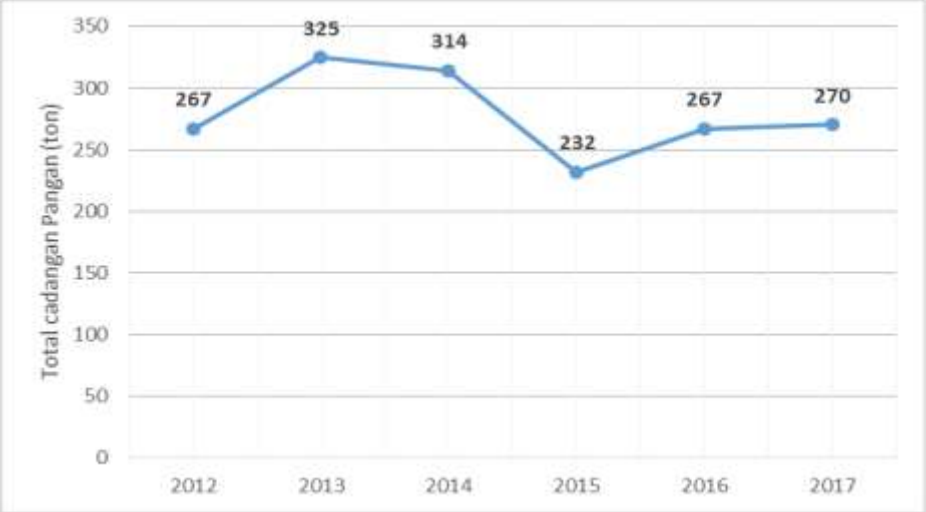

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.29.
Cadangan Pangan Tahun 2012-2017 di Kabupaten Bantul

Pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah cadangan pangan, hal ini disebabkan pada tahun 2015 pemerintah tidak menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah. Pada tahun 2017 cadangan pangan Kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebesar 3 ton dibanding tahun 2016. Cadangan pangan pada tahun 2017 terdiri dari cadangan pangan pemerintah sebesar 5,04 ton beras dan cadangan pangan masyarakat sebesar 147,11 ton yang disimpan dalam 24 lumbung pangan dan 17 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul pada awal tahun 2017 adalah 7,036 ton beras. Pada bulan November 2017, tepatnya tanggal 28 November 2017, di Kabupaten Bantul terjadi bencana badai Cempaka yang

menyebabkan terjadinya banjir dan longsor di beberapa wilayah di Kabupaten Bantul.

Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kerawanan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan menyalurkan cadangan pangan beras sebesar 2 ton. Penyaluran dilakukan pada tanggal 2 Desember 2017 bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Bantul.

3. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal.

Secara nasional, target capaian skor PPH sebesar 90% dengan batas waktu pencapaian pada tahun 2015. Perkembangan skor pola pangan harapan Kabupaten bantul tahun 2013-2017 disajikan pada Gambar berikut:

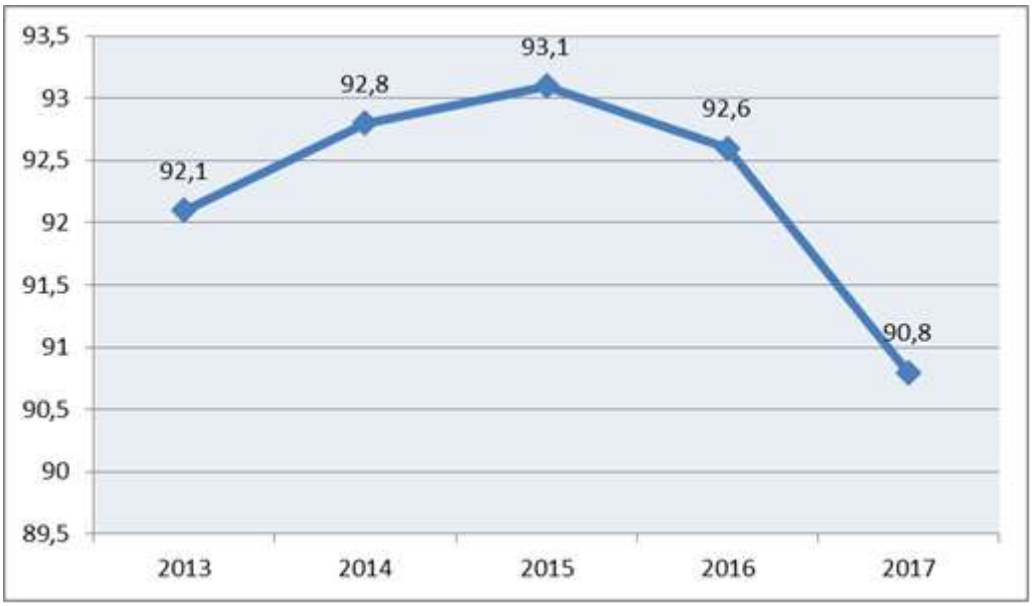

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.30.
Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

Skor pola pangan harapan di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2015. Pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015, namun tetap melampaui target SPM. Penurunan skor pada

2016 karena kurangnya konsumsi kelompok bahan pangan umbi-umbian, sayur dan buah, minyak dan lemak dan kurangnya penerapan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di masyarakat sehingga penganekaragamannya kurang.

Skor pola pangan harapan pada tahun 2017 sebesar 90,8. Perlu peningkatkan konsumsi sayur, buah, umbi-umbian, minyak, dan lemak agar skor PPH meningkat. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

Tabel 2.73.
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2014-2017

No.	KelompokPangan	Skor Pola PanganHarapan			
		2014	2015	2016	2017
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	21,7
2	Umbi-umbian	1,5	1,6	1,5	1,7
3	Panganhewani	24,0	24,0	24,0	24
4	Minyakdan lemak	1,2	1,2	2,8	3,1
5	Buah/bijiberlemak	1,0	1,0	0,7	0,9
6	Kacang-kacangan	10,0	10,2	10,0	10,0
7	Gula	1,1	1,1	1,1	1,4
8	Sayurdanbuah	29,0	29,0	27,5	28,0
9	Lain-lain	0	0	0	0,0
	Total	92,8	93,10	92,6	90,8

Sumber: Diperpautkan, 2018

4. Penanganan Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Penanganan rawan pangan dilakukan melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini

mungkin dan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui beberapa program.

Keberhasilan penanganan desa rawan pangan dapat dilihat pada Tabel 2.74. Pada tahun 2013 terdapat enam desa rawan pangan dan pada tahun 2017 tinggal dua desa yang dikategorikan desa rawan pangan.

Tabel 2.74.
Desa Rawan Pangan Tahun 2013-2017

No.	Desa Yang Diindikasikan Rawan Pangan				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	Guwosari	Trimurti	Trimurti	Trimurti	Girirejo
2	Trimurti	Jagalan	Girirejo	Girirejo	Guwosari
3	Banguntapan	Imogiri	Wukirsari	Wukirsari	
4	Singosaren	Ngestiharjo			
5	Jagalan	Guwosari			
6	Bangunjiwo				
7	Tirtonirmolo				

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2018

2.3.2.4. Pertanahan

1. Penyelesaian Izin Lokasi

Perizinan terkait pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul yaitu persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), perizinan klarifikasi/perizinan lokasi, perizinan mendirikan bangunan, perizinan gangguan, dan perizinan teknis operasional. Perizinan lokasi di peruntukan untuk izin pemanfaatan ruang dengan luasan lahan di atas satu hektar.

Tabel 2.75.
Persentase Jumlah Izin Lokasi Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Permohonan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi	Persentase (%)
2013	3	2	66,67
2014	8	7	87,50
2015	14	13	92,85
2016	6	3	50,00
2017	2	2	100,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2018

2. Luas Lahan Bersertifikat

Pensertifikatan tanah pada tahun 2017 dilakukan pada lima bidang tanah pemerintah. Data status tanah di Kabupaten Bantul tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.76.
Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan HAT

No.	Uraian	Jumlah		Persentase (%)	
		Bidang	Luas (m²)	Bidang	Luas (m²)
A	Kabupaten Bantul	629.836	506.850.000	-	-
	Rata-rata		805 m²		
B	Tanah Terdaftar				
	a) HM	481.777	294.139.185	85,04	58,03
	b) HGB	19.126	7.282.095	3,38	1,44
	c) HP	3.243	8.727.115	0,57	1,72
	d) Wakaf	1.558	407.350	0,28	0,08
	e) Hak Lainya (HPL, Sarusun)	11		0,002	0,48
	Jumlah	505.715	312.989.158	89,26	61,75
	Rata-rata per sertipikat		619 m² / stpk		
C	Tanah belum terdaftar Rata-rata	124.121	193.860.842	19.71	38,25
D	Jumlah Penduduk	955.015 jiwa			

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2018

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

1. Persentase Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah pada tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yaitu di desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan seluas kurang lebih 12 hektar, yang dikelola dengan *control landfill* untuk sampah residu akhir.

Jika dilihat dari persentase sampah yang ditangani tersebut, sampah yang dapat ditangani relatif masih kecil sehingga sebagian besar sampah yang tidak terlayani, dikelola mandiri oleh masyarakat, antara lain dengan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman serta dikelola melalui jejaring sampah dan bank sampah.

Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air

limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon.

2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Kinerja pengelolaan sampah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan produktif. Pada tahun 2016 telah dilakukan peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan, pengembangan teknologi pengolahan persampahan, sosialisasi penggunaan pupuk kompos dari sampah pasar dan kerjasama pengelolaan sampah antar daerah melalui Sekber Kartamantul.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Jumlah TPS di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dari jumlah tersebut baru tersebar di 16 kecamatan. Untuk Kecamatan Dlingo belum terjangkau oleh TPS. Pengolahan sampah di Kecamatan tersebut masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Tabel 2.77.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Tahun 2013-2017
di Kabupaten Bantul

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah TPS (unit)	135	150	165	231	245
Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	142	158	173	1.386	1.470
Jumlah Penduduk (Jiwa)	938.433	968.632	919.440	968.632	927.181
Rasio Daya Tampung TPS per 1000 penduduk (m3/1000 penduduk)	0.151	0.163	0.188	1.431	1.585

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2018

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah TPS sebesar 245 unit dengan rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk 1.585 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yang sebesar 231 unit dengan rasio 1.431.

Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah, dilaksanakan untuk pengelolaan persampahan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Kerjasama pengelolaan tersebut melalui Sekretariat Bersama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul (Sekber Kartamantul) dan Pemda DIY. Bentuk kerjasama berupa kontribusi pendanaan operasional pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Kontribusi pendanaan dari masing-masing kabupaten/kota dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemda DIY. Mekanisme ini diberlakukan sejak tahun 2015, di mana pengelolaan TPST Piyungan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY.

3. Pencemaran Status Mutu Air

Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

Pada tahun 2015, berdasarkan hasil uji laboratorium ada beberapa parameter yang melebihi persyaratan. Parameter-parameter yang konsentrasinya melebihi baku mutu yaitu senyawa timbal dan total koli.

Parameter timbal melebihi baku mutu di tiga lokasi pantau dengan konsentrasi sebesar 0,1 mg/L, 0,18 mg/L dan 0,25 mg/L. Tingginya konsentrasi timbal diindikasikan adanya pencemaran yang berasal dari limbah domestik rumah tangga, industri kecil dan bengkel. Penyebab tingginya kadar timbal di air sumur warga adalah pembuangan baterai bekas dan air aki bekas ke sembarang tempat yang kemudian meresap ke tanah hingga sampai ke air sumur warga.

Untuk parameter total koli, juga melebihi baku mutu di ketiga titik pantau dengan konsentrasi sebesar 9,0 x 10 jpt/100 ml, 1,5 jpt/100 ml dan 7 x 10 jpt/100 ml. Tingginya konsentrasi bakteri koli dipengaruhi oleh sanitasi yang kurang baik seperti terikutnya kotoran manusia maupun hewan dalam air tersebut (jpt = jumlah

perkiraan terdekat).

Selanjutnya terkait dengan penduduk berakses air minum, bahwa penyediaan pengelolaan air minum dilaksanakan Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul. Dalam rangka penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU) dan pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) di IKK Pajangan. Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan PDAM. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur gali, mencapai lebih dari 77,57% dan hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 22,43%).

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2017, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul tercatat sebesar 45,10. Indeks ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bantul masih berada dalam status “waspada”. Hal ini terjadi karena adanya penurunan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. Rendahnya kualitas air di Kabupaten Bantul terutama disebabkan oleh semakin tingginya konsentrasi *fecal coli* dan total *coli* di lima sungai yang mengalir melalui wilayah Kabupaten Bantul (telah melampaui baku mutu). Sementara untuk kualitas udara walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi belum melampaui baku mutu. Hal ini antara lain akibat penambahan tutupan vegetasi dan ruang terbuka hijau yang sangat minim belum mampu mengimbangi penambahan sumber emisi gas pencemar udara (industri, transportasi, dan kebutuhan energi lainnya) sehingga kualitas udara juga semakin menurun.

2.3.2.6. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk merupakan salah satu indikator SPM yang dilaksanakan Kabupaten Bantul dalam pelayanan dokumen kependudukan dengan penanggungjawab kegiatan berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bantul tahun 2013-2017 ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.78.
Cakupan Penerbitan KTP Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	634.650	637.841	668.144	677.425	**686.537**
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP	641.375	693.904	687.219	704.074	**704.459**
3	Persentase penduduk yang memiliki KTP ber-NIK	98,95%	99%	97,22%	96,21%	97,5%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, 2018

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan era baru di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Persentase kepemilikan KTP sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 terus menurun yang disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk wajib ber KTP tidak sebanding dengan kenaikan penduduk yang mengajukan permohonan KTP.

Adanya penurunan prosentase kepemilikan KTP-el dari tahun 2012 s/d 2016 ini karena masih adanya penduduk warga Bantul yang masih berada diluar negeri (TKI) dan banyaknya anak yang telah berusia 17 tahun dan tidak secara langsung melakukan perekaman KTP-el, selain itu juga adanya akurasi data NIK

yang diharapkan bisa menekan angka dobel data, yang secara tidak langsung dapat berakibat jumlah cakupan KTP pada tahun 2016 ini menurun yaitu 95,80%.

Tabel 2.79.
Data Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Kepemilikan Kepala Keluarga	Wajib KTP	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
1	Srandakan	31.276	10.833	10.833	24.165	23.554
2	Sanden	31.924	11.563	11.563	25.125	24.435
3	Kretek	30.837	11.031	11.031	24.122	23.560
4	Pundong	35.448	12.506	12.506	27.443	26.549
5	Bambanglipuro	41.201	14.698	14.698	31.803	31.023
6	Pandak	51.492	17.844	17.844	39.806	38.794
7	Pajangan	62.788	11.439	11.439	26.345	25.579
8	Bantul	57.408	22.176	22.176	47.884	46.830
9	Jetis	62.531	19.966	19.966	43.766	42.830
10	Imogiri	38.502	21.727	21.727	47.644	46.463
11	Dlingo	46.825	13.425	13.425	29.802	28.749
12	Banguntapan	51.051	35.665	35.665	79.934	77.871
13	Pleret	107.596	15.754	15.754	34.475	33.434
14	Piyungan	97.034	17.253	17.253	38.139	37.130
15	Sewon	100.222	32.786	32.786	73.551	71.672
16	Kasihan	34.894	33.400	33.400	75.453	73.816
17	Sedayu	46.152	15.753	15.753	35.002	34.248
	Jumlah	**927.181**	**317.813**	**317.813**	**704.459**	**686.537**

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Bantul, 2018

2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Selain cakupan penerbitan KTP, indikator SPM yang juga dilaksanakan Kabupaten Bantul dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah cakupan penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan

penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul dari tahun 2013 hingga tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.80.
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran	7.892	10.446	10.127	10.949	10.000
Jumlah kelahiran	8.625	11.286	10.516	11.056	10.900
Persentase penerbitan akta kelahiran	**91,50**	**92,56**	**96,30**	**99,03**	**91,74**

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Bantul, 2018

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa seluruh penduduk yang lahir di tahun yang bersangkutan memperoleh akta kelahiran. Pada tahun 2013 indikator SPM ini sudah tercapai. Dengan memperhatikan pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul telah berhasil mencapai indikator ini. Namun, pada tahun 2013 cakupan penerbitan akta kelahiran turun menjadi 91,50%, hal ini karena bayi yang lahir pada bulan akhir tahun 2013 banyak yang belum melaporkan dan baru mencatatkan kelahiran di tahun 2014 Sementara pada tahun 2017 ini penerbitan akta kelahiran mencapai 91,74% Kenaikan tersebut salah satu indikatornya adalah kebijakan pemerintah dalam UU no 24 tahun 2013 yang diantaranya menyebutkan bahwa penerbitan akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa penting, diubah penerbitannya ditempat domisili penduduk, dan juga adanya program pemerintah dengan memberikan pelayanan pembuatan akta tanpa biaya serta kenaikan angka kelahiran bayi.

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.81.
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD Tahun 2013-2017
Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kelompok Binaan LPMD	313	313	313	933	933
2	Jumlah LPMD	75	75	75	75	75
3	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan LPMD	4,17	4,17	4,17	12,44	12,44

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan PMD Kabupaten Bantul, 2018

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPMD. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul dari Tahun 2013 hingga tahun 2017 cenderung sama, yaitu sebesar 12,44. Hal ini berarti bahwa rata-rata satu LPMD membina sekitar 12 kelompok.

2. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah tim penggerak PKK desa/kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Pada tahun 2017 ini jumlah kelompok binaan PKK 2074.

Tabel 2.82. Kelompok Binaan PKK Tahun 2015-2017

No	Nama Organisasi	Jumlah		
		2015	2016	2017
1	PKK Kecamatan	17	17	17
2	Kelompok PKBN	325	325	325
3	Kleompok Kadarkum	339	339	339
4	Kelompok Pola Asuh	402	402	402
5	Kelompok PKK Dusun	933	933	933
Jumlah		**2074**	**2074**	**2074**

Sumber: Kantor PMD, 2018

3. Pemberian Bantuan Khusus

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa diberikan bantuan khusus dengan mengacu Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Khusus P2MD. Tahun 2017 bantuan khusus diberikan untuk pembangunan sarana umum yang bersifat fisik, kawasan khusus, pembangunan fisik obyek wisata dan kawasan kuliner.

2.3.2.8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Cakupan PUS yang Istrinya di bawah 20 Tahun

Cakupan sasaran PUS yang istrinya dibawah 20 tahun merupakan salah satu indikator SPM bidang KB dan KS pelayanan KIE KB dan KS. Standar SPM cakupan PUS yang usianya di bawah 20 tahun adalah proporsi PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah maksimal sebesar 0,35% (nilai 100) harus tercapai pada tahun pada tahun 2014. Berdasarkan Tabel 2.83 terlihat bahwa sejak tahun 2014 Kabupaten Bantul sudah mampu memenuhi standar SPM.

Tabel 2.83. Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun Kabupaten Bantul Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Pembilang: PUS yang usia istrinya < 20 tahun	662	662	366	289	544
Penyebut: Total PUS	152.277	152.793	150.105	149.683	154.202
Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun	0,435	0,433	0,244	0,19	0,35
Nilai SPM	80.4597701	80.8314	143.443	184.211	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PMD Kabupaten Bantul, 2017

Cara menghitung Nilai SPM:

3,5% merupakan standar nasional, jadi bila Cakupan PUS itu dibawah 3,5 semakin baik.

$$\frac{3{,}5\ \%}{\text{Cakupan PUS yang istrinya} < 20\text{ tahun}} \times 100\%$$

Contoh, untuk Tahun 2012:

$$\frac{3{,}5\%}{0{,}435\%} \times 100\% = 80{,}459$$

2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta PUS pada tahun 2017 turun dibandingkan dengan tahun 2016.

Tabel 2.84.
Kesertaan KB Kabupaten BantulTahun 2013-2017

No.	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	PUS	153.395	-	150.105	-	149.683	-	154.202	-	143.861	-
2.	Peserta KB Aktif	125.018	81,50	119.894	79,87	120.240	80,45	121.764	78,96	109.257	75,95
3.	Peserta KB MKJP	43.743	34,99	40.858	27,22	41.234	34,24	42.308	34,75	37.453	34,28
4.	Peserta KB Pria	9.800	7,84	9.223	6,14	9.306	7,73	9.543	7,84	9.308	8,52
5.	Peserta KB Baru	16.382	109,90	13.414	94,52	13.864	100,95	13.837	100,45	11.801	85,36
6.	PUS *Unmetneed*	8.892	5,86	9.257	6,34	8.556	5,72	9.058	5,87	12.118	8,42

Sumber: DPPKBPMD Kabupaten Bantul, 2018

3. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia dibawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral, dan sosial.

Tabel 2.85.
Cakupan Anggota BKB ber-KB Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

Cakupan anggota BKB ber-KB	2013	2014	2015	2016	2017
	91,19	86,72	84,56	91,88	94,5

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PMD Kabupaten Bantul, 2018

Cakupan anggota BKB ber-KB di Kabupaten Bantul telah mencapai target baik yang ditetapkan nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul.

2.3.2.9. Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis angkutan umum sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Bantul.

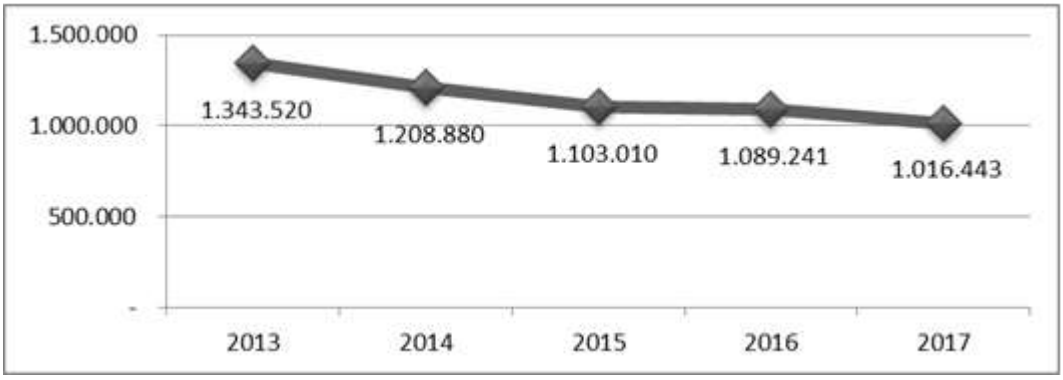

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.31.
Grafik Jumlah Penumpang Umum Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

Jumlah penumpang angkutan umum bis di Kabupaten Bantul dari tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum buruk.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum.

2. Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan kabupaten adalah memberikan ijin trayek untuk pedesaan. Ijin trayek di Kabupaten Bantul dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Pada tahun 2012 trayek yang ada di Bantul berjumlah enam trayek yang tersebar di lima kecamatan yaitu: Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo, dan Kasihan. Kemudian pada tahun 2014 terdapat ijin trayek baru sebanyak satu trayek yang melayani Imogiri. Sampai dengan tahun 2017 belum ada penambahan trayek dan yang beroperasi tinggal dua ijin trayek. Jumlah ijin trayek di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.86.
Jumlah Ijin Trayek di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah ijin trayek	Lokasi
2012	6	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan
2013	6	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan
2014	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri
2015	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri
2016	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri
2017	7	Kecamatan Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlinggo dan Kasihan, Imogiri

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018

3. Jumlah uji KIR Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk

pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Tabel 2.87.
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

JENIS	Jumlah Uji Kir				
	2013	2014	2015	2016	2017
Uji kir kendaraan umum	15.418	16.870	17.810	18.730	20.923

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2018

Di Kabupaten Bantul pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis berdasarkan ketetapan oleh Menteri Perhubungan. Jumlah uji kir di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya uji KIR untuk menekan angka kecelakaan khususnya mobil barang atau trayek umum.

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Bantul pelabuhan laut dikembangkan dengan mengoptimalkan Kawasan Pandansimo di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan sebagai pangkalan pendaratan ikan dan pendukung wisata pantai.

Pelabuhan udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Bantul tidak terdapat pelabuhan udara/bandara.

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Di Kabupaten Bantul terdapat empat terminal dengan kategori C, selain itu terdapat tiga lokasi pemungutan retribusi yaitu TPR Imogiri, TPR Piyungan,TPR Sedayu dan TPR Parangtritis Selama kurun waktu 5 tahun tidak mengalami pertambahan atau pengurangan jumlah lokasi terminal.

Sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Pasal 13 ayat 2) untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi:

a. terminal penumpang tipe C di Desa Palbapang Kecamatan Bantul;
b. terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu;
c. stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu;
d. terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

Tahun 2017 pembangunan halte sebanyak lima unit yang terpasang di halte Pasar Barongan, halte SMAN 1 Bantul, halte SMPN 1 Pandak, halte Sapuangin, dan halte Bandung.

5. Angkutan Darat

Angkutan Darat atau *land transportation* adalah jenis kegiatan ekonomi berupa pemberian/bisnis jasa angkutan/transportasi barang atau orang di darat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan bus, taksi maupun kereta api. Di Kabupaten Bantul angkutan darat yang terorganisir berupa angkutan umum penumpang bus dan minibus.

Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah pengguna angkutan umum karena saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan angkutan umum akibat semakin mudahnya dalam memperoleh kendaraan pribadi (sepeda motor). Penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal dapat mengurangi beban lalu lintas yang semakin padat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dari Pemerintah Daerah sehingga masyarakat bersedia beralih menggunakan angkutan umum.

Tabel 2.88.
Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum Yang Masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Angkudes						
No.	Trayek	Jumlah Armada				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Ps.Bantul-Imogiri	10	10	10	10	0
2	Ps.Bantul-Tugu Genthong	3	3	3	0	0
3	Ps.Bantul-Pundong	0	0	0	0	0
4	Ps.Bantul-Kretek	0	0	0	0	0
5	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Munthuk)	0	0	0	0	0

6	Ps.Imogiri-Dlingo (lewat seropan)	4	4	4	4	0
7	Ps.Bantul-Pleret	0	0	0	0	0
8	Ps.Bantul-Krebet	0	0	0	0	0
9	Dlingo-Rejoinangun	22	0	0	0	0
10	Pajangan-Bantul-Pajangan	4	0	0		0
	Jumlah	43	17	17	14	0
Angkutan Perbatasan						
No.	**Trayek**	**Jumlah Armada**				
		2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Yogya- Parangtritis	28	29	29	29	29
2	Yogya- Samas	7	7	7	7	7
3	Yogya- Sorobayan	10	8	8	8	8
4	Yogya-Srandakan	26	22	22	6	6
5	Dlingo - Terminal Giwangan	22	16	16	16	16
6	Yogyakarta – Petoyan	7	7	7	7	7
7	Trisik - Giwangan			16	16	16
	Jumlah	100	89	105	89	89
AKDP						
No.	**Trayek**	**Jumlah Armada**				
		2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Yogya- Panggang GK	22	22	22	17	18
2	Yogya- Parangtritis	26	26	26	26	26
3	Yogya- Samas	15	15	15	14	14
4	Yogya- Pandansimo	13	13	13	13	13
5	Yogya- Wates	21	21	21	16	16
6	Yogya- Ngentakrejo	8	8	8	8	8
	Jumlah	109	105	105	94	96

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2018

Tabel 2.89. Laporan Pelaksanaan PPNS Dinas Perhubungan di Kabupaten Bantul Tahun 2016

Bulan	Lokasi	Jumlah Kendaraan yang Diperiksa	Jml yang Melanggar	Keterangan
Januari		53	7	
Februari		89	23	
Maret		0	0	
April	Jalan Srandakan	49	29	
	Jalan Parangtritis	62	20	
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September	Jalan Paris (Depan PLN)	80	24	
Oktober				
November				
Desember				
JUMLAH		**333**	**103**	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2017

Tabel 2.90. Laporan Pelaksanaan PPNS Dinas Perhubungan di Kabupaten Bantul Tahun 2017

Tgl	Lokasi	Jumlah Kendaraan yang Diperiksa	Jumlah yang Melanggar	Keterangan
13 Februari	Jln. Parangtritis (depan PLN)	53	24	
18 Maret	Jln. Parangtritis (Selatan Sp.4 Druwo)	51	16	
11 April	Jln. Parangtritis (depan PLN)	75	18	
2 Mei	Silok, Imogiri	25	11	
15 Mei	Jln. Wonosari, Piyungan	48	31	
22 Mei	Jln. Srandakan depan Pasar Manggiran	18	NA	
24 Mei	Pajangan	46	22	
30 Agustus	Jln. Srandakan depan Pasar Manggiran	41	21	
Oktober	Jln. Paris (depan PLN)	65	18	
22 November	Jln. Srandakan depan Pasar Manggiran	68	13	
	Jln. Srandakan depan Pasar Manggiran	86	17	
20 Desember	Jln. Paris (depan PLN)	47	26	
JUMLAH		**623**	**217**	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2018

Tabel 2.91. Data Kecelakaan Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Laka	Korban			Kerugian Materi
			MD	LB	LR	
1	Januari	146	17	-	173	66.450.000
2	Februari	144	9	-	161	91.980.000
3	Maret	86	6	-	89	31.570.000
4	April	151	7	-	173	55.005.000
5	Mei	107	13	-	115	39.150.000
6	Juni	167	10	-	187	55.750.000
7	Juli	97	14	-	93	36.200.000
8	Agustus	92	13	-	89	29.000.000
9	September	50	5	-	53	13.800.000
10	Oktober	51	12	-	59	28.750.000
11	November	34	13	-	27	22.650.000
12	Desember	136	16	10	110	56.003.700
	TOTAL	**1.261**	**135**	**10**	**1.329**	**526.308.700**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2017
Keterangan: MD: Meninggal Dunia
LB: Luka Berat
LR: Luka Ringan

Tabel 2.92. Data Kecelakaan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Laka	MD	LB	LR	Kerugian Materi
1	Bantul	172	12	0	202	63.390.000
2	Sewon	237	23	0	262	97.450.000
3	Banguntapan	149	12	0	176	62.450.000
4	Piyungan	64	11	0	66	46.850.000
5	Kasihan	156	12	0	169	20.250.000
6	Sedayu	78	10	0	82	122.150.000
7	Pajangan	33	4	0	35	7.400.000
8	Pandak	72	9	0	81	19.300.000
9	Kretek	32	4	0	37	11.200.000
10	Pundong	32	8	0	38	8.600.000
11	Jetis	121	12	0	126	43.650.000
12	Pleret	33	3	0	38	13.900.000
13	Imogiri	57	5	0	70	51.620.000
14	Bambanglipuro	52	8	0	52	17.800.000
15	Sanden	26	0	0	30	7.750.000
16	Srandakan	27	2	0	31	4.750.000
17	Dlingo	19	0	0	23	4.600.000
	JUMLAH	**1.360**	**135**	**0**	**1518**	**603110.000**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2018

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita karangan, iklan yang dicetak dan di terbitkan secara tetap atau periodik dan untuk dijual kepada umum. Lingkup berita dapat menyangkut berita internasional, nasional, maupun berita daerah (lokal). Fungsi dari surat kabar itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang beragam bagi masyarakat luas.

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak surat kabar di daerah menunjukkan bahwa semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah cukup banyak tetapi hanya beberapa jenis yang dijadikan bahan referensi di Kabupaten Bantul.

Tabel 2.93.
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	2	4	4	4	4
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	7	5	5	6	6
3	Total jenis surat kabar	9	9	9	10	10

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2018

Jumlah jenis surat kabar baik terbitan nasional maupun lokal yang masuk ke Kabupaten Bantul cenderung konstan dengan total jenis surat kabar sekitar sembilan jenis. Ketersediaan surat kabar baik nasional/lokal diharapkan semakin meningkat kualitasnya sebagai sarana penunjang dalam peningkatan pelayanan masyarakat akan informasi yang terkait dengan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul juga menerbitkan Buletin Sejada dengan tujuan sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan masyarakat lewat media cetak yang penyebarannya sampai ke tingkat dusun melalui kecamatan. Dalam setiap tahunnya diterbitkan empat kali edisi. *Outcome*-nya adalah tersosialisasikannya program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul dampaknya masyarakat bisa mengetahui dan memahami program kerja dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul lewat media cetak milik pemerintah ini. Kendala yang dihadapi adalah jumlah cetakannya masih terbatas sehingga belum bisa menjangkau ke tingkat dukuh ataupun RT.

1. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Penyiaran adalah pancaran melalui ruang angkasa oleh sumber frekuensi dengan sinyal yang mampu diterima di telinga atau didengar dan dilihat oleh publik. Media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa yaitu radio dan televisi. Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2.94.
Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penyiaran radio lokal	2	2	2	2	2
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	3	4	4	4	4
4	Jumlah penyiaran TV nasional	1	1	1	1	1
5	Total penyiaran radio/TV lokal	5	6	6	6	6

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2018

Jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Bantul cenderung tetap. Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan TVRI dalam acara Taman Gabusan, hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi bagi masyarakat. Disamping itu, dengan masuknya penyiaran radio dan TV nasional ke Kabupaten Bantul diharapkan dapat memicu penyiaran radio dan TV lokal untuk meningkatkan kualitas sehingga penyiaran radio dan televisi lokal dapat bersaing dengan penyiaran radio dan televisi nasional.

Dialog interaktif dalam satu tahun dengan maksud terjalinnya interaksi dan komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat Bantul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun media radio yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah Radio Bantul, Radio Persatuan, dan RRI. Hasil akhirnya adalah tersosialisasikannya program kerja dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Taman Gabusan merupakan siaran langsung di TVRI stasiun Yogyakarta. Siaran ini dilaksanakan sebanyak 40 kali terdiri dari 36 kali di dalam studio dan 4 kali di luar studio selama setahun. Model siaran adalah *talk show* dengan dialog interatif dengan pemirsa di luar studio. Kegiatan ini merupakan interaksi dan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat Bantul dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul. Tujuan acara ini adalah meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membangun sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat sebagai prasyarat terwujudnya *good governance* dan sebagai ajang promosi potensi daerah.

Sosialisasi cukai untuk meningkatkan pemanfaatan dana DBH-CHT melalui televisi diantaranya RBTV, Jogja TV, Adi TV dll.

2. Web Site milik Pemerintah Daerah

Keberadaan *website* milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki satu *website* utama dengan alamat http://www.bantulkab.go.id/, dengan 33 subdomain yang terdiri dari 32 subdomain untuk SKPD dan 1 subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul. Subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul, adalah http://hukum.bantulkab.go.id/ dan subdomain untuk SKPD sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.95.
Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017

No.	Dinas	Subdomain
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	dikpora.bantulkab.go.id
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul	sosial.bantulkab.go.id
3	Dinas Pariwisata	pariwisata.bantulkab.go.id
4	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	diperpautkan.bantulkab.go.id
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	pu.bantulkab.go.id
6	Dinas Kesehatan	dinkes.bantulkab.go.id
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.bantulkab.go.id
8	Dinas Perhubungan	dishub.bantulkab.go.id
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	nakertrans.bantulkab.go.id
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	diskukmp.bantulkab.go.id
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dppkbpmd.bantulkab.go.id
12	Dinas Kebudayaan	disbud.bantulkab.go.id
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	dptr.bantulkab.go.id
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.bantulkab.go.id
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dpk.bantulkab.go.id
16	Satpol PP	satpolpp.bantulkab.go.id
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	dpmpt.bantulkab.go.id
18	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.bantulkab.go.id
19	Dinas Perdagangan	perdagangan.bantulkab.go.id

No.	Badan	Subdomain
1	Bappeda	bappeda.bantulkab.go.id
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	bkpp.bantulkab.go.id
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad.bantulkab.go.id
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.bantulkab.go.id
5	Inspektorat	inspektorat.bantulkab.go.id
6	Kantor Kesbangpol	kesbangpol.bantulkab.go.id
No	**SKPD**	**Subdomain**
1	Sekretariat Daerah	setda.bantulkab.go.id
2	Sekretariat DPRD	dprd.bantulkab.go.id
3	RSUD Panembahan Senopati	rsudps.bantulkab.go.id
4	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	ulp.bantulkab.go.id
No.	**Kecamatan**	**Subdomain**
1	Kecamatan Bambanglipuro	kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id
2	Kecamatan Banguntapan	kec-banguntapan.bantulkab.go.id
3	Kecamatan Bantul	kec-bantul.bantulkab.go.id
4	Kecamatan Dlingo	kec-dlingo.bantulkab.go.id
5	Kecamatan Imogiri	kec-imogiri.bantulkab.go.id
6	Kecamatan Jetis	kec-jetis.bantulkab.go.id
7	Kecamatan Kasihan	kec-kasihan.bantulkab.go.id
8	Kecamatan Kretek	kec-kretek.bantulkab.go.id
9	Kecamatan Pajangan	kec-pajangan.bantulkab.go.id
10	Kecamatan Pandak	kec-pandak.bantulkab.go.id
11	Kecamatan Piyungan	kec-piyungan.bantulkab.go.id
12	Kecamatan Pleret	kec-pleret.bantulkab.go.id
13	Kecamatan Pundong	kec-pundong.bantulkab.go.id
14	Kecamatan Sanden	kec-sanden.bantulkab.go.id
15	Kecamatan Sedayu	kec-sedayu.bantulkab.go.id
16	Kecamatan Sewon	kec-sewon.bantulkab.go.id
17	Kecamatan Srandakan	kec-srandakan.bantulkab.go.id

Sumber: KPDT, 2018

Keberadaan *website* milik Pemerintah Kabupaten Bantul beserta subdomainnya diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan infomasi publik di Pemerintah Kabupaten Bantul.

E-Government merupakan salah satu pengungkit (*Quick Win*) dalam mendukung terwujudnya program reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bantul. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul memposisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi. Di

samping itu, kebijakan ini ditempuh sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province* dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government.* Membangun Bantul *Smart City* merupakan cita-cita dan tujuan pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan *e-Government* atau pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menentukan kebijakan bahwa *e-Government* merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi. Pengembangan *e-Government* menitikberatkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul tidak dapat lepas dari tuntutan kebutuhan vital sarana dan prasarana teknologi informasi. Oleh karena itu mutlak bagi pemerintah Kabupaten Bantul, agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi tersebut di berbagai lini.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut juga *e-Government (e-Gov)* dan *online government* dan telah berjalan di Kabupaten Bantul. *E-Government* telah diaplikasikan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan aplikasi *e-Government* melalui *website*, Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah menerapkan 66 sistem informasi dan 51 aplikasi baik yang bersifat intranet, desktop, maupun *online*, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.96. Aplikasi Sistem Informasi Tahun 2001-2017

No.	Tahun	Nama Aplikasi
1	2001	SIM Pengolahan Gaji PNS
2	2002	SIM Pelayanan Satu Atap (Perijinan)
3	2003-2004	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
4	2005	SIM Monografi *Online*

No.	Tahun	Nama Aplikasi
5	2005	SIM Kependudukan
6	2006	SIM Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006)
7	2007	Sistem Cetak KK dan KTP
8	2007	Sistem Keluarga Berencana
9	2007	SistemTenaga Kerja dan Nakertrans
10	2007	Sistem Informasi Pariwisata
11	2007	Sistem Informasi Layanan Data KPDE
12	2007	Sistem informasi Presensi PNS
13	2008	SIM Keluarga Miskin
14	2008	SIM Kesehatan Ibu, Anak, dan TBC
15	2008	SIM Potensi Kecamatan
16	2008	SIM Pelayanan Perpustakaan
17	2009	SIM Keuangan Daerah
18	2009	SIM Barang Daerah
19	2009	SIM Investasi Daerah
20	2009	SIM Kepegawaian
21	2009	SIM Pengendalian Pembangunan Daerah
22	2009	SIM Pelayanan Pajak Reklame
23	2009	SIM Pelayanan BPHTB
24	2010	SIM Perijinan *Online*
25	2010	SIM Cetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
26	2011	SIM Kewilayahan
27	2012	SIM Penanggulangan Kemiskinan
28	2012	SIM Perencanaan Pembangunan
29	2012	Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
30	2012	Pengembangan Sistem Perijinan On-line
31	2012	Sistem Informasi Pedagang Pasar
32	2012	Sistem Informasi Barang Milik Daerah
33	2012	Sistem Informasi PBB
34	2013	Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul
35	2013	Interroperabilitas Sistem Keuangan Kabupaten Bantul
36	2014	Interoperabilitas SIM Pernikahan dan SIAK
37	2014	SIM Pelaporan Kesehatan Masyarakat
38	2014	eSakip (SIM Laporan Kinerja)
39	2015	SIM Kesiswaan
40	2015	SIM Aplikasi Database Tanah Desa
41	2015	SIM Database Jaminan Kesehatan
42	2015	SIM Polisi Pamong Praja

No.	Tahun	Nama Aplikasi
43	2015	SIM Aset PNPM (Database Aset PNPM dan Dana Bergulir)
44	2016	SIM Interoperabilitas SID dan SIM PATEN Kecamatan
45	2016	Sistem Aplikasi Perencanaan pembangunan berbasis desa
46	2017	SIM elapor
47	2017	SIM simbarang-nakertrans
48	2017	SIM simbarang-setwan
49	2017	Sistem pendaftaran online kendaraan
50	2017	SIM *Wistlerblower*
51	2017	SIM Zona Integritas
52	2017	SIM simbarangdlh
53	2017	SIM smscenter
54	2017	SIM tanahdesa
55	2017	SIM tanahkasultanan
56	2017	Sistem Informasi Desa (75 Desa)
57	2017	SIM Aset
58	2017	SIM Menara Telekomunikasi
59	2017	SIM rsudps
60	2017	SIM Perencanaan Pembangunan
61	2017	SIM Integrasi Data Kependudukan dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
62	2017	SIM Penanggulangan Kemiskinan
63	2017	SIM Pengendalian Pembangunan
64	2017	SIM Monografi desa
65	2017	SIM Pelaporan Administrasi Kesehatan Masyarakat
66	2017	SIM Perizinan
67	2017	Aplikasi Pengembangan Sekolah Adiwiyata
68	2017	Aplikasi agenda kegiatan DPRD
69	2017	Aplikasi dppkbpmd
70	2017	Aplikasi dprd
71	2017	Aplikasi dwp
72	2017	Aplikasi jdih-dprd
73	2017	Aplikasi Jejaring Pengelola Sampah Mandiri AMOR
74	2017	Aplikasi jrd
75	2017	Aplikasi kesiswaan
76	2017	Aplikasi layananinspektorat
77	2017	Aplikasi paten
78	2017	Aplikasi pbb
79	2017	Aplikasi perizinan-bappeda
80	2017	Aplikasi persuratan-bappeda
81	2017	Aplikasi perundanganri

No.	Tahun	Nama Aplikasi
82	2017	Aplikasi pkk
83	2017	Aplikasi pnpm-pmd
84	2017	Aplikasi potensiwisata
85	2017	Aplikasi ppid
86	2017	Aplikasi ppkd
87	2017	Aplikasi ppns
88	2017	Aplikasi profildkp
89	2017	Aplikasi profilkoperasi
90	2017	Aplikasi puskesmas-pleret
91	2017	Aplikasi rkas
92	2017	Aplikasi sarpras-sd
93	2017	Aplikasi setda
94	2017	Aplikasi sik
95	2017	Aplikasi simpamong
96	2017	Aplikasi simpangindagkop
97	2017	Aplikasi simpegnaker
98	2017	Aplikasi simpel
99	2017	Aplikasi sinak
100	2017	Aplikasi sipleret
101	2017	Aplikasi siukm
102	2017	Aplikasi ulp-pbj
103	2017	Aplikasi umum
104	2017	Aplikasi warintek
105	2017	Aplikasi pencaker
106	2017	Aplikasi simperkes
107	2017	Aplikasi mpm
108	2017	Aplikasi pbdt
109	2017	Aplikasi dpmpt
110	2017	Aplikasi e-investment
111	2017	Aplikasi lkpm-dpmpt
112	2017	Aplikasi Kearsipan
113	2017	Aplikasi SPSE
114	2017	Aplikasi Pelayanan Terpadu
115	2017	Aplikasi Pelayanan Terpadu
116	2017	Aplikasi Pengadaan Barang Secara Elektronik
117	2017	Aplikasi Sistem Pengelolaan Presensi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi, 2018

Beberapa sarana komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantul berbasis ilmu pengetahuan teknologi adalah pemanfaatan media telematika, seperti penggunaan aplikasi sistem informasi, SMS center, *website* daerah yaitu www.bantulkab.go.id, bantulbiz.com, bantulcraft.com, informasi SKPD melalui subdomain SKPD, Warung Informasi dan Teknologi (Warintek), fasilitas akses jaringan internet dan intranet SKPD dan telecenter.

Tabel 2.97. Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

No.	Media	2017
1	SMS Center	Januari sd Desember: 252 SMS
2	Siaran Taman Gabusan TVRI Yogyakarta	36x siaran di studio dan 4x siaran di luar studio
3	Website daerah (www.bantulkab.go.id)	54 sub domain dengan 275.022 pengunjung
4	Dialog Interaktif Radio Bantul FM	24 siaran
5	Jurnal Riset Daerah	Penerbitan 3 edisi reguler (bulan April, Agustus, dan Desember) dan Edisi Khusus tahun 2017 bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018 (data diolah)

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat. Salah satu peran dan fungsi KIM adalah sebagai partner jaringan informasi dari pemerintah ke masyarakat, sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang peduli informasi. Jumlah KIM yang saat ini terdaftar di Diskominfo ada 19 KIM.

Meluasnya infrastruktur jaringan internet dan intranet Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pembangunan jaringan *fiber optic* sepanjang 43,955 km yang tersebar di seluruh PD Pemerintah Kabupaten Bantul, kecamatan, dan pemerintah tingkat desa serta Puskesmas.

3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul diperoleh dari rata-rata nilai IKM OPD pemberi layanan se-Kabupaten Bantul. IKM di Kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan di OPD Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Hasil penilaian IKM Tahun 2017 dari seluruh OPD

layanan yang telah menyusun dokumen IKM dengan nilai rata-rata 87,57, nilai terendah 66,50 dan nilai tertinggi 97,06. Indeks kepuasan layanan masyarakat di Kabupaten Bantul tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.98.
IKM Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Tahun	IKM
1	2013	76,4
2	2014	78,77
3	2015	78,13
4	2016	78,69
5	2017	87,57

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

Sesuai dengan Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.99.
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2018

Berdasarkan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka nilai rata-rata IKM Kabupaten Bantul tahun 2017 berada pada interval 81,26-100,00 yaitu memiliki nilai A dengan kinerja unit pelayanan dalam kategori sangat baik.

Untuk IKM kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, per semester angkanya menunjukkan trend yang meningkat. Dilihat dari standar deviasinya menunjukkan bahwa nilai IKM antar kecamatan cenderung mengalami fluktuasi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan publik di

tingkat kecamatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun kualitasnya cenderung variatif. Dengan demikian, diperlukan adanya terobosan yang dapat memperkecil tingkat fluktuasi/perbedaan kualitas layanan publik antar kecamatan.

Tabel 2.100. Rekap IKM Kabupaten Bantul pada Tahun 2013 - 2017:

NO	KECAMATAN	2013		2014		2015		2016		2017	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
1	Dlingo	NA	NA	80,94	NA	80,9	80,94	80,94	77,57	95,84	95,06
2	Piyungan	NA	NA	80,82	NA	80,8	79,26	84,08	80,19	89,36	93,78
3	Pleret	NA	NA	78,32	NA	77,4	80,00	82,40	81,85	96,84	96,60
4	Banguntapan	NA	NA	78,88	NA	80,3	80,05	80,18	80,05	80,12	80,45
5	Imogiri	NA	NA	80,15	NA	81,0	80,02	79,40	79,99	88,99	89,83
6	Sewon	NA	NA	77,06	NA	75,2	75,20	76,17	76,93	79,99	96,07
7	Jetis	NA	NA	75,50	NA	77,8	78,04	79,61	79,11	95,41	94,70
8	Pundong	NA	NA	76,17	NA	83,5	88,16	82,35	85,05	97,87	96,90
9	Kretek	NA	NA	77,75	NA	79,8	80,18	79,83	80,75	97,68	94,83
10	Bambanglipuro	NA	NA	83,40	NA	78,5	78,64	77,63	77,83	82,31	97,06
11	Bantul	NA	NA	78,33	NA	78,6	77,00	78,03	77,15	95,18	93,18
12	Kasihan	NA	NA	76,54	NA	77,1	79,23	82,64	81,67	82,73	83,69
13	Sedayu	NA	NA	77,36	NA	78,9	80,23	79,18	79,02	94,76	93,10
14	Pajangan	NA	NA	78,75	NA	80,0	82,50	81,84	81,83	75,92	94,16
15	Pandak	NA	NA	78,75	NA	77,5	73,24	74,01	79,53	81,50	82,93
16	Sanden	NA	NA	82,03	NA	78,1	79,97	82,93	80,24	98,62	96,89
17	Srandakan	NA	NA	78,46	NA	81,9	81,90	81,61	81,63	81,91	81,91
Rata-rata		NA	NA	78,78	NA	79,26	79,68	80,17	80,02	89,12	91,83
Standar Deviasi		NA	NA	2,12	NA	2,06	3,16	2,64	2,07	7,86	5,79

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018 data diolah

2.3.2.11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Pembangunan koperasi di Kabupaten Bantul diarahkan pada pengembangan koperasi menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi. Adapun sasarannya adalah peningkatan kinerja dan produktifitas usaha koperasi.

Sampai dengan tahun 2017, koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dikarenakan adanya Peraturan Menteri Koperasi No: 10/PER/KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No: 244/Dep.1/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Pembubaran Koperasi Tidak Aktif dalam Rangka Pendataan dan Penataan Koperasi. Di tahun 2016 telah dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebanyak 64 koperasi.

Tabel 2.101.
Koperasi Berbadan Hukum Tahun 2014-2017

No.	Kecamatan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Kasihan	37	38	10	35
2	Sewon	60	61	62	51
3	Banguntapan	43	44	42	34
4	Pundong	11	12	12	6
5	Dlingo	16	19	20	19
6	Piyungan	22	23	23	21
7	Pajangan	10	10	10	9
8	Bantul	87	90	92	86
9	Srandakan	18	18	18	16
10	Pandak	15	17	17	15
11	Imogiri	32	30	31	30
12	Sanden	24	24	23	22
13	Kretek	10	10	10	9
14	Sedayu	15	17	18	16
15	Jetis	30	31	31	26
16	Pleret	22	22	23	17
17	Bambanglipuro	21	22	21	21
Jumlah		**473**	**488**	**493**	**433**

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian per Desember 2018

Upaya secara berkelanjutan terhadap koperasi yang kurang aktif dilakukan melalui pendampingan dalam peningkatan tertib administrasi pembukuan, manajemen serta mengikutkan pengurus, pengawas dalam pelatihan perkoperasian, diharapkan akan lebih menurunkan jumlah koperasi tidak aktif di

masa mendatang sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Jumlah UKM non BPR/LKM

Sasaran pembangunan dalam mengembangkan UKM di Kabupaten Bantul antara lain meningkatnya kinerja, produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatnya akses kelembagaan keuangan dan permodalan pada UMKM/Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatnya sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi UMKM/IKM, meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM, serta terwujudnya masyarakat yang berjiwa wirausaha (*entrepreneur*) tinggi dan mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada. Kemudian dari aspek pengembangan LKM, Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha untuk meningkatkan status kelembagaan LKM untuk menjadi badan hukum dalam bentuk koperasi dan PT, sesuai dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2013 tentang LKM. Upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi UMKM, pelatihan manajemen ekspor, impor, pelatihan teknologi informasi, kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, serta mengadakan pendataan secara langsung ke eksportir maupun importir. Secara umum perkembangan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2017 jumlah UMKM di Kabupaten Bantul mencapai sebanyak 46.378 unit, meningkat 0,43% dibanding tahun 2016.

Tabel 2.102. UMKM di Kabupaten Bantul
Tahun 2014-2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017
1.	Usaha Mikro	27.498	27.672	27.708	27.828
2.	Usaha Kecil	11.458	11.531	11.544	11.594
3.	Usaha Menengah	6.874	6.918	6.926	6.956
	Jumlah	45.830	46.121	46.178	46.378

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian per Desember , 2018

Tabel 2.103.
Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM
Tahun 2014-2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017
1.	Usaha Mikro	54.996	55.344	55.416	55.656
2.	Usaha Kecil	34.374	34.593	34.632	34.782
3.	Usaha Menengah	6.874	6.918	6.926	6.956
	Jumlah	**199.354**	**200.625**	**200.864**	**201.734**

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian per Desember, 2018

Tabel. 2.104.
Data Penerbitan IUMK

No	Tahun	Jumlah
1	2015	4.531
2	2016	4.671
3	2017	2.723
Jumlah		11.925

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian per Desember Tahun, 2018

2.3.2.12. Penanaman Modal

Jumlah investor Kabupaten Bantul Tahun 2016 cenderung didominasi oleh investor luar negeri (PMA) daripada investor dalam negeri (PMDN). Ditinjau dari jumlah investor secara keseluruhan (PMA dan PMDN), jumlah investor di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 106 usaha dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Sedangkan pada Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 19 usaha.

Tabel 2.105.
Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

No.	Tahun	Jumlah Investor		Jumlah
		PMA	PMDN	
1	2013	29	7	36
2	2014	27	8	35
3	2015	32	87	119
4	2016	37	5	42
5	2017	46	15	61

Sumber: Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2018

4. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan *output* yang efisien.

Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri dengan sistem SPIPISE pada tahun 2015 mencapai 80% yang terdiri dari penerbitan 3 Izin Prinsip dan 1 Izin Usaha dengan jumlah 5 pemohon (4 izin prinsip dan 1 izin usaha), sedangkan pada tahun 2016 mencapai 100% dengan menerbitkan 1 izin usaha dari 1 pemohon.

Pendaftaran penanaman modal yang berupa Izin Dasar (Izin Lokasi, Izin Gangguan, IMB); Izin Teknis (SIUP, TDI/IUI, IUTM, Izin Bidang Kesehatan, IUA, IUJK, TDUPar); Tanda Daftar Perusahaan/TDP pada tahun 2015 mencapai 84,41% dengan menerbitkan 5.362 izin dari 6.352 pemohon dan pada tahun 2016 mencapai 88,45% dengan menerbitkan 6.021 izin dari 6.807 pemohon.

Pada tahun 2015 data perusahaan PMA yang masuk dibuktikan dengan telah terbitnya Izin Prinsip Penanaman Modal maupun Izin Usaha dari BKPM RI sebanyak 7 (tujuh) perusahaan. Sedangkan perusahaan PMDN yang yang masuk dibuktikan dengan telah diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebanyak 74 (tujuh puluh empat) perusahaan. 8 (delapan) perusahaan, terdiri dari 1 (satu) perusahaan PMA dan 7 (tujuh) perusahaan PMDN.

Tabel 2.106.
Nilai Investasi PMA/PMDN Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Jumlah Proyek PMDN+ PMA	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
s.d 2013	8	29	37	541.527.452.654,89	204.205.834.766,00	745.733.287.420,89	322.427.979.909,66	76,17
s.d 2014	9	28	37	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95	17,47
s.d 2015	90	38	128	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10	11,10
s.d 2016	5	37	42	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11	14,60
s.d 2017	15	46	61	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.596,05	141.917.800.000,00	12,72

Sumber: Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2018
Catatan:
- Realisasi investasi pada tahun 2016 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situshttps://lkpmonline.bkpm.go.id

- 2011 dan 2012, kurs US$ 1 = Rp9.000
- 2013 , kurs US$ 1 = Rp9.600 sesuai APBN-P 2013
- 2014 , kurs US$ 1 = Rp11.600 sesuai APBN-P2014
- 2015 , kurs US$ 1 = Rp12.500 sesuai APBN-P 2015
- 2016 , TW I dan TW II kurs US$ 1 = Rp13.900 sesuai APBN 2016
- 2016 , TW III dan TW IV kurs US$ 1 = Rp13.500 sesuai APBN-P 2016
- 2016 , TW I dan TW II kurs US$ 1 = Rp13.500 sesuai APBN 2017
- 2017 , TW III dan TW IV kurs US$ 1 = Rp13.500 sesuai APBN-P 2017

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 secara keseluruhan mencapai nilai Rp 1.257.314.637.596,05 meningkat sebesar Rp141.917.799.900,00 atau 12,72% bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2014 sebesar Rp 1.115.396.837.696,05 (dengan kurs 1 US$ sama dengan Rp 13.300,00). Investasi masih didominasi oleh investor asing sejumlah 45 unit usaha dibandingkan dengan investor dalam negeri yang berjumlah 15 unit usaha. Kemudian jika dilihat dari nilai investasi, PMA lebih besar dibanding PMDN. Nilai investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 655.549.055.730,00, sementara nilai investasi PMDN sebesar Rp 601.765.581.966,05. Hal ini menunjukkan bahwa investor luar negeri sudah mulai tertarik untuk melakukan investasi di Kabupaten Bantul.

2. Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

Tabel 2.107.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah	
1	2013	56	18	74	8.705	5.863	14.568	196,86
2	2014	59	24	83	8.928	5.986	14.914	179,69
3	2015	50	98	148	8.909	9.355	18.264	123,41
4	2016	37	5	42	10.364	9.366	19.730	469,76

No.	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah	
5	2017	46	15	61	13.880	9.880	23.760	389,51

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2018

Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2017 mencapai 389,51 artinya satu perusahaan PMA/PMDN mampu menampung sekitar 389 tenaga kerja. Jumlah ini turun bila dibanding rasio daya serap tenaga kerja tahun 2016 yang mencapai 469,76. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, mengalami penurunan sebesar 17,08%. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh kemajuan teknologi dimana pemanfaatan tenaga kerja manusia telah digantikan dengan penggunaan alat berteknologi tinggi.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi Pemuda

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Jumlah organisai pemuda di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan.

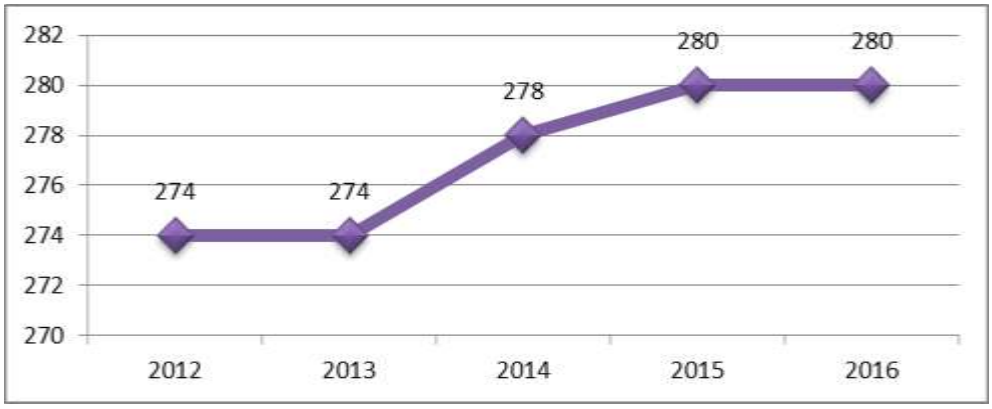

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul, 2017

Gambar 2.32.
Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2012-2016 di Kabupaten Bantul

Peningkatan jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberdayakan generasi muda dalam pembangunan. Pengembangan potensi pemuda dan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan diantaranya

melalui pelatihan bela negara, bakti pemuda dan sosial, *expo* pemuda, kader anti narkoba dan pemuda pelopor.

2. Jumlah Organisasi Olahraga

Seperti halnya jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Bantul juga mengalami peningkatan. Peningkatan organisasi olahraga di Kabupaten Bantul tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memasyarakatkan olahraga.

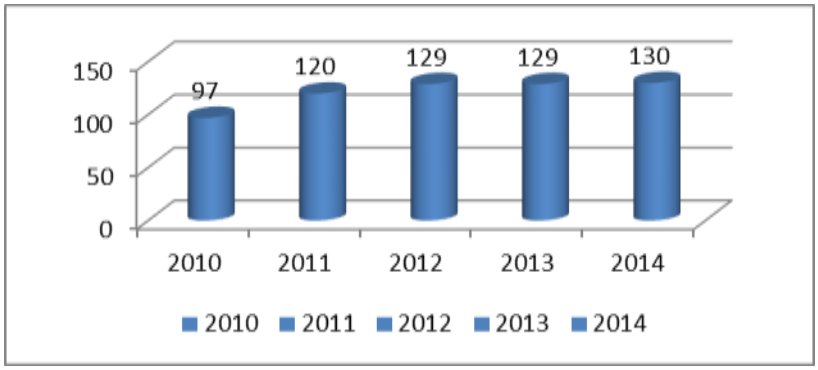

Sumber: Disdikpora, 2017

Gambar 2.33.
Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2010-2014 di Kabupaten Bantul

3. Jumlah Cabang Olahraga yang Menjalankan Kompetisi

Tabel 2.108.
Cabang Olahraga yang Menjalankan Kompetisi Secara Teratur
Tahun 2015-2018 di Kabupaten Bantul

2015	2016	2017	2018
1. Atletik	1. Atletik	1. Atletik	1. Atletik
2. PSSI	2. PSSI	2. PSSI	2. PSSI
3. PBVSI	3. PBVSI	3. PBVSI	3. PBVSI
4. Percasi	4. Percasi	4. Percasi	4. Percasi
5. IPSI	5. IPSI	5. IPSI	5. IPSI
6. Dansa	6. Dansa	6. Dansa	6. Dansa
7. Tenis Lapangan	7. Tenis Lapangan	7. Tenis Lapangan	7. Tenis Lapangan
8. Angkat Besi/Berat	8. Angkat Besi/Berat	8. Angkat Besi/Berat	8. Angkat Besi/Berat
9. PERBASI	9. PERBASI	9. PERBASI	9. PERBASI
10. Bulutangkis	10. Bulutangkis	10. Bulutangkis	10. Bulutangkis
11. Tenis Meja	11. Tenis Meja	11. Tenis Meja	11. Tenis Meja
12. Yudo	12. Yudo	12. Yudo	12. Yudo
13. Karate	13. Karate	13. Karate	13. Karate
14. Hoki	14. Hoki	14. Hoki	14. Hoki
15. Gulat	15. Gulat	15. Gulat	15. Gulat

2015	2016	2017	2018
16. PORDASI 17. Taekwondo 18. Sepak Takraw 19. Tarung Drajad 20. Senam 21. Panahan	16. PORDASI 17. Taekwondo 18. Sepak Takraw 19. Tarung Drajad 20. Senam 21. Panahan 22. Sepeda 23. Menembak 24. Dayung	16. PORDASI 17. Taekwondo 18. Sepak Takraw 19. Tarung Drajad 20. Senam 21. Panahan 22. Sepeda 23. Menembak 24. Dayung 25. Aeromodelling 26. Anggar 27. Bilyard 28. Bridge 29. Drumband 30. Golf 31. Kempo 32. Panjat Tebing 33. Renang 34. Sepatu roda 35. Tinju	16. PORDASI 17. Taekwondo 18. Sepak Takraw 19. Tarung Drajad 20. Senam 21. Panahan 22. Sepeda 23. Menembak 24. Dayung 25. Aeromodelling 26. Anggar 27. Bilyard 28. Bridge 29. Drumband 30. Golf 31. Kempo 32. Panjat Tebing 33. Renang 34. Sepatu roda 35. Tinju 36. *Gate ball* 37. *Wood ball* 38. Bola keranjang 39. *Young* Mundo

Sumber: Kantor PORA, 2018

Penyelenggaraan urusan olahraga di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Kantor Pemuda dan Olahraga (PORA). Adapun pembinaan atlet berprestasi dan penyelenggaraan kompetisi dilakukan oleh KONI dibawah bimbingan dan arahan Kantor PORA.

4. Prestasi dalam bidang Olahraga

Beberapa prestasi keolahragaan telah diraih dalam tahun 2017, diantaranya:

a. POPDA DIY Tahun 2017 Kabupaten Bantul mengirimkan atlet dan pendamping yang bertanding di 23 Cabang Olahraga dan Kontingen Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan prestasi sebagai **Juara Umum** dengan memperoleh medali 58 emas, 50 perak dan 50 perunggu.

b. PORDA DIY Ke XIV diselenggarakan di Kabupaten Bantul kontingen Kabupaten Bantul sebagai ***runner up*** dengan perolehan medali 135 emas, 12 perak dan 151 perunggu.

c. PEPARPEDA, menyeleksi tiga cabang olahraga pelajar SLB dan inklusi dan mengirimkan atlet luar biasa ke tingkat DIY sebanyak 40 atlet pada tiga cabang olahraga yaitu atletik, bulutangkis, dan tenis meja, kontingen Kabupaten Bantul kembali meraih **juara umum** dengan perolehan medali tujuh emas, tujuh perak dan empat perunggu.

2.3.2.14. Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Bantul masih ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertempat di Bantul. Namun demikian, karena melihat bahwa di segenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman dan koordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Bantul sering bekerjasama dengan BPS melaksanakan beberapa program yang hasilnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain kerjasama dengan BPS, Pemerintah Kabupaten Bantul juga melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan statistik.

Tahun 2017 dilaksanakan pengumpulan data, melakukan verifikasi dan validasi serta mengolah data Gakin sehingga didapatkan data keluarga Miskin yang ter-*update* dengan menggunakan data Gakin BDT 2015. Tujuannya antara lain mengumpulkan data keluarga Gakin BDG 2015, melakukan verifikasi data Gakin 2015, mendapatkan data yang ter-*update* sesuai kondisi tahun 2017, dan menyusun data statistik kemiskinan untuk 75 desa.

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti:

- Buku “Kabupaten Dalam Angka”
- Buku “PDRB Kabupaten”

Kedua dokumen di atas ada di Kabupaten Bantul, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program-kegiatan.

1. Buku Kabupaten Dalam Angka

Merupakan buku informasi yang menyajikan data terkini terkait dengan kondisi Kabupaten Bantul terdiri dari antara lain: kondisi geografis, jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum daerah, dan lain-lain.

2. Buku PDRB Kabupaten

Untuk mengetahui sejauh mana hasil pencapaian pembangunan perekonomian Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Bantul mengeluarkan secara resmi buku PDRB Kabupaten yang berisi informasi-informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB per kapita, inflasi, ketimpangan (distribusi) pendapatan, dan lain-lain.

2.3.2.15. Persandian

Kegiatan sandi dalam pendekatan konsep komunikasi sejalan dengan ruang lingkup konsep komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dimaknai sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan. Hal ini berarti pesan-pesan senantiasa diciptakan dan dipertukarkan dengan kesadaran untuk dimaknai oleh kedua belah pihak dalam rangkaian yang berlanjut dan dinamis. Pesan-pesan yang ciptakan dan dipertukarkan adalah makna dari simbol atau lambang yang dapat ditangkap panca indera. Simbol dapat berupa kata-kata atau nirkata, lisan atau tertulis. Penciptaan dan penafsiran pesan terjadi melalui *coding* dan *decoding*.

Pada hakekatnya pengelolaan informasi berklasifikasi rahasia dalam konteks persandian, akan berada pada alur dari mulai pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman, dan penyimpanan. Untuk naskah dinas berklasifkasi rahasia, kerahasiaannya dilakukan dengan enkripsi. Khusus untuk komunikasi melalui jaringan, perlu ada jaminan terhadap keselamatan pesan melalui *e-mail*. Untuk informasi yang dihasilkan dan disimpan dalam bentuk arsip digital, maka kerahasiaan dilakukan dengan enkripsi dan keutuhan data dengan *hash function*. Sementara untuk pengiriman informasi digital, maka kerahasiaannya perlu dilakukan dengan cara enkripsi jaringan. Khusus untuk pengiriman dalam bentuk *hardcopy*, maka pengamanan dilakukan terhadap fisik pesan dan personil pembawa pesan.

Persandian dalam penyelenggaraan pengamanan persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Bagi pemerintah daerah, masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.3.2.16. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sebagai bagian dari DIY, Kabupaten Bantul tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan. Pada tahun 2012 penyelenggaraan festival seni dan budaya mencapai 20 *event*, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 77 *event* dan pada tahun 2017 telah diselenggarakan sebanyak 488 *event* meliputi diantaranya pentas wayang, kethoprak, jathilan, reog, seni religi, dan hadroh. Peningkatan penyelenggaraan *event* seni dan budaya ini merupakan wujud dari keseriusan pemerintah daerah untuk melestarikan seni dan budaya agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Tabel 2.109.
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2015-2017
di Kabupaten Bantul

TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1. Pagelaran Wayang Kulit	1. Pagelaran Wayang Kulit	1. Pagelaran Wayang Kulit
2. Festival Dalang Cilik	2. Festival Dalang Cilik	2. Festival Dalang Cilik
3. Gelar Seni Budaya Yogyakarta	3. Gelar Seni Budaya Yogyakarta	3. Gelar Seni Budaya Yogyakarta
4. Gelar Kesenian Luar Daerah	4. Gelar Kesenian Luar Daerah	4. Gelar Kesenian Luar Daerah
5. Festival Kesenian Tradisional	5. Festival Kesenian Tradisional	5. Festival Kesenian Tradisional
6. Sarasehan Budaya	6. Sarasehan Budaya	6. Sarasehan Budaya
7. Fes,tival Sendratari	7. Fes,tival Sendratari	7. Fes,tival Sendratari
8. Gelar Seni Pertunjukkan	8. Gelar Seni Pertunjukkan	8. Gelar Seni Pertunjukkan
9. Parade Tari Nusantara	9. Parade Tari Nusantara	9. Parade Tari Nusantara

TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
10. Festival Langen Carito	10. Festival Langen Carito	10. Festival Langen Carito
11. Festival Reog dan Jathilan se-DIY	11. Festival Reog dan Jathilan se-DIY	11. Festival Reog dan Jathilan se-DIY
12. Bentara Upacara Adat se-DIY	12. Bentara Upacara Adat se-DIY	12. Bentara Upacara Adat se-DIY
13. Festival Karawitan ibu-ibu se-DIY	13. Festival Karawitan ibu-ibu se-DIY	13. Festival Karawitan ibu-ibu se-DIY
14. Festival Sendratari se-DIY	14. Festival Sendratari se-DIY	14. Festival Sendratari se-DIY
15. Festival Ketoprak se-DIY	15. Festival Ketoprak se-DIY	15. Festival Ketoprak se-DIY
16. Festival Dalang se-DIY	16. Festival Dalang se-DIY	16. Festival Dalang se-DIY
17. Festival Keroncong se-DIY	17. Festival Keroncong se-DIY	17. Festival Keroncong se-DIY
18. Festival Budaya se-DIY	18. Festival Budaya se-DIY	18. Festival Budaya se-DIY
19. Festival Desa Budaya se-DIY	19. Festival Desa Budaya se-DIY	19. Festival Desa Budaya se-DIY
20. Festival Tari dan Seni Pertunjukan se-DIY	20. Festival Tari dan Seni Pertunjukan se-DIY	20. Festival Tari dan Seni Pertunjukan se-DIY

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2018

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui program pengelolaan keragaman budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Festival seni dan budaya yang diselenggarakan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di atas.

2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Bantul pada tahun 2017 berupa tiga gedung kesenian dan 2.147 grup kesenian meningkat dibanding tahun 2015 yang baru mempunyai 1.924 grup kesenian. Minimnya sarana fisik/gedung kesenian di Kabupaten Bantul perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan aktivitas grup kesenian yang semakin bertambah.

3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Kabupaten Bantul sebagai salah satu destinasi wisata penting di DIY, khususnya jenis wisata budaya maka penyelenggaraan urusan kebudayaan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui kebijakan yang

berlandaskan prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aset seni budaya masyarakat, warisan budaya, dan Cagar Budaya (CB) guna menunjang predikat sebagai destinasi wisata budaya.

Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 meliput:

- Benda bergerak berjumlah 295 buah yang terdiri dari arca, watu gilang, lingga, yoni, dan lain-lain;
- Situs berjumlah 3 buah berupa watu songkamal, watu lindung di Kecamatan Piyungan, dan watu gilang di Kecamatan Pandak;
- Kawasan cagar budaya 4 buah terdiri dari makam raja-raja di Imogiri, Keraton Pleret, Kotagede, dan makam di Giriloyo;
- Pengelolaan kawasan budaya yaitu pengelolaan museum, warisan dan cagar budaya serta taman budaya di daerah melalui kegiatan lawatan sejarah ke Museum Wayang Kekayon di Kecamatan Banguntapan, Kompleks Masjid Jami Kotagede, Kompleks Makam Raja Mataram I Kotagede, dan Rumah Budaya Tembi, dan penilaian obyek yang diduga sebagai cagar budaya. Harapan ke depan potensi seni budaya, sejarah dan purbakala daerah dapat terinformasikan, terdokumentasi, dan terlindungi dengan baik.

Tabel 2.110.
Data Warisan/Cagar Budaya Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bambanglipuro	7
2	Banguntapan	24
3	Bantul	12
4	Dlingo	8
5	Imogiri	18
6	Jetis	9
7	Kasihan	15
8	Kretek	31
9	Pajangan	16
10	Pandak	12
11	Piyungan	13
12	Pleret	17
13	Pundong	18
14	Sanden	7

No	Kecamatan	Jumlah
15	Sedayu	3
16	Sewon	6
17	Srandakan	5
	Total	**21**

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2018

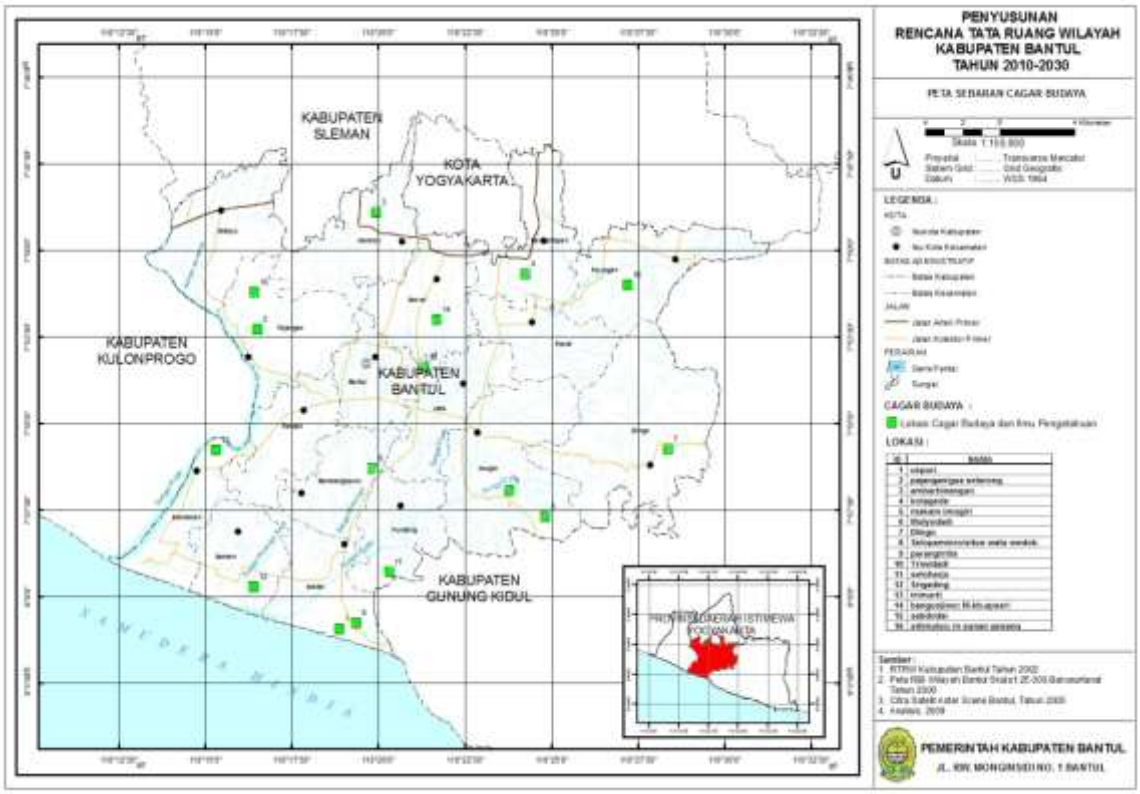

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.34.
Peta Sebaran Cagar Budaya di Kabupaten Bantul

4. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Ada delapan pilar prioritas pembangunan kebudayaan nasional antara lain pelestarian hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, penguatan multikulturalisme, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pengembangan industry budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan SDM dan pranata kebudayaan, dan pengembangan sarana prasarana kebudayaan. Pemerintah pusat telah melakukan pemantapan indikator indeks pembangunan kebudayaan dari pilar-pilar kebudayaan. Penilaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul berdasarkan hasil survey adalah 57,01. Nilai ini masih jauh dibawah nilai DIY yang menduduki peringkat pertama

tingkat nasional dengan nilai 80,00. Oleh sebab itu perlu upaya peningkatan pencapaian indeks pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul dengan memperhatikan berbagai aspek dalam delapan pilar prioritas kebudayaan nasional.

2.3.2.17. Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan di Kabupaten Bantul terdiri dari satu perpustakaan daerah dan layanan perpusatakaan keliling. Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan pelayanan perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Ada 143 titik lokasi layanan keliling. Pelayanan dilakukan selama 4 hari dalam 1 Minggu, 16 hari dalam sebulan, pada hari Senin-Kamis dengan rata-rata pengunjung perhari 1.481 orang.

Pelaksanaan perpustakaan keliling setiap hari Senin sampai dengan Kamis, dengan sasaran keliling meliputi perpustakaan sekolah, perpustakaan masjid, perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan komunitas masyarakat, perpustakaan desa dan perpustakaan khusus (dinas/instansi). Dari semua unit armada yang ada, sudah menerapkan IT dengan sistem otomasi perpustakaan.

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui system pendataam pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.111.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012-2017 Kabupaten Bantul

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	214.611	108.432	175.202	218.521	345.368	518.693

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul, 2018

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 214.611 orang dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 518.693 pengunjung. Meningkat 50% dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul antara lain disebabkan oleh metode layanan dengan menggunakan sistem otomasi, paket dan manual, penambahan lokasi layanan keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber-AC, suasana nyaman serta tersedianya SDM pengelola perpustakaan yang memadai.

3. Koleksi buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sejak tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kemitraan dengan *stakeholder* perpustakaan dan adanya variasi koleksi. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul yang ada saat ini sebanyak 104.300 buku dengan jumlah judul bahan koleksi yang tersedia sebanyak 40.300 judul. Perkembangan jumlah koleksi bahan pustaka dari 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.112.
Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

2013		2014		2015		2016		2017	
Judul	Buku	Judul	Buku	Judul	Buku	Judul	Buku	Judul	Buku
23.407	57.135	32.871	86.729	23.407	57.135	32.871	86.729	40.300	104.300

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul, 2018

2.3.2.18. Kearsipan

1. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Pengelolaan arsip secara baku adalah pengeloaan arsip yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:

a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara nasional;
b. menyediakan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
c. mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfatan arsip sesuai dengan ketentuan aturan yang ada;
d. melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
e. menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
g. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
h. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kearsipan, dilaksanakan berbagai upaya melalui:

a. Penerbitan buku petunjuk teknis kearsipan yang ditinjau ulang secara berkala;
b. Bimbingan teknis kearsipan bagi sumber daya manusia kearsipan (arsiparis, petugas arsip dinas/instansi/kecamatan/desa);
c. Penambahan personil untuk mendukung kinerja kantor;
d. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pengelolaan kearsipan yang meliputi:
   1) Diklat kearsipan
   2) Diklat penyataraan
   3) Diklat preservasi arsip
   4) Diklat JIKN
   5) Diklat arsip media baru
   6) Bintek kearsipan

Meski demikian, ada beberapa Diklat yang sangat dibutuhkan namun belum dapat dilaksanakan, yaitu:

a. Pernyataan arsiparis asli
b. Diklat TIMPAK

c. Diklat arsip dinamis
d. Diklat arsip statis
e. Diklat penyusunan JRA.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan).

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

1. Produksi Perikanan Budidaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019, sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan dijabarkan dalam tiga misi yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan**.** Adapun kondisi yang ingin dicapai adalah: 1) terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; 2) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan 3) terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Tabel 2.113.
Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan
Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Ikan	Produksi (Kg)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Gurami	2.038.269	2.123.092	2.038.280	1.860.867	2.028.830
2	Nila	2.151.031	2.361.658	2.231.763	1.924.565	2.114.000
3	Lele	6.688.746	7.088.024	6.106.252	6.738.202	7.094.430
4	Bawal	227.527	382.730	218.462	258.883	282.250
5	Patin	64.049	40.086	95.597	40.150	29.370
6	Mas	56.716	24.040	24.268	34.018	37.450
7	Udang Vannamei	579.218	925.418	650.602	507.038	440.890
8	Lain-lain	1.380	71.927	-	-	-
Jumlah		**10.980.671**	**11.806.936**	**13.016.975**	**11.365.224**	**12.027.236**

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2018

Pada tahun 2017 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 663.512 kg atau 5,84% dari 11.363.724 kg pada tahun2016 menjadi 12.027.236 kg. Kenaikan ini disebabkan karena introduksi teknologi baru yaitu budidaya ikan hemat lahan dan air (MATLAIR). Dengan lahan yang terbatas dan padat tebar tinggi, mampu meningkatkan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bantul.

Dukungan pemerintah dalam peningkatan produksi perikanan budidaya kepada masyakat senantiasa dilakukan, baik melalui pelatihan, pendampingan dan pembinaan serta pemberian bantuan sarana prasarana untuk meningkatkan produksi. Pengembangan budidaya perikanan juga didukung dengan pengembangan benih ikan melalui empat Balai Benih Ikan (BBI) yakni BBI Barongan, Sanden, Gesikan, dan Krapyak, dan melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Produksi benih yang dihasilkan pada tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.114.
Produksi Benih Ikan dari UPR dan BBI Tahun 2013-2017

No.	Jenis Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	BBI	1.632.086	1.717.347	2.079.065	2.600.854	3.378.975
2	UPR	177.822.435	119.903.855	124.752.824	80.759.141	68.523.214

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya kenaikan produksi benih ikan pada tahun 2017 sebesar 1.935.106 ekor atau 2,32% dibanding dengan tahun 2016.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi benih berkualitas, antara lain dengan memberikan bantuan induk gurami, lele, nila, dan sarana perbenihan. Selain itu melalui pembinaan dan pengembangan perikanan juga telah diberikan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya baik untuk sarana pembesaran maupun pembenihan ikan.

2. Produksi Perikanan Tangkap

Selain perikanan budidaya, di Kabupaten Bantul juga terdapat perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap tahun 2017 sebesar 656,80 ton mengalami kenaikan 27,16% dibanding tahun 2016. Produksi perikanan tangkap tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.115.
Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	Jumlah (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi tangkap laut	546.787	364,86	391,37	234,30	396,20
2	Produksi tangkap perairan umum	655.350	487,71	349,23	282,20	260,60
Jumlah		1.202.137	852,67	741,60	516,50	656,80

Sumber: Diperpautkan Kabupaten Bantul, 2018

Kenaikan produksi ini diakibatkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Pembinaan dan pendampingan yang intensif dari penyuluh dan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.
b. Fasilitasi berbagai bantuan baik berupa alat penangkapan ikan, kapal penangkap ikan serta pinjaman modal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
c. Kondisi cuaca wilayah di Pantai Perairan Laut WPP 573 yang kondusif bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan dan didukung potensi ikan yang besar sehingga produksi perikanan tangkap laut meningkat.

2.3.3.2. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisata dan PAD sektor pariwisata disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.116.
Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)	Jumlah PAD (Rp)
2013	2.229.569	9.120.764.400,00
2014	2.298.351	9.767.144.025,00
2015	2.500.114	11.150.632.500,00
2016	2.800.800	12.739.875.250,00
2017	3.405.685*)	17.090.253.000,00

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2018

Ket: *) Jumlah kunjungan wisatan pada Minggu Pertama bulan Desember Tahun 2017, sedangkan sampai dengan akhir bulan Desember sebesar 3.711.384

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2017 mencapai 3.405.685 orang atau meningkat sebesar 21,59% dari tahun 2016. Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap PAD 2017 mencapai Rp17.090.253.000,00 atau meningkat sebesar 34,15% dari perolehan tahun 2016. Peningkatan perolehan tersebut di atas selain didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa-desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata.

Kemudian jika dilihat dari sisi jumlah daya tarik wisata dan usaha pariwisata di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dalam arti terdapat penambahan yang cukup signifikan dalam jumlah daya tarik wisata budaya dan usaha pariwisata dalam bentuk restoran/rumah makan. Namun demikian tetap diperlukan upaya yang lebih komprehensif baik melalui penggalian sumberdaya wisata baru, peningkatan kerjasama pengembangan pariwisata, maupun peningkatan promosi investasi dan kemitraan di bidang pariwisata untuk membangun kepariwisataan Kabupaten Bantul di masa mendatang.

Tabel 2.117.
Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata
Tahun 2016-2017

No.	Daya Tarik Wisata	2016	2017	Satuan	Keterangan
1	Alam	20	20	Unit	Pantai, goa, ekosistem bakau, gumuk pasir
2	Buatan	54	59	Unit	Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro dan Desa Desa Wisata
No.	**UsahaPariwisata**	**2016**	**2017**	**Satuan**	**Keterangan**
1	Hotel bintang	1	1	Unit	Sejak 2012, bintang empat
2	Hotel non-bintang	94	117	Unit	
3	Restoran/rumah makan	199	225	Unit	
4	Jasa perjalanan wisata	25	67	Unit	
5	Transportasi Wisata	4	5	Unit	
6	Jasa hiburan dan rekreasi	22	57	Unit	
7	Tempat Penyelenggaraan Pertemuan ,Konferensi, (MICE)	2	7	Unit	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2018

Kunjungan wisata meningkat pada enam hari besar tertentu, yaitu liburan tahun baru 2018 di obyek wisata Pantai Parangtritis; padusan 2017 di obyek wisata Pantai Parangtritis; lebaran 2017 di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, obyek wisata Pantai Kuwaru, obyek wisata Goa Cerme, dan obyek wisata Goa Selarong; malam satu sura 2017 di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, dan obyek wisata Pantai Kwaru; dan malam tahun baru 2018 di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai

Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, dan obyek wisata Pantai Kuwaru.

Tabel 2.118.
Desa Wisata Tahun 2017

No.	Nama Desa Wisata	Alamat/ website	Potensi Wisata	Jenis Kategori	CP
1	Kaki Langit	Mangunan, Dlingo	Alam Perbukitan Aneka Kerajinan Kuliner tiwul dll.	berkembang	Purwoharsono 081804117711
2	Goa Gajah	Lemahbang Mangunan Dlingo	Goa Gajah	embrio	Sugimin 087839879069
3	Cempluk	Cempluk, mangunan, Dlingo	Wisata budaya& kerajinan	embrio	Suhardi 087739697151
4	Songgo Langit	Skorame, Mangunan, Dlingo	Wisata budaya& kerajinan	embrio	Lagimin 087839983308
5	Banyu Nibo	Rejosari, Terong, Dlingo	Pertanian terasering *Tracking* Gunung api purba Air terjun	embrio	Sagiyo 081804254475 Aris 08522843669 Sukamdan 087838391333
6	Karangasem	Karangasem Munthuk	Kerajinan Bambu, alam	embrio	Karyadi 083867161718
7	Karang Tengah	Karang Tengah, Imogiri Kasiutri.com	Budidaya Ulat Sutera & Batik Pewarna alami	maju	Pargiyanto 08128003052 Sogiyanto 085867224945
8	Kebon Agung	Desa Kebon Agung, Imogiri Kebonagungimogiri .blogspot.com	Wisata Pendidikan Pertanian	maju	Bachroni 081328732113 Dalbiya 081392525751
9	Candran	Desa Kebon Agung, Imogiri Kebonagungimogiri .blogspot.com	Museum Tani Gejog lesung Nini thowog	maju	Kristyo Bintoro 085100865311 Ponijo 085643752225
10	Wukirsari	Desa Wukirsari Imogiri Desawukirsari.com	Batik Tulis Pewarna Alami	maju	Nur Ahmadi 08175475794 Agus B 0274 6557238
11	Pujungrejo	Desa Wukirsari Imogiri	Kerajinan Kulit Seni tari	embrio	Sujiono 08179108397
12	Imogiri	Desa Imogiri, Imogiri	Wisata Budaya	embrio	Surojo 087838842188
13	Wunut	Desa Sriharjo, Imogiri	Alam Budaya	embrio	Sugiyanto 087838421730
14	Krebet	Desa Sendang Sari, Pajangan Krebet.com	Kerajinan Batik Kayu	maju	Kemiskidi 0816685954, Yulianto 0818270657
15	Mangir, Ki Ageng Wonoboyo	Desa Sendangsari Pajangan	Wisata Sejarah mataram islam Reog Campursari Kuliner Gudeg manggar	embrio	Irwan Purnomo 085729810210 Muh. Irwan 08157955413
16	Guwosari Slarong	Desa Guwosari, Pajangan Guwosaricraft.com	Cagar Budaya & Kerajinan kayu Goa selarong	berkembang	Dahono 0817464977 Jumino 0274 9111498
17	Kampung Santan	Desa Guwosari, Pajangan Guwosaricraft.com	Kerajinan Tempurung Kuliner ingkung	berkembang	Zukron 086647545570 Nur taufik

No.	Nama Desa Wisata	Alamat/ website	Potensi Wisata	Jenis Kategori	CP
					085643454575
18	Kalak Ijo	Desa Guwasari, Pajangan	Kuliner ingkung, budaya	embrio	Haryanto 081227077577 Sareh 0815100204545
19	Tembi	Desa Timbulharjo, Sewon Tembivillage.wordpress.com	Aneka Kerajinan	maju	Dawud Subroto 081392133205
20	Kajigelem	Desa Bangunjiwo, Kasihan	wisata budaya pembuatan gerabah	berkembang	H. Suburjo Hartono, SE 0274 7475423
21	Jipangan	Jipangan, Bangunjiwo, Kasihan	Seni Budaya & kerajinan	berkembang	Darmawan 085640423376 Siyam 81328431269
22	Manding	Desa Sabdodadi, Bantul	Sentra Kerajinan Kulit	maju	Jumakir (0274) 6662191 Siti Fatimah 0274 8336586
23	Jagalan	Desa Jagalan, Banguntapan	Cagar Budaya	embrio	Bambang Winardi 085868269754
24	Kalibuntung	Desa Srihardono, Pundong Desawisatakalibuntung.com	out bond pendidikan	berkembang	Eko 081568444252 Kholis 087839098211
25	Kampung Surocolo	Desa Seloharjo, Pundong	Seni Budaya, gua jepang	embrio	Rutijo 081804271322
26	Panjangrejo	Desa Panjangrejo, Pundong	Kerajinan Gerabah	berkembang	Suparjo 081802637571
27	Puton	Desa Trimulyo, Jetis	Alam dan perikanan	berkembang	Soraya Isfandiary 081328570018
28	Trimulyo	Desa Trimulyo, Jetis	Cagar Budaya & batik sekar nitik	embrio	Emam Darmawan 081804077645
29	Kiringan	Desa Canden, Jetis	Jamu Herbal	embrio	Sudiyatmi 08179426696
30	Mangrove	Tirtohargo Kretek	Alam, pena-naman mangrove	embrio	Dwi Ratmanto 085100294460
31	Laguna Depok	Depok Parangtritis	Outbond, Kuliner sea food	embrio	Tanto 08193177723
32	Mulyodadi	Desa Mulyodadi Bambanglipuro	Kuliner, senibudaya	embrio	Sigid 081328512189
33	Lopati	Desa Trimurti, Srandakan	Kuliner	berkembang	Pairin 081392883667
34	Gilangharjo	Desa Gilangharjo Pandak	Wisata Alam Pendidikan	embrio	supriyanto 081903714747
35	Pandansari	Desa Gadingsari, Srandakan	Wisata Pantai & Buah Naga	embrio	Rohjiyanto 081804275277
36	Goa Cemara	Desa Gadingsari, Srandakan	Wisata Pantai, outbond	berkembang	Wahadi 081804197658
37	Kergan	Desa Tirtomulyo, Kretek	Wisata Pendidikan Perikanan	embrio	Sunarto
38	Ngringinan	Desa Palbapang, Bantul	Wisata Museum	embrio	Windu Hadi Kuntoro 085842856438

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2018

2.3.3.3. Pertanian

1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB.

Tujuan pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, adalah meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.119.
Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas
Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kacang Tanah dan Kedelai Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Uraian	Tahun					Ket.
			2013	2014	2015	2016 *	2017	
1	Padi Ladang	Luas Panen	71	30	120,00	65,00	45	Ha
		Produktivitas (GKG)	30,28	45,25	57,08	32,75	39,21	ku/ha
		Produksi (GKG)	215	136	685,00	21,00	176	Ton
		Produksi beras	136	86	433,92	145,99	111,16	Ton
2	Padi Sawah	Luas Panen	32.621	30.160	29.642	30.009	30.026	Ha
		Produktivitas (GKG)	64,11	63,90	67,18	60,18	60,81	ku/ha
		Produksi (GKG)	209.133	192.711	199.141,00	180.595	182.603	Ton
		Produksi beras	132.172	121.793	125.857,11	119.426,9	119.901,8	Ton
3	Jagung	Luas Panen	3.371	3.826	4.312,00	3.647,00	3.379,5	Ha
		Produktivitas	19.076	22.671	67,10	69,63	24.222	ku/ha
		Produksi (pipilan kering)	56,59	59,26	28.933,00	25.394,00	71,67	Ton

No.	Komoditas	Uraian	Tahun					Ket.
			2013	2014	2015	2016 *	2017	
4	Kedelai	Luas Panen	1.412	1.562	1.660,00	980,40	920,4	Ha
		Produktivitas	2.203	2.501	16,77	12,87	1.325	ku/ha
		Produksi (wose kering)	15,6	16,01	2.784,00	1.262,00	14,39	Ton
5	Kacang Tanah	Luas Panen	2.451	3.106	3.390	2501,50	2.173	ha
		Produktivitas	13,61	13,5	17,75	13.78	3.064	ku/ha
		Produksi	3.336	4.192	6061	3448	14,10	ton

Sumber: Disperpautkan Kabupaten Bantul, 2018
*Angka sangat sementara

Pada tahun 2017 untuk padi ladang mengalami penurunan luas panen dari 65 ha menjadi 45 ha dan produksi beras dari 145,99 ton menjadi 111,16 ton dibanding tahun 2016. Sedangkan produktivitas dan produksi padi ladang mengalami peningkatan, produktivitas naik dari 32,75 ku/ha di tahun 2016 menjadi 39,21 ku/ha pada tahun 2017. Padi sawah terjadi kenaikan luas panen padi sebesar 17 ha, dan produksi padi mengalami kenaikan sebesar 2.008 ton dibandingkan tahun 2016. Kenaikan produksi padi sawah tahun 2017 ini disebabkan kenaikan produktivitas sebesar 60,81 ku/ha.

Upaya yang dilakukan demi peningkatan produktivitas ini diantaranya dengan penyediaan berbagai prasarana dan sarana pertanian (seperti pembangunan saluran irigasi), pelatihandan pendampingan kepada kelompok tani mulai dari *on farm* sampai dengan *off farm*, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pengendalian hama dan Organisme Penggangu Tanaman (OPT).

Selain tanaman padi, komoditas yang termasuk tanaman pangan adalah palawija. Palawija unggulan Kabupaten Bantul antara lain jagung, kacang tanah, dan kedelai. Produksi jagung pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 4,61% atau 1.172 ton dibandingkan tahun 2016, sedangkan produktivitasnya mengalami kenaikan sebesar 2,92% atau 2,04 ku/ha. Penurunan produksi jagung disebabkan penurunan luas panen sebesar 7,33% karena dampak siklon cempaka yang terjadi pada akhir bulan November. Seluas 14 Ha tanaman jagung pada lahan inundasi (bantaran sungai) di wilayah Seloharjo, Pundong mengalami puso dan gagal panen.

Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir dan lahan jagung tergenang air. Lahan jagung yang terendam lebih dari empat jam akan

menyebabkan tanaman jagung mati, sehingga terjadi panen muda atau bahkan gagal panen.

Pada tahun 2017 produksi kacang tanah mengalami penurunan sebesar 11,13% atau 384 ton dibandingkan tahun 2016. Penurunan produksi ini disebabkan oleh penurunan luas panen sebesar 13,13% atau 889 Ha. Hujan tinggi masih menjadi penyebab penurunan produksi kacang tanah ini. Pengisian polong pada saat hujan tidak terjadi secara maksimal sehingga panen muda dan produksi rendah.

Lain halnya dengan kedelai, pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Kenaikan produksi kedelai mencapai 4,99% atau 63 ton. Meskipun luas panen mengalami penurunan sebesar 6,12%, produktifitas mengalami kenaikan sebesar 11,8% sehingga mampu mendongkrak peningkatan produksi.

2. Produksi Komoditas Hortikultura

Tanaman sayuran dan buah-buahan termasuk dalam tanaman hortikultura, di antaranya bawang merah, cabai merah dan jamur. Bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 0,65% atau 50,80 ton. Kenaikan produksi ini terjadi karena terdapat peningkatan produktifitas sebesar 8,76%.

Produksi cabai merah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 265,93% dari 409,26 ton pada tahun 2016 menjadi 1.497,60 ton pada tahun 2017. Peningkatan produksi ini disebabkan peningkatan luas panen dan produktifitas masing-masing sebesar 252,59% dan 3,98%.

Peningkatan produksidan produktivitas tanaman hortikultura tersebut ditempuh dengan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP). Pelatihan GAP telah dilaksanakan baik GAP Sayur maupun GAP buah. Pelatihan GAP sayur dilaksanakan di kantor Balai Pelaksana Penyuluhan (BPP) Bambanglipiro dan BPP Sewon, sedangkan GAP buah dilaksanakan di Kelompok Tani Kediwung, dan Kelompok Tani Sukorame, Mangunan Dlingo.

Tabel 2.120.
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah, Cabai Merah, dan Pisang Tahun 2013-2017

No.	Bawang Merah	2013	2014	2015	2016	2017	Ket
1	Luas Panen	602	833	584	765	708	Ha
2	Produksi	7.327	8.616,4	4.501,9	7.859,40	7.910,20	Ton
3	Produktivitas	12,17	10,34	7,71	10,27	11,17	ton/ha
No.	**Cabai Merah**						**ket**
1	Luas Panen	581	189	469	116	409	Ha
2	Produksi	1.765,1	420,4	1.825,3	409,26	1.497,6	Ton
3	Produktivitas	3,04	2,22	3,89	3,52	3,66	Ton/ha
No.	**Pisang**						**ket**
1	Tanaman	419.498	161.900	391.409	376.235	228.310	pohon
2	Produksi	4.862	4.704	6.262,55	6.095	6.095,9	Ku
3	Produktivitas	0,12	0,29	0,16	0,162	0,267	ku/pohon

Sumber: Dipertahut, 2018 (angka sementara)

3. Produksi Komoditas Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu dan kelapa.Pada tahun 2017 produksi tembakau mengalami kenaikan sebesar 197,41% atau 2.020,5 ku, dengan kenaikan produktivitas sebesar 61,84% atau 3,68 ku/ha dibanding tahun 2016.

Produksi maupun produktivitas mete pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2016. Produksi mete meningkat sebesar 291,95% atau 100,11 ku dikarenakan luas panen mengalami kenaikan sebesar 6,29% atau 7,1 ha.

Tabel 2.121.
Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Komoditas	Uraian	Tahun					Ket.
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Tembakau	Luas Panen	164	219	478,60	172,00	316,00	ha
		Produksi	741,13	2.068,5	4.740,20	1.023,50	3.044	ku (rajang kering)
		Produktivitas	4,52	9,45	9,91	5,95	9,63	ku/ha (rajang kering)
3	Mete	Luas Panen	684,90	474	252,40	112,70	119,80	ha
		Produksi	93,94	6,56	174,95	34,29	134,40	ku (glondong krg)
		Produktivitas	0,14	0,01	0,69	0,30	0,76	ku/ha (glondong krg)
4	Tebu	Luas Panen	1.448,25	1.425,93	1333,66	1.174,32	1.207,69	ha
		Produksi	58.153,75	47.349,8	50.392,65	41.021,95	29.186,75	ku (hablur)
		Produktivitas	40,15	33,21	37,79	34,93	26,76	ku/ha (hablur)
5	Kelapa	Luas Panen	6.996,05	7.026,01	7.039,65	7.064,07	10.464,73	ha
		Produksi	80.585,47	88.925,89	89.456,53	102.622	112.677	ku (kopra)
		Produktivitas	11,52	12,66	12,71	14,53	15,87	ku/ha (kopra)

Sumber: Disperpautkan Kabupaten Bantul, 2018
*Angka sementara

Produksi tebu tahun 2017 menurun 28,85% atau 11.835,25 ku dibanding tahun 2016 karena terjadi hujan tinggi sehingga produktifitas juga menurun 23,39% dari 34,93 ku/ha menjadi 26,76 ku/ha. Hujan yang tinggi menyebabkan penurunan rendemen tebu. Penurunan rendemen tebu ini terjadi tidak hanya di Bantul, akan tetapi juga terjadi di seluruh Indonesia.

Produksi kelapa juga meningkat sebanyak 9,79% atau 10.055 ku. Produktifitas kelapa juga meningkat 9,25% atau 1,344 ku/ha karena cuaca optimal untuk pertumbuhan kelapa.

4. Produksi Komoditas Peternakan

Produksi komoditas peternakan daging terdiri dari daging sapi, kuda, kambing/domba, ayam, dan itik. Produksi telur terdiri dari telur ayam buras, ayam ras petelur, dan itik, sedangkan produksi susu berasal dari sapi perah seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.122.
Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

Produksi	Komoditas	2013	2014	2015	2016	2017
1	Daging (kg)	12.911.302	12.911.302	14.142.366	14.742.551	17.780.230
2	Telur (kg)	7.045.296	7.045.296	7.572.329	8.072.166	7.132.296
3	Susu (kg)	252.780	252.780	304.662	365.127	178.034

Sumber: Disperpautkan Kabupaten Bantul, 2018

Pada tahun 2017 terjadi kenaikan produksi daging dibanding tahun 2016. Kenaikan daging tersebut dipengaruhi oleh kenaikan populasi ternak besar, kecil, maupun unggas. Produksi telur dipengaruhi oleh kenaikan populasi ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Di sisi lain, pada tahun 2017 produksi telur dan susu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016.

Produksi ternak selain daging, telur, dan susu juga berupa anakan. Untuk menghasilkan anakan yang unggul telah disediakan *straw* untuk ternak sapi, domba, dan kambing. Jenis semen beku yang paling banyak digunakan adalah Simental, Limosin, Brahman, dan Peranakan Ongole (PO).

2.3.3.4. Kehutanan

Hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu

keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan bijaksana.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Kawasan hutan negara di Kabupaten Bantul luasnya 1.052,60 Ha. Jenis fungsi hutan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.123. Kawasan Hutan Negara 2016

Jenis Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam:	
a. Hutan cagar alam	11,40
b. Hutan taman nasional	-
c. Hutan wisata alam	-
d. Suaka alam laut dan daratan	-
e. Suaka alam perairan	-
2. Hutan lindung	1.041,20
3. Hutan produksi terbatas	-
4. Hutan poduksi	-
5. Hutan produksi yang dapat dikonversi	-
JUMLAH	**1.052,60**

Sumber: Disperpautkan Kabupaten Bantul, 2017

Kondisi lahan di Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 bagian yaitu kritis dan potensi kritis dengan luasan seperti pada tabel berikut:

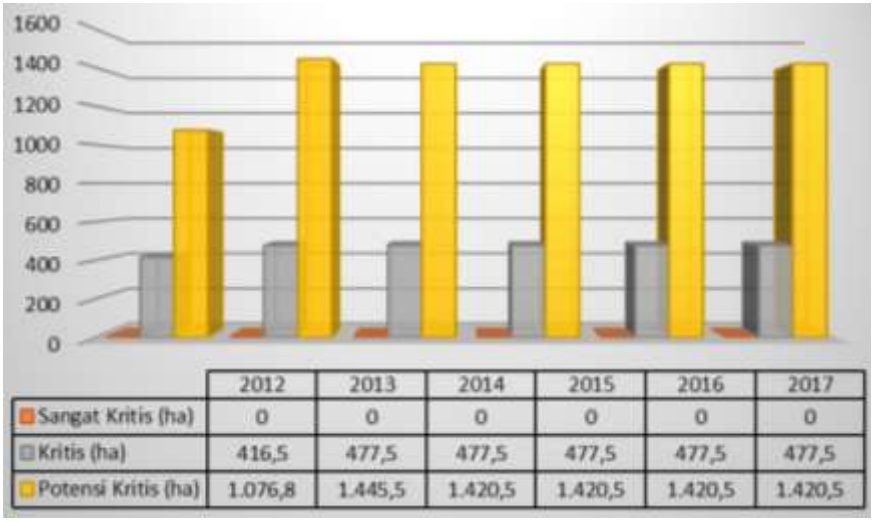

Sumber: Disperpautkan Kabupaten Bantul, 2018

Gambar 2.35.
Luas Lahan Kritis Tahun 2012-2017 di Kabupaten Bantul

Penanganan lahan kritis di Selopamioro, Seloharjo, dan Terong masih belum dapat menurunkan luasan lahan kritis, karena di 3 lokasi tersebut merupakan lahan potensial kritis dan tanaman masih memerlukan pemeliharaan sehingga dampak kegiatan masih belum dapat menjadikan lahan potensial kritis tersebut menjadi lahan produktif.

2.3.3.5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini sangat terbatas, khususnya terkait Sumber Daya Energi dan kebutuhan energi secara umum. Dalam upaya menggali potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bantul belum dapat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Bantul. Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi adalah dengan melakukan kajian. Kajian Geothermal di Parang Wedang, Kretek menunjukkan bahwa energi panas bumi di Parang Wedang belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C sedangkan panas bumi di Parangwedang adalah 40°C. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan beberapa kajian sebagai langkah awal ketercukupan kebutuhan energi di Kabupaten Bantul.

2.3.3.6. Perdagangan

1. Pasar Tradisional

Potensi perdagangan di Kabupaten Bantul diprioritaskan pada pengembangan pasar tradisional. Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain: memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat

inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat. Sampai dengan akhir tahun 2017 di Kabupaten Bantul terdapat 25 pasar yang kondisinya sudah baik, data tersebut disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.124.
Data Pasar Kondisi Baik Tahun 2017 di Kabupaten Bantul

No.	Nama Pasar	Luas Tanah	Kepemilikan	Jumlah Pedagang
1	Bantul	27.714	Pemda	1,565
2	Niten	32.635	Kas Desa	926
3	Klitikan Niten	4.000	Kas Desa	167
4	Janten	1.000	Pemda	79
5	Piyungan	23.500	Pemda	1,015
6	Imogiri	48.000	Kas Desa	1,587
7	Angkruksari	20.035	Kas Desa	513
8	Pijenan/Gesikan	15.000	Pemda	258
9	Hw.Pandak	1.888	SG	73
10	Pundong	6.085	Kas Desa	500
11	Jejeran	4.000	SG	711
12	Pleret	6.150	SG	421
13	Hw.Imogiri	12.000	Kas Desa	120
14	Sorobayan	20.315	Kas Desa	290
15	Semampir	2.890	SG	180
16	Sungapan	967	SG	118
17	Turi	8.050	Kas Desa	774
18	Celep	1.409	SG	121
19	Panasan	4.235	Kas Desa	231
20	Dlingo	40.000	Kas Desa	180
21	Ngipik	5.000	Pemda	167
22	Koripan	532	SG	53
23	Jragan	573	SG	47
24	Unggas Bantul	725	SG	166
25	Pasar Seni Gabusan	45.000	Kas Desa	79

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2018

Selain itu, Pasar Imogiri lolos mendapatkan sertifikat pasar ber SNI dari Badan Standarisasi Nasional. Standarisasi tersebut tertuang dalam SNI 8152:2015, dimana SNI tersebut mengatur tentang persyaratan umum, teknis, dan pengelolaan yang harus dipenuhi oleh pasar rakyat.

2. Ekspor Bersih Perdagangan

Pembangunan perdagangan di Kabupaten Bantul juga diarahkan pada peningkatan perdagangan internasional melalui pengembangan kegiatan ekspor. Perdagangan internasional Kabupaten Bantul menyumbang nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian Bantul. Hal ini dibuktikan dengan menggeliatnya kegiatan ekspor ke luar negeri. Pada tahun 2016, kegiatan ekspor di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan baik dari segi nilai, volume maupun macam komoditas. Hal ini disebabkan antara lain melalui upaya pembukaan peluang pasar negara tujuan baru, peningkatan daya saing produk dan intensifikasi promosi melalui keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkala dalam berbagai kegiatan pameran dagang. Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Bantul tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.125.
Perkembangan Ekspor Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Volume Ekspor (kg)	7.299.669,06	7.689.301,62	7.871.678,60	9.642.793.219,00	10.168.084,05
2	Nilai Ekspor (US$)	56.644.456,97	59.771.562,69	66.626.177,34	73.971.386.116,80	79.200.365,59
3	Jumlah Negara Tujuan	42	43	43	42	44
4	Macam Komoditi	36	35	36	36	36

Sumber: Dinas Perdagangan (diolah), 2018

Kondisi kinerja nilai ekspor pada tahun 2017 adalah sebesar 79.200.365,59 US$, mengalami kenaikan sebesar 7,09% dibanding tahun 2016.

Peningkatan ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti tekstil, *furniture*, dan *handycraft*, sedangkan negara tujuan ekpor utama adalah Australia, USA, Jepang, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura.

Tahun 2017, sektor perdagangan memberikan sumbangan sekitar 8,92% dalam struktur PDRB Bantul atau sebesar Rp 2.034.326 Juta. Jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY mengalami peningkatan sebesar 14% atau sebesar Rp 264.194 juta. Data PDRB sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.126.
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2008-2017

Tahun	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2008	778.308
2009	868.617
2010	952.424
2011	1.087.696
2012	1.236.290
2013	1.347.850
2014	1.473.263
2015	1.585.613
2016	1.770.132
2017	2.034.326

Sumber: Dinas Perdagangan (diolah), 2018

2.3.3.7. Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Bantul setelah sektor pertanian. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri kecil menengah. Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan. Perkembangan industri kecil menengah di Kabupaten Bantul tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.127.
Pertumbuhan Industri

No	Sektor Industri	2015		2016		2017	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1.	Pangan	8.290	27.480	8.754	29.019	9.095	29.783
2.	Sandang dan Kulit	854	6.719	902	7.095	921	7.449
3.	Kerajinan Umum	7.143	24.772	7.543	26.159	7.912	28.623

No	Sektor Industri	2015		2016		2017	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
4.	Kimia dan Bahan Bangunan	3.101	28.246	3.275	29.828	3.286	29.991
5.	Logam dan Jasa	1.035	2.900	1.093	3.062	1.096	3.162
Jumlah		**20.423**	**90.117**	**21.567**	**95.164**	**22.310**	**99.008**

Sumber data: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian per Desember 2018

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Industri kecil dan Menengah (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.

Potensi IKM di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 75 sentra lokasi IKM dengan jumlah pengrajin 22.645 IKM, tenaga kerja 99.920 orang, di Kabupaten Bantul memberikan kontribusi PDRB sebesar 15.17% . Adapun laju pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul sebesar 3.47%.

Pada tahun 2017 Kabupaten Bantul telah dinobatkan sebagai Kabupaten Kreatif setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif.

2.3.3.8. Ketransmigrasian

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah animo,

minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar. Penempatan transmigran dari tahun 2013-2017 ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.128.
Jumlah Transmigran di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah (KK)
2013	53
2014	23
2015	40
2016	50
2017	12

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2018

Jumlah KK transmigran pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Dalam kurun waktu 2012-2015, jumlah KK transmigran tertinggi pada tahun 2013 sebanyak 53 KK.

2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan

2.3.4.1. Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam hal perencanaan, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka koordinasi dengan pemerintah DIY dan Pusat juga dilaksanakan.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan monev dan evaluasi kinerja dalam

penerapan *e-Government* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

2.3.4.2. Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan

sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD DIY) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Mengupayakan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan dan evaluasi

kinerja dalam rangka penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan barang daerah yang transparan dan akuntabel;

3. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
4. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
5. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpatda;
6. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing PD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
7. Meningkatkan koordinasi antar PD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
8. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media *online, leaflet*, dan lain-lain;
9. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
10. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
11. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian.

Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari Pegawai Otonomi Daerah dan Pegawai Vertikal. Pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 berjumlah 10.741 orang yang terdiri dari 4.813 orang laki-laki dan 5.928 orang perempuan.

Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Kabupaten Bantul menurut golongan, terdiri dari:

- Golongan I berjumlah 133 orang
- Golongan II berjumlah 1.358 orang
- Golongan III berjumlah 4.787 orang
- Golongan IV berjumlah 4.463 orang

Sedangkan Pegawai Negeri Vertikal di Kabupaten Bantul Tahun 2016 berjumlah 1.503 orang, yang terdiri dari 829 orang laki-laki dan 674 orang perempuan. Sementara, menurut golongan, terdiri dari:

- Golongan I berjumlah 18 orang
- Golongan II berjumlah 190 orang
- Golongan III berjumlah 911 orang
- Golongan IV berjumlah 384 orang

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan Iptek

yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi *mindset* semua elemen, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan.

2.3.4.5. Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

a. Fungsi Penunjang Pengawasan

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Tabel 2.129. Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Kebutuhan	Kekurangan
			Berdasar Perbup 152/2016 tentang Formasi dan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	
1	Struktural			
	Inspektur	1	1	

	Sekretaris	1	1	
	Inspektur Pembantu	4	4	
	Kasubag	3	3	
2	Fungsional Tertentu			
	Auditor	21	36	15
	P2UPD	6	20	14
	Auditor Kepegawaian	-	4	4
3	Fungsional Umum	14	19	5
Jumlah		**50**	**88**	**38**

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bantul 2018

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2016 tentang Formasi dan Hasil analisis Jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul terdapat kekurangan 38 personil.

Berdasarkan hasil Audit Kinerja BPK terhadap Inspektorat Kabupaten Bantul tahun 2013 yang mendasarkan jumlah perhitungan formasi pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Perhitungan Formasi Auditor pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka jumlah total auditor Inspektorat Kabupaten Bantul adalah 94 personil sedangkan kondisi saat ini berjumlah 21 personil sehingga ada kekurangan 73 personil.

Terkait dengan kompetensi tenaga fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemetaan kompetensi terhadap pejabat fungsional yang ada. Kebutuhan kompetensi yang di butuhkan berdasarkan sasaran audit sejumlah 24 kompetensi yang harus didukung dengan 3 jenis diklat fungsional dan 21 jenis diklat substantif.

Untuk 3 jenis diklat fungsional (JFT Pertama, JFT Muda, JFA Madya) 27 personil pejabat fungsional telah mengikuti semua, sedangkan untuk 21 jenis diklat substantif belum merata diikuti oleh pejabat fungsional dan dilakukan secara bertahap.

b. Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah

dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

c. Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum

Fungsi penunjang pemerintahan umum merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat adalah pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diangkat oleh Bupati.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Aspek daya saing daerah berisi penjelasan terhadap 4 fokus, yaitu: fokus kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bantul dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran untuk kelompok non makanan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, persentase pengeluaran non makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Bantul semakin baik.

Tabel 2.130.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Tahun 2012-2016 di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Pengeluaran Konsumsi	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1	Non Makanan	55.05	53.31	52.80	55.85	58.44
2	Makanan	44,95	46,69	47,20	44,15	41,56

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2017

2.4.1.2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktifitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktifitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktifitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Tabel 2.131.
Produktivitas Per Sektor Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	PDRB ADHK	14.138.719	14.867.409	15.610.514	16.362.864	17.117.854
2	Jumlah Angkatan Kerja	522.558	524.148	471.920	510.544	558.980
3	Rasio Produktivitas Daerah	27,06	28,36	33,08	32,05	34,32

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018

2.4.1.3. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Penghitungan NTP diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Penilaian ini menunjukkan bahwa hasil dari kegiatan pertanian para petani tersebut dinikmati petani sendiri. Semakin tinggi angka NTP berarti semakin kuat tingkat kemampuan daya beli petani yang berarti menunjukkan kesejahteraan petani semakin meningkat. Nilai tukar petani di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari 97,56 persen pada 2015 menjadi 103,36 persen pada 2016. Tetapi pada tahun 2017 turun menjadi sebesar 101,47.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap

Rasio panjang jalan dalam kondisi mantap menunjukkan tingkat ketersediaan jalan yang dapat memberi akses setiap kendaraan. Semakin mantap kondisi jalan di suatu daerah, maka daya saing daerah tersebut akan meningkat. Rasio panjang jalan Kabupaten Bantul dalam kondisi mantap disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.132.
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang jalan kondisi mantap (km)	418,540	441,620	439,535	341,220	463,23
2	Panjang total jalan kabupaten (km)	872,130	871,125	872,125	609,440	624,470
Persentase (%)		**48**	**50,7**	**50,4**	**55.9**	**74,18**

Sumber: DPUP&KP Kabupaten Bantul, 2018

Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, pada tahun 2016 kondisi jalan kabupaten Bantul hanya 55,9% dari panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, sisanya dalam kondisi sedang, rusak dan rusak berat. Kondisi jalan mantap/baik pada tahun 2016 ini mengalami penurunan dari tahun 2015.

Pada tahun 2017 panjang jalan kondisi mantap mengalami peningkatan dari tahun 2016, yaitu sebesar 74,18% dari kondisi jalan kabupaten Bantul.

2.4.2.2. Jumlah Bank atau Perusahaan Yang Mendukung CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bentuk tanggung jawab organisasi atau perusahaan terhadap masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Kabupaten Bantul, CSR telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai dan telah terbukti memberikan andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMN, lembaga keuangan non BUMN, instansi kesehatan, instansi pendidikan, dan perusahaan umum yang ada di Kabupaten Bantul telah banyak mengalokasikan dana CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengapresiasi dan mendokumentasikan bantuan dana CSR tersebut, setiap tahun Pemerintah

Kabupaten Bantul setiap tahun menerbitkan buku CSR Membangun Bantul. Pada tahun 2016 tercatat ada 45 instansi dan perusahaan yang memberikan dana CSR kepada masyarakat Bantul.

2.4.2.3. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Penginapan/hotel yang tersedia di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun 2016 terdiri dari 1 hotel bintang 4 dan 94 hotel non bintang, meningkat dibandingkan kondisi pada Tahun 2015, yakni terdiri dari 1 hotel bintang 4 dan 87 hotel non bintang.

Jika dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata, perkembangan penginapan/hotel di Kabupaten Bantul cenderung meningkat. Jumlah hotel bintang 4 di Kabupaten Bantul tidak mengalami peningkatan, sedangkan jumlah hotel non bintang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah hotel non bintang mencapai 94 buah. Hal ini dipengaruhi oleh pola kunjungan wisatawan ke beberapa obyek wisata di Kabupaten Bantul yang umumnya bersifat singkat dalam arti tidak menginap sehingga berdampak pada rendahnya aspek permintaan terhadap kebutuhan hotel/penginapan di Kabupaten Bantul. Diperlukan upaya untuk lebih meningkatkan daya tarik keanekaragaman destinasi wisata sehingga diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Bantul yang pada akhirnya dapat memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten Bantul. Perkembangan ketersediaan penginapan/hotel tahun 2012–2016 di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.133.
Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Bantul
Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Penginapan/ Hotel	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur	Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur	Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur	Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur	Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur
1	Hotel Bintang 4	1	83	166	1	83	166	1	83	166	1	83	166	1	83	166
2	Hotel Bintang 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hotel Bintang 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Penginapan/ Hotel	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur	Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur	Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur	Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur	Jmlh Hotel	Jmlh Kamar	Jmlh Tempat Tidur
4	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	57	N/A	N/A	71	N/A	N/A	76	N/A	N/A	87	N/A	N/A	94	N/A	N/A
TOTAL JUMLAH PENGINAPAN/ HOTEL		**58**			**72**			**77**			**88**			**95**		

Sumber: Dinas PariwisataKabupaten Bantul, 2017

2.4.2.4. Ketersediaan Restoran

Tingkat ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan salah satu perkembangan tingkat daya tarik investasi pariwisata daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah khususnya sektor pariwisata dan peluang-peluang yang ditimbulkan dalam bentuk penyediaan lapangan pekerjaan, wisata kuliner dan pengembangan produk makanan lokal.

Tabel 2.134.
Jumlah Restoran di Kabupaten Bantul Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jenis Usaha restoran	115	129	159	177	199

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2017

2.4.2.5. Fasilitas Listrik dan Air Bersih

1. Fasilitas Listrik

Pengembangan Energi Terbarukan (EBT) di Kabupaten Bantul adalah energi hibrid yang merupakan implementasi dari Sistem Inovasi Daerah (SIDa) berupa pengembangan energi bayu (kincir angin) dan surya (*photovoltaic*/PV). Pembanguan kincir angin dilakukan leh Kementerian Riset dan Teknologi (kemenristek) dan LAPAN dengan melibatkan instansi baik pusat maupun daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta. PLTH dibangun di Pantai Baru Pandansimo karena di kawsan tersebut memiliki potensi angin dan cahaya matahari yang cukup melimpah, selain itu pada tahun 2009 wilayah tersebut belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Pada tahun 2010 telah dibangun 33 menara turbin angin

berdaya 56 kilo Watt (kW) dan 218 panel surya yang berkapasitas 27 kW sehingga secara keseluruhan total daya yang dihasilkan mencapai 83 kW.

Energi yang dihasilkan oleh PLTH ini telah dirasakan oleh masyarakat sekitar dan terbukti telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembuatan es, pompa air, penerangan jalan, warung, dan rumah di sekitar kawasan tersebut.

2. Fasilitas Air Bersih

Pengelolaan air minum untuk masyarakata dilaksanankan oleh Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul. Penyediaan air minum di daerah rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM dilakukan dengan cara pembangunan Hidran Umum (HU) dan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu untuk mendukung perkembangan Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota mandiri, telah dibangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di IKK Pajangan.

Jumlah pelanggan PDAM pada tahun 2015 sebesar 23.962 meningkat lebih dari 40% jika dibandingan tahun 2012, sedangkan jumlah air bersih yang disalurkan kepada masyarakt juga meningkat menjadi 3.779.386 m^3 pada tahun 2015. Rincian jumlah pelanggan PDAM dan air bersih yang disalurkan tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.135.
Jumlah Pelanggan dan Air Bersih yang disalurkan PDAM 2012-2016

No.	Data	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pelanggan	17.083	19.242	21.360	23.962	26.079
2	Air Bersih yang Disalurkan	2.927.293	2.738.498	3.412.848	3.779.386	4.489.915

Sumber: PDAM Kabupaten Bantul, 2017

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Perkembangan investasi di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, antara lain melalui kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, penyederhanaan prosedur birokrasi, perbaikan/pengembangan infrastruktur kawasan peruntukan industri, peningkatan sistem informasi investasi serta promosi investasi daerah yang lebih intensif serta optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu.

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.136.
Angka Kriminalitas Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus Narkoba	19	90	21	45	46
2	Jumlah kasus Pembunuhan	3	3	3	4	0
3	Jumlah Kejahatan Seksual	31	5	19	4	28
4	Jumlah kasus Penganiayaan	40	44	53	81	136
5	Jumlah kasus Pencurian	347	387	410	345	393
6	Jumlah kasus Penipuan	41	33	143	88	83
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	0	0	0	2
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	481	562	649	567	688
9	Jumlah Penduduk	938.433	913.407	919.440	928.676	927.181
10	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	5,13	6,15	7,06	6,11	7,40
10	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	5,13	6,15	7,06	6,11	7,40

Sumber: Polres Kabupaten Bantul, 2018

Pada tahun 2017, angka kriminalitas di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016. Peningkata angka kriminalitas ini di sebabkan meningkatnya tindak kejahatan terutama kasus penganiayaan. Hal ini masih perlu upaya penanganan dan pencegahan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam meminimalisir tindak kriminal.

Tabel 2.137. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah

No		Tahun					Rata-rata*	Standar Deviasi*
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	Pelanggaran	N/A	N/A	228	396	410	344,67	101,28
2	Sasaran	N/A	N/A	357	565	641	521	147,02
Prosentase		N/A	N/A	63,87	70,09	63,96	65,97	3,57

Sumber: Sat Pol PP Kabupaten Bantul 2018

Dilihat dari tabel di atas dilihat dari hasil prosentasenya jumlah pelanggaran perda di Kabupaten Bantul cukup tinggi. Dengan nilai rata-rata selama 3 tahun terakhir sebesar 65,97%. Rata-rata pelanggaran perda yang terjadi di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2015 – 2017 sebesar 344,67 pelanggaran. Angka ini dianggap masih cukup tinggi sehingga diperlukan adanya penegakkan peraturan (perda) yang lebih optimal.

2.4.3.2. Jumlah Demonstrasi

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjuk rasa. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut.

Tabel 2.138.
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bidang Politik	14	1	6	3	-
2	Ekonomi	3	6	2	5	-
3	Kasus pemogokan kerja	1	20	2	-	-
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	18	27	10	8	3

Sumber: Polres Kabupaten Bantul dan Satuan Pol PP Kabupaten Bantul, 2018

2.4.3.3. Lama Proses Perijinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari digalakannya reformasi birokrasi. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkat kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang perizinan.

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Bagi Kabupaten Bantul upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dalam proses perijinan terus ditingkatkan terutama sekali melalui reformasi di bidang perijinan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang menangani pengelolaan perijinan secara terpadu agar terjadi peningkatan pelayanan perizinan dengan prosedur yang mudah, murah, cepat, berkualitas, dan akurat.

Tabel 2.139.
Jenis Pelayanan Ijin dan Non Ijin Kabupaten Bantul

No.	Nama Perijinan	Jumlah Jenis Perijinan
1	Perijinan dasar	4
2	Perijinan perdagangan dan industri	13
3	Perijinan usaha dan jasa konstruksi	3
4	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	13
5	Perijinan angkutan	3
6	Perijinan bidang kesehatan	54
7	Perijinan bursa kerja luar negeri	1
8	Perijinan Penjualan Minuman Beralkohol	2
9	Perijinan Usaha Perikanan	5
10	Usaha Bidang Kominfo	1

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2018

Pada tahun 2017 Dinas Perijinan telah melayani jenis ijin dan non ijin yang meliputi:

a) Perijinan dasar : 4 jenis
b) Perijinan perdagangan dan industri : 13 jenis
c) Perijinan usaha dan jasa konstruksi : 3 jenis
d) Tanda daftar usaha pariwisata : 13 jenis
e) Perijinan angkutan : 3 jenis
f) Perijinan bidang kesehatan : 54 jenis

g) Perijinan bursa kerja luar negeri : 1 jenis
h) Perijinan penjualan minuman beralkohol : 2 jenis
i) Perijinan usaha perikanan : 5 jenis
j) Usaha bidang kominfo : 1 jenis

Dengan adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu, proses penyelesaian ijin dapat diselesaikan paling lama 12 hari jika syarat administrasi dan teknisnya lengkap, jelas, dan benar. Di samping itu, di Kabupaten Bantul pengurusan ijin dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis ijin dalam obyek ijin yang sama).

Selama tahun 2016 jumlah permohonan izin yang masuk ke Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sebanyak 6.807 dan dapat diterbitkan sebanyak 6.021 atau 88,45%. Adapun pada tahun 2017 permohonan ijin sebanyak 6.165 dan dapat diselesaikan/ditetapkan sebanyak 5.986 atau 97,09%; meningkat jika dibandingkan tahun 2016. Secara terperinci pelayanan perizinan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.140.
Lama Proses Perijinan di Kabupaten Bantul Tahun 2017

No.	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-Rata Maks Rp)
1	SIUP	3	10	Tidak dipungut
2	TDP	3	5	Tidak dipungut
3	IUI	5	10	Tidak dipungut
4	TDI	5	8	Tidak dipungut
5	IMB	6	13	Sesuai Rumus Perhitungan Retribusi IMB
6	Izin Gangguan	-	-	Sudah tidak diselenggarakan berdasarkan Perbup 43 tahun 2017 tentang Penghentian Pelaksanaan Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2011 tentang Izin Gangguan

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2018

Tabel 2.141.
Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul

No.	Jenis Izin	2015	2016	2017
1	Permohonan izin	6.930	6.807	6.165
2	Izin diterbitkan	5.940	6.021	5.986
3	Izin ditolak	151	165	177
4	Izin dalam proses	839	621	2

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2018

Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul mampu menyelesaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan perijinan dengan baik dan memuaskan melalui berbagai sarana baik datang langsung (disediakan loket khusus pengaduan), telepon, SMS, *e-mail*, maupun melalui *website* yang terintegrasi dalam SIM perizinan. Pengaduan yang masuk ditangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus penanganan pengaduan. Jumlah pengaduan yang masuk selama tahun 2016 adalah 78 pengadu.

Terkait ijin bangunan (IMB), data dari Dinas Perijinan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.142.
Penetapan IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan di Tahun 2017 Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	2017
1	Kasihan	387
2	Banguntapan	380
3	Sewon	159
4	Pleret	122
5	Bantul	58
6	Sedayu	283
7	Pajangan	38
8	Piyungan	41
9	Jetis	64
10	Bambanglipuro	23
11	Srandakan	4
12	Pandak	12
13	Imogiri	15
14	Kretek	9
15	Dlingo	2
16	Pundong	6

17	Sanden	7
Jumlah		**1.610**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2018

2.4.3.4. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha/investasi dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2.143.
Daftar Perda yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi Kabupaten Bantul

Jenis Perda
1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
3. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Moal di Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Kontruksi;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Jenis Perda
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038; dan
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038.

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Bantul, 2018

2.4.4. Status Desa

Selain status desa perdesaan dan perkotaan, ada status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, mengingat desa Kabupaten Bantul memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi luas wilayah, kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, dll. Hal ini penting karena pembangunan perdesaan merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembanguan kawasan perdesaan". Selain itu juga mendukung salah satu Nawacita pemerintah, yaitu “Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”.

Ada dua status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan hasil analisis dari basis data yang sama yaitu hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2014.

Berdasarkan hasil pendataan Podes pada tahun 2008, diketahui masih terdapat 16 desa dengan status “**desa tertinggal**”. Namun, berdasarkan tolok ukur IPD maupun IDM yang berbasis Podes Tahun 2014, tidak terdapat lagi desa di Kabupaten Bantul dengan status ‘**desa tertinggal’**.

Status desa berdasarkan kriteria dan indikator pengukuran desa adalah:

a. Indeks Pembangunan Desa (IPD)

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan bagian dari rencana pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPD) dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. IPD dikeluarkan oleh Bappenas berdasarkan data sensus Potensi Desa (Podes) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan dalam jangka waktu tiga tahunan. Pendataan Podes terakhir dilakukan pada bulan April 2014 yang mendata seluruh wilayah administrasi hingga mulai tingkat desa, kecamatan, hingga

kabupaten. Nantinya diharapkan Podes dapat dilakukan dalam jangka waktu satu tahunan sebagai data dasar IPD.

Terdapat lima dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) yaitu:

1) Pelayanan dasar yang merupakan aspek untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Indikator pada aspek ini meliputi: ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan (TK, SD, SMP, SMA) dan ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik dan lain-lain);
2) Kondisi infrastruktur yang mencakup sarana prasarana dasar, pengembangan ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (pertokoan, minimarket, warung makan, sarana prasarana sanitasi dan lain-lain);
3) Aksesibilitas/transportasi yang meliputi kondisi jalan, ketersediaan angkutan umum, waktu tempuh dan biaya transportasi per kilometer dan lain-lain;
4) Pelayanan publik, yang mencakup penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), gizi buruk, ketersediaan fasilitas olah raga dan lain-lain;
5) Penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kelengkapan pemerintah desa, aset, kualitas SDM aparatur desa, dan lain-lain.

Dari lima dimensi IPD tersebut yang mencapai bobot terbesar adalah pelayanan publik kemudian pelayanan dasar, sedangkan yang terkecil ialah kondisi infrastruktur. Dengan melihat bobot tertinggi pada "pelayanan publik" maka peningkatan pelayanan publik akan mendorong IPD meningkat signifikan.

Hasil evaluasi pembangunan desa 2014 dapat dibedakan desa-desa berdasar karakteristik Tertinggal, Berkembang, dan Mandiri, yang kemudian dari masing-masing karakteristik dapat dibedakan menjadi "mula", "madya", dan "lanjut". Perkembangan desa tahun 2014 terlihat memusat pada desa berkembang.

Klasifikasi desa pada IPD adalah "tertinggal" (desa dengan indeks < 50), kemudian "berkembang" (desa dengan indeks > 50 dan < 75), dan "mandiri" (desa dengan indeks > 75).

b. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah pengukuran tentang klasifikasi dan status desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yakni mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa pada tahun 2019.

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial (indeks ketahanan sosial), ekonomi (indeks ketahanan ekonomi) dan lingkungan (indeks ketahanan ekologi). Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari dimensi:

1. modal sosial;
2. kesehatan;
3. pendidikan; dan
4. permukiman.

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari perangkat indikator:

1. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
2. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator: a) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen); b) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan c) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
3. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator: terdapat kantor pos dan jasa logistik.
4. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
   a) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
   b) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
   c) Akses penduduk ke kredit.

Indeks Ketahanan Ekologi terdiri dari perangkat indikator:

1. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:

a) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah, dan udara; dan
b) Terdapat sungai yang terkena limbah.

2. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
   a) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan
   b) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa dalam lima status, yakni:

1. Desa Sangat Tertinggal;
2. Desa Tertinggal;
3. Desa Berkembang;
4. Desa Maju; dan
5. Desa Mandiri.

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: < 0,491
2. Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri: > 0,815

Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten Bantul menurut IPD maupun IDM, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.144.
Status Desa di Kabupaten Bantul Menurut
Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM)

No.	Kecamatan	Desa	IDM	Klasifikasi	IPD	Klasifikasi
1	Srandakan	Poncosari	0,7641	Maju	77,86	Mandiri
		Trimurti	0,7658	Maju	78,47	Mandiri
2	Sanden	Srigading	0,7032	Berkembang	78,61	Mandiri
		Gadingsari	0,8038	Maju	75,36	Mandiri
		Gadingharjo	0,6977	Berkembang	64,79	Berkembang
		Murtigading	0,7678	Maju	74,39	Berkembang
3	Kretek	Tirtoharjo	0,7032	Berkembang	67,6	Berkembang
		Donotirto	0,8308	Mandiri	83,07	Mandiri
		Parangtritis	0,8511	Mandiri	82,64	Mandiri
		Tirtosari	0,676	Berkembang	68,86	Berkembang

No.	Kecamatan	Desa	IDM	Klasifikasi	IPD	Klasifikasi
		Tirtomulyo	0,800	Maju	75,71	Mandiri
4	Pundong	Seloharjo	0,7638	Maju	68,22	Berkembang
		Srihardono	0,8156	Mandiri	77,92	Mandiri
		Panjangrejo	0,7877	Maju	69,67	Berkembang
5	Bambanglipuro	Sumbermulyo	0,842	Mandiri	82,04	Mandiri
		Sidomulyo	0,7969	Maju	75,84	Mandiri
		Mulyodadi	0,7155	Maju	76,77	Mandiri
6	Pandak	Caturharjo	0,7452	Maju	73,63	Berkembang
		Wijirejo	0,7677	Maju	77,24	Mandiri
		Triharjo	0,7648	Maju	72,01	Berkembang
		Gilangharjo	0,8072	Maju	79,13	Mandiri
7	Pajangan	Guwosari	0,792	Maju	73,34	Berkembang
		Triwidadi	0,7198	Maju	68,76	Berkembang
		Sendangsari	0,7299	Maju	67,68	Berkembang
8	Bantul	Sabdodadi	0,7476	Maju	74,99	Berkembang
		Palbapang	0,801	Maju	80,52	Mandiri
		Ringinharjo	0,7427	Maju	74,2	Berkembang
		Bantul	0,8059	Maju	83,4	Mandiri
		Trirenggo	0,7702	Maju	72,87	Berkembang
9	Jetis	Patalan	0,7757	Maju	78,12	Mandiri
		Trimulyo	0,7935	Maju	77,23	Mandiri
		Canden	0,7661	Maju	71,77	Berkembang
		Sumberagung	0,7874	Maju	76,03	Mandiri
10	Imogiri	Selopamioro	0,7159	Maju	73,66	Berkembang
		Kebonagung	0,7282	Maju	71,86	Berkembang
		Sriharjo	0,7097	Maju	69,82	Berkembang
		Karangtalun	0,7729	Maju	73,03	Berkembang
		Karangtengah	0,6930	Berkembang	63,50	Berkembang
		Imogiri	0,7364	Maju	80,05	Mandiri
		Wukirsari	0,7643	Maju	78,38	Mandiri
		Girirejo	0,7261	Maju	64,28	Berkembang
11	Dlingo	Mangunan	0,7113	Maju	72,38	Berkembang
		Dlingo	0,6644	Berkembang	69,32	Berkembang
		Muntuk	0,7061	Berkembang	71,24	Berkembang
		Temuwuh	0,7471	Maju	73,21	Berkembang
		Jatimulyo	0,6366	Berkembang	64,91	Berkembang
		Terong	0,7318	Maju	77,16	Mandiri
12	Banguntapan	Tamanan	0,8371	Mandiri	79,05	Mandiri
		Baturetno	0,8339	Mandiri	82,35	Mandiri
		Jagalan	0,6481	Berkembang	64,98	Berkembang
		Banguntapan	0,8649	Mandiri	89,02	Mandiri
		Singosaren	0,7519	Maju	73,32	Berkembang

No.	Kecamatan	Desa	IDM	Klasifikasi	IPD	Klasifikasi
		Wirokerten	0,8181	Mandiri	78,66	Mandiri
		Jambidan	0,7240	Maju	69,30	Berkembang
		Potorono	0,8293	Mandiri	82,12	Mandiri
13	Pleret	Bawuran	0,6486	Berkembang	64,68	Berkembang
		Wonokromo	0,7954	Maju	78,26	Mandiri
		Wonolelo	0,6405	Berkembang	64,94	Berkembang
		Segoroyoso	0,7155	Maju	76,20	Mandiri
		Pleret	0,8271	Mandiri	80,81	Mandiri
14	Piyungan	Sitimulyo	0,7713	Maju	81,77	Mandiri
		Srimulyo	0,8053	Maju	79,20	Mandiri
		Srimartani	0,7377	Maju	75,02	Mandiri
15	Sewon	Pendowoharjo	0,8271	Mandiri	79,72	Mandiri
		Bangunharjo	0,8588	Mandiri	84,70	Mandiri
		Timbulharjo	0,8369	Mandiri	80,75	Mandiri
		Panggungharjo	0,8141	Maju	82,29	Mandiri
16	Kasihan	Tamantirto	0,7135	Maju	70,54	Berkembang
		Tirtonirmolo	0,7604	Maju	81,42	Mandiri
		Ngestiharjo	0,8264	Mandiri	82,03	Mandiri
		Bangunjiwo	0,7259	Maju	70,15	Berkembang
17	Sedayu	Argodadi	0,6739	Berkembang	66,13	Berkembang
		Argosari	0,7574	Maju	75,57	Mandiri
		Argomulyo	0,8641	Mandiri	75,35	Mandiri
		Argorejo	0,7710	Maju	79,96	Mandiri

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018

Berdasarkan Tabel diatas, analisis status desa di Kabupaten Bantul menurut IPD, dapat disimpulkan:

1. Tidak ada satupun desa di Kabupaten Bantul yang mendapat status tertinggal;
2. Jumlah desa yang berstatus ‘Mandiri’ sebanyak 41 desa dan ‘Berkembang’ sejumlah 34 desa;
3. Berdasarkan *ranking* IPD, tiga desa dengan skor tertinggi adalah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan (89,02); Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon (84,70); dan Desa Bantul, Kecamatan Bantul (83,40). Adapun desa dengan nilai terendah adalah Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri (63,50); Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri (64,28); dan Desa Bawuran, Kecamatan Pleret (64,68).

Sementara berdasarkan analisis menurut IDM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada satupun desa di Kab. Bantul yang mendapat status tertinggal;
2. Menurut IDM, terdapat sejumlah 15 desa dengan kriteria 'Mandiri', 48 'Maju' dan sisanya 12 'Berkembang';
3. Menurut *ranking* IDM, tiga desa dengan skor tertinggi adalah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan (0,8649); Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu (0,8641); dan Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon(0, 8588). Adapun desa dengan nilai terendah adalah Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo (0,6366); Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret (0,6405); dan Desa Bawuran, Kecamatan Pleret (0,6486).

2.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2.4.5.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin

baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.145.
Pencari Kerja yang Terdaftar Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No	Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD	41	139	8	52	46
2	SLTP	216	399	143	112	340
3	SLTA Umum	482	1.023	479	515	689
4	SLTA Kejuruan	1.921	1.055	1.177	1.213	2.868
5	Diploma I dan II	113	12	23	17	162
6	Sarjana Muda/Diploma III	1.522	416	841	671	2.322
7	Diploma IV	0	0	0	0	67
8	Sarjana/S1	4.763	1.073	803	703	4.525
9	S2/S3	181	39	18	21	236
Jumlah/Total		**9.239**	**4.156**	**3.492**	**3.304**	**11.255**

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2018

Tenaga kerja yang terdaftar di Kabupaten Bantul cenderung masih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Sehingga, tenaga kerja di Kabupaten Bantul masih tergolong tenaga kerja terampil. Sedangkan tenaga kerja lulusan S1/S2/S3 yang merupakan tenaga kerja ahli hanya sedikit bila dibandingkan dengan lulusa SLTA, SLTP maupun SD. Dengan demikian, program pelatihan tenaga kerja mutlak diperlukan sehingga tenaga kerja di Kabupaten Bantul dapat bersaing di dunia kerja.

2.4.5.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditangung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orangtua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 menunjukkan angka hampir 46,69%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan tahun 2017 di Kabupaten Bantul masih tergolong tinggi dan jika dibandingkan dengan tahun 2016 ada penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif

di Kabupaten Bantul masih dominan sehingga dalam pembangunan daerah harus dapat memanfaatkan dan mengembangkan SDM yang produktif.

Tabel 2.146.
Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	151,706	194.160	197.912	206.905	196.441
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	116.824	88.331	86.776	93.398	92.668
3	Jumlah penduduk usia usia tidak produktif (1+2)	268.530	282.491	284.688	300.303	289.109
4	Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun	738.802	566.701	634.752	619.143	638.072
5	Rasio ketergantungan (3/4)	36,3	49.84	44,85	48,5	46,69

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Bantul, 2018

2.4.6. Capaian SPM 2017

Terbitnya PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mulai berlaku pada 1 Januari 2019, seharusnya diikuti dengan terbitnya peraturan yang mengatur penerapan SPM dari kementerian urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian terkait, namun pada saat ini masih dalam proses penyusunan. Baru ada satu peraturan yang sudah ditetapkan dari kementerian teknis yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait kondisi tersebut, pengukuran pencapaian SPM masih menggunakan PP Nomor 65 Tahun 2005.

Penyusunan capaian SPM tahun 2017 ada enam bidang meliputi:

1. Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota, capaian SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.147.
Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2017

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
I.	Pendidikan Dasar Oleh Kab/Kota	1	Tersedianya satuan pendidikan dalam	SD	100	100	100.00	100.00
				MI	-	-	100.00	100.00

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	SMP	100	100	100.00	100.00
				MTs	-	-	100.00	100.00
			Pembilang: Jumlah satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah SD, MI, SMP, MTs di Kabupaten	-	-	-	-	-
		2	**Pembilang:** Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belaja tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	80.1	83.8	70.18	74.24
				MI			86.76	70.91
				SMP	95.5	94.3	94.32	98.86
				MTs	-	-	63.64	89.77
			Pembilang: Jumlah SD/MI yang jumlah peserta didik tidak melebihi 32	-	-	-	-	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			orang dan Jumlah SMP/MTs yang tidak melebihi 36 orang					
			Penyebut: Jumlah SD, MI, SMP, MTs di Kabupaten	-	-	-	-	-
		3	Pembilang jumlah di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan parktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	75	60.92	22.73	43.18
				MTs	-	-	15.91	26.14
			Pembilang: Jumlah SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah SMP, MTs di Kabupaten	-	-	-	-	-
		4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang	SD	74.79	50.7	79.5	78.12
				MI			51.72	62.5
				SMP	75	52.9	75.00	93.18
				MTs	-	-	75.00	93.18

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;					
			Pembilang: Jumlah di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah SD, MI, SMP, MTs di Kabupaten	-	-	-	-	-
		5	Pembilang: Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	SD	83.19	99.44	99.17	100
				MI			100.00	100
				-	-	-	-	-
			Pembilang: Jumlah SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah	-	-	-	-	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;					
			Penyebut: Jumlah SD, MI di kabupaten	-	-	-	-	-
		6	Pembilang di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	76.14	100	62.7	65.91
				MTs	-	-	9.09	-
			Pembilang: Jumlah SMP/MTs tersedia SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah SMP, MTs di Kabupaten	-	-	-	-	-
		7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	SD	93	100	97.92	100
				MI	-	-	98.28	95.84
			Pembilang:					

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			Jumlah SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik					
			Penyebut: Jumlah SD, MI di kabupaten	-	-	-	-	-
		8	Pembilang: Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	SMP	90.91	91.95	91.48	98.86
				MTs	-	-	93.18	86.36
			Pembilang: Jumlah SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah SMP, MTs di	-	-	-	-	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			Kabupaten					
		9	Pembilang: Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kalifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	SMP	75	71.26	58.62	62.5
				MTs	-	-	50.00	-
			Pembilang: Jumlah SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah SMP, MTs di Kabupaten	-	-	-	-	-
		10	Di setiap Kabupeten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SD	91.9	82.6	88.92	92.52
				MI	-	-	89.66	-
			Pembilang: Jumlah SD/MI yang Kepala Sekolah berkualifikasi	-	-	-	-	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik					
			Penyebut: Jumlah SD/MI di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
		11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SMP	95.5	88.5	81.82	78.41
				MTs	-	-	86.36	-
			Pembilang: Jumlah SMP/MTs yang memiliki Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah SMP, MTs di Kabupaten	-	-	-	-	-
		12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SD	100	100	100	100
				MI			100	100
				SMP	100	100	100	100
				MTs	-	-	100	100
			Pembilang: Jumlah pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah	-	-	-	-	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			pengawas Sekolah Dasar, MTs, SMP di Kabupaten					
		13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efktif;	SD	100	100	100	100
				MI	-	-	100	100
				SMP	-	-	100	100
				MTs	-	-	100	100
			Pembilang: Jumlah SD, MI, SMP, MTs yang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah SD, MI, SMP, MTs di Kab/Kota	-	-	-	-	-
		14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD	53.78	56.58	82.4	96.12
				MI			65.52	
				SMP	81.82	83.91	80.68	100
				MTs	-	-	50	-
			Pembilang: Jumlah kunjungan pengawas ke	-	-	-	-	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;					
			Penyebut: Jumlah kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan	-	-	-	-	-
II	**Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan**	1	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan membandingkan satu set untuk setiap peserta didik;	SD	83.28	88.24	66.91	77.56
				MI	-	-	41.38	77.56
			Pembilang: Jumlah SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah SD/MI di	-	-	-	-	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			Kabupaten/Kota					
		2	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SMP	85.86	82.76	36.37	48.27
				MTs	-	-	15.46	21.59
			Pembilang: Jumlah SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;					
			Penyebut: Jumlah SMP/MTs di Kab/Kota					
		3	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	83.2	90.8	53.46	78.79
				MI	-	-	31.3	-
			Pembilang: Jumlah SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan	-	-	-	-	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;					
			Penyebut: Jumlah SD/MI di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
		4	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	80.11	80.95	79.55	95.57
				MI			72.4	
				SMP	93.18	71.26	79.55	87.50
				MTs	-	-	36.36	-
			Pembilang: Jumlah SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah SD/MI/SMP/MTs di Kab/Kota	-	-	-	-	-
		5	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,	SD	69.78	83.75	93.35	96.4
				MI			57.39	96.4
				SMP	70.45	82.76	62.5	77.27
				MTs	-	-	36.36	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;					
			Pembilang: Jumlah guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah Total Guru Tetap SD, MI, SMP, MTs di Kab/Kota	-	-	-	-	-
		6	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: a) Kelas I - II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; d) Kelas VII - IX: 27 jam per minggu;	SD	97.2	94.4	100	85.32
				MI	-	-	100	-
				SMP	100	94.25	100	100
				MTs	-	-	100	-
			Pembilang: Jumlah satuan Pendidikan SD, MI, SMP, MTs yang	-	-	-	-	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka					
			Penyebut: Jumlah total satuan pendidikan di Kab/Kota	-	-	-	-	-
		7	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;	SD	100	93.84	100	100
				MI			100	100
				SMP	100	89.66	100	100
				MTs	-	-	100	100
			Pembilang: Jumlah satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah total satuan pendidikan di Kab/Kota	-	-	-	-	-
		8	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;	SD	82.91	98.57	97.73	97.51
				MI			96.21	97.51
				SMP	87.5	98.05	87.39	96.59
				MTs	-	-	85.91	96.59
			Pembilang: Jumlah guru menerapkan	-	-	-	-	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;					
			Penyebut: Total Jumlah Guru di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
		9	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	SD	90.8	96.9	98.44	99.45
				MI	-	-	96.21	99.45
				SMP	93.2	99.8	87.5	96.59
				MTs	-	-	86.36	99.45
			Pembilang: Jumlah guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	-	-	-	-	-
			Penyebut: Total Jumlah Guru di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
		10	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	SD	79.8	87.7	96.12	98.61
				MI			86.21	
				SMP	67	89.7	77.27	96.59
				MTs	-	-	77.27	-
			Pembilang: Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap	-	-	-	-	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			semester;					
			Penyebut: Jumlah Total Kepala Sekolah di Kab/Kota	-	-	-	-	-
		11	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	SD	95.8	98.63	98.4	98.89
				MI			96.21	98.89
				SMP	95.45	99.77	93.98	98.86
				MTs	-	-	92.96	-
			Pembilang: Jumlah guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah guru di Kab/Kota	-	-	-	-	-
		12	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (U S/ U N) kepada orang tua	SD	98.04	97.48	94.32	99.17
				MI	-	-	89.66	98.34
				SMP	98.86	93.1	86.36	100
				MTs	-	-	84.09	100

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester;					
			Pembilang: Jumlah Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester;	-	-	-	-	-
			Penyebut: Jumlah Kepala Sekolah di Kab/Kota	-	-	-	-	-
		13	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	SD	98.32	98.32	96.4	100
				MI	-	-	94.24	100
				SMP	98.9	96.6	93.18	100
				MTs	-	-	83.39	98.61
			Pembilang: satuan pendidikan menerapkan	-	-	-	-	-

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		KONDISI CAPAIAN SPM				
				LEVEL	CAPAI-AN SPM 2014	CAPAI-AN SPM 2015	CAPAI-AN SPM 2016	CAPAI-AN SPM 2017
			prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)					
			Penyebut: Jumlah satuan pendidikan di Kab/Kota	-	-	-	-	-

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

Capaian SPM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang SPM Bidang Pendidikan, dimana tahun 2017 mulai menggunakan 3 Indikator SPM, seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.148. Capaian SPM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	Persentase
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Usia 5-6 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini	100%	-
2	Pendidikan Dasar	Usia 7-18 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan SD, SMP, dan SMA	100%	-
3	Pendidikan Kesetaraan	Usia 7-18 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan	100%	-

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.149.
Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2017

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator		Tahun/Capaian SPM (%)				
				2013	2014	2015	2016	2017
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4.	91,66	92	90,76	100	92,03
		2	Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani.	82,39	87,75	90,51	103	95,13
		3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	99,96	109,06	99,96	99	99,98
		4	Cakupan pelayanan Ibu Nifas.	100	100	95,14	96	97,23

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator		Tahun/Capaian SPM (%)				
				2013	2014	2015	2016	2017
		5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani.	77,1	84,4	100	95	93,9
		6	Cakupan kunjungan bayi.	90	90	90,45	89	90,18
		7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100	100	100	100	100
		8	Cakupan pelayanan anak balita.	77,75	84,35	90	80	80,36
		9	Cakupan pemberian makan pendamping ASI/pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100	100	100	100	100
		10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatanat.	100	100	100	100	100
		11	Cakupan panjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.	99,99	98,98	100	100	100
		12	Cakupan peserta KB Aktif.	80	80,57	70	75	75,95
		13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit.					
		a	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun.	100	100	100	120	167
		b	Penemuan penderita Pneumonia Balita.	100	100	100	87	100
		c	Penemuan pasien baru TB BTA Positif.	40,77	40,17	100	35	86,17
		d	Penderita DBD yang ditangani.	100	100	100	133	100
		e	Penemuan Penderita Diare.	10	10	20	40	54,8
		14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.	112,86	100	100	100	100
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin.	99,99	112,86	46,28	90	100
		16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100	100	100	100	100
III	Penyelidikan	17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan	100	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator		Tahun/Capaian SPM (%)				
				2013	2014	2015	2016	2017
			epidemiologi <24 jam.					
IV	Promosi	18	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	90,67	80	100

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

Capaian SPM Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang SPM Bidang Kesehatan, dimana tahun 2017 mulai menggunakan 12 Indikator SPM, seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.150. Capaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.270	13.132	92,03
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.375	12.373	99,98
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.355	10.575	85,59
4	Pelayanan Kesehatan Balita	48.774	44.029	90,27
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	26.762	26.754	99,97
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	180.997	180.997	100,00
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	41.545	16.618	40,00
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.509	34.509	100,00
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	1.441	1.441	100,00
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.599	5.599	100,00
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	696	696	100,00
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	880	880	100,00

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tabel 2.151.
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target Nasional		Capaian			
		Indikator		Nilai	Tahun	2014	2015	2016	2017
I	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat.	1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.	100%	2019	67.82	8144.57	81.45	7263.41
		2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.	70%	2019	-	-	81.2	81.16%
II	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat.	3	Tingkat kondisi jalan Kabupaten/Kota baik dan sedang.	60%	2019	75.49	86.62	87	73.22
		4	Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota.	100%	2019	100	100	100	100
III	Penyediaan air minum.	5	Persentase penduduk yang mendapatkan akses.	82%	2019	92.71	85.55	85.5	98.14
IV	Penyediaan sanitasi.	6	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai.	60%	2019	90.49	91.25	91.25	91.99
		7	Persentase pengurangan sampah di perkotaan.	20%	2019	-	-	-	-
		8	Persentase pengangkutan sampah.	70%	2019	14.61	14.90	14.9	12
		9	Persentase pengoperasian TPA.	70%	2019	70	70	70	0
		10	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50% (pen-duduk)	2019	12.64	86.92	86.29	28.01
				50% (gena-ngan)	2019	-	-	-	0
V	Penataan bangunan dan lingkungan.	11	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan.	60%	2019	-	-	91.72	98.17

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target Nasional		Capaian			
		Indikator		Nilai	Tahun	2014	2015	2016	2017
VI	Penanganan pemukiman kumuh perkotaan.	12	Persentase berkurangnya luasan permukiman.	10%	2019	0.00	14.66	14.66	50.38
VII	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi.	13	Persentse tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIP JAKI)	60%	2019	90.00	90.00	90	90.00
VIII	Izin usaha jasa konstruksi.	14	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	2019	-	-	92.31	-
IX	Informasi penataan ruang.	15	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital.	100%	2019	19.35	19.35	19.35	19.35
X	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	16	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	50%	2019	13.81	13.81	13.81	13.81

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana tahun 2017 mulai menggunakan 2 Indikator SPM, seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.152. Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	Persentase
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (m3)	100%	-
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100%	-

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.153.
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
I	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	91.7	91.73	91.73	98.60
		2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	9.0	9.02	9.02	96.60
II	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	84.0	84.00	84.00	100

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dimana tahun 2017 mulai menggunakan 2 Indikator SPM, seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.154. Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	Persentase
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	-

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.155.
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
I	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga.	-	100.0	100	100
		2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk.	-	97.2	97	97
		3. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.	-	96.30	88,67	88,67
		4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	-	42.88	43	43
II	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat.	5. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kab/Kota.	100	100.0	98.2	98.2
		6. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	3.0	3.0	-	3
		7. Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kab/Kota.	0.951	0.951	-	0.951
III	Penanggulangan Bencana Kebakaran.	8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kab/Kota.	-	-	69.69	34.71
		9. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	-	-	100	100.00
		10. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	-	-	22.58	9.62
		11. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	-	-	100.00	100.00

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja tentang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dimana tahun 2017 mulai menggunakan 5 Indikator SPM, seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.156. Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	Persentase
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Warga negara yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah	100%	-

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	Persentase
		Kabupaten		
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	100%	-
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	-
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	-
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	100%	-

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

6. Bidang Sosial

Tabel 2.157.
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2017

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan		Indikator		Tahun			
					2014	2015	2016	2017
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:				5	8	8	8
	A	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala Kabupaten/Kota.	1	Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	-	-	-	-
	B	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kab/Kota.	2	Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	10	10	12	12
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:				-	-	-	-
	A	Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala Kab/Kota.	3	Persentase (%) pantai sosial skala Kab/Kota yang menyediakan sarana.	75	80	80	80
	B	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kab/Kota.	4	Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang	60	60	60	60

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan		Indikator		Tahun			
					2014	2015	2016	2017
				menyediakan sarana.				
3	Penanggulangan korban Bencana				-	-	-	-
	A	Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kab/Kota	5	Persentase (%) korban bencana skala Kab/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	80	100	100
	B	Evakuasi korban bencana skala Kab/Kota.	6	Persentase (%) korban bencana skala Kab/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	-	-	-	-
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat, fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial:				-	-	-	-
	−	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kab/Kota.	7	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	8	10	10	10

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

Capaian SPM Dinas Sosial sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bidang Sosial, dimana tahun 2017 mulai menggunakan 2 Indikator SPM, seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.158. Capaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	Persentase
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	100%	-
2	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten	100%	-

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, 2018

Tabel 2.159.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Bantul

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Standar (Target 2017 sesuai RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021/Perda 11 Tahun 2016)	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017		
1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1,1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06	5,10	5,30	Belum tercapai, hal ini dikarenakan beberapa sektor utama pendukung perekonomian mengalami perlambatan pertumbuhan tidak sebaik tahun 2016.
1.1.2.	Pemerataan Pendapatan	Angka	0,3967	0,4126	0,3121	Belum tercapai, hal ini disebabkan bahwa sebagian penduduk perkotaan memiliki pola konsumsi yang jauh lebih tinggi dari masyarakat lainnya.
1.2.	Kesejahteraan Sosial					
1.2.1.	Pendidikan					
1.2.1.1.	Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,55	14,73	15,2	Belum tercapai, tetapi ada peningkatan lebih baik dari kondisi tahun 2016. Tahun 2017 masih angka sangat sementara.
1.2.1.2.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	%	8,79	8,84	8,84	Sesuai
1.2.1.3.	APM					
1.2.1.3.1.	APM SD	%	84,09	84,20	84,20	Sesuai

1.2.1.3.2.	APM SMP	%	67,64	67,70	67,7	Sesuai
1.2.1.4.	APK					
1.2.1.4.1.	APK PAUD	%	98,70	98,75	98,75	Sesuai
1.2.1.4.2.	APK SD	%	96,11	96,15	96,15	Sesuai
1.2.1.4.3.	APK SMP	%	95,10	95,15	95,15	Sesuai
01:02:02	Kesehatan					
1.2.2.1.	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,44	73,47	73,28	Melampaui
1.2.2.2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	7,65	8,74	8,35	Belum tercapai, hal ini dikarenakan tingginya kematian bayi yang disebabkan adanya penyakit kongenital, asfiksi dan infeksi.
1.2.2.3.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	96,77	72,8	87,5	Melampaui
1.2.2.4.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,4	0,41	0,37	Belum tercapai, capaian ini disebabkan karena meningkatnya gizi buruk dengan penyakit penyerta dan masih banyak balita dengan BBLR. Gizi buruk yang terentaskan masih masuk kategori gizi kurang.
1.2.3.	Kemiskinan					
1.2.3.1.	Angka Kemiskinan	%	14,55	14,07	13,66	Belum tercapai, tetapi lebih baik dari capaian tahun 2016. Hal ini sejalan dengan ketimpangan perekonomian antar wilayah dimana wilayah Kabupaten Bantul masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
1.2.3.2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77,36	77,61	77,61	Sesuai

2	PELAYANAN UMUM					
2.1. 2.1.1.	Pelayanan Urusan Wajib Urusan Wajib Terkait dengan Pelayanan Dasar					
2.1.1.1.	Pendidikan					
2.1.1.1.1.	Pendidikan Dasar					
2.1.1.1.1.1.	Persentase Kelulusan					
2.1.1.1.1.1.1.	SD/MI	%	100	100	100	Sesuai
2.1.1.1.1.1.2.	SMP/MTs	%	100	100	100	Sesuai
2.1.1.1.1.2.	Angka Melanjutkan					
2.1.1.1.1.2.1.	SD/MI	%	100	100	100	Sesuai
2.1.1.1.1.2.2.	SMP/MTs	%	100	100	100	Sesuai
2.1.1.1.1.3.	Angka Putus Sekolah					
2.1.1.1.1.3.1.	SD/MI	%	0,02	0,02	0,02	Sesuai
2.1.1.1.1.3.2.	SMP/MTs	%	0,02	0,02	0,02	Sesuai
2.1.1.2.	Kesehatan					
2.1.1.2.1	Prevalensi pemderita HIV	Angka	0,083	0,09	<0.5	Melampaui
2.1.1.2.2.	Angka Kesakitan/Insidence Rate (IR)DBD	per 100.000 penduduk	237,75	57,98	140	Melampaui
2.1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
2.1.1.3.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	N/A	71,57	72,00	Belum tercapai, tetapi capaian tersebut dengan mutu pelayanan infrastruktur termasuk berada pada kategori B (baik) dengan kinerja pelayanan baik.

2.1.1.3.2.	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	82,79	74,18	84,45	Belum tercapai, hal ini disebabkan adanya perubahan status jalan kabupaten dan jalan desa.
2.1.1.3.3.	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80	80	80	Sesuai
2.1.1.3.4.	Persentase kecukupan air irigasi	%	81,12	81,16	81	Melampaui
2.1.1.3.5.	Presentase penanganan banjir	%	20,30	24,90	20,56	Melampaui
2.1.1.3.6.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	70,00	70,24	81	Belum tercapai, tetapi capaian tersebut termasuk dalam klasifikasi tinggi yaitu pelaksanaan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rujukan rencana tata ruang.
2.1.1.3.7.	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	dokumen	-	2	74	
2.1.1.3.8.	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	%	-	70	84	
2.1.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
2.1.1.4.1	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan yang Tertangani	%	50	80	70	Melampaui
2.1.1.5.	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat					
2.1.1.5. 1.	Angka Kriminalitas	Angka	0,061	0,074	0,038	Belum tercapai, hal ini karena tingkat kejahatan semakin tinggi terutama kasus pencurian. Hal ini disebabkan adanya perubahan dan tuntutan pola hidup yang lebih konsumtif.
2.1.1.5.2.	Persentase penegakan perda	%	57	60	100	
2.1.1.5.3.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100	75	Melampaui
2.1.1.5.4.	Jumlah Intolenransi di Masyarakat	Kasus	-	-	-	Sesuai
2.1.1.5.5.	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi	%			-	Sesuai

			-	-		
2.1.1.5.6.	Desa Tangguh Bencana	Desa	15	29,33	22,66	Melampaui
2.1.1.5.7.	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	%	94	97	97	Sesuai
2.1.1.5.8.	Persentase Relokasi Warga	%	9,09	27,28		
2.1.1.5.9.	Persentase Sekolah Siaga Bencana	%	2,69	3,19	3,19	Sesuai
2.1.1.6.	Sosial					
2.1.1.6.1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	13,5	13,25	13,25	Sesuai
2.1.1.6.2.	Persentase Penanganan NAPZA	%	4	5	5	Sesuai
2.1.2.	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.1.2.1	Tenaga Kerja					
2.1.2.1.1	Angka Pengangguran	%	3,00	3,10	2,3	Belum tercapai, Hal ini disebabkan belum optimalnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta terbatasnya kesempatan kerja selain itu kondisi dunia usaha yang belum kondusif serta minimnya informasi pasar kerja.
2.1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1.2.2.1	Rasio kekerasan Perempuan dan Anak	rasio	0,38	0,38	0,38	Sesuai
2.1.2.3	Ketahanan Pangan					
2.1.2.3.1.	Ketersediaan energi	kkal/kapita/hari	3,079	3,08	3,08	Sesuai
2.1.2.3.2.	Ketersediaan protein	kkal/kapita/hari	72	72,20	72,20	Melampaui
2.1.2.3.3	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	93,20	93,30	93,30	Sesuai

2.1.2.3.4.	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	%	27	29	29	Sesuai
2.1.2.4.	Pertanahan					
2.1.2.4.1.	Cakupan sertifikasi tanah	%	-	84		
2.1.2.5.	Lingkungan Hidup					
2.1.2.5.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	31,35	45,10	45	Melampaui
2.1.2.5.2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	32	35	35	Sesuai
2.1.2.5.3.	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	55	60	60	Sesuai
2.1.2.5.4.	Indeks Tutupan Lahan	Angka	27,50	33,85	33,85	Sesuai
2.1.2.5.5.	Volume Sampah yang Tertangani	ribu m3	420	430	430	Sesuai
2.1.2.6.	Kependudukan dan Catatan Sipil					
2.1.2.6.1.	Persentase cakupan kepemilikan KTP	%	100	100	100	Sesuai
2.1.2.6.2.	Presentase cakupan kepemilikanakte kelahiran usia 0-18 tahun	%	80	85	85	Sesuai
2.1.2.6.3.	Rata-rata Cakupan Kepemlikikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	-	-		
2.1.2.6.4.	Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	%	-	-		
2.1.2.6.5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,18	81	81	Sesuai
2.1.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2.1.2.7.1.	Indeks Desa Membangun	Jumlah desa mandiri	14	16	88	
2.1.2.8.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
2.1.2.8.1.	Persentase Kategori Keluarga Kurang Sejahtera	%	13:49	13:15	13:15	Sesuai
2.1.2.8.2.	Rata-rata Jumlah Jiwa dalam Keluarga	Jiwa	3,29	3,2	3,24	Sesuai

2.1.2.9.	Perhubungan					
2.1.2.9.1.	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	%	5	6	6	Sesuai
2.1.2.10.	Komunikasi dan Informatika					
2.1.2.10.1.	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services (DGS)	%	60	70		
2.1.2.10.2.	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	-	75	70	Melampaui
2.1.2.11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
2.1.2.11.1.	Cakupan Jumlah KUKM yang Naik Kelas	Unit	-	180	50	Melampaui
2.1.2.11.2.	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Unit	-	180		
2.1.2.11.3.	Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	-	10		
2.1.2.12.	Penanaman Modal					
2.1.2.12.1.	Pertumbuhan Investasi	%	8,5	8,6	8,6	Sesuai
2.1.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga					
2.1.2.13.1.	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	4	4	4	Sesuai
2.1.2.14.	Statistik					
2.1.2.15.	Persandian					
2.1.2.16.	Kebudayaan					
2.1.2.16.1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54,8	57,01	50	Melampaui
2.1.2.16.2.	Jumlah desa budaya	Desa	9	10	10	Sesuai
2.1.2.16.3.	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	%	-	-		
2.1.2.17.	Perpustakaan					
2.1.2.17.1.	Persentase Peningkatan Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan	%	28,5	29	29	Sesuai
2.1.2.18.	Kearsipan					
2.1.2.18.1.	Persentase SKPD yang menyelenggarakan Kerasipan sesuai Standar dengan nilai baik	%	27	33	33	Sesuai

2.2	Pelayanan Urusan Pilihan					
2.2.1	Kelautan dan Perikanan					
2.2.1.1.	Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	0,35	5,92	1,30	Melampaui
2.2.1.2.	Produksi Perikanan	Ton	12.251	12.683	12.404	Melampaui
2.2.2	Pariwisata					
2.2.2.1	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	%	12,03	21,59	6	Melampaui
2.2.2.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.800.800	3.405.685	3.200.000	Melampaui
2.2.2.3	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,6	1,8	1,4	Melampaui
2.2.3.	Pertanian					
2.2.3.1.	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	%	9,94	0,1133	0,1010	Melampaui
2.2.3.2.	Pertumbuhan Produksi Tanaman Holtikultura	%	14,09	7,94	1,025	Melampaui
2.2.3.3.	Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan	%	7,8	0,17	0,15	Melampaui
2.2.3.4.	Pertumbuhan Produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	%	4,24	20,52	0,6	Melampaui
2.2.3.5.	Produksi daging	Ton	14.363,65	15.502,70	14.298.356	Sesuai
2.2.3.6.	Produksi Tanaman Pangan	Ton	231.092,01	231.325,42	231.325,42	Sesuai
2.2.3.7.	Produksi Tanaman Holtikultura	Ton	6420,02	6.485,83	6.485,83	Sesuai
2.2.3.8.	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	14.473,39	14.495,10	14.495,10	Sesuai
2.2.4.	Perdagangan					
2.2.4.1.	Pertumbuhan Ekspor	%	7	7	7	Sesuai
2.2.4.2.	Jumlah Pasar Tipe A	Unit	0	1		
2.2.4.3.	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perdagangan	%	7,63	4,61		
2.2.5.	Perindustrian					
2.2.5.1.	Pertumbuhan industri	%	1,58	3,4	1,6	Melampaui
2.2.5.2	Cakupan Industri Kreatif	%	39	41,11	30	Melampaui

2.2.6.	Transmigrasi					
2.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia *Governance Index*/IGI)	Klasifikasi	7,45 (Baik)	75 (Baik)	65 (Baik)	Melampaui
2.3.1.	Perencanaan Pembangunan					
2.3.1.1.	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	%	-	94,35		
2.3.1.2.	Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja Program OPD	%	-	90	92	
2.3.2.	Administrasi Keuangan Daerah					
2.3.2.1.	Opini Pemeriksaan BPK	Predikat	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	Sesuai
2.3.2.2.	Percepatan Belanja Pemerintah	%	48	60	60	Sesuai
2.3.2.3.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	21	22	22	Sesuai
2.3.2.4.	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	%	17	17:05	17:05	Sesuai
2.3.3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					
2.3.3.1.	Presentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	%	84	89	100	
2.3.3.2.	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	%	73,55	81,32	74	Melampaui
2.3.4.	Penelitian dan Pengembangan					
2.3.5	Pengawasan					
2.3.5.1	Nilai Maturitas SPIP	Level	Level 1 (1,92)	Level 2 (2,0)	level 2 (2.0)	Sesuai
2.3.6.	Perumusan Kebijakan					
2.3.6.1	Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	Angka	65	70	70	Sesuai
2.3.6.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79	80	80	Sesuai
2.3.6.3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,3 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3.4 (sangat tinggi)	Sesuai
2.3.6.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	80 (A)	82 (A)	82 (A)	Sesuai
2.3.6.5	Persentase Belanja Pegawai	%	55	52	52	Sesuai
2.3.6.6	Prosentase Raperda yang disetujui bersama	%	80	80		
2.3.7.	Pemerintahan Umum					

2.3.7.1.	IKM Kecamatan	%	70	80	80	Sesuai
2.3.7.2.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	%	80	85	85	Sesuai
2.3.7.3.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	75	80	80	Sesuai
2.3.7.4.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	70	80	80	Sesuai
3	DAYA SAING DAERAH					
3.1.	Nilai Tukar Petani	Angka	101,2	101,4	101,4	Sesuai
3.2.	Persentase Layanan Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan SOP	%	75	-	77	
3.3.	Percepatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	%	-	77		
3.4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78	78,5	78,5	Sesuai
3.5.	Upah Mininum Kabupaten	Rp	1.297.700	1.404.760	1.446.935	

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Keuangan daerah menunjukkan manajemen pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan di masa lalu yang menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Melalui analisis ini akan diperoleh gambaran kapasitas pendapatan dan belanja daerah untuk menjadi bahan penyusunan penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah proyeksi 3 (tiga) tahun kedepan. Gambaran kinerja keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

Komponen Pendapatan:

1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Komponen Belanja:

1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Komponen Pembiayaan:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan APBD, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan kedepan. Secara umum gambaran tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Gambaran tentang rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013-2017 tertuang pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Per-tumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	**PENDAPATAN**	**1.520.302.695.802,11**	**1.813.917.142.697,00**	**1.951.223.236.705,05**	**2.000.334.166.353,84**	**2.086.878.989.570,45**	**8,43**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**224.197.864.331,11**	**357.411.062.724,00**	**390.624.492.073,16**	**404.454.703.746,07**	**494.179.068.471,97**	**23,61**
1.1.1.	Pajak Daerah	83.232.017.500,00	99.558.470.705,00	123.257.183.734,63	133.474.742.165,22	165.562.359.004,37	**18,94**
1.1.2.	Retribusi Daerah	27.116.286.436,00	26.004.713.221,00	22.840.342.141,00	26.613.085.433,67	31.575.738.483,00	**4,72**
1.1.3.	Hasil Pengel. Keuangan Daerah yang dipisahkan	9.508.075.666,16	12.643.382.253,00	18.379.740.300,31	21.068.269.986,18	20.130.437.131,20	**22,13**
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	104.341.484.728,95	219.204.496.545,00	226.147.225.897,22	223.298.606.161,00	276.910.533.853,40	**34**
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**938.492.077.341,00**	**1.036.632.898.871,00**	**1.041.842.461.074,00**	**1.331.352.777.163,00**	**1.287.256.262.558,00**	**8,86**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	36.484.563.341,00	26.466.340.871,00	26.631.974.074,00	39.338.415.888,00	34.871.178.970,00	**2,38**
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	854.810.634.000,00	949.252.188.000,00	942.850.827.000,00	999.814.365.000,00	982.250.842.000,00	**3,66**
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	47.196.880.000,00	60.914.370.000,00	72.359.660.000,00	292.199.996.275,00	270.134.241.588,00	**86,03**
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**357.612.754.130,00**	**419.873.181.102,00**	**518.756.283.557,89**	**264.526.685.444,77**	**305.443.658.540,48**	**1,86**
1.3.1.	Hibah	4.931.948.900,00	3.413.205.900,00	5.174.588.400,00	6.148.735.500,00	10.598.764.728,00	**28**
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	**-**
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	77.299.389.230,00	98.768.112.402,00	127.655.949.157,89	137.137.204.944,77	145.068.714.991,48	**17,56**
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	246.782.676.000,00	285.847.270.000,00	354.195.046.000,00	99.912.945.000,00	131.691.087.000,00	**-0,06**
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	28.598.740.000,00	31.844.592.800,00	31.730.700.000,00	21.327.800.000,00	18.085.091.821,00	**-9,25**

	Pemerintah Daerah lainnya						
2	**BELANJA**	**1.387.719.170.740,15**	**1.700.351.278.810,00**	**1.933.302.495.457,00**	**2.016.543.978.974,00**	**2.076.742.163.062,60**	**10,88**
2.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**916.215.912.463,00**	**978.483.338.794,00**	**1.178.889.689.579,00**	**1.265.890.290.230,00**	**1.116.642.511.784,00**	**14,83**
2.1.1.	Belanja Pegawai	852.127.417.397,00	908.310.595.284,00	968.253.479.955,00	1.032.505.302.997,00	825.306.291.768,00	**-0,06**
2.1.2.	Belanja Bunga	24.051.603,00	10.326.592,00	-	-	-	**-**
2.1.3.	Belanja Subsidi		-	-	-	-	**-**
2.1.4.	Belanja Hibah	14.007.445.000,00	7.870.765.000,00	43.433.691.844,00	31.862.069.500,00	50.474.188.248,00	**98,91**
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	15.778.200.000,00	11.729.150.000,00	17.453.300.000,00	3.267.350.000,00	1.650.300.000,00	**-26,91**
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	-	-	11.177.422.633,00	12.429.995.580,00	14.330.194.685,00	**6,62**
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	34.103.008.463,00	50.215.239.431,00	137.955.724.509,00	185.304.699.853,00	222.760.211.526,00	**69,13**
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	175.790.000,00	347.262.487,00	616.070.638,00	520.872.300,00	2.121.325.557,00	**116,69**
2.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**471.503.258.277,15**	**721.867.940.016,00**	**754.412.805.878**	**750.653.688.744,00**	**960.099.651.278,60**	**20,74**
2.2.1.	Belanja Pegawai	94.968.987.656,00	107.521.636.429,00	48.401.696.955,00	44.678.753.435,00	69.976.098.898,00	**1,79**
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.264.430.146,06	303.931.012.821,00	371.130.713.662,00	421.914.402.648,00	557.504.286.927,46	**31,48**
2.2.3.	Belanja Modal	183.269.840.475,09	310.415.290.766,00	334.880.395.261,00	284.060.532.661,00	332.619.265.453,14	**19,79**
3	**PEMBIAYAAN NETTO**	**71.811.437.951,45**	**173.779.518.712,69**	**257.727.308.519,76**	**268.326.441.725,81**	**237.089.480.812,54**	**45,54**
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	110.873.724.177,71	213.163.271.394,69	291.223.808.519,76	293.078.441.725,81	261.454.280.812,54	**33,95**
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.062.286.226,26	39.383.752.682,00	33.496.500.000,00	24.752.000.000,00	24.364.800.000,00	**-9,86**

Sumber: BKAD 2018, data diolah

b) Pendapatan Daerah

Gambaran tentang Pendapatan Daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013-2017, sebagaimana tertuang pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertum-buhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
	PENDAPATAN	**1.520.302.695.802,11**	**1.813.917.142.697,00**	**1.951.223.236.705,05**	**2.000.334.166.353,84**	**2.086.878.989.570,45**	**8,43**
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**224.197.864.331,11**	**357.411.062.724,00**	**390.624.492.073,16**	**404.454.703.746,07**	**494.179.068.471,97**	**23,61**
1	Pajak Daerah	83.232.017.500,00	99.558.470.705,00	123.257.183.734,63	133.474.742.165,22	165.562.359.004,37	**18,94**
2	Retribusi Daerah	27.116.286.436,00	26.004.713.221,00	22.840.342.141,00	26.613.085.433,67	31.575.738.483,00	**4,72**
3	Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.508.075.666,16	12.643.382.253,00	18.379.740.300,31	21.068.269.986,18	20.130.437.131,20	**22,13**

4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	104.341.484.728,95	219.204.496.545,00	226.147.225.897,22	223.298.606.161,00	276.910.533.853,40	**34**
II	**DANA PERIMBANGAN**	**938.492.077.341,00**	**1.036.632.898.871,00**	**1.041.842.461.074,00**	**1.331.352.777.163,00**	**1.287.256.262.558,00**	**8,86**
1	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	36.484.563.341,00	26.466.340.871,00	26.631.974.074,00	39.338.415.888,00	34.871.178.970,00	**2,38**
2	Dana Alokasi Umum	854.810.634.000,00	949.252.188.000,00	942.850.827.000,00	999.814.365.000,00	982.250.842.000,00	**3,66**
3	Dana Alokasi Khusus	47.196.880.000,00	60.914.370.000,00	72.359.660.000,00	292.199.996.275,00	270.134.241.588,00	**86,03**
III	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**357.612.754.130,00**	**419.873.181.102,00**	**518.756.283.557,89**	**264.526.685.444,77**	**305.443.658.540,48**	**1,86**
1	Pendapatan Hibah	4.931.948.900,00	3.413.205.900,00	5.174.588.400,00	6.148.735.500,00	10.598.764.728,00	**28**
2	Bagi Hasil Pajak dr Propinsi atau Pemda lainnya	77.299.389.230,00	98.768.112.402,00	127.655.949.157,89	137.137.204.944,77	145.068.714.991,48	**17,56**
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	246.782.676.000,00	285.847.270.000,00	354.195.046.000,00	99.912.945.000,00	131.691.087.000,00	**-0,06**
4	Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainnya	28.598.740.000,00	31.844.592.800,00	31.730.700.000,00	21.327.800.000,00	18.085.091.821,00	**-9,25**

Sumber: BKAD 2018, Laporan Keuangan Kab.Bantul 2013-2017, data diolah

Berdasarkan Tabel 3.2, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat pada periode tahun 2013 sebesar Rp 1.520.302.695.802,31 sampai dengan periode tahun 2017 sebesar Rp 2.086.878.989.570,45 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 8,43%.

Pendapatan Asli Daerah mengalami kecenderungan peningkatan pada periode tahun 2013-2017 dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 23,61%. Secara persentase pertumbuhan masing – masing komponen PAD berbeda–beda. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 34%, Pajak Daerah sebesar 18,94%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar 22,13%, sedangkan pertumbuhan yang terendah adalah retribusi daerah sebesar 4,72%.

Pada prinsipnya retribusi mengalami trend kenaikan, namun di tahun 2015 terdapat penurunan retribusi disebabkan adanya mutasi rekening pendapatan dari retribusi daerah ke lain-lain pendapatan yang sah, akibat pergantian bentuk pengelolaan keuangan yang ada di Puskesmas yang telah menjadi BLUD. Selain itu, adanya penurunan tarif retribusi menara telekomunikasi dari 2% x NJOP PBB menjadi tarif retribusi yang lebih rendah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang besaran tarif menara telekomunikasi di Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber utama pendapatan Kabupaten Bantul berasal dari Dana Perimbangan dengan rata rata pertumbuhan sebesar 8,86%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus yaitu dari tahun 2013 sebesar Rp 47.196.880.000,00 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 270.134.241.588,00 dengan rata - rata pertumbuhan sebesar 86,03%. Selain itu capaian tersebut juga disumbang oleh dana alokasi umum. Dana alokasi umum Kabupaten Bantul setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan Periode 2013-2017 terakhir sebesar 3,66%.

Selain dari dana perimbangan dan PAD, sumber utama pendapatan daerah adalah dari Lain – lain Pendapatan yang Sah dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 1,86% periode Tahun 2013-2017. Selanjutnya sumber terbesar diperoleh dari Pendapatan Hibah sebesar 28% dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,56%, sedangkan terendah rata – rata pertumbuhannya bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar -0,06%. Penurunan pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada tahun 2017 terjadi karena adanya perubahan rekening pendapatan yang tadinya dana tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan guru masuk dalam dana penyesuaian dan otonomi khusus tetapi mulai tahun 2017 masuk dalam Dana Alokasi Khusus non Fisik.

c) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah. Pada tabel berikut disajikan Realisasi Belanja Daerah dibandingkan dengan Anggaran Belanja Daerah tahun 2013-2017, sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - rata pertum buhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	BELANJA	**1.387.719.170.740,15**	**1.700.351.278.810,00**	**1.933.302.495.457,00**	**2.016.543.978.974,00**	**2.076.742.163.062,60**	**10,88**
I	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**916.215.912.463,00**	**978.483.338.794,00**	**1.178.889.689.579,00**	**1.265.890.290.230,00**	**1.116.642.511.784,00**	**6,01**
1	Belanja Pegawai	852.127.417.397,00	908.310.595.284,00	968.253.479.955,00	1.032.505.302.997,00	825.306.291.768,00	**-0,06**
3	Belanja Bunga	24.051.603,00	10.326.592,00	-	-	-	**-**
4	Belanja Hibah	14.007.445.000,00	7.870.765.000,00	43.433.691.844,00	31.862.069.500,00	50.474.188.248,00	**98,91**
5	Belanja Bantuan Sosial	15.778.200.000,00	11.729.150.000,00	17.453.300.000,00	3.267.350.000,00	1.650.300.000,00	**-26,91**
6	Belanja Bagi Hasil kpd Pem. Prop/Kab/Kota dan Desa	-	-	11.177.422.633,00	12.429.995.580,00	14.330.194.685,00	**6,62**
7	Belanja Bantuan Keu kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem. Bawahan	34.103.008.463,00	50.215.239.431,00	137.955.724.509,00	185.304.699.853,00	222.760.211.526,00	**69,13**
8	Belanja Tidak Terduga	175.790.000,00	347.262.487,00	616.070.638,00	520.872.300,00	2.121.325.557,00	**116,69**
II	**BELANJA LANGSUNG**	**471.503.258.277,15**	**721.867.940.016,00**	**754.412.805.878,00**	**750.653.688.744,00**	**960.099.651.278,60**	**20,74**
1	Belanja Pegawai	94.968.987.656,00	107.521.636.429,00	48.401.696.955,00	44.678.753.435,00	69.976.098.898,00	**1,79**
2	Belanja Barang dan Jasa	193.264.430.146,06	303.931.012.821,00	371.130.713.662,00	421.914.402.648,00	557.504.286.927,46	**30,42**
3	Belanja Modal	183.269.840.475,09	310.415.290.766,00	334.880.395.261,00	284.060.532.661,00	332.619.265.453,14	**19,79**

Sumber: Laporan Keuangan Kab.Bantul 2013-2017

Memperhatikan Tabel 3.3 diperoleh gambaran umum belanja periode tahun 2013-2017 bahwa realisasi Belanja mengalami pertumbuhan rata rata sebesar 10,88%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dari Rp 916.215.912.462,92 pada Tahun 2013 hingga Rp 1.116.642.511.784,00, dengan rata-rata kenaikan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 6,01%. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu Rp 471.503.258.277,15 (2013) hingga Rp 960.099.651.278,60 (2017), dengan rata -rata kenaikan realisasi Belanja Langsung sebesar 20,74%. Untuk Belanja bagi Hasil Kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Desa pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada dikarenakan retribusi kepada desa ditunda dan baru dilaksanakan mulai tahun 2015. Belanja Bunga dikarenakan Hutang Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2014 telah lunas maka mulai tahun 2015 sudah tidak menganggarkan Belanja Bunga lagi.

d) Pembiayaan

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA RATA
		(Rp)	(Rp)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
I	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**110.873.724.177,71**	**213.163.271.394,69**	**291.223.808.519,76**	**293.078.441.725,81**	**261.454.280.812,54**	29,93
1	Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	104.107.673.809,71	204.394.963.013,69	283.419.882.598,76	283.026.051.157,81	254.841.678.796,54	31,22
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	6.766.050.368,00	8.768.308.381,00	7.803.925.921,00	8.710.516.768,00	6.612.602.016,00	-0,57
3	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	1.341.873.800,00	-	-
II	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**39.062.286.226,26**	**39.383.752.682,00**	**33.496.500.000,00**	**24.752.000.000,00**	**24.364.800.000,00**	-9,86
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	31.074.500.000,00	31.074.500.000,00	25.600.000.000,00	16.045.000.000,00	17.150.000.000,00	-11,2
2	Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	181.036.226,26	115.252.682,00	-	-	-	-25
3	Pemberian Pinjaman Daerah/Dana Bergulir	7.806.750.000,00	8.194.000.000,00	7.896.500.000,00	8.707.000.000,00	7.214.800.000,00	-1,9
	PEMBIAYAAN NETTO	**71.811.437.951,45**	**173.779.518.712,69**	**257.727.308.519,76**	**268.326.441.725,81**	**237.089.480.812,54**	45,54
SISA LBH PEMBIAYAAN ANGG.TA BERKENAAN		204.394.963.013,69	283.419.882.599,00	283.026.051.157,81	252.116.629.105,54	247.226.307.320,39	6,42

Sumber: Laporan Keuangan Kab.Bantul 2013-2017

Memperhatikan Tabel 3.4, diperoleh gambaran bahwa secara umum dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2013-2017), realisasi pembiayaan mengalami kenaikan rata rata sebesar 45,54 %. Hal ini didukung oleh pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dari Rp 110.873.724.178 pada Tahun 2013 hingga Rp 261.454.280.812,54 Tahun 2017, dengan rata-rata kenaikan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 29,93% dengan sumbangan terbesar diperoleh dari SILPA dengan rata rata pertumbuhan 31,22%.

Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran bahwa realisasi Pengeluaran Pembiayaan juga mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu dari sebesar Rp 39.062.286.226 pada Tahun 2013 hingga Rp 24.364.800.000,00 Tahun 2017, dengan rata-rata kenaikan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar -9,86%. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan mengalami kenaikan dengan rata – rata sebesar 6,42%. Untuk Penjualan aset daerah yang dipisahkan pada tahun 2015 ada penjualan aset eks PT Bantul Kota Mandiri.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Bantul serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, serta Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2013 -2017 disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

URAIAN	TAHUN					RATA - RATA
	2013	2014	2015	2016	2017	%
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	**204.716.368.713,00**	**285.369.715.466,00**	**304.022.512.823,00**	**296.308.785.281,54**	**247.225.967.225,39**	**6,71**
Kas di Kas Daerah	200.372.118.652,00	243.203.195.284,00	247.160.037.778,00	221.268.668.753,62	229.851.336.932,90	4,1
Kas di Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran	59.454.650,00	25.477.313,00	8.869.750,00	74.654.448,00	833.005.672,00	408,79
Kas di Bendahara Penerimaan	319.727.768,00	1.930.606.270,00	163.880.700,00	460.910.384,00	713.824.537,00	162,11
Kas di BLUD	3.965.067.643,00	40.210.436.599,00	35.857.143.629,00	30.269.625.119,92	13.541.504.539,49	208,11
Kas di Bendahara BOS	-	-	4.482.327.015,00	17.353.282.450,00	2.281.585.544,00	50,07
Kas di Bendahara Block Grant	-	-	9.751.551.599,00	26.837.712.126,00	-	43,8

Kas di KPU dan Panwas	-	-	6.598.702.352,00	-	-	-
Kas di Bendahara Dana Bergulir	-	-	-	43.932.000,00	4.710.000,00	-22,32
Piutang	**62.972.848.463,00**	**55.164.362.978,00**	**62.253.836.218,00**	**138.185.122.413,12**	**165.413.281.337,94**	**2,44**
Piutang Pajak	28.638.373.648,00	29.920.117.515,00	33.484.372.015,00	85.821.335.423,29	97.093.170.135,37	46,46
Piutang Retribusi	2.290.906.449,00	2.253.755.787,00	1.047.272.722,00	2.087.948.332,00	2.336.181.963,65	14,03
Piutang Lain-lain PAD	19.939.725.844,00	13.548.779.764,00	19.648.135.820,00	35.055.495.306,60	50.808.323.946,65	34,08
Piutang Pemberian Pinjaman Pemerintah	8.119.046.088,00	6.694.066.725,00	6.094.790.750,00	-	-	-6,63
Piutang Bag Lancar TGR	500.000,00	93.600.000,00	163.700.000,00	46.302.100,00	23.125.600,00	4643,28
Piutang Lainnya	3.984.296.434,00	2.654.043.187,00		14.204.551.854,00	14.776.862.986,00	-7,34
Belanja dibayar dimuka			1.815.564.911,00	969.489.397,23	375.616.706,27	-26,96
Persediaan	**28.252.363.642,00**	**53.021.970.079,00**	**41.311.367.632,00**	**48.774.707.769,70**	**49.634.079.006,70**	**21,35**
Jumlah Aset Lancar	**295.941.580.818,00**	**393.556.048.523,00**	**407.587.716.673,00**	**483.268.615.464,36**	**462.273.327.570,03**	**6,79**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	1.693.268.835,00	1.683.518.835,00	-	-	-	-0,14
Investasi Permanen	139.687.881.219,00	173.410.605.057,00	208.535.674.249,00	229.152.262.959,40	248.569.576.110,98	15,69
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**141.381.150.054,00**	**175.094.123.892,00**	**208.535.674.249,00**	**229.152.262.959,40**	**248.569.576.110,98**	**15,33**
ASET TETAP						
Tanah	108.139.101.068,00	125.853.759.878,00	13.262.508.807,00	535.067.314.152,00	517.919.614.242,00	964,54
Peralatan dan Mesin	288.714.057.488,00	338.521.883.049,00	421.599.414.558,00	514.461.731.543,57	561.102.664.150,57	18,22
Gedung dan Bangunan	947.878.454.330,00	1.072.854.175.759,00	1.113.889.239.250,00	1.261.647.454.204,97	1.194.597.731.231,78	6,24
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.359.431.593.379,00	1.506.658.775.052,00	1.680.757.495.114,00	1.821.460.231.355,26	1.973.041.023.200,00	9,77
Aset Tetap Lainnya	57.864.257.360,00	66.537.927.082,00	66.266.447.901,00	73.057.689.969,00	65.734.074.972,00	3,7
Konstruksi dalam Pengerjaan	3.048.831.050,00	-	1.098.574.401,00	644.050.000,00	-	-10,34

Akumulasi Penyusutan		-	- 1.708.767.439.789,06	- 1.824.330.894.618,56	- 1.895.906.957.057,62	2,67
Jumlah Aset Tetap	**2.765.076.294.675,00**	**3.110.426.520.820,00**	**1.588.106.240.241,94**	**2.382.007.576.606,24**	**2.416.488.150.738,73**	4,23
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	15.311.414,00	15.311.414,00	15.311.414,00	764.419.414,00	742.769.414,00	1222,41
TGR	-	81.412.500,00		-	-	-25
Aset Tak Berwujud	3.587.414.749,00	4.451.359.249,00	5.397.278.165,00	17.412.173.338,44	19.945.487.938,44	70,62
Aset Lain-lain	-	1.850.595.936,00	6.350.410.718,00	6.350.410.718,00	-	60,79
Aset lain yang dibatasi penggunaannya	-	-	523.296.485,00	238.727.239,45	229.284.603,45	-14,58
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-7.914.273.215,11	-10.110.558.975,11	6,94
Jumlah Aset Lainnya	**3.602.726.163,00**	**6.398.679.099,00**	**12.286.296.782,00**	**16.851.457.494,78**	**10.806.982.980,78**	42,73
JUMLAH TOTAL ASET	**3.206.001.751.710,00**	**3.685.475.372.334,00**	**2.216.515.927.945,94**	**3.111.279.912.524,78**	**3.138.138.037.400,52**	**3,08**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	125.554.625,00	-	-	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	20.250.000,00	8.437.500,00	55.453.876,00	54.070.542,93	211.677.621,80	196,97
Utang Jangka Pendek Lainnya	118.390.513,00	-	-	-	-	-
Utang Belanja	14.688.493.956,00	17.479.176.381,00	14.444.791.035,00	8.987.426.141,00	13.717.202.977,00	4,12
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.677.931,00	19.226.597,00	-	1.161.600,00	-	261,46
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**14.954.367.025,00**	**17.506.840.478,00**	**14.500.244.911,00**	**9.042.658.283,93**	**13.928.880.598,80**	**4,07**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	8.437.500,00	-	-	-	-	-
	8.437.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0

JUMLAH KEWAJIBAN	**14.962.804.525,00**	**17.506.840.478,00**	**14.500.244.911,00**	**9.042.658.283,93**	**13.928.880.598,80**	4,06
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	204.394.963.014,00	283.419.882.598,76	283.025.051.157,81	252.116.629.105,54	-	30,98
Cadangan Pendapatan yang ditangguhkan	319.727.768,00	1.930.606.270,00	163.880.700,00	-	-	67,59
Cadangan Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
Cadangan Piutang	62.972.848.463,00	45.722.653.165,00	135.186.124.099,13	139.605.198.463,12	-	287,41
Cadangan Persediaan	28.252.363.642,00	53.021.970.079,00	41.311.367.632,00	48.774.707.769,70	-	12,33
Dana Lancar lainnya	-	-	20.832.580.966,00	44.190.994.576,00	-	3,03
						3,16
Dana yang Harus Disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	-14.952.689.094,00	-17.506.840.478,00	-14.500.244.911,00	-9041496683,93	-	26,9
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	**280.987.213.793,00**	**366.588.271.634,76**	**466.018.759.643,94**	**484.687.529.914,36**	**0,00**	32,09
EKUITAS DANA INVESTASI						
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	141.381.150.054,00	175.094.123.892,00	208.535.674.249,00	229.152.262.959,40	-	18,52
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.765.076.294.675,00	3.110.426.520.819,00	3.416.336.258.632,91	4.206.338.471.224,79	-	12,8
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	3.602.726.163,00	6.398.679.099,00	12.286.296.782,00	24.765.730.709,89	-	60,99
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-8.437.500,00	-	-	-	-	-48,63
			- 1.708.767.439.789,06	- 1.832.245.167.833,68	-	1,81
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	**2.910.051.733.392,00**	**3.291.919.323.810,00**	**1.928.390.789.874,85**	**2.628.011.297.060,40**	**0,00**	3,6
JUMLAH EKUITAS	**3.191.038.947.185,00**	**3.658.507.595.444,76**	**2.394.409.549.518,79**	**3.112.698.826.974,76**	**0,00**	2,15

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.206.001.751.709,00**	**3.676.014.435.922,76**	**2.335.977.506.549,61**	**3.030.547.431.031,26**	**3.045.637.995.200,45**	-17,57

Sumber: Laporan Keuangan Kab.Bantul 2013-2017

A. Aset

Secara keseluruhan, aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,08%. Aset lancar pemerintah Kabupaten Bantul mengalami tren pertumbuhan positif dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,79%. Kas mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2013 sebesar Rp 204.716.368.713 menjadi sebesar Rp 247.225.967.225,39 pada tahun 2017 dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 6,71%. Investasi Jangka Panjang pemerintah Kabupaten Bantul mengalami tren pertumbuhan dengan rata – rata sebesar 15,33%. Sedangkan jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Kabupaten Bantul selama tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,23%, dengan nilai total aset tetap Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar Rp 3.138.138.037.400,52. Untuk Kas di bendahara Bos dan Kas di bendahara Block Grant dari tahun 2012 – 2014 tidak disajikan dalam laporan keuangan sedangkan pada tahun 2015 disajikan ke dalam laporan keuangan dikarenakan mulai tahun 2015 telah berbasis akrual. Piutang Pemberian Pinjaman Pemerintah merupakan piutang lancar yang diberikan kepada masyarakat baik kepada Kelompok atau perorangan yang merupakan reklas dari dana bergulir pada Tahun Anggaran 2013 yang ditempatkan pada Pos Investasi Non Permanen.

B. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2013-2017 mengalami penurunan dengan rata – rata sebesar 4,06%. Hal ini terjadi dikarenakan Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar Rp 14.962.804.525,00 menjadi sebesar Rp 13.928.880.598,80 pada Tahun 2017. Selama periode tahun 2013-2017 terjadi peningkatan pada Pendapatan diterima dimuka dan Utang Belanja yang merupakan

penerimaan dari pengelolaan dana bergulir. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tidak memilik kewajiban jangka panjang.

C. Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Bantul selama tahun 2013-2017 tumbuh rata-rata sebesar 2,15% persen pertahun, dimana pada tahun 2013 sebesar Rp 3.191.038.947.185,00 dan tahun 2017 Rp 3.031.709.114.601,65. Pertumbuhan ini didorong pertumbuhan ekuitas dana lancar yaitu dengan pertumbuhan rata–rata pertahun sebesar 32,09%. Ekuitas dana lancar diperoleh dari jumlah silpa ditambah cadangan untuk piutang dan cadangan untuk persediaan dikurangi utang jangka pendek ditambah pendapatan yang ditangguhkan. Sedangkan untuk ekuitas dana Investasi pada tahun 2013-2017 juga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,60%,

Berdasarkan data neraca Kabupaten Bantul periode tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.5 selanjutnya diolah untuk menghasilan rasio keuangan Kabupaten Bantul. Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk Tahun 2013-2017 berdasarkan formulasi, yang disajikan pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	**Rasio Likuiditas**					
1.	Rasio lancar (current ratio)	19,79	22,48	28,11	44,52	30,14
2.	Rasio quick (quick ratio)	17,90	19,45	25,26	39,12	26,06
B	**Rasio Solvabilitas**					
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,00467	0,00475	0,00654	0,00353	0,00405
2	Rasio hutang terhadap modal	0,00469	0,00477	0,00913	0,00473	0,00510

Sumber: Laporan Keuangan Kab.Bantul 2013-2017

Berdasarkan Tabel 3.6 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Batul dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampauan membayar semua kewajiban fianansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Bantul yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek.

Rasio Lancar menunjukkan sejauh mana akitva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2013 adalah sebesar 19,79 dan tahun 2017 sebesar 30,14 Hal ini berarti menunjukkan tahun 2017 kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar 30 kali lebih.

2. Rasio Quicks

Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Penghitungan *quick ratio* dengan mengurangkan aktiva lancar dengan persediaan. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick pada Tahun 2013 adalah sebesar 17,90 serta periode tahun 2017 Rasio Quicks sebesar 26,06. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang, sehingga dengan mengetahui Rasio Solvabilitas dapat diketahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2013 sebesar 0,00467 dan pada tahun 2017 sebesar 0,00510. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Kabupaten Bantul sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2013 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar 0,00541 dan pada Tahun 2017 sebesar 0,00510. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Bantul, dalam arti sangat mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dan pengelolaan Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara

tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Bantul bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bantul pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan sumber, pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali di dalam wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari:

1. Pajak daerah merupakan suatu bentuk iuran wajib yang dibebankan kepada Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung.

Berdasarkan UU No 8 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Pajak daerah yang dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah PBB Perkotaan dan Perdesaan, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet;

2. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa yang diterima secara langsung untuk kepentingan pribadi, terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi, tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan jasa dana bergulir dan penerimaan lain-lain.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas:

1. Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan 2 prinsip yaitu *princip by origin* dimana daerah penghasil menerima bagian yang lebih besar sedangkan daerah lain menerima berdasarkan pemerataan, sedangkan *princip by actual* penyaluran DBH baik untuk daerah penghasil maupun bukan disalurkan berdasarkan realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. DBH ini merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang dilakukan melalui

pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil dari sebagaian penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi . DAU bersifat *block grant* yang mana penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;
2. Bagi hasil pajak dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya;
3. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat memacu daerah menuju tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang tercermin dari semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Sehingga arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah yaitu dengan optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta berupaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.

Arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi atas pajak dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan *(compliance)* dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, Secara umum, proses ini meliputi sebagai berikut:
   a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
   b. Penyempurnaan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;
   c. Penyelenggaraan sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
   d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
   e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait;
   f. Peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah.
2. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah mempunyai maksud dalam rangka memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, secara umum proses ini dilaksanakan sebagai berikut:
   a. *Updating* data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
   b. Pengkajian penerapan jenis retribusi baru;
   c. Optimalisasi penyerapan penerimaan pajak daerah dari basis pajak PBB dan BPHTB;
   d. Optimalisasi pemungutan pajak BPHTB; dan
   e. Optimalisasi pemungutan PBB P2.

Selain itu arah kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD; dan

2. Optimalisasi penerimaan yang bersumber bagi hasil perpajakan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

Selanjutnya dalam konteks pelaksanaan analisa proporsi penggunaan anggaran selain melihat dari kebijakan pendapatan juga melihat dari kebijakan umum belanja daerah tahun anggaran sebelumnya yang menggambarkan arah kebijakan Belanja Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2010-2015. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir kalinya diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung yang peruntukannya meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga; dan
2. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanan belanja daerah di masa lalu adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta pengentasan kemiskinan.
3. Belanja pada setiap PD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:
   a. Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.
   b. Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
   c. Dana alokasi khusus; untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Adapun Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran dapat di jabarkan sebagai berikut:

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2013 s/d tahun 2017 secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Bantul, yang dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	2013			2014			2015			2016			2017			RATA - RATA (%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	
B	**BELANJA**	**1.570.168.261.924,38**	**1.387.719.170.740,07**	**88,38**	**1.901.355.826.511,47**	**1.700.351.278.810,00**	**89,43**	**2.179.257.337.075,43**	**1.933.302.495.457,00**	**88,71**	**2.358.567.406.918,41**	**2.016.543.978.974,00**	**85,50**	**2.330.692.497.939,22**	**2.076.742.163.062,60**	**89,10**	**88,23**
I	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.038.779.837.738,38**	**916.215.912.463,00**	**88,20**	**1.103.697.182.625,47**	**978.483.338.794,00**	**88,66**	**1.359.234.039.732,43**	**1.178.889.689.579,00**	**86,73**	**1.497.364.759.107,51**	**1.265.890.290.230,00**	**84,54**	**1.304.091.749.148,42**	**1.116.642.511.784,00**	**85,63**	**86,75**
1	Belanja Pegawai	934.697.924.499	852.127.417.397,00	91,17	1.008.895.356.969,00	908.310.595.284,00	90,03	1.113.552.863.057,00	968.253.479.955,00	86,95	1.225.249.824.782,00	1.032.505.302.997,00	84,27	946.444.529.504,00	825.306.291.768,00	87,20	**87,92**
2	Belanja Bunga	51.506.900,00	24.051.603,00	46,70	10.500.000,00	10.326.592,00	98,35	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	**29,01**
3	Belanja Hibah	17.521.544.000	14.007.445.000,00	79,94	8.952.744.000,00	7.870.765.000,00	87,91	60.282.647.000,00	43.433.691.844,00	72,05	34.738.229.500,00	31.862.069.500,00	91,72	73.294.080.933,00	50.474.188.248,00	68,87	**80,10**
4	Belanja Bantuan Sosial	18.003.050.000,00	15.778.200.000,00	87,64	12.969.925.000,00	11.729.150.000,00	90,43	18.391.950.000,00	17.453.300.000,00	94,90	5.578.550.000,00	3.267.350.000,00	58,57	3.901.100.000,00	1.650.300.000,00	42,30	**74,77**
5	Belanja Bagi Hasil kpd Pem. Prop/Kab/Kota dan Desa	2.069.182.600,00	0,00	0,00	0	0	0,00	11.177.432.740,00	11.177.422.633,00	100,00	12.664.759.430,00	12.429.995.580,00	98,15	14.330.194.685,00	14.330.194.685,00	100,00	**59,63**
6	Belanja Bantuan Keu kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem. Bawahan	40.524.621.500,00	34.103.008.463,00	84,15	59.939.587.100	50.215.239.431,00	83,78	138.297.392.912,00	137.955.724.509,00	99,75	195.396.577.000,00	185.304.699.853,00	94,84	231.802.574.900,00	222.760.211.526,00	96,10	**91,72**
7	Belanja Tidak Terduga	25.912.008.239,38	175.790.000,00	0,68	12.929.069.556,47	347.262.487,00	2,69	17.531.754.023,43	616.070.638,00	3,51	23.736.818.395,51	520.872.300,00	2,19	34.319.269.126,42	2.121.325.557,00	6,18	**3,05**
II	**BELANJA LANGSUNG**	**531.388.424.186,00**	**471.503.258.277,15**	88,73	**797.658.643.886,00**	**721.867.940.016,00**	90,50	**820.023.297.343,00**	**754.412.805.878,00**	92,00	**861.202.647.810,90**	**750.653.688.744,00**	87,16	**1.026.600.748.790,80**	**960.099.651.278,60**	93,52	**90,38**
1	Belanja Pegawai	106.224.560.325,00	94.968.987.656,00	89,40	119.076.607.317,00	107.521.636.429,00	90,30	52.660.449.963,00	48.401.696.955,00	91,91	50.819.149.200,00	44.678.753.435,00	87,92	73.583.148.206,00	69.976.098.898,00	95,10	**90,93**
2	Belanja Barang dan Jasa	228.175.726.657,00	193.264.430.146,06	84,70	348.815.942.641,00	303.931.012.821,00	87,13	416.776.979.404,75	371.130.713.662,00	89,05	481.755.149.995,90	421.914.402.648,00	87,58	594.956.668.673,80	557.504.286.927,46	93,71	**88,43**
3	Belanja Modal	196.988.137.204,00	183.269.840.475,09	93,04	329.766.093.928,00	310.415.290.766,00	94,13	350.585.867.975,25	334.880.395.261,00	95,52	328.628.348.615,00	284.060.532.661,00	86,44	358.060.931.911,00	332.619.265.453,14	92,89	**92,40**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Berdasarkan Tabel 3.7 dari data realisasi Belanja Tidak Langsung menunjukkan trend peningkatan dari Rp 916.215.912.462,92 pada tahun 2013 menjadi Rp 1.116.642.511.784,00 di tahun 2017, dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap ketersediaan anggaran mencapai sebesar 86,75%. Sedangkan untuk tingkat realisasi Belanja Langsung juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar Rp 471.503.258.277,15 menjadi Rp 960.099.651.278,60 pada tahun 2017, dengan rata-rata tingkat realisasi terhadap ketersediaan anggaran sebesar 90,38%. Untuk realisasi belanja hibah pada tahun 2015 melebihi anggaran, hal ini dikarenakan adanya ketentuan untuk belanja barang dan jasa (belanja langsung) yang sifatnya hibah kepada masyarakat harus dikonversi ke dalam belanja hibah (belanja tidak langsung) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bantul tertuang pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

KODE	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.	**BELANJA**	**871.788.261.299**	**933.094.335.643,00**	**1.182.882.746.993,00**	**1.266.328.248.660,67**	**1.145.389.576.381,84**
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**641.280.485.195**	**663.836.778.330,00**	**963.511.123.838,00**	**1.027.489.764.511**	**817.692.644.574,00**
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	**641.280.485.195**	663.836.778.330,00	963.511.123.838,00	1.027.489.764.511	817.692.644.574,00
5 . 1 . 1 . 01	Gaji Dan Tunjangan	627.616.382.562	651.247.854.730,00	694.203.998.303,00	714.667.286.650	663.489.993.481,00
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	9.662.178.000	8.593.231.200,00	265.395.233.863,00	308.820.477.912	148.260.815.093,00
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4.001.924.633	3.995.692.400,00	3.911.891.672,00	4.001.999.949	5.941.836.000,00

5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**230.507.776.104**	**269.257.557.313,00**	**219.371.623.155,00**	**238.838.484.149,67**	**325.681.393.279,41**
5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	**87.983.966.034**	**81.928.876.800**	**48.401.696.955,00**	**44.670.253.435,00**	**59.730.127.335,00**
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.115.538.640	19.622.425.250	19.646.772.640,00	5.153.557.350,00	5.315.219.200,00
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.129.750.415	25.787.808.285,00	24.699.024.615,00	34.738.875.735,00	46.177.883.900,00
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	575.941.000	644.575.000,00	384.242.500,00	158.364.250,00	110.305.003,00
5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai BLUD	34.162.735.979	35.540.175.515,00	3.670.657.200,00	4.619.456.100,00	8.115.719.232,00
5 . 2 . 1 . 08	Honorarium Pengelolaan Operasional Dinas	-	333.892.750,00	1.000.000,00	-	11.000.000,00
5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	**113.071.591.206**	**136.656.410.194,00**	**136.352.749.403,00**	**162.405.660.517,18**	**215.357.836.240,84**
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.158.088.489	6.823.130.259,00	6.644.352.038,00	8.698.704.073,00	12.595.764.406,00
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.512.189.885	34.525.363.164,00	32.329.694.268,00	37.750.177.837,00	42.107.677.152,84
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.550.912.555	21.682.285.380,00	27.569.358.049,00	28.944.102.300,00	36.074.704.232,00
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	404.220.000	8.880.000,00	2.158.500,00	14.859.560,00	6.567.897.370,00
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.306.309.335	9.568.039.027,00	8.967.463.225,00	9.421.828.508,18	12.729.167.082,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.354.535.512	6.558.630.759,00	6.358.867.454,00	7.437.945.254,00	9.167.822.906,00
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	5.120.297.676	2.314.815.012,00	2.423.933.727,00	2.202.677.379,00	3.184.534.725,00
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	634.405.000	889.048.460,00	859.256.000,00	915.225.000,00	1.151.322.000,00
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.081.805.000	1.439.424.250,00	1.720.625.250,00	2.406.117.500,00	3.468.991.900,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	13.337.212.600	21.994.225.890,00	21.862.421.920,00	25.126.909.861,00	30.851.036.806,00
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	233.764.750	453.352.600,00	251.023.600,00	295.939.899,00	4.371.452.625,00
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	404.698.000	388.369.600,00	538.961.050,00	1.079.931.264,00	1.503.899.200,00
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	487.290.500	670.229.000,00	783.893.590,00	1.569.372.025,00	3.167.484.500,00

5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.395.450.704	21.827.964.163,00	16.845.053.982,00	27.795.508.307,00	35.352.013.236,00
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.500.000	416.500.000,00	-	213.500.000,00	420.000.000,00
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.072.809.200	1.426.515.280,00	2.460.003.000,00	3.275.132.200,00	2.320.355.900,00
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	5.780.000	11.250.000,00	-	-	-
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.911.322.000	5.658.387.350,00	6.735.683.750,00	8.532.861.750,00	10.323.712.200,00
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	**29.452.218.864**	**50.672.270.319,00**	**34.617.176.797,00**	**31.762.570.179,49**	**50.593.429.703,57**
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	3.571.227.380	12.168.578.960,00	5.241.167.061,00	7.622.103.824,00	482.771.250,00
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	4.057.712.813	11.888.159.450,00	10.748.451.600,00	2.743.278.550,00	11.603.018.280,00
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	216.730.970	398.773.907,00	1.545.389.066,00	1.432.590.268,00	3.816.044.317,00
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.939.738.449	10.224.927.536,00	-	-	-
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.384.345.507	7.841.717.310,00	5.746.177.193,00	8.569.645.964	11.858.848.163,00
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.760.024.100	3.095.580.477,00	1.350.023.750,00	1.086.406.743	1.072.607.000,00
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	140.906.545	208.922.050,00	-	-	-
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	217.044.650	489.570.060,00	-	-	-
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	1.018.992.850	1.071.976.420,00	1.403.409.349,00	467.968.100	1.044.576.644,00
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	1.080.087.000	1.649.912.950,00	682.978.728,00	652.146.200,00	622.646.009,00
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	128.015.000	242.908.800,00	155.971.250,00	350.499.400	78.695.000,00
5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	813.450.500	1.184.997.299,00	2.482.480.500,00	2.729.221.443,49	651.857.507,70
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	3.123.943.100	206.245.100,00	-	-	-

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Bantul 2013-2017

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2011 – 2013 cenderung mengalami penurunan, penurunan tersebut dikarenakan terjadinya penurunan belanja pegawai. Pada tahun 2014 – 2015 mengalami trend peningkatan, yang lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Selanjutnya pada periode 2016-2017 proporsi belanja aparatur menunjukkan trend penurunan, yang disebabkan adanya pengalihan pegawai sesuai kewenangan pada Tahun 2017. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2013-2017 Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	BELANJA (UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN)	PROSENTASE
		(a)	(b)	(a) / (b) X 100%
1	Tahun Anggaran 2013	871.788.261.299	910.850.547.525,26	95,71
2	Tahun Anggaran 2014	933.094.335.643	972.478.088.325,00	95,95
3	Tahun Anggaran 2015	1.182.882.746.993	1.216.379.246.993,00	97,25
4	Tahun Anggaran 2016	1.266.328.248.661	1.291.080.248.660,67	98,08
5	Tahun Anggaran 2017	1.145.389.576.382	1.169.754.376.381,84	97,92

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Bantul 2013-2017

Berdasarkan Tabel 3.9, diperoleh Prosentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif meningkat dari waktu ke waktu, tahun 2013 prosentasenya sebesar 95,71 persen dan tahun 2017 prosentasenya turun menjadi sebesar 97,92 persen.

Dari prosentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan kecenderungannya semakin meningkat proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sehingga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pembangunan daerah.

3.2.2. Analisa Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan.

Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun -tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah harus cermat dalam Penyusunan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan, serta memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah tahun anggaran sebelumnya menggambarkan arah kebijakan Pembiayaan Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017. Pembiayaan daerah secara umum diprioritaskan pada peningkatan dan pemberdayaan BUMD dan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat melalui Dana Bergulir.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi yang bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah serta akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2013-2017, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program khususnya pada periode tahun 2019-2021.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2019-2021 secara umum memperhatikan rata-rata pertumbuhan APBD pendapatan kurun waktu 2013-2017. Pada proyeksi PAD dipergunakan asumsi pertumbuhan moderat sebesar rata rata 4-5% per tahun. Hal ini disesuaikan dengan potensi pajak dan retribusi daerah ke depan serta diasumsikan kondisi perekonomian daerah cukup kondusif dan stabil. Sedangkan proyeksi Dana Perimbangan diasumsikan tetap sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan untuk Lain-Lain Pendapatan Yang Sah diproyeksikan mengalami rata rata pertumbuhan sebesar 1,86% yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Dengan menggunakan tahun dasar 2018 yaitu data APBD Tahun 2018, maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2016-2021 Kabupaten Bantul

Uraian	REALISASI	REALISASI	APBD	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	**2.000.334.166.353,84**	**2.086.878.989.570,45**	**2.086.789.858.571,60**	**2.105.110.240.388,60**	**2.151.302.906.189,03**	**2.186.065.468.118,84**
Pendapatan Asli Daerah	404.454.703.746,07	494.179.068.471,97	449.023.625.139,00	464.070.079.956,00	508.991.914.238,45	541.304.432.608,75
Pendapatan Pajak Daerah	133.474.742.165,22	165.562.359.004,37	167.071.000.000,00	175.246.970.395,00	185.000.000.000,00	190.000.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	26.613.085.433,67	31.575.738.483,00	39.926.324.699,00	38.384.147.534,00	40.615.728.550,45	44.039.634.467,25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.068.269.986,18	20.130.437.131,20	20.707.296.087,00	21.707.166.955,00	23.169.995.909,84	25.123.226.565,04
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223.298.606.161,00	276.910.533.853,40	221.319.004.353,00	228.731.795.072,00	260.206.189.778,16	282.141.571.576,46
Dana Perimbangan	1.331.352.777.163,00	1.287.256.262.558,00	1.376.480.531.000,00	1.376.480.531.000,00	1.376.480.531.000,00	1.376.480.531.000,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.338.415.888,00	34.871.178.970,00	38.161.003.000,00	38.161.003.000,00	38.161.003.000,00	38.161.003.000,00
Dana Alokasi Umum	999.814.365.000,00	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00
Dana Alokasi Khusus	292.199.996.275,00	270.134.241.588,00	356.068.686.000,00	356.068.686.000,00	356.068.686.000,00	356.068.686.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**264.526.685.444,77**	**305.443.658.540,48**	**261.285.702.432,60**	**264.559.629.432,60**	**265.830.460.950,58**	**268.280.504.510,09**
Pendapatan Hibah	6.148.735.500,00	10.598.764.728,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	137.137.204.944,77	145.068.714.991,48	141.733.524.432,60	146.733.524.432,60	148.004.355.950,58	150.454.399.510,09
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.912.945.000,00	131.691.087.000,00	113.326.105.000,00	113.326.105.000,00	113.326.105.000,00	113.326.105.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	21.327.800.000,00	18.085.091.821,00	1.726.073.000,00	-	-	-

Sumber: BKAD Data diolah, 2018

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bantul diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal

dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bantul untuk periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah; dan
3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
2) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali sumer-sumber pendapatan daerah dengan cara Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/ retribusi daerah.
5) Peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan.
6) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
7) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
8) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
9) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi terkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana di Kabupaten Bantul ditindak lanjuti dengan 3 (tiga) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlahnya realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK.

Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak daerah dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya

aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil adalah:

a) Peningkatan akurasi data potensi sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
b) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.3.2. Proyeksi SILPA

Proyeksi SiLPA tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 diprediksikan berdasarkan pertimbangan trend pertumbuhan SiLPA kurun waktu 2013-2017, prediksi kemampuan pendapatan dan belanja daerah dan ketentuan terkait dengan batasan maksimal surplus/defisit APBD. Proyeksi SiLPA 2016-2021 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.10 menunjukkan bahwa nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA dari periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2021 diasumsikan mengalami penurunan sebesar 5% per tahun dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.11. Realisasi Dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016-2021 Kabupaten Bantul

URAIAN	REALISASI	REALISASI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	283.026.051.157,81	254.841.678.796,54	167.231.673.329,11	186.977.667.285,65	176.623.478.823,62	201.158.036.430,65

Sumber: BKAD, data diolah, 2018

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 2019-2021, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2016-2021 Kabupaten Bantul

NO	URAIAN	REALISASI	REALISASI	APBD	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN	2.000.334.166.353,84	2.086.878.989.570,45	2.086.789.858.571,60	2.105.110.240.388,60	2.151.302.906.189,03	2.186.065.468.118,84
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	283.026.051.157,81	254.841.678.796,54	167.231.673.329,11	186.977.667.285,65	176.623.478.823,62	201.158.036.430,65
KAPASITAS KEMAMPUAN KEDUA		2.283.360.217.511,65	2.341.720.668.366,99	2.254.021.531.900,71	2.292.087.907.674,25	2.327.926.385.012,65	2.387.223.504.549,49

Sumber: BKAD Data diolah, 2018

3.3.3. Proyeksi Belanja

Proyeksi belanja yang meliputi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2016 - 2021 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel berikut:

Tabel 3.13.
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Tahun Anggaran 2016-2021 Kabupaten Bantul

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	REALISASI	REALISASI	APBD	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
BELANJA	**2.016.543.978.974,11**	**2.076.742.163.062,60**	**2.205.525.940.400,71**	**2.258.837.907.674,25**	**2.287.601.385.012,65**	**2.346.898.504.549,49**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.265.890.290.230,00**	**1.132.578.116.160,00**	**1.225.125.698.360,46**	**1.224.273.785.315,25**	**1.206.710.118.163,28**	**1.211.962.674.357,65**
Belanja Pegawai	1.032.505.302.997,00	825.306.291.768,00	878.610.267.094,40	881.882.472.436,29	885.106.121.885,01	889.388.244.322,71
Belanja Hibah	31.862.069.500,00	66.409.792.624,00	55.370.075.410,00	61.362.588.000,00	43.129.900.893,83	43.129.900.893,83
Belanja Bantuan Sosial	3.267.350.000,00	1.650.300.000,00	8.648.200.000,00	8.396.720.000,00	3.867.694.000,00	3.847.694.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.429.995.580,00	14.330.194.685,00	17.564.212.350,00	20.785.351.792,90	22.508.675.133,44	23.499.108.890,11
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	185.304.699.853,00	222.760.211.526,00	249.184.016.671,00	246.097.726.251,00	246.097.726.251,00	246.097.726.251,00
Belanja Tidak Terduga	520.872.300,00	2.121.325.557,00	15.748.926.835,06	5.748.926.835,06	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	**750.653.688.744,11**	**944.164.046.902,60**	**980.400.242.040,25**	**1.034.564.122.359,00**	**1.080.891.266.849,37**	**1.134.935.830.191,84**
Belanja Pegawai	44.678.753.435,00	69.976.098.898,00	93.280.876.740,00	98.061.521.672,93	102.842.166.605,85	107.984.274.936,14
Belanja Barang dan Jasa	421.914.402.647,16	541.568.682.551,46	571.940.966.193,20	601.252.940.710,60	630.564.915.228,00	662.093.160.989,40
Belanja Modal	284.060.532.661,95	332.619.265.453,14	315.178.399.107,05	335.249.659.975,48	347.484.185.015,52	364.858.394.266,30

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		REALISASI	REALISASI	APBD	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	BELANJA	**2.016.543.978.974,11**	**2.076.742.163.062,60**	**2.205.525.940.400,71**	**2.271.387.665.145,51**	**2.319.651.675.432,66**	**2.393.948.794.969,50**
A.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.265.890.290.230,00**	**1.132.578.116.160,00**	**1.225.125.698.360,46**	**1.241.967.411.003,25**	**1.238.760.408.583,28**	**1.259.012.964.777,65**
1.	Belanja Pegawai	1.032.505.302.997,00	825.306.291.768,00	878.610.267.094,40	896.182.472.436,29	914.106.121.885,01	932.388.244.322,71
3	Belanja Hibah	31.862.069.500,00	66.409.792.624,00	55.370.075.410,00	55.370.075.410,00	43.129.900.893,83	43.129.900.893,83
4	Belanja Bantuan Sosial	3.267.350.000,00	1.650.300.000,00	8.648.200.000,00	5.390.610.000,00	3.867.694.000,00	3.847.694.000,00
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.429.995.580,00	14.330.194.685,00	17.564.212.350,00	20.127.309.650,90	22.508.675.133,44	24.499.108.890,11
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	185.304.699.853,00	222.760.211.526,00	249.184.016.671,00	249.148.016.671,00	249.148.016.671,00	249.148.016.671,00
7	Belanja Tidak Terduga	520.872.300,00	2.121.325.557,00	15.748.926.835,06	15.748.926.835,06	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
B	**BELANJA LANGSUNG**	**750.653.688.744,11**	**944.164.046.902,60**	**980.400.242.040,25**	**1.029.420.254.142,26**	**1.080.891.266.849,38**	**1.134.935.830.191,84**
1.	Belanja Pegawai	44.678.753.435,00	69.976.098.898,00	93.280.876.740,00	97.944.920.577,00	102.842.166.605,85	107.984.274.936,14
2.	Belanja Barang dan Jasa	421.914.402.647,16	541.568.682.551,46	571.940.966.193,20	600.538.014.502,86	630.564.915.228,00	662.093.160.989,40
3.	Belanja Modal	284.060.532.661,95	332.619.265.453,14	315.178.399.107,05	330.937.319.062,40	347.484.185.015,52	364.858.394.266,30

Sumber : BKAD Data diolah, 2018

Peningkatan belanja pegawai pada komponen belanja tidak langsung rata -rata sebesar 2% mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk belanja tidak langsung lainnya diasumsikan menurun (bantuan hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Adapun untuk Belanja Langsung diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata rata sebesar 5% sesuai dengan rata rata capaian pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah.

3.3.4. Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun 2016-2017 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.14 serta memperhitungkan proyeksi kemampuan keuangan terhadap peningkatan pengelolaan dana bergulir dan penyertaan modal pemerintah pada BUMD. Adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui Tabel berikut ini:

Tabel 3.14.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021
Kabupaten Bantul

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	REALISASI	REALISASI	APBD	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp.)	(Rp.)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**293.078.441.725,81**	**261.454.280.812,54**	**177.941.673.329,11**	**197.687.667.285,65**	**187.623.478.823,62**	**212.158.036.430,65**
Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	283.026.051.157,81	254.841.678.796,54	167.231.673.329,11	186.977.667.285,65	176.623.478.823,62	201.158.036.430,65
Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	8.710.516.768,00	6.612.602.016,00	10.710.000.000,00	10.710.000.000,00	11.000.000.000	11.000.000.000
Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	1.341.873.800,00	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**24.752.000.000,00**	**24.364.800.000,00**	**28.635.000.000,00**	**43.960.000.000,00**	**51.325.000.000,00**	**51.325.000.000,00**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.045.000.000,00	17.150.000.000,00	16.500.000.000,00	31.825.000.000,00	43.325.000.000,00	43.325.000.000,00
Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah/Dana Bergulir	8.707.000.000	7.214.800.000,00	12.135.000.000,00	12.135.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	**268.326.441.725,81**	**237.089.480.812,54**	**149.306.673.329,11**	**153.727.667.285,65**	**136.298.478.823,62**	**160.833.036.430,65**
SISA LBH PEMBIAYAAN ANGG.TA BERKENAAN	252.116.629.105,54	247.226.307.320,39	0,00	0	0	0

Sumber: BKAD Data diolah, 2018

Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke dalam dua bentuk Perumda dan Perseroda, penggunaan istilah perusahaan daerah bergeser menjadi BUMD.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk mengganti bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, instruksi tersebut tidak diikuti

terbitnya peraturan pelaksana pengelolaan BUMD dengan bentuk yang baru. Selanjutnya, pada tahun 1998, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, BUMD dibagi dalam dua bentuk, yaitu: Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, sehingga istilah Perusahaan Daerah kembali muncul, dan jika dilihat dari penggunaan istilahnya, Permendagri No. 3 Tahun 1998 mengelompokkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk dari BUMD.

Pemerintah Kabupaten Bantul saat ini sedang memproses perubahan peraturan daerah terkait BUMD Kabupaten Bantul baik itu PDAM, PD BPR BANK BANTUL, maupun PD ANEKA DHARMA, sudah dalam proses penyusunan Naskah Akademik. Perubahan bentuk badan hukum untuk BUMD ditargetkan selesai pada tahun 2019.

Sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan, Untuk PD BPR agar dirubah badan hukumnya menjadi perseroda, hal ini dimaksudkan karena PD BPR difokuskan pada *profit oriented* sehingga diperlukan badan hukum yang lebih profesional untuk memperluas operasional serta memudahkan dalam penambahan modal usaha.

Sedangkan untuk PD Aneka Dharma tetap menjadi perumda hanya aturan – aturan didalamnya menyesuaikan dengan peraturan perundang–undangan yang terbaru. Sedangkan PDAM tetap menjadi Perumda dikarenakan adanya fungsi sosial yaitu pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat sehingga pemerintah daerah tetap bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan BUMD.

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah perlu peningkatan modal BUMD melalui penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal pada BUMD ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.15. Penyertaan Modal pada BUMD

BUMD	TAHUN		
	2019	2020	2021
BPD	22.000.000.000	36.825.000.000	36.825.000.000
BANK BANTUL	3.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
PDAM	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000

ANEKA DHARMA	1.825.000.000	-	-
Jumlah	31.825.000.000	43.325.000.000	43.325.000.000

Sedangkan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Bank Pembangunan Daerah DIY sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 294.600.000.000,00 yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

3.3.5 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar - besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

a. Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10% (sepuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/ misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat PD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/ kegiatan unggulan PD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi

masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

c. Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan.

Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk prioritas III.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana Tabel 3.15 sebagai berikut.

Tabel 3.16.
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Tahun 2016-2021 Kabupaten Bantul

JENIS DANA	Alokasi											
	APBD		APBD		APBD		PROYEKSI		PROYEKSI		PROYEKSI	
	TA 2016		TA 2017		TA 2018		TA 2019		TA 2020		TA 2021	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
PRIORITAS I	70	1.598.352.152.258	70	1.639.204.467.857	70	1.577.815.072.331	70	1.604.461.535.372	70	1.629.548.469.509	70	1.671.056.453.185
PRIORITAS II	25	570.840.054.378	25	585.430.167.092	25	563.505.382.975	25	573.021.976.919	25	581.981.596.253	25	596.805.876.137
PRIORITAS III	5	114.168.010.876	5	117.086.033.418	5	112.701.076.595	5	114.604.395.384	5	116.396.319.251	5	119.361.175.227
JUMLAH	**100**	2.283.360.217.511,65	**100**	**2.341.720.668.366,99**	**100**	**2.254.021.531.900,71**	**100**	**2.292.087.907.674,25**	**100**	**2.327.926.385.012,65**	**100**	**2.387.223.504.549,49**

Sumber: BKAD Data diolah, 2018

BAB IV.
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa mendatang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Adapun Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul disesuaikan dengan bidang urusan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat digambarkan melalui Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritasdi Kabupaten Bantul

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
I. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	(1) Pemerataan dan perluasan akses Pendidikan masih rendah. (2) Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing pendidikan masih rendah. (3) SDM Pengelolaan Sekolah yang belum optimal. (4) Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi SPM (buku teks,laboratorium, ruang kelas, perpustakaan dan ruang guru/kepala sekolah.)	(1) Sarana dan prasarana lengkap. (2) Optimalisasi pendidik dan pemberdayaan guru. (3) Bantuan Operasional Pendidikan kepada sekolah. (4) Motivasi Pendidikan Tinggi.
2	Kesehatan	(1) Angka kematian ibu melahirkan cenderung fluktuatif. (2) Masih tingginya angka kematian bayi. (3) Masih adanya balita gizi buruk (4) Angka kesakitan penyakit menular tinggi. (5) Masih adanya daerah endemik (6) Semakin meningkatnya penyakit tidak menular.	(1) Adanya pemetaan dan pengawasan ibu hamil/bersalin/nifas berisiko. (2) Optimalisasi kualitas *Antenatal Care* (ANC). (3) Koordinasi intensif antar *stakeholder* terkait *Feedback* ibu hamil dan pemantauan dengan kewaspadaan dini RS (KDRS). (4) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini ibu hamil/nifas berisiko. (5) Meningkatnya program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). (6) Meningkatnya peran *stakeholder* lintas sektor dalam upaya penurunan AKI. (7) Deteksi dini penyakit penyerta TB seperti HIV, pneomonia dan*Multi Drug Resistant* (MDR). (8) Meningkatnya peran serta dari layanan kesehatan swasta dalam penemuan TB. (9) Meningkatnya kewaspadaan terhadap siklus 5 tahunan maupun 3 tahunan DB. (10) Meningkatnya kapasitas tempat tidur RS
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(1) Pemeliharaan jalan tidak menjangkau seluruh panjang jalan yang mengalami	(1) Peningkatan jalan dalam kondisi rusak/rusak berat berdasarkan prioritas dan peningkatan

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
		kerusakan. (2) Belum terpadunya perencanaan pembangunan drainase antar wilayah. (3) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya perawatan jaringan irigasi rendah. (4) Masih adanya konstruksi jaringan irigasi berupa tanah (belum pasangan batu).	spesifikasi konstruksi jalan sesuai dengan struktur tanah dan beban kendaraan yang melintas. (2) Terpenuhinya target pelaksanaan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengupayakan terobosan program-program pembiayaan. (3) Pemerintah desa kuat dan swadaya masyarakat meningkat. (4) Jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(1) Masih adanya kawasan kumuh. (2) Harga rumah tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah. (3) Kurangnya Fasilitas pemakaman Umum.	(1) Tertatanya kawasan kumuh secara bertahap dan berkelanjutan. (2) Terbangunnya Rusunawa. (3) Penerapan hunian berimbang. (4) Fasilitasi rumah murah untuk MBR. (5) Peningkatan penanganan RTLH. (6) Penyediaan area pemakaman umum oleh Pemerintah.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	(1) Belum optimalnya pelaksanaan penegakan perda; (2) Belum optimalnya pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat; (3) Wilayah Bantul rawan terhadap gempa bumi, longsor, banjir, gelombang pasang, kebakaran dan kekeringan; (4) Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam pemilu.	(1) Peningkatan pembinaan dan penyuluhan keamanan lingkungan melalui pemberdayaan SDM Linmas; (2) Peningkatan patroli wilayah; (3) Peningkatan kerjasama dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) Penyuluhan/ sosialisasi perda tentang kantrantibmas; (5) Peningkatan operasi penegakan perda melalui operasi yustisi dan non yustisi; (6) Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan; (7) Penyusunan rencana aksi pengendalian keamanan lingkungan; (8) Pembangunan berbasis risiko bencana; (9) Peningkatan pendidikan politik masyarakat; (10) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait pemantauan orang asing; (11) Peningkatan kerukunan umat beragama; (12) Peningkatan

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
			pendidikan wawasan kebangsaan; (13) Ormas, Orsos, dan LSM paham tentang hak dan kewajibannya.
6	Sosial	Masih tingginya penyandang masalah sosial	(1)Penegakan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan pelibatan semua *stakeholder* dalam menyelesaikan masalah PMKS. (2) Meningkatnya koordinasi antar PSM dan antar pilar partisipan kesejahteraan sosial. (3) Peningkatan koordinasi OPD terkait untuk membantu pelaksanaan validasi, terutama dalampemberian NIK pada setiap peserta PBI-JKN. (4) Peningkatan fasilitas rehabilitasi kesejahteraan sosial
II. Urusan Wajib <u>Tidak</u> Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	Tenaga Kerja	(1) Masih banyaknya pekerja yang mendapatkan upah dibawah UMK. (2) Masih rendahnya ketersediaan tenaga terampil.	(1)Adanya *job canvasing* dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *on-line* secara reguler. (2) Implementasi dan penegakan aturan UMK. (3) Tenaga Kerja mempunyai ketrampilan yang dibutuhkan pasar kerja. (4) Meningkatnya produktivitas tenaga kerja. (5) Adanya pelatihan kewirausahaan secara berkelanjutan.
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(1) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan. (2) Masih tingginya angka KDRT	(1) Peningkatan peranserta perempuan dalam pengambilan kebijakan publik. (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender.

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
3	Ketahanan Pangan	(1) Pola konsumsi keaneragaman pangan masyarakat belum optimal. (2) Inovasi pengolahan pangan lokal masih rendah. (3) Masih terdapat desa rawan pangan.	(1) Adanya pelatihan petani yang berumur relatif muda dengan materi agribisnis. (2) Terfasilitasinya pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal. (3) Adanya diversifikasi pangan dengan pangan lokal. (4) Pemberdayaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat. (5) Penanganan desa rawan pangan. (6) Monev peredaran makanan secara berkala. (7) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
4	Pertanahan	(1) Tanah hak milik masih banyak yang belum bersertifikat.	Adanya pelaksanaan program PTSL
5	Lingkungan Hidup	(1)Belum adanya personil analis laboratorium (2) Penurunan kualitas air sungai dan udara. (3) Pengelolaan limbah masyarakat dan dunia industri masih rendah. (4) Banyaknya kerusakan lahan akibat penambangan.	(1) Terisinya personil secara bertahap. (2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. (3) Bertambahnya Penanaman pohon dan menambah luasan ruang terbuka hijau.
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1) Cakupan kepemilikan KTP-el belum optimal.	(1) Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan Adminduk dan Pencatatan Sipil. (2) Koordinasi secara intensif antar *stakeholders* untuk kesepakatan penanganan bagi WNI yang pergi ke LN. (3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP melalui gerakan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk).
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1) Kinerja LPMD belum optimal. 2) Belum semua desa memiliki Bumdes. 3) Sarana dan prasarana pasar desa belum memadai.	(1) Intensifikasi pelatihan kepada masyarakat. (2) Meningkatnya kapasitas SDM pemerintah desa. (3) Adanya pemberdayaan usaha ekonomi yang sudah ada dalam rangka mendorong

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
			percepatan pertumbuhan ekonomi desa. (4) Penerapan TTG yang telah dikembangkan lembaga penelitian dan pengembangan seperti Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna (PPTTG) dan LIPI. (5) Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. (6) Intensifikasi diseminasi tentang manfaat P2WKSS.
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan keluarga dan keluarga terencana. (2) *Unmed need* KB masih relatif tinggi. (3) Banyak pernikahan usia dini.	(1) KIE perlu ditingkatkan dari sisi kualitatif dan kuantitatif. (2) Tertatanya PLKB dan peningkatan peran dari IMP dan kader. (3) Terbentunya kelompok-kelompok PIK remaja dan KIE bagi remaja.
9	Perhubungan	(1) Kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas. (2) Kesadaran dan keselamatan berlalu lintas rendah.	(1) Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum dengan adanya penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersedia angkutan umum. (2) Meningkatkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas. (3) Adanya rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. (4) Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan. (5) Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan.
10	Komunikasi dan Informatika	(1) kurangnya kapasitas optimalnya *warehouse* data yang ada. (2) Belum terintegrasinya data aplikasi telematika di masing masing OPD. (3) Kurangnya informasi yang akurat berbasis kelompok masyarakat. (4) kurangnya OPD yang memiliki PPID Aktif. (5) perlunya SDM yang terampil bidang TIK di era digital.	(1) Peningkatan kualitas dan kuantitas *warehouse* data serta optimalisasi secara berkelanjutan. (2) Tumbuhnya komitmen dan motivasi Pimpinan OPD untuk penggunaan data secara bersama dan terintegrasi. (3) Membangun aplikasi sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh data OPD. (4) Memperluas target sosialisasi tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyrakat. (5)

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
			Memperluas target sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik hingga tingkat staf/petugas pengelola informasi. (6) Perlunya Pelatihan SDM bidang TIK.
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	(1)Koperasi belum menjadi lembaga ekonomi yang optimal membantu masyarakat. (2) Kelembagaan dan manajemen koperasi belum optimal. (3) Koperasi banyak yang tidak aktif. (4) Daya saing produk UKM perlu ditingkatkan	(1) Revitalisasi koperasi. (2) Berkembangnya sistem kemitraan antara Koperasi dengan UKM. (3) Penguatan kelembagaan. (4) Tumbuhnya jiwa kewirausahaan. (5) Fasilitasi permodalan. (6) Pelatihan teknis. (7) Pengembangan industri kreatif.
12	Penanaman Modal	(1) Meskipun mencapai target, namun realisasi investasi termasuk rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan investasi daerah lainnya. (2) Ketersediaan Lahan terbatas. (3) Infrastruktur kawasan terbatas. (4) Pelayanan perijinan belum optimal	(1)Adanya promosi investasi. (2) Beroperasinya Kawasan Industri baik di Kawasan Industri Piyungan maupun di Kawasan Peruntukan Industri Sedayu. (3) Adanya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Perpres 97 Tahun 2014 dalam rangka memudahkan investor dalam pengurusan perizinan dan non perizinan penanaman modal. (4) Penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
13	Kepemudaan dan Olahraga	(1) Masih terbatasnya wirausahawan dari kalangan pemuda. (2) Sarana dan prasarana olahraga belum optimal. (3) Prestasi olahraga belum optimal. (4) Belum optimalnya gerakan pramuka dikalangan non pelajar.	(1) Jiwa kewirausahaan para pemuda tinggi. (2) Adanya seleksi atlet di tingkat kabupaten. (3) Adanya sarana olahraga indoor dan kolam renang yang memiliki standar nasional. (4) Meningkatkan Gerakan Saka Taruna Tani dan Saka Wana Bakti.
14	Statistik	(1) Data tidak *up-to-date.* (2) Pengumpulan data masih manual. (3) Belum ada kesamaan persepsi data.	(1) Koordinasi secara intensif untuk menyatukan data sesuai peruntukkannya. (2) Adanya Pelatihan bagi operator data di berbagai SKPD untuk mengoperasikan sistem pengumpulan data

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
			secara *on-line*.
15	Persandian	(1) Terbatasnya Peralatan Pengamanan Informasi; (2) Belum Optimalnya Komunikasi antar OPD; (3) Belum Optimalnya Jaring Komunikasi sandi Daerah.	(1) Peningkatan pengamanan informasi melalui persandian; (2) Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi; (3) Membangun komunikasi dengan jajaran persandian di pusat maupun daerah melalui Forkomsanda.
16	Kebudayaan	(1) Belum adanya kebijakan pokok-pokok pikiran, rencana dan strategi pelestarian kebudayaan yang mencakup: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah. (2) Belum adanya identifikasi dan kodifikasi budaya daerah. (3) Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan aktualisasi budaya.	(1) Tersedianya potensi budaya (baik benda maupun tak benda), termasuk di dalamnya pelaku seni, kelompok-kelompok kesenian, pakar dan pemerhati kebudayaan; (2) Adanya kesadaran bersama (*multi stakeholder* kebudayaan) untuk terlibat dalam upaya pelestarian kebudayaan; (3) Tersedianya potensi sarana dan prasrana yang dapat dikembangkan menjadi sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan aktualisasi budaya.
17	Perpustakaan	(1) Kurangnya koleksi bahan pustaka. (2) Cakupan pelayanan Perpustakaan belum optimal; (3) Belum optimalnya perpustakaan digital	(1) Peningkatan koleksi bahan pustaka.(2) Optimalnya sarana dan prasarana. (3) Pengembangan SDM perpustakaan.
18	Kearsipan	(1) Belum optimalnya sarana dan prasarana pengolahan, layanan dan pameran arsip. (2) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga arsiparis. (3) Kurangnya kesadaran pentingnya pengelolaan kearsipan.	(1) Apresiasi kearsipan dan penyuluhan bagi seluruh pejabat di SKPD, lurah, dan kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul. (2) Menambah proporsi Diklat kearsipan bagi petugas arsip dan arsiparis. (3) Adanya sosialisasi Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta diupayakan agar tata kearsipan dimasukkan dalam materi pemeriksaan Inspektorat.
III. Urusan Pilihan			
1	Kelautan dan Perikanan	(1) Keterbatasan benih dan induk berkualitas. (2) Produksi perikanan masih	(1) Penyediaan bibit ikan unggul. (2) Mempermudah akses informasi kondisi cuaca

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
		rendah.	dan iklim bagi para nelayan. (3) Meningkatkan kemampuan nelayan dan sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk menangkap ikan di jalur penangkapan ikan II dan III. (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2	Pariwisata	(1) Manajemen Pengelolaan Pariwisata belum optimal. (2) Kualitas sarana dan prasarana pariwisata belum optimal. (3) Sebaran kunjungan wisatawan tidak merata	(1) Peningkatan sarana prasarana wisata, dan penguatan kapasitas SDM serta lembaga pengelolaan obyek wisata. (2) Pelaksanaan kampanye dan pembinaan Sadar Wisata secara kontinyu dengan memanfaatkan semua media. (3) Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata meliputi infrastruktur dan fasilitas pendukung. (4) Tersusunnya RDKP untuk 17 kecamatan dan RTRW untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kabupaten Bantul dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi. (5) Optimalisasi promosi wisata.
3	Pertanian	(1) Kelembagaan Petani daya tawarnya rendah. (2) Penerapan teknologi anjuran lemah. (3) Regenerasi SDM petani makin sulit. (4) Penyediaan Saprodi belum optimal. (5) Belum tersedianya data ternak menurut jenis kelamin dan umur. (6) Produktivitas ternak belum optimal. (7) Tingginya alih fungsi lahan. (8) Belum optimalnya pengendalian dan penaggulangan bencana pertanian.	(1) Pendampingan kepada kelompok tani, demplot, pelatihan dan sekolah lapangan. (2) Gerakan penggunaan pupuk berimbang. (3) Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang rusak. (4) Pelatihan pananganan pasca panen. (5) Pemanfaatan lahan marginal untuk penanaman hijauan pakan ternak berkualitas dan pengolahan pakan ternak alternatif (fermentasi, silase). (6) Pendataan ternak menurut jenis kelamin dan umur. (7) Aktifnya Unit Pengolah Pakan (UPP) Non Ruminansia dalam pembuatan pakan buatan. (8) Pengendalian laju alih fungsi lahan. (9) Asuransi Pertanian.

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
4	Kehutanan	Kewenangan kabupaten/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten/kota. Kabupaten Bantul tidak memiliki TAHURA sehingga urusan kehutanan tidak dilaksanakan di Kabupaten Bantul.	
5	Energi dan Sumber daya Mineral	(1) Adanya Penambangan ilegal.	(1) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian berdasarkan peraturan perundangan.
6	Perdagangan	(1) Keterbatasan jangkauan pelayanan dan fasilitasi promosi produk Bantul. (2) Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tetapi melalui mekanisme pasar.	(1) Pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi produk Kab. Bantul. (2) Melakukan operasi pasar
7	Perindustrian	(1) Industri kecil baru sebagian yang memiliki SP-IRT. (2) Daya saing industri rendah. (3) Keterbatasan lahan dan infrastruktur industri. (4) Kelembagaan, pemasaran dan sumberdaya lemah. (5) Pengembangan industri kreatif belum optimal.	(1) Terstandarisasinya industri dengan SNI, SVLK,HKI, Sertifikasi Halal. (2) Adanya badan pengelola Kawasan Industri Piyungan. (3) Kemudahan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar/Badan Hukum bagi kelompok IKM.
8	Transmigrasi	(1) Koordinasi dengan daerah penerima lemah. (2) Kuota transmigran ditentukan oleh kebijakan pusat.	(1) Koordinasi secara intensif dengan daerah penerima, Pemda DIY dan Kementerian Transmigrasi. (2) Verifikasi kepada calon transmigran sehingga akan diperoleh calon transmigran yang mempunyai minat, motivasi, berketrampilan serta memenuhi syarat.
IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
1	Fungsi Penunjang Perencanaan	(1) Konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran belum optimal; (2) Musrenbang belum efektif menyerap aspirasi masyarakat; (3) Pengendalian kebijakan dan perencanaan belum optimal.	(1) SIM Terintegrasi. (2) Komitmen dalam penerapan Pagu Indikatif Kecamatan. (3) Komitmen terhadap hasil pengendalian untuk bahan perencanaan yang berkelanjutan.

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
2	Fungsi Penunjang Keuangan	(1) Pengelolaan aset daerah belum optimal; (2) Belum optimalnya pencapaian target pendapatan daerah; (3) Pengelolaan keuangan belum optimal.	(1) Peningkatan pengelolaan barang milik daerah; (2) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; (3) Peningkatan disiplin anggaran.
3	Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya profesionalisme dan kompetensi PNS.	(1) Adanya sistem aplikasi kepegawaian yang terpadu dan terintegrasi. (2) Melakukan analisis kepegawaian. (3) Melakukan peningkatan kapasitas pegawai.
4	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	(1) Secara kelembagaan fungsi Litbang terbatas pada penelitian yang menunjang pada proses perencanaan dan sinergitas antara pemerintah /pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat; (2) Belum tersedia tenaga fungsional peneliti.	(1) Peningkatan kerjasama penerapan hasil penelitian yang dihasilkan oleh akademisi dan lembaga penelitian; (2) Adanya *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah; (3) Diterbitkannya Jurnal Riset Daerah secara berkala.
5	Fungsi Penunjang Lainnya		
	a. Fungsi Penunjang Pengawasan	(1) Tindak lanjut temuan belum optimal; (2) Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan terbatas.	(1) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan; (2) Pemberdayaan Aparatur pengawasan dan tenaga pemeriksa.
	b. Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan	(1) Belum optimalnya pelayanan dokumentasi hukum; (2) Belum optimalnya koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi: kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kesehatan; (3) Terbatasnya SDM layanan pengadaan barang dan jasa pemerintahan; (4) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi; (5) Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal; (6) Belum optimalnya kebijakan pengembangan	(1) Peningkatan layanan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, pemberian bantuan hukum, pengawasan produk hukumpemerintah desa, publikasi peraturan perundang-undangan, pembinaan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); (2) Melaksanakan perumusan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan sosial bagi warga miskin, pendidikan dan kesehatan; (3) Peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui layanan

No.	Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
		ekonomi masyarakat.	LPSE; (4) Peningkatan kinerja ASN melalui evaluasi analisis jabatan, evaluasi analisis beban kerja; (5) Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi; (6) Melakukan kajian kebijakan kualitas pelayanan publik; (7) Peningkatan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan APBD, pembuatan pedoman pelaksanaan pembangunan; (8) Peningkatan kapasitas SDM, keuangan dan kelembagaan desa; (9) Peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum; (10) Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah; (11) Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga; (12) Peningkatan kajian pengembangan potensi ekonomi masyarakat termasuk sarana prasarana dan lembaga ekonomi daerah; (13) Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan.
	c. Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi program kegiatan SKPD di wilayah kecamatan.	Optimalisasi dan peningkatan fungsi kecamatan dalam koordinasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan, jika dinamika eksternal khususnya selama 3 (tiga) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Isu strategis diidentifikasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten;
2. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
3. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
5. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1. Kajian Isu Internasional dan Isu/Kebijakan Pembangunan Nasional

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap isu internasional dan kebijakan pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Bantul. Hasil *review* akan melengkapi isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan.

Pemberlakuan MEA tahun 2015 menyebabkan lalu lintas perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara menjadi tanpa kendala. MEA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya. Perdagangan bebas dapat diartikan tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara anggota ASEAN.

Negara-negara ASEAN telah menyepakati sektor-sektor prioritas menuju momen tersebut. Ketika berlangsung ASEAN Summit ke-9 tahun 2003 ditetapkan 11 *Priority Integration Sectors* (PIS). Namun pada tahun 2006 PIS yang ditetapkan berkembang menjadi 12 yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa. Tujuh sektor barang industri terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu. Sedangkan lima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, e-ASEAN, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik.

Dalam menghadapi persaingan yang teramat ketat selama MEA ini, negara-negara ASEAN harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, cerdas, dan kompetitif.

c. Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA)

Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) akan dibangun dengan konsep bandara internasional modern dengan fasilitas intermoda. Sarana intermoda yang dimaksud yakni lajur khusus kereta api yang bisa mengakses langsung area bandara. Selain itu, bandara ini akan memiliki landasan pacu (*runway*) minimal 3.250 meter sehingga pesawat jet berbadan besar dapat mendarat dan tinggal landas. Dengan demikian, terbuka luas peluang untuk membuka penerbangan langsung (*direct flight*) baik ke Asia maupun Eropa. Dengan masuknya pesawat besar sangat memungkinkan menjadikan DIY sebagai kawasan embarkasi haji baru dengan jalur langsung ke tanah suci. Tambahan pula, pembangunan infrastruktur pendukung dan peluang masuknya investasi dapat menyerap tenaga kerja masyarakat. Bandara yang ditarget bisa menampung 15 juta penumpang tiap tahunnya ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2020.

d. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)

Sejalan dengan Visi Gubernur 2017–2022 yaitu Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Dengan demikian direncanakan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung kawasan strategis pantai selatan, salah satunya dengan pembangunan JJLS.

Berdasarkan Kepmen PU Nomor 631 Tahun 2009 tentang Status Jalan Nasional Bukan Tol, JJLS merupakan jaringan jalan nasional strategis belum tersambung yang memiliki panjang 125,125 Km dengan rincian Kabupaten Kulon Progo sepanjang 28,840 km, Kabupaten Bantul sepanjang 20,195 km, dan Kabupaten Gunungkidul sepanjang 76,090 km. Dalam pelaksanaan pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan ini biaya fisik konstruksi didanai melalui alokasi dana APBN. Pembebasan lahan pada tahun 2016-2017 (dimulai dari Samas ke timur) menggunakan dana keistimewaan, sedangkan pemerintah kabupaten terlibat dalam proses sosialisasi. Realisasi rencana pembangunan JJLS di Kabupaten Bantul yaitu sepanjang 16,58 km, terdiri dari ruas Pandansimo-Samas terbangun sepanjang 6,28 km, ruas Samas-Kretek terbangun sepanjang 5 km, ruas Kretek-Girijati direncanakan akan dibangun sepanjang 5,3 km pada

tahun 2018-2019 melalui APBN, rencana pembangunan Jembatan Srandakan III, dan jembatan Kretek II direncanakan dibangun pada tahun 2018-2019.

e. Pembangunan Jogja *Outer RingRoad* (JORR)

Pembangunan jalan lingkar luar Yogyakarta atau Jogja *Outer Ring Road* (JORR) direncanakan untuk mengurangi arus lalu lintas di jalan lingkar (*ring road*) Yogyakarta yang semakin padat. Panjang JORR direncanakan 113,413 km dan lebar jalan 40 m, melewati tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kulonprogo, dan Bantul. Rute JORR yang melewati Kabupaten Bantul sepanjang 47,48 km, terdiri dari rute Sentolo-Imogiri (22 km), rute Imogiri-Piyungan (16,325 km), dan rute Piyungan-Kalasan (9,155 km). Studi kelayakan Rencana Pembangunan JORR telah dilakukan pada tahun 2016, sedangkan AMDAL disusun pada tahun 2017. Untuk mendukung rencana pembangunan tersebut diharapkan *sharing* dari pemerintah kabupaten berupa sosialisasi maupun pembebasan lahan.

f. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs*). Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDGs aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030.

Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

1. Kemiskinan - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. Kelaparan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.

4. Pendidikan - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
5. Wanita - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. Air - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. Energi - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. Ekonomi - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Infrastruktur - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. Kesenjangan - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. Komunitas - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. Konsumsi - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. Iklim - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhpengaruhnya.
14. Lautan yang berkesinambungan - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. Ekosistem - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
16. Institusi - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.

17. Kemitraan - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Kabupaten Bantul, sebagian atau seluruh tujuan SDGs dapat dipilih sebagai tujuan yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Kabupaten Bantul 3 (tiga) tahun mendatang. Hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu SDGs sebagai isu strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul, dengan catatan telah dilakukan kajian mengenai relevansi antara isu SDGs dengan permasalahan *riil* di lapangan.

Beberapa isu terkait SDGs, capaian isu strategis SDGs Kabupaten Bantul ada yang sudah tercapai dan belum tercapai, berikut faktanya:

- Tujuan pertama dalam sasaran Global SDGs dimana Pada Tahun 2030, mengurangi setidak-tidaknya setengah *proporsi* laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2017 masih diatas DIY (13,02%). Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul sejalan dengan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dimana wlayah Kabupaten Bantul masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
- Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian di Kabupaten Bantul. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga masih fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 72,8 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu).
- Ketersediaan air bersih dan sanitasi, yakni menjamin ketersediaan serta *pengelolaan* air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Akses air bersih penduduk Kabupaten Bantul mencapai 107,12, hal ini dicapai karena sebagian warga memiliki akses air bersih dari 2 atau lebih sumber air, misal dari air bersih perpipaan dan sumur gali. Sedangkan, akses jamban tahun 2017 menurut data Dinas Kesehatan sebesar 100% mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 97,0%, hal ini berarti semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses jamban.

g. Pelestarian Gumuk Pasir

Gumuk Pasir terbentuk oleh endapan butiran-butiran pasir halus yang terbawa oleh angin. Di DIY, pembentukan gumuk pasir terjadi akibat material vulkanik Gunung Merapi berupa batuan yang pecah menjadi kerikil dan akhirnya menjadi butiran pasir, terbawa angin menuju pantai dan tertahan oleh ombak dan angin yang sangat kuat dari Samudera Hindia sehingga menghasilkan gumuk pasir yang disebut *barchan*, yang berbentuk melengkung mirip bulan sabit. Gumuk pasir tipe *barchan* yang ada di Parangtritis saat ini adalah salah satu dari hanya dua di dunia. Adapun satunya berada di negara Mexico.

Gumuk pasir di Parangtritis telah ditetapkan sebagai *Geo Heritage* oleh Badan Geologi Nasional. Kondisi saat ini menurut beberapa pakar ekologi, sedang terancam rusak bahkan dapat punah. Hal ini ditengarai akibat dari aktivitas manusia yang dilakukan di dekat kawasan gumuk, seperti pembangunan tambak, perluasan lahan pertanian, dan penanaman pohon cemara udang yang berpotensi menahan angin pembentuk gumuk. Diperlukan upaya-upaya strategis dan sinergis untuk melindungi dan melestarikan *Geo Heritage* Gumuk Pasir Parangtritis.

h. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan ancaman besar terhadap ketahanan pangan. Pada tahun 2015 telah terjadi alih fungsi lahan seluas 50 ha. Sesuai dengan UU No 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah DIY No. 10 Tahun 2011 Tentang Pelindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan agar Pemerintah melakukan Perlindungan terhadap lahan-lahan produktif dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam Perda telah ditetapkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantul paling kurang 13.000 ha. Beberapa kebijakan telah dilaksanakan untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan antara lain:

1) Moratorium Perumahan di Kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon, Bantul dan Pleret.

2) Pelarangan alih fungsi lahan desa.
3) Pemetaan rencana kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

4.2.2. Kebijakan Provinsi

a. RPJMD DIY Tahun 2017-2022[1]

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, isu strategis dalam pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Angka Kemiskinan

DIY mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung sasaran Tujuan pertama dalam sasaran Global SDGs/TPB dimana Pada Tahun 2030, mengurangi setidak-tidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasioanal. Tingkat kemiskinan pada periode 2010 sampai dengan September 2016 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin 2010 sebesar 16,83 persen, turun menjadi 13,02 persen pada Maret 2017. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan DIY memang masih lebih tinggi. Dalam sasaran pengurangan kemiskinan pada RPJMN 2015-2019, target tingkat kemiskinan DIY tahun 2019 adalah 7%-8%. Dengan kondisi DIY capaian saat ini per September 2017 sebesar 12.36 %, ditarget dalam RAD SDGs/TPB DIY secara bertahap diupayakan diturunkan dengan target per tahun kurang lebih 1% pertahun sehingga diharapkan pada 5 (lima) tahun mendatang Tahun 2022 turun menjadi 7 %.

2. Tingginya Ketimpangan Wilayah

Isu strategis terkait Ketimpangan Wilayah mendapatkan perhatian di dalam beberapa tujuan dalam SDGs/TPB. Adapun yang secara khusus berkaitan dengan ketimpangan wilayah yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan

*)Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJMD DIY Tahun 2017-2022 halaman IV-111 s/d IV-121

kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang. Sasaran dalam tujuan ini antara lain meliputi:

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi,
- Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun,
- Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun,
- Menurunnya koefisien gini, dan
- Menurunnya tingkat kemiskinan.

3. Pencemaran, Kerusakan Alam, dan Resiko Bencana Alam

Isu terkait lingkungan yaitu:

- Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua,
- Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan,
- Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan,
- Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya,
- Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dan
- Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

4. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Isu terkait belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian di DIY juga telah menjadi issu atau target sasaran dalam tujuan SDGs/TPB, yaitu:

- Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan

- Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

Beberapa isu strategis terkait pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain masih maraknya alih fungsi lahan, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Alih fungsi lahan tersebut pada umumnya adalah kawasan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian yang tinggi dikarenakan melonjaknya kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat. Sementara di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum optimal dengan belum ditetapkannya lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

5. Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal

Infrastruktur strategis merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah, yang dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah kawasan pesisir selatan DIY. Penyediaan infrastruktur strategis di kawasan selatan bertujuan untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah terutama pada penurunan penyimpangan PDRB di kawasan selatan terhadap PDRB di kawasan Utara (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta), serta penurunan angka kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah konektivitas. Dengan adanya konektivitas suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Konektivitas dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya konektivitas ini memerlukan dukungan infrastruktur strategis diantaranya jalan, bandara, dan jalur kereta api penghubung. Infrastruktur jalan dan konektivitas tidak dapat dipisahkan dalam perannya mempengaruhi perkembangan wilayah.

6. Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi

Terkait isu pengembangan pendidikan, dalam SDGs/TPB DIY telah menyelaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam dokumen RAN, yaitu: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Adapun sasaran-sasaran akhir SDGs tahun 2030 sebagai berikut:

- Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- Menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
- Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

7. Pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda

Sebagaimana tercantum dalam Visi RPJP 2005-2025, kebudayaan menjadi salah satu pilar utama pembangunan. Upaya pembangunan kebudayaan semakin intens terutama seusai penetapan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Semakin kuatnya upaya pemeliharaan dan pengembangan budaya benda maupun tak benda menghadapi ancaman kerusakan sejumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan perkotaan dan faktor alamiah. Sementara itu, dalam aspek tak benda, sejumlah warisan budaya tak benda yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya, adat dan

tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra telah mendapatkan pengakuan warisan budaya tak benda nasional.

8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Terkait dengan isu tata kelola pemerintahan telah menjadi bahasan dalam SDG's/TPB yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

9. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam TPB merupakan pilar tersendiri yaitu pilar ekonomi, terdiri dari 4 (empat) tujuan yaitu:

- Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Paradigma pembangunan ekonomi mengalami pergeseran, dari yang mengejar angka pertumbuhan meningkat menjadi pertumbuhan yang bersifat inklusif. Pertumbuhan yang inklusif dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif akan memberi rakyat miskin sebuah titik awal yang memungkinkan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, peningkatan

jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial.

- Pertumbuhan inklusif diukur melalui *Inclusive Growth Index* (IGI) yang memiliki lima dimensi yaitu (1) dimensi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi, (2) dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, (3) dimensi kesetaraan gender, (4) dimensi kapabilitas dan (5) dimensi perlindungan sosial. Berdasarkan pengukuran indeks IGI diperoleh dimensi infrastruktur ekonomi, kesetaraan gender dan kapabilitas manusia mencapai indeks kepuasan yang relatif tinggi. Sementara itu, dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih relati rendah pencapaiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belum diikuti dengan penurunan kesenjangan baik distribusi pendapatan antar individu maupun distribusi pendapatan antar Kabupaten/kota.

b. Rencana Tata Ruang dan Keistimewaan DIY

Dalam perkembangannya kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Bantul juga mengacu pada kawasan Strategis dalam RTRW DIY dan juga Keistimewaan DIY.

Rencana pola ruang keistimewaan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pola ruang keistimewaan ini menyangkut keberadaan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, serta satuan ruang lainnya yang memiliki nilai keistimewaan. Pengelolaan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, serta satuan ruang keistimewaan lainnya.

Kawasan strategis RTRW dan Keistimewaan DIY terkait dengan wilayah Kabupaten Bantul, antara lain:

a) Pengembangan kawasan strategis koridor:
   1) Kawasan Koridor Temon – Prambanan.
   2) Kawasan Koridor Tempel - Parangtritis.
   3) Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Kawasan Strategis Kepentingan Sosial dan Budaya

1) Nitiprayan, Pleret, Imogiri, Parangkusumo.
2) Ekologis budaya selatan.
3) Gumuk pasir Parangtritis.

c) Kawasan Strategis Kepentingan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Bentang Alam Karst (Kec. Dlingo dan Kec. Imogiri)

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Di dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

Berikut ini disajikan telaahan RPJMD beberapa kabupaten/kota tetangga Kabupaten Bantul.

Tabel 4.2.
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Nama Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
1	Kota Yogyakarta	2012-2016	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas 3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto 4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat
		2017-2022	1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat 2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta 3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta 4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya 5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan 6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman 7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
2	Kabupaten Sleman	2016 - 2021	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penigkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

No	Nama Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait
			3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan. 4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan. 5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan *gender* yang proporsional.
3	Kabupaten Kulon Progo	2017-2022	1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan. 2. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada Prinsip-Prinsip *Clean Government* dan *Good Governance.* 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah yang berbasis pada Pertanian dalam arti luas, Industri dan Pariwisata yang berdaya saing dan Berkelanjutan bertumpu pada Pemberdayaan Masyarakat. 4. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah. 5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan secara Optimal dan Berkelanjutan 6. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban melalui Kepastian, Perlindungan dan Penegakan Hukum.
4	Kabupaten Gunungkidul	2016 - 2021	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. 3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional. 4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah. 5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif. 6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

4.2.4. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabuputen Bantul Tahun 2006-2025.

Visi Kabupaten Bantul 2006-2025, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis.**

Dalam mewujudkan visi tersebut, tahapan dan skala prioritas lima tahun ketiga dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Prioritas Lima Tahun Tahap Ketiga RPJPD di Kabupaten Bantul 2006-2025

Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga: **Pencapaiandaya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**		
MISI	**TAHAP III**	**PRIORITAS TAHAP III**
1. Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkansumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitikberatkanpengurangan risiko bencana, serta berdasarkan pada keimanandan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.	a) Peningkatan pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenjang, peningkatan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan. b) Pemenuhan sekolah berkualitas melalui penyediaan/pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, dan pemenuhan fasilitas pendidikan. c) Peningkatan kuantitas dan kualitas siswa pada sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan. d) Pengembangan pendidikan non formal sesuai dengan pekembangan ilmu dan teknologi e) Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan	a) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. b) Peningkatan budaya hidup sehat dan bersih. c) Peningkatan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. d) Peningkatkan status gizi masyarakat dengan cara menjalankan pola hidup bersih dan sehat melalui upaya promotif dan preventif secara terus-menerus

Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga: **Pencapaiandaya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**		
MISI	**TAHAP III**	**PRIORITAS TAHAP III**
		terhadap berbagai penyakit dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. e) Peningkatan pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular
	Peningkatan perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja	a) Penciptaan peluang kesempatan kerja danberusaha bagi seluruh lapisan masyarakat. b) Peningkatan sarana permodalan. c) Peningkatan kerjasama antar daerah di tingkat nasional termasuk transmigrasi. d) Peningkatan etos masyarakat berwirausaha dengan dukungan informasi peluang usaha. e) Peningkatan pelatihan ketrampilan. f) Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha. g) Peningkatan kesehatan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lindungan yang kondusif
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna mengahadapi perdagangan bebas negara-negara maju sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia	a) Pengembangan unit-unit usaha industri kecil dan kerajinan rakyat yang potensial. b) Peningkatan penyiapan dan penggunaan bahan baku lokal. c) Peningkatan kualitas produk dan jangkauan pemasaran. d) Peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri. e) Pengembangan sistem industri, dalam lingkup mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan dan berbasis keluarga dan teknologi. f) Pengembangan kawasan industri kreatif yang memadai. g) Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengganggguran. h) Peningkatan kepariwisataan dengan memanpaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainya. i) Pengembangan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif
	Terwujudnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat	a) Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah dalam rangka

Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga: **Pencapaiandaya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**		
MISI	**TAHAP III**	**PRIORITAS TAHAP III**
	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis	peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. b) Penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah. c) Peningkatan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air. d) Pengembangan teknologi informasi ke seluruh wilayah.
	Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan	a) Penataan ruang kawasan strategis, penyusunan *zone regulation* dan Rencana Penataan Permukiman (RPP). b) Peningkatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kepariwisataan dengan memanfaatkan. c) Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan. d) Peningkatan tata ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya dan penetapan insentif disinsentif
	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang; keberagaman pesona keindahan alam, budaya, dan potensi daerah lainnya	a) Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkunggan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. b) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung. c) Peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam. d) Pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan
	Pengurangan risiko bencana melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.	a) Pembangunan infrastruktur permukiman dan relokasi penduduk dari wilayah rawan bencana. b) Peningkatan kelembagaan masyarakat. c) Peningkatan kemampuan seluruh masyarakat, baik perempuan, anak dan usia lanjut dalam mengenali aspek bencana. d) Peningkatan sarana prasarana sistem

Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga:
Pencapaiandaya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.

MISI	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III
		peringatan dini bencana
	Berkurangnya Penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	a) Mewujudkan kesetaraan *gender* di lapisan masyarakat, organisasi, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. b) Peningkatan peran kelompok kegiatan sosial perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif. c) Peningkatan kemampuan perempuan dan kelompok rentan dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pengembangan diri. d) Jaminan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi (kespro) serta kelangsungan hidup ibu anak. e) Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial guna menampung penyandang masalah sosial
	Penanganan olah raga, peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda	a) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang olah raga. b) Pengembangan budaya olah raga bagi masyarakat. c) Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subyek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
	Mantapnya Karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, berkeperibadian Indonesia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yag dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis	a) Pembentukan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis. b) Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja. c) Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat
2. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab,	Peningkatan Kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	a) Peningkatan kinerja, kapasitas dan profesionalisme aparatur serta lembaga pemerintah. b) Penerapan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. c) Mewujudkan inventarisasi, pendayagunaan dan manajemen aset-aset daerah secara efektif, efisien dan produktif.

Penekanan Pada Lima Tahun Ketiga: **Pencapaiandaya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan SDM, dan optimalisasi pengelolaan SDA, berbasis IPTEK.**		
MISI	**TAHAP III**	**PRIORITAS TAHAP III**
		d) Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah. e) Mewujudkan kepastian, perlindungan, penegakan dan pelayanan hokum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global. f) Pemantapan tata kelola pemerintahan yang empatik.
	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	a) Penerapan Teknologi informasi sampai tingkat desa dalam pelayanan publik. b) Pemantapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercipta kepuasan masyarakat. c) Peningkatan mutu sarana dan prasarana publik.
	Peningkatan ketertiban masyarakat.	a) Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan. b) Pemantapan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana dalam kehidupan bermasyarakat
	Pemantapan kesadaran masyarakat dan aparat, membudayakan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan HAM	

b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1) Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakanlahanpertanian pangan berkelanjutan;
2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

1) Menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;
2) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
3) Menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah;
4) Mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan
5) Mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah meliputi:

a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa;
b. Meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman serta untuk mendorong peningkatan hasil pertanian;
c. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan laut untuk mengembangkan potensi kelautan Bantul;
d. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;
e. Meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; dan
f. Meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan**.**

Dalam RTRW Bantul telah ditetapkan beberapa kawasan strategis kabupaten, yaitu:

a. Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten, terdiri dari:

a) Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);
b) Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
c) Kawasan Strategis Pantai Selatan,Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan
d) Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
e) Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan
f) Kawasan Strategis Industri Piyungan.

b. Kawasan Strategis Sosio-Kultural Kabupaten yaitu Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan:
   a) Gabusan –Manding – Tembi (GMT) dan
   b) Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem).

c. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten, yaitu:
   a) Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
   b) Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Rencana pola ruang Kabupaten Bantul juga mengikuti arahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali serta Peraturan Daerah DIY tentang Rencana Tata Ruang DIY. Berdasarkan peraturan tersebut maka rencana pola ruang lindung Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, serta kawasan rawan bencana alam.

Adapun rencana pola ruang budidaya Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang ada dalam RTRW Bantul, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk pengembangan pariwiata, pengembangan energi terbarukan, perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela.

Dalam mendukung *grand design* dan *roadmap* kawasan Pantai Selatan sebagai halaman muka DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan berbagai langkah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan pendukung JJLS,
2. Penetapan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sedayu dan Kecamatan Pajangan.
3. Penyelamatan ekosistem gumuk pasir.
4. Pegembangan sentra-sentra industri potensial.
5. Peningkatan daya saing IKM.
6. Pengembangan destinasi wisata.
7. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.
8. Pengembangan pertanian lahan pasir.

c. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul)

Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul) dibentuk melalui SK Bersama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman dan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 583b/B/SKB/Bt/1996, 310/Kep/KDH/1996/1169 Tahun 1996 tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Prasarana Perkotaan. Untuk memantapkan kerja sama

antar daerah yang dijalin, maka dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta No.152a 02/SKB.KDH/A/2004, Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta No.04/Pem/RT/2001, 38/Kep.KHP/2001, Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelola Prasarana dan Sarana Perkotaan Antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Sekretariat Bersama dibentuk sebagai forum fasilitasi, perencana dan mediasi untuk memudahkan koordinasi antar tiga daerah dalam menentukan penyediaan pelayan yang terpilih. Pelayanan terpilih mencakup 6 (enam) hal, yaitu: pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, penyediaan air bersih, saluran pembuangan, jalan dan transportasi.

Kartamantul memiliki visi: ”Menjadi lembaga yang menjembatani terwujudnya kerjasama yang setara, adil, partisipatif, transparan dan demokratis, untuk mewujudkan perkotaan yang nyaman, indah dan sehat yang didukung oleh sarana – prasarana dan pelayanan yang memadai, kesadaran dan peran serta masyarakat yang tinggi”.

Dalam visi ini, ketiga daerah berusaha untuk mewadahi berbagai kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan antar wilayah. Setiap daerah memiliki potensi dan tanggung jawab yang sama dalam pengambilan keputusan sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya ketidakpuasan.

Sedangkan Misinya adalah:

a) Melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil yang adil,
b) Melakukan mediasi penyelesaian permasalahan,
c) Melakukan koordinasi manajemen dan implementasi,
d) Melakukan fasilitasi proses pengambilan keputusan,
e) Membangun jaringan kerja yang kuat,
f) Memberikan inisiasi perubahan, dan
g) Memberikan rekomendasi kebijakan.

Berdasarkan visi dan misinya, Kartamantul bertujuan:

a) Menyeimbangkan dan mengharmonisasikan pengelolaan dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan di tiga pemerintah daerah,

b) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, dan
c) Meningkatkan penggunaan yang efisien dari sumber daya ketiga pemerintah daerah dan untuk mengoptimalkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di Metropolitan Yogyakarta.

Terdapat tiga aspek utama yang terkandung dalam tujuan Kartamantul, yakni: keharmonisan, koordinasi, dan efisiensi. Aspek-aspek tersebut menjadi jiwa dari setiap kegiatan yangdiselenggarakan oleh Kartamantul.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah dengan meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di wilayah yang berbatasan. Artinya, Kartamantul tidak menafikan proses pembangunan yang terjadi di setiap daerah anggotanya dan justru menjadikan pijakan bagi pengembangan program pembangunan secara bersama-sama.

4.2.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP (Kebijakan, Rencana, dan Program). Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Proses penyusunan KLHS RPJMD dimulai dengan melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk pemetaan pemangku kepentingan, selanjutnya Pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan kemudian pelingkupan untuk memperoleh daftar pendek isu-isu lingkungan. Tahap berikutnya adalah pengkajian konsistensi pembangunan berkelanjutan RPJMD, pengkajian pengaruh RPJMD terhadap isu sosial budaya, ekonomi, dan

lingkungan. Tahap berikutmya adalah merumuskan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif dan merumuskan rekomendasi yang diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Dari proses pra pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 309 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait isu pembangunan berkelanjutan sebanyak 11 isu, yaitu:

1) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya,
2) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata,
3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku,
4) Program Pembangunan Gedung,
5) Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
6) Program Pengembangan Perumahan,
7) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan,
8) Program pengembangan destinasi pariwisata,
9) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial,
10) Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan, dan
11) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

4.2.5.1. Kesimpulan

KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 telah disusun, dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Peran KLHS sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi KLHS juga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas dan lintas sektor. Pada isu strategis dan tercermin dalam visi pemerintah pada RPJMD Kabupaten Bantul, bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Bantul menuju pembangunan yang berkelanjutan.

b. Rumusan tujuan dan strategi RPJMD Kabupaten Bantul telah memuat pertimbangan pengarusutamaan lingkungan hidup.
c. Rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), telah memperhatikan keterkaitan dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

4.2.5.2. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 telah disusun dengan memperhatikan rekomendasi KLHS sebagai berikut:

a. Umum

1) Pada beberapa program terdapat rekomendasi untuk melakukan pemantauan ataupun pengelolaan dari pelaksanaan program. Program tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya pemantauan secara berkala dari kualitas lingkungan. Hal ini untuk menimalisir dampak samping yang akan berakibat pada lingkungan.
2) Selain itu, perlu adanya telaah lebih dalam mengenai peningkatan program infrastruktur ataupun peningkatan pendapatan kerja dengan berdampak pada perubahan tata guna lahan dalam beberapa tahun kedepan.
3) Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan harmonisasi materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul serta menjabarkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses harmonisasi dokumen rencana tersebut sekaligus digunakan untuk mengintegrasikan prinsip keterkaitan, prinsip keseimbangan dan prinsip keadilan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.
4) Dalam peningkatan pendapatan penduduk dengan peningkatan kegiatan produksi, maka pelaksanaan implementasi RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) harus terkelola dengan baik.
5) Dalam evaluasi RPJMD, sebaiknya dilakukan kajian dengan lingkup yang lebih kecil (kecamatan), karena KLHS menggambarkan karakteristik dari setiap wilayah. KLHS regional memang akan menghadapi persoalan oleh

adanya keragaman kebijakan yang terikat dalam suatu region atau wilayah. Dalam wilayah tersebut dapat ditemukan dan juga diperlukan aneka sektor, aneka tahap perkembangannya, aneka pelakunya dan aneka jangkauannya.

b. Teknis

1) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian yang ramah lingkungan serta mendorong penggunaan pupuk organik.
2) Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian utamanya LP2B dan reformasi agraria dalam rangka mempertahankan produksi dan produktifitas.
3) Pembangunan infrastruktur fisik diupayakan untuk meminimalkan menggunakan lahan pertanian/LP2B dalam rangka mempertahankan luasan areal produktif.
4) Untuk mempertahankan/meningkatkan/fungsi resapan air perlu menjaga areal terbuka, dan membudayakan sumur resapan dan bio-pori.
5) Untuk mengurangan emisi serta gejalan Rumah Kaca perlu digalakkan kegiatan penghijauan disepanjang koridor jalan, baik wilayah pemukiman pedesaan, Jalan penghubung Desa, Jalan penghubung Kecamatan dan Jalan Kabupaten, serta Jalan Propinsi dan Jalan Negara.
6) Untuk menahan dan mengurangi pesatnya alih fungsi lahan sekitar wilayah perkotaan, fungsi pengendalian terhadap dan penegakan hukum perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan dan dikembangkan dengan mendasarkan pada rencana tata ruang dan peningkatkan peran serta masyarakat.

4.2.6. Penetapan Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang

harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Bantul 2016-2021, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang antara lain meliputi kesehatan, pendidikan dan rohani.
2. Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal.
3. Pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing.
4. Mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan dan daya saing daerah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.
6. Pengembangan sarana dan prasarana dasar dan yang menunjang aktivitas perekonomian.
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
8. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial.
9. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dan kehutanan

Beberapa keterangan tambahan terkait rumusan isu strategis di atas dan sejalan dengan isu strategis DIY adalah sebagai berikut:

a) Kerusakan Kawasan Pantai Akibat Abrasi

Kawasan pantai selatan yang berada di Kabupaten Bantul tertutama di Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek dengan garis pantai kurang lebih 12 Km. Rusaknya ekosistem pantai dikhawatirkan mendorong terjadinya abrasi pantai. Dari ketiga kawasan pantai tersebut, saat ini telah mengalami abrasi walaupun tingkat kerusakannya berbeda-beda. Pantai Parangtritis tingkat abrasinya lebih kecil dibandingkan dengan Pantai Samas, Pandansimo, dan Kuwaru. Hal ini disebabkan adanya material gumuk pasir yang lebih banyak dibandingkan dengan pantai lainnya sehingga dapat menghalangi abrasi pantai.

b) Alih Fungsi Lahan

Peningkatan kebutuhan penduduk akan penyediaan perumahan, fasilitas pendidikan, kegiatan usaha menyebabkan banyak terjadi alih fungsi lahan terutama dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan banyak terjadi terutama di kawasan perkotaan, sedangkan dari sisi fungsinya wilayah Kabupaten Bantul sebagai daerah produksi pertanian yang produktif untuk DIY.

c) Kawasan Pantai Selatan

Kegiatan yang melebihi daya dukung di pantai selatan berpotensi menimbulkan ancaman lingkungan berupa abrasi dan hilangnya potensi gumuk pasir. Kegiatan tersebut seperti tambak udang, perkembangan bangunan akibat kegiatan wisata, dan lainnya.

BAB V.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder*, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 3 (tiga) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2006-2025). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis.** Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapai sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

5.1. Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
5. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
6. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah yang menjadi etos kerja Kabupaten Bantul yaitu "Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri,

sejahtera, demokratis, dan agamis yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi. Adapun penjabaran filosofinya yaitu:

1. **Produktif** dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.
2. **Profesional** dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.
3. **Ijo Royo-Royo** dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan baik di musim kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimana pun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.
4. **Tertib** dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/ perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.
5. **Aman** dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.
6. **Sehat** dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/ manusia yang menghuninya.
7. **Asri** dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri

tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang berstandar pada kreativitas manusiawi.

8. **Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.
9. **Demokratis** dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.
10. **Agamis** dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari.

5.2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum

sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;

3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN, dan RPJMD Propinsi.

Tabel 5.1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KON-DISI AKHIR
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	Terwujudnya penyelengga-raanpemerintah an daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI)	Klasifikasi	RPJMD 11/2016		60 (Baik)	65 (Baik)	70 (Baik)	75	80 (Baik)	85 (Sangat Baik)	
							Realisasi	N/A	74,5 (Baik)	75 (Baik)	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	7,5 (Baik)	8,0 (Baik)	8,5 (Sangat Baik)	8,5 (Sangat Baik)
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	RPJMD 11/2016		73,26	73,28	73,3	73.31	73.32	73.33	
							Realisasi	73,24	73,44	73,47	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	73,6	73,65	73,70	73,70
				Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	RPJMD 11/2016		15	15,2	15,4	15,6	15,8	15,9	
							Realisasi	15	13,55	14,73	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	15,23	15,38	15,54	15,54
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Turunnya Jumlah Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	RPJMD 11/2016		14,41	13,66	12,91	12,16	11,41	10,66	
							Realisasi	15,16	14,55	14,07	-	-	-	-	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KON-DISI AKHIR
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan			Kurang Mampu			Perubahan RPJMD		-	-	12,13	10,86	9,59	8,32	8,32
			Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	RPJMD 11/2016		5,25	5,3	5,4	5,45	5,5	5,6	
							Realisasi	5,1	5,06	5,1	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	5,45	5,5	5,6	5,6
					Gini Ratio	Angka	RPJMD 11/2016		0,3149	0,3121	0,3093	0,3065	0,305	0,3025	
							Realisasi	0,3177	0,3967	0,41	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,39	0,38	0,37	0,37
				Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	RPJMD 11/2016		5	6	7	8	9	10	10
							Realisasi	4,85	12,03	21,59	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	22	23	24	24
				Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	Persen	RPJMD 11/2016		25	30	35	40	45	50	
							Realisasi	22	39	41,11	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	45	47	50	50
				Terpenuhinya kebutuhan pangan	Pertumbuhan produksi tanaman	Persen	RPJMD 11/2016		0,1005	0,1010	0,1015	0,102	0,1025	0,103	
							Realisasi	0,1001	9,94	0,1133	-	-	-	-	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KON-DISI AKHIR
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				masyarakat	pangan		Perubahan RPJMD		-	-	-	0,1020	0,.1025	0,1030	0,1030
					Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	RPJMD 11/2016		1,00	1,025	1,05	1,08	1,10	1,125	
							Realisasi	0,75	14,09	7,94	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	1,08	1,10	1,125	1,125
					Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Persen	RPJMD 11/2016		0,10	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	
							Realisasi	0,09	7,8	0,17	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,25	0,3	0,35	0,35
					Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	RPJMD 11/2016		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	
							Realisasi	0,45	4,24	20,52	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,8	0,9	1	1
				Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	RPJMD 11/2016		1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	
							Realisasi	1,20	0,35	5,92	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	1,40	1,45	1,50	1,50
4	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum,	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	Klasifikasi	RPJMD 11/2016		N/A	72	74	76	78	80	
							Realisasi	N/A	N/A	71,57	-	-	-	-	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KON-DISI AKHIR
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	hidup untuk pembangunan berkelanjutan		prasarana dasar masyarakat	Layanan Infrastruktur		Perubahan RPJMD		-	-	-	76	78	80	80
				Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	RPJMD 11/2016		39	45	50	56	63	72	
							Realisasi	38	31,35	45,1	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	56	63	72	72
				Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Persen	RPJMD 11/2016		20	22,66	25,34	28	30,66	33,34	
							Realisasi	18	15	29,33	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	38,66	45,33	52	52
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	RPJMD 11/2016		80	81	70,35	83	84	85	
							Realisasi	79	70	70,24	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	72,5	75	80,0	80,0

5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Persen	RPJMD 11/2016		0,040	0,038	0,035	0,03	0,028	0,027	
							Realisasi	0,04	0,061	0,074	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,070	0,065	0,060	0,060
		Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangun-an Kebudayaan	Angka	RPJMD 11/2016		40	50	60	70	80	90	
							Realisasi	35	54,8	57,01	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	65	70	75	75

BAB VI.
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran perubahan RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Bantul mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bantul. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut:

6.1.1. Analisis SWOT

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Kekuatan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bantul cukup tinggi yaitu diatas capaian nasional.
2. PDRB perkapita Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
3. Aksesibilitas dari pusat kota DIY mudah dan strategis.
4. Pertumbuhan kunjungan wisatawan tinggi.
5. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya, dan olahraga.
6. Angka Partisipasi Murni dan APK cukup baik.
7. Angka Kriminalitas cukup rendah.
8. Posisi strategis Bantul sebagai 'halaman depan' dalam paradigma pembangunan DIY "*Among Tani Dagang Layar*".
9. Kabupaten Bantul sebagai bagian kawasan strategis DIY (Kawasan BKM, Kawasan Industri, dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta).

Kelemahan

1. Ketimpangan pendapatan ada kecenderungan meningkat.
2. Angka kemiskinan Bantul cukup tinggi, sedikit diatas Provinsi DIY dan nasional.
3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
4. Potensi sektor-sektor unggulan belum berkembang secara optimal.
5. Rata-rata pertumbuhan unit usaha industri kecil menengah masih rendah.
6. Daya saing produk belum optimal.
7. Sarana dan Prasarana infrastrukur pelayanan publik belum optimal.
8. Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis belum optimal.
9. Trend ratio guru dan siswa menurun.
10. Trend penyakit tidak menular meningkat.
11. Prevalensi penyakit infeksi dan menular masih tinggi.
12. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas sehingga masih tergantung pada Pemerintah Pusat.

13. Keterbatasan potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan wilayah.

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Peluang

1. Terbuka peluang pasar melalui kerjasama regional Antar Negara (AFTA, MEA, dll).
2. DIY sebagai tujuan wisata keenam terbesar setelah Bali menjadikan Bantul juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata.
3. Adanya agenda pembangunan nasional melalui *Nawa Cita*.
4. Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi DIY dalam RPJMD mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Bantul (Pembangunan Bandara NYIA dan JJLS).
5. Pemerintah DIY menjadikan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan dalam pengembangan wilayah.
6. Adanya peluang bagi Bantul untuk ikut serta mensukseskan SDG's sebagai komitmen melanjutkan target-target MDG's.

Ancaman

1. Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana alam.
2. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif dengan pemberlakuan MEA.
3. Persaingan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata.

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah:

	KEKUATAN	KELEMAHAN
FAKTOR INTERNAL	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bantul cukup tinggi yaitu diatas capaian nasional. 2. PDRB perkapita Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. 3. Aksesibilitas dari pusat kota DIY mudah dan strategis 4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya, dan olahraga. 5. Angka Partisipasi Murni dan APK cukup baik. 6. Posisi strategis Bantul sebagai 'halaman depan' dalam paradigma pembangunan DIY. 7. Pertumbuhan kunjungan wisatawan tinggi.	1. Ketimpangan pendapatan (gini ratio) kecenderungan menurun. 2. Angka kemiskinan Bantul cukup tinggi, diatas Provinsi DIY dan nasional. 3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian. 4. Potensi sektor-sektor unggulan belum berkembang secara optimal. 5. Rata-rata pertumbuhan unit usaha industri kecil menengah masih rendah. 6. Daya saing produk belum optimal 7. Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan publik belum optimal 8. Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis belum optimal. 9. Trend ratio guru dan siswa menurun. 10. Trend penyakit tidak menular meningkat. 11. Prevalensi penyakit infeksi dan menular masih tinggi. 12. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas sehingga masih tergantung pada pemerintah pusat. 13. Keterbatasan potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan wilayah.
FAKTOR EKSTERNAL	8. Kabupaten Bantul sebagai kawasan strategis DIY (Kawasan BKM, Kawasan Industri, dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta) 9. Angka Kriminalitas cukup rendah.	

PELUANG	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
1. Terbuka peluang pasar melalui kerjasama regional Antar Negara (AFTA, MEA, dll). 2. DIY sebagai tujuan wisata keenam terbesar setelah Bali menjadikan Bantul juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata. 3. Adanya agenda pembangunan nasional melalui Nawa Cita. 4. Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi DIY dalam RPJMD mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Bantul (Pembangunan Bandara NYIA, JJLS). 5. Adanya peluang bagi Bantul untuk ikut serta mensukseskan SDG's sebagai komitmen melanjutkan target-target MDG's. 6. Pemerintah Provinsi DIY menjadikan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi.	1. Pengoptimalan segala potensi ekonomi dan produk Bantul untuk menembus pasar internasional. 2. Peningkatan kualitas hidup sebagai basis untuk mendukung kondisi nasional maupun sebagai bagian dari promosi wisata daerah. 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan efek pengganda pertumbuhan bagi semua lapisan masyarakat. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai target-target SDG's. 5. Peningkatan sarana-prasarana dan akses untuk mendukung pembangunan kawasan selatan Bantul sebagai halaman depan DIY. 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal untuk mendukung pariwisata daerah. 7. Pengembangan kawasan strategis daerah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan kualitas masyarakat Bantul.	1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. 2. Optimalisasi penataan ruang dalam rangka untuk memberikan kepastian investasi dan pengembangan ekonomi masyarakat. 3. Peningkatan potensi destinasi wisata dan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi untuk meningkatkan potensi sektor unggulan, industri kecil dan daya saing produk di pasar regional dan internasional. 4. Peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka untuk mempersiapkan kualitas masyarakat dalam menghadapi persaingan regional dan internasional. 5. Peningkatan infrastruktur pelayanan publik dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan pengembangan produk unggulan daerah. 6. Peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. 7. Pengembangan kualitas dan potensi sumberdaya manusia yang menjadi daya

		dukung bagi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 8. Peningkatan peran serta masyarakat dan kehidupan keluarga dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan pembangunan.
ANCAMAN 1. Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana. 2. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif dengan pemberlakuan MEA. 3. Persaingan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan produk daerah termasuk pengembangan destinasi wisata.	**STRATEGI S-T** 1. Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam rangka melakukan upaya mitigasi bencana. 2. Peningkatan kualitas SDM dan produk IKM dalam rangka ekspansi di pasar regional dan internasional. 3. Pengembangan potensi dan kawasan strategis dalam rangka memperkuat daya saing daerah.	**STRATEGI W-T** 1. Optimalisasi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan produk unggulan setempat. 2. Pemetaan dan penataan kawasan potensial dan kawasan rawan bencana. 3. Peningkatan kerjasama antar daerah untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi.

6.1.2. Kebijakan Sektoral

Penentuan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bantul ke depan selain mempertimbangkan hasil analisa SWOT di atas, juga memperhatikan kebijakan daerah yang berfokus pada upaya-upaya peningkatan dan penguatan sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut meliputi:

A. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul 2015-2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RUPMK Bantul adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh upaya sektor terkait

dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Bantul, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.

Mengacu pada RUPM Daerah Istimewa Yogyakarta dan potensi perekonomian Kabupaten Bantul, RUPMK Bantul menetapkan 6 (enam) sektor prioritas, yaitu pangan, infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan penanaman modal di 6 (enam) sektor prioritas tersebut diarahkan ke wilayah-wilayah yang paling memerlukan dan juga wilayah/kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar dan paling sedikit memiliki unit usaha dan investasi. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pemusatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu saja dan untuk menghindari pelanggaran batas daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu wilayah.

Dalam RUPMK Bantul juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup. Pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Bantul didukung oleh pengembangan energi alternatif, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di kawasan pantai Kabupaten Bantul.

Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPMK Bantul diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis

Adapun secara lebih detail Fokus Pengembangan Penanaman Modal dalam RUPMK Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Fokus Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Bantul (RUPMK Bantul)

NO	SEKTOR	URAIAN
1	Pangan	1. Perbenihan (*seed centre*) 2. Pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. 3. Pengembangan kawasan minapolitan dan industri budidaya perikanan
2	Infrastruktur	1. Peningkatan infrastruktur Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan kawasan Bantul Kota Mandiri. 2. Pengembangan kawasan peruntukan industri di Piyungan dan Sedayu-Pajangan, dan di kawasan lainnya, yang terintegrasi dengan pengembangan perindustrian dan kawasan peruntukan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mewujudkan industri Kabupaten Bantul yang berdaya saing. 3. Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata, yang meliputi 2 (dua) kawasan pengembangan pariwisata sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: • Kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya; • Kawasan Goa Cerme sebagai kawasan wisata susur goa; • Kawasan pantai Parangtritis - Depok - Kuwaru dan sekitarnya. 4. Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Bantul. 5. Pengembangan infrastruktur dan pendukung transportasi, terutama untuk meneruskan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan infrastruktur transportasi lainnya. 6. Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam pengembangan infrastruktur pendukung di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bantul, Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Kawasan Pembangunan Pariwisata, dan Infrastruktur strategis lainnya
3	Energi	1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan dalam bentuk Pembangkit Listrik Hibrid (Surya-Bayu) (PLTH) di area Pantai Pandansimo dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Pantai Samas dan sekitarnya. 2. Pasokan energi untuk mendukung investasi di DIY
4	Kebudayaan dan Pariwisata	1. Optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi Daya Tarik Wisata.

NO	SEKTOR	URAIAN
		2. Pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan dan saujana (*lansekap*).
5	Pendidikan	Pengembangan industri pendukung untuk industri pendidikan di Bantul, terutama di Bantul bagian Utara, yaitu di klaster Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Institut Seni Indonesia, dan di Kecamatan Pajangan untuk klaster perguruan tinggi lain untuk mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan.
6	Ekonomi Kreatif	1. Industri kreatif kerajinan. 2. Industri berbasis teknologi informasi.

Fokus penanaman modal tersebut diatas selanjut dijabarkan dalam *Roadmap* Investasi RUPMK Bantul sebagai berikut:

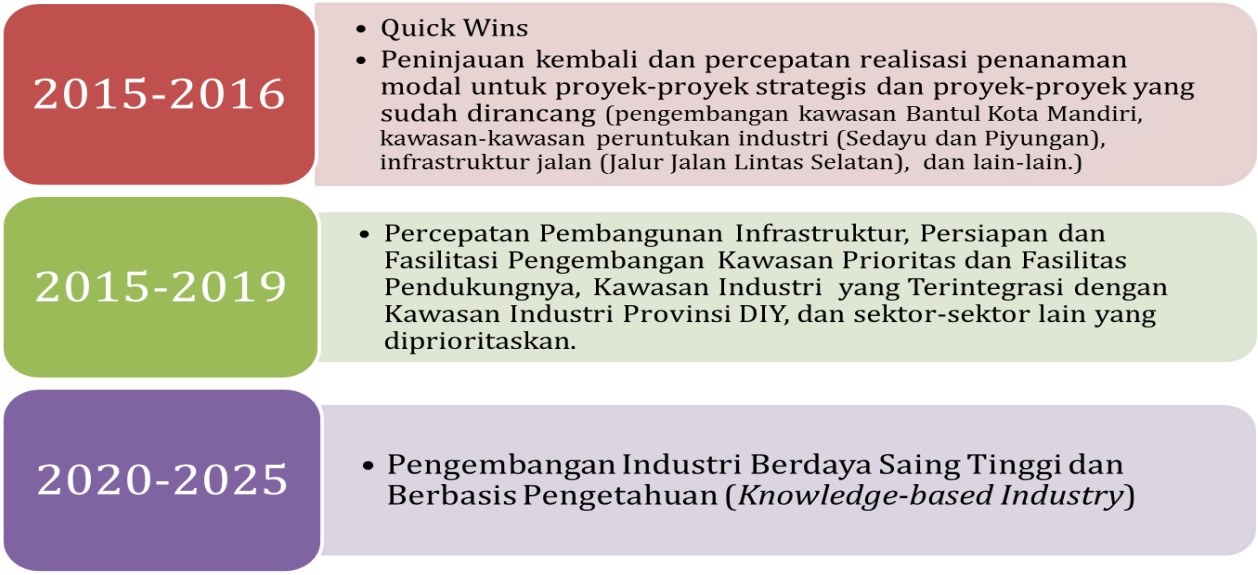

B. Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RADPG) Kabupaten Bantul 2016-2021

Pembangunan pangan dan gizi adalah sebuah investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktifitas sumberdaya manusia. Pengaruh pangan dan gizi begitu signifikan sehingga pemerintah menetapkan program percepatan pangan dan gizi utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan (Perpres No 42 Tahun 2013).

Berkaitan dengan rencana aksi nasional pangan dan gizi 2015-2019, pendekatan multisektor menjadi pilihan pendekatan yang akan diterapkan. Meskipun aspek kesehatan menjadi indikator dominan dalam *output* rencana aksi

pangan dan gizi, proses pencapaian aspek ini sagat membutuhkan dukungan dari multi sektor yang saling bersinergi dalam program dan pelaksanaannya. Demikian pula, aspek pemerataan akses pangan dan penggunaan pangan yang aman, bergizi, dan beragam melalui program yang saling terintegrasi (multisektor) merupakan perhatian utama agenda internasional dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan prinsipnya: "*No one leave behind*".

Pembangunan pangan dan gizi secara nasional telah dimulai sejak tahun 2001 dengan program-program yang tersusun sebagai upaya pencapaian tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Selanjutnya, pembangunan ketahanan pangan dan gizi saat ini, 2015-2019, melanjutkan trend positif pembangunan pangan dan gizi dengan pendekatan multi-sektor. Program-program kesehatan tetap menjadi *leading* sektor dalam peningkatan status kesehatan masyarakat ditunjang dengan sinergisme program-program unit kerja lainnya dalam rangka memenuhi *sufficient conditions* pencapaian status gizi masyarakat.

1. Tujuan Penyusunan RADPG

Tujuan umum penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2016-2021 Kabupaten Bantul adalah sebagai panduan yang diacu dan arahan yang diperhatikan bagi SKPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain untuk berperan serta meningkatkan kontribusinya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kabupaten Bantul.

Berikut tujuan khusus penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2016-2021 Kabupaten Bantul:

1. Meningkatkan pemahaman dan peran seluruh *stakeholder* dan masyarakat untuk pemantapan ketahanan pangan dan perbaikan gizi Kabupaten Bantul.
2. Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi sehingga terjaga keterpaduan mulai dari asek perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Bantul.
3. Meningkatkan kemampuan dalam menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi.
4. Menetapkan pilihan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan.
5. Membangun dan mengoptimalkan lembaga pangan dan gizi.

6. Meningkatkan kemampan dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi.

2. Indikator Kinerja Utama RADPG

Untuk mengukur keberhasilan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama RADPG

Indikator Kinerja Utama RADPG	Satuan	Kondisi Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi pada Akhir Periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,38	0,4	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37
Ketersediaan energi	kkal/kapita/hari	3.072	3.075	3.080	3.085	3.090	3.095	3.100	3.100
Ketersediaan protein	gram/kapita/hari	77,80	77,85	77,90	77,95	78,00	78,25	78,36	78,36

6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan hasil analisa dan fokus kebijakan sebagaimana tersebut diatas, maka Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut ini:

Tabel 6.3.Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik, Efektif,Efisien Dan Bebas Dari KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	1. Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. 2. Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan dan	1. Meningkatkan kualitas SDM birokrasi 2. Mengembangkan layanan birokrasi yang prima 1. Meningkatkan Mutu SDM dan Sistem Perencanaan dan

		pengelolaan keuangan daerah.	Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Terampil Dan Berkepribadian Luhur			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	1. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	1. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan. 2. Peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang berimbang. 3. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 4. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.	1. Meningkatkan Sarana Prasarana, SDM, dan Akses serta Mutu Pelayanan Kesehatan. 1. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan secara berkelanjutan. 1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat 1. Meningkatkan prestasi olahraga.
	2. Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing pendidikan. 2. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar. 3. Penguatan fungsi keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak.	1. Memperluasan akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin. 1. Meningkatkan pemenuhan standar nasional pendidikan. 2. Meningkatkan model pendidikan berbasis budi pekerti. 1. Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini

Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan Pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	1. Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat. 2. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu. 3. Validasi data warga kurang mampu.	1. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha. 1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. 1. Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat.
	2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing produk daerah.	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. 2. Meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi.

			3. Meningkatkan kontribusi belanja.
		2. Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat	1. Mengurangi kesenjangan pendapatan 2. Meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif.
	3. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul.	1. Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata.	1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata. 2. Meningkatkan keragaman destinasi pariwisata.
	4. Terciptanya industri kreatif yang berkualitas.	1. Akselerasi pengembangan industri kreatif.	1. Meningkatkan kualitas produk, SDM dan Kelembagaan UMKM Kreatif.
	5. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.	1. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. 2. Pengembangan peternakan berbasis industri.	1. Intensifikasi dan diversifikasi usaha tani. 1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Peternakan.
	6. Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat.	1. Peningkatan produksi perikanan.	1. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana perikanan.

Misi 4 : Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Sarana-Prasarana Umum, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Risiko Bencana			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	1. Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	1. Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan sarana dan prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat 2. Peningkatan keselamatan transportasi	1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana. 2. Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat 1. Meningkatkan pencegahan kecelakaan transportasi
	2. Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	1. Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.	1. Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup
	3. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	1. Pengembangan edukasi kebencanaan	1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana. 2. Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana.
	4. Terwujudnya kesesuaian	1. Peningkatan kualitas perencanaan,	1. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang.

	pemanfaatan ruang	pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Misi 5 : Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Bantul Yang Agamis, Nasionalis, Aman, Progresif Dan Harmonis Serta Berbudaya Istimewa.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama. 2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.	1. Mendorong terciptanya situasi kondusif dalam kehidupan beragama. 2. Meningkatkan pemahaman hukum.
Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	1. Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	1. Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan	1. Mengoptimalkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya

Dalam rangka mendukung percepatan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Bantul, telah dirumuskan ***Quick Win*** pembangunan yang secara teknis dituangkan dalam perencanaan tahunan.

Pada tataran filosofis, Makaryo Mbangun Deso merupakan perwujudkan dari Nawacita Pemerintah untuk membangun dari pinggiran. Selama ini, model pembangunan yang *top down oriented* dan sangat urban bias, telah menempatkan desa pada posisi marginal, terpinggirkan dan terabaikan dan kurang mendapat prioritas. Makaryo mbangun deso merupakan suatu upaya nyata membangun suatu paradigm pembangunan baru yang mengedepankan desa sebagai ujung tombak setiap langkah menuju peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia, mengingat sebagian besar masyarakat masih tinggal di pedesaan, membangun desa berarti membangun sebagian besar masyarakat Indonesia.

Makaryo Mbangun Deso merupakan suatu perjuangan yang melibatkan semua elemen dan komponen bangsa, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi. Upaya bersama yang dilandasi tekad bersama akan menghasilkan suatu kekuatan sinergis untuk dapat mengatasi masalah, memanfaatkan peluang dan mengoptimalkan potensi yang ada bagi kemakmuran seluruh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi inti dari Makaryo Mbangun Deso, bukan meletakkan masyarakat desa sebagai obyek dan sasaran

pembangunan semata. Gerakan membangun diri masyarakat desa yang selama ini hanya menjadi slogan, harus direalisasikan melalui Makaryo Mbangun Deso.

Makaryo Mbangun Deso harus dilakukan dalam kerangka perencanaan daerah yang telah ada, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tanpa menempatkan pada landasan itu, makaryo mbangun deso akan kehilangan arah, tidak sinkron dengan program pembangunan dari atas maupun tidak optimal untuk mendapat dukungan dari rencana tahunan setiap instansi pemerintah. Pada sisi yang lain, tanpa landasan perencanaan yang *integrative*, berkesinambungan dan terukur, Makaryo Mbangun Deso hanya akan menjadi slogan tanpa isi maupun realisasi, parsial dan temporer, serta rentan menjadi sumber masalah dalam pengambilan kebijakan yang keliru.

Makaryo Mbangun Deso memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya memerangi kemiskinan dengan meletakkan dua pilar utama, pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat telah menjadi tujuan sejak awal pembangunan dicanangkan, namun dinamika perkembangan masyarakat yang cepat menyebabkan muncul masalah yang telah meminggirkan, mengabaikan dan memiskinkan masyarakat, teruta masyarakat perdesaan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik dari kesehatan maupun pendidikan. Oleh karena itu serangan langsung dan frontal terhadap sumber masalah kualitas sumberdaya manusia menjadi agenda utama dan penting, yaitu melalui peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan, khususnya bagi masyarakat di lingkungan perdesaan.

Makaryo Mbangun Deso juga berupaya membangun manusia dan masyarakat yang utuh. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat bukan sekedar aspek materil-ekonomi, namun juga masalah spiritual-non ekonomi, kebudayaan dan tata kehidupan masyarakat yang makin bermartabat. Makaryo Mbangun Deso adalah upaya, ikhtiar yang dilakukan namun semua itu tidak lepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Membangun keseimbangan hubungan dengan Tuhan dan hubungan diantara sesama manusia menjadi inti penting Makaryo Mbangun Deso. Melalui persepsi yang demikian, setiap langkah adalah ibadah, setiap langkah adalah upaya mengamalkan Pancasila.

6.2. Program Pembangunan Daerah

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Perumusan program pembangunan daerah merupakan tahap sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi pembangunan Kabupaten Bantul perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan mensinergikan dengan program prioritas pembangunan Provinsi DIY serta memperhatikan dinamika, fokus dan arah program prioritas daerah.

Adapun penentuan program prioritas daerah Kabupaten Bantul periode Tahun 2016-2021 difokuskan dan mempertimbangkan pada kebijakan umum dan kepentingan sebagai berikut:

1. Peningkatan Bantuan Pendidikan

Besaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) direncanakan akan dinaikkan secara bertahap sehingga pada 5 tahun ke depan besaran BOP sudah bisa mendekati *Unit Cost Standart* untuk masing-masing jenjang pendidikan. Pada tahun 2017 untuk jenjang SD/MI direncanakann sudah mencapai 76% dari *Unit Cost Standart*, dengan kebutuhan biaya sebesar Rp.24.938.710.000, sedangkan untuk jenjang SMP/MTS direncanakan sudah mencapai 69% dari *Unit Cost Standart* dengan kebutuhan biaya sebesar Rp.26.195.000.000. Adapun skema rencana peningkatan biaya BOP tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 6.4. Rancangan Peningkatan BOP Jenjang PAUD

No	Kegiatan	Jumlah	Anggaran (Rp) (000)	Tahun (dlm ribuan)					Ket.
				2017	2018	2019	2020	2021	
a	**BBOP APBD**								Besarnya anggaran tiap tahun naik 5%
1	TK Pembina Kab	1	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155	
2	TK Pembina Kecamatan	5	5.000	25.000	26.250	27.562	28.940	30.387	
3	SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	1	450.000	450.000	472.500	496.125	520.931	546.977	
	Jumlah			485.000	509.250	534.712	561.448	589.520	
b	**BOP Pusat**			16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	

Sumber. Bappeda, 2016

Tabel 6.5.
Rancangan Peningkatan BOP Jenjang SD/MI

NO	JENJANG	JUMLAH	SATUAN	BOP/ murid (Rp) (000)	TAHUN (000)					KET
					2017	2018	2019	2010	2021	% *Unit Cost* (Asumsi BOSNAS TETAP: Rp. 800.000/anak)
1	SD/MI (BOP)	84.538	anak	295	24.938.710					76%
		85.806	anak	350		30.032.124				79%
		87.093	anak	450			39.191.124			86%
		88.400	anak	550				48.619.757		93%
		89.726	anak	560					50.246.309	94%

NO	JENJANG	JUMLAH	SATUAN	BOP/ murid (Rp) (000)	TAHUN (000)					KET
					2017	2018	2019	2010	2021	% *Unit Cost* (Asumsi BOSNAS TETAP: Rp. 800.000/anak)
2	Sekolah SSN	18	Sekolah	10.000	180.000					SSN : Sekolah Standar Nasional
		20	Sekolah	10.000		200.000				
		22	Sekolah	10.000			220.000			
		24	Sekolah	10.000				240.000		
		26	Sekolah	10.000					260.000	
3	Sekolah pra SSN	17	sekolah	10.000	170.000					
		19	sekolah	10.000		190.000				
		21	sekolah	10.000			210.000			
		23	sekolah	10.000				230.000		
		25	sekolah	10.000					250.000	
4	Sekolah inklusi	48	sekolah	7000	336.000					
		49	sekolah	7000		343.000				
		50	sekolah	7000			350.000			
		51	sekolah	7000				357.000		
		52	sekolah	7000					364.000	
	JUMLAH				25.624.710	30.765.124	39.971.922	49.446.757	51.120.309	

Sumber. BAPPEDA, 2016

Tabel 6.6.
Rancangan Peningkatan BOP Jenjang SMP/MTs

NO	JENJANG	JUMLAH	SATUAN	BOP/murid (Rp) (000)	TAHUN (000)					KET
					2017	2018	2019	2010	2021	% *Unit Cost* (Asumsi BOSNAS TETAP: Rp. 1.000.000/anak)
1	SMP/MTs (BOP)	40.300	anak	650	26.195.000					69%
		40.905	anak	830		33.950.735				76.8%

NO	JENJANG	JUMLAH	SATUAN	BOP/murid (Rp) (000)	TAHUN (000)					KET
					2017	2018	2019	2010	2021	% *Unit Cost* (Asumsi BOSNAS TETAP: Rp. 1.000.000/anak)
		41.518	anak	1000			41.518.067			84%
		42.141	anak	1100				46.354.922		88%
		42.775	anak	1200					51.327.541	92%
2	Sekolah SSN	40	Sekolah	10.000	400.000					SSN : Sekolah Standar Nasional
		42	Sekolah	10.000		420.000				
		44	Sekolah	10.000			440.000			
		46	Sekolah	10.000				460.000		
		48	Sekolah	10.000					480.000	
3	Sekolah pra SSN	35	sekolah	10.000	350.000					
		37	sekolah	10.000		370.000				
		39	sekolah	10.000			390.000			
		41	sekolah	10.000				410.000		
		43	sekolah	10.000					430.000	
4	Sekolah inklusi	12	sekolah	7.000	120.000					
		14	sekolah	7.000		140.000				
		16	sekolah	7.000			160.000			
		18	sekolah	7.000				180.000		
		20	sekolah	7.000					200.000	
5	Subsidi UNBK	5	sekolah	10.000	50.000					UNBK : Ujian Nasional Bebasis Komputer
		7	sekolah	10.000		70.000				
		9	sekolah	10.000			90.000			
		11	sekolah	10.000				110.000		
		13	sekolah	10.000					130.000	
6	Sekolah Olahraga Nasional	1	sekolah	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7	Sekolah Olahraga Daerah	3	sekolah	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	JUMLAH				27.175.000	35.010.735	42.658.067	47.574.922	52.627.541	

Sumber. Bappeda, 2016

2. Total *coverage* Jaminan Kesehatan

Sesuai dengan *Road Map* Nasional, bahwa pada tahun 2019 semua jenis jaminan kesehatan harus melebur/bertransformasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul juga secara bertahap akan melakukan transformasi kepesertaan Jaminan Kesehatan dari Jamkesda ke BPJS.Tahapan rancangan transformasi jaminan kesehatan akan mulai tahun 2017 s/d tahun 2021.

Tabel 6.7.
Rancangan Pentahapan Transformasi Jaminan Kesehatan Daerah ke BPJS

Uraian	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Uang (000)	Target
Premi Jamkesda (Buffer)	121.666	14.599.920	90	100.803	12.096.360	90	10.000	1.200.000	90	10.000	1.200.000	90	10.000	1.200.000	90	10.000	1.200.000	90
Cavital Risk		619.080			514.095			51.000			51.000			51.000			51.000	
Premi BPJS				50.000	13.800.000		150.803	41.621.628		150.803	41.621.628		150.803	41.621.628		150.803	41.621.628	
Piutang RS dan Puskes-mas								4.000.000										
Jumlah	**121.666**	**15.219.000**		**150.803**	**26.410.455**		**160.803**	**46.872.628**		**160.803**	**46.872.628**		**160.803**	**46.872.628**		**160.803**	**46.872.628**	

Sumber.Bappeda, 2016

3. Akselerasi penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, sejak Tahun 2011 terus mengalami penurunan, sehingga terjadi peningkatan persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Dari data BPS terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2015 mencapai 15,2% lebih rendah bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Tahun 2014.

Pengurangan angka kemiskinan setiap tahunnya akan menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul yang dilakukan melalui program berkelanjutan antara lain: program penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, validasi data keluarga miskin serta pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS). Selain itu, program bantuan keuangan khusus ekonomi produktif dari Pemerintah DIY secara berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan.

4. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sebagai salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul, pengembangan pariwisata akan tetap menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dikarenakan dampak atau *multiplier effect* nya terhadap akselerasi perekonomian daerah sangat positif, antara lain penyediaan lapangan usaha, pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah dan pertumbuhan industri pariwisata serta kontribusi dalam bentuk PAD terhadap Pemerintah Daerah. Pengembangan destinasi pariwisata difokuskan pada pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan peningkatan daya tarik serta pelayanan pariwisata.

Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- ***DPD-Segoro Kidul*** meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai Kawasan Wisata Alam, Budaya, Pendidikan, Dirgantara, Religi dan Olahraga;

- ***DPD-Songgo Langit*** meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai Kawasan Wisata Alam Perbukitan, Budaya, Sejarah, Agro Tourism, Olahraga dan Industri;
- ***DPD-Songgo Negoro*** meliputi Banguntapan, Sewon dan Kasihan sebagai Kawasan Wisata Industri Kreatif, Kerajinan, Budaya, Pendidikan, Sejarah dan MICE;
- ***DPD-Pangeran Diponegoro*** meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai Kawasan Wisata Kerajinan, Sejarah, Budaya, Kuliner dan Pedesaan; dan
- ***DPD-Pancer Bumi*** meliputi Bantul, Bambanglipuro, Pundong dan Jetis sebagai Kawasan Wisata Alam, Kuliner, Budaya, Olahraga dan Kerajinan.

5. Pengembangan Kawasan Budaya

Kabupaten Bantul sebagai salah satu destinasi wisata penting di DIY, khususnya jenis wisata budaya maka penyelenggaraan urusan kebudayaan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui kebijakan yang berlandaskan prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aset seni budaya masyarakat, warisan budaya, dan Cagar Budaya (CB) guna menunjang predikat sebagai destinasi wisata budaya.

Kawasan strategis pengembangan kawasan budaya Kabupaten Bantul diarahkan di beberapa kawasan yaitu:

a) Kawasan Kotagede Banguntapan,
b) Kawasan Imogiri,
c) Kawasan Pleret,
d) Kawasan Goa Selarong Pajangan,
e) Kawasan Ambar Binangun Kasihan,
f) Kawasan Masjid Pathok Negoro Kasihan,
g) Kawasan Parangtritis Kretek,
h) Kawasan Mangir Pajangan,
i) Kawasan Makam Sewu Pandak,
j) Kawasan Cagar Budaya Pendidikan.

6. Pengembangan Industri Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki industri kreatif yang beraneka ragam, sehingga menjadi kekuatan dan peluang dalam menghadapi persaingan dunia usaha semakin tinggi. Pemerintah Kabupaten Bantul akan mendorong pengembangan industri kreatif daerah secara lebih optimal guna meningkatkan daya saing daerah baik pada level nasional maupun internasional dengan memfokuskan pada pengembangan sentra-sentra kreatif.

7. Peningkatan ketahanan pangan

a) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah dengan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Kondisi alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat dewasa ini, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencari alternatif dan strategi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di Kabupaten Bantul dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan.

b) Pengembangan peternakan modern

Kebutuhan dan konsumsi pangan hewani masyarakat yang selalu meningkat serta keterbatasan pasokan ternak yang disebabkan oleh pengelolaan yang masih tradisional, mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kebijakan pengembangan peternakan modern dengan konsep industri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak siap potong sehingga dapat mencukupi dan pasokan kebutuhan pangan hewani masyarakat serta dapat memberikan kestabilan harga pangan sehingga tetap dapat menjaga daya beli masyarakat.

c) Pengembangan Perikanan

Perikanan merupakan sektor penting dalam pembangunan karena mempunyai peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan sebagai penyedia pangan khususnya sumber protein.

Potensi perikanan di Kabupaten Bantul cukup tinggi mencakup perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sektor perikanan tidak hanya menggerakkan sektor perikanan saja, namun juga mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*). Industri penyedia sarana produksi perikanan dan industri paska panen akan memberikan dampak yang lebih besar dalam perekonomian. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan stimulasi dan dorongan dalam pembangunan sektor perikanan melalui kebijakan yang tepat dan berpihak kepada terciptanya sistem ekonomi perikanan yang optimal dan berkelanjutan dengan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan masyarakat.

8. **Pengembangan Kawasan Strategis terkait dengan Investasi**

   Investasi merupakan salah satu stimulus dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini yang mendasari pemerintah Kabupaten Bantul melakukan percepatan pembangunan kawasan strategis investasi yang meliputi Kawasan Industri dan Kawasan Pariwisata. Melalui pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

9. **Gerakan CSR untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan**

   Potensi CSR yang cukup besar di Kabupaten Bantul dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Melalui kerjasama yang sinergis dengan pihak swasta diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada upaya-upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Penyelenggaraan tanggung jawab sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam peraturan Bupati Bantul No. 04 Tahun 2015.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara lebih detail gambaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 6.8.
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	1. Peningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	1. Meningkatkan kualitas SDM birokrasi	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia *Governance Index*/IGI)	Nilai Maturitas SPIP	**Level 1 (1,92)**	**Level 3 (3,3)**	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Pengawasan)	INSPEKTORAT
					Persentase pemenuhan kompetensi Aparatur	**84%**	**91,30**	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Fungsi Penun-jang Kepega-waian serta Pendidikan dan Pelatihan	BKPP
			2. Mengembangkan layanan birokrasi yang prima		Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	**57,3**	**75**	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Fungsi PenunjangLainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
					Indeks Kepuasan Masyarakat	**78.13%**	**84%**	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	Fungsi Penun-jang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
								Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
								Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan		
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**3,2 (Sangat Tinggi)**	**3,8 (Sangat Tinggi)**	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
								Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
								Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah		
								Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah		
								Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
					Persentase SKPD yang menyelenggara-an kearsipan sesuai standar dengan nilai baik	**27%**	**70 %**	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
					Indeks Kepuasan Aparatur	**73%**	**82%**	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Fungsi Penun-jang Kepega-waian serta Pendidikan dan Pelatihan	BKPP
					Persentase Layanan Perijinan dan Non Perijinan Tepat Waktu	**56,88%**	**85%**	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penanaman Modal	DPMPT
								Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Indeks Kepuasan Masyarakat	**77**	**80,5**	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	**60%**	**90%**	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
					Prosentase SKPD yang menerapkan layanan unggulan *Digital Government Service* (DGS)	**60%**	**90%**	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa,	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
								Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
								Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen Admi-nistrasi Kependudukan	**N/A**	**92%**	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	**N/A**	**95%**	Proram Keserasian Kebijakan Kependudukan		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	**79%**	**81%**	Program Pengelolaan Data Kependudukan		
					Persentase Penegakan Perda	**100%**	**72%**	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								Program Penegakan Perda		
					Persentase pemilih yang berpartisipasi	**70,5%**	**75%**	Program pendidikan politik masyarakat	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Persentase pencapaian prolegda	**22%**	**22%**	Program Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SEKRETARIAT DPRD
		2. Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.	1. Meningkatkan Mutu SDM dan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	**79 (BB)**	**82 (A)**	Program peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
								Program Penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa		
								Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
								Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
						N/A	**95%**	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Fungsi Penunjang Perencanaan	BAPPEDA

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Persentase Rata-rata capaian Sasaran Daerah			Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Perencanaan Sosial dan Budaya		
					Persentase Rata-rata capaian target kinerja program OPD	**N/A**	**91,50%**	Program pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang Perencanaan	BAPPEDA
					Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	**80%**	**100%**	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
					Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	**70%**	**90%**	Program pemberdayaan masyarakat	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
					Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	**60%**	**100%**	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	KECAMATAN
					Persentase Belanja Pegawai	**58,90%**	**45%**	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Fungsi PenunjangLainnya (Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan)	SETDA
					Opini Pemeriksaan BPK	**1 (WTP)**	**1 (WTP)**	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang	BKAD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan)	
								Program Pengelolaan Barang Daerah		
					Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	**20,21%**	**26%**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi PenunjangLainnya (Fungsi Penunjang Keuangan)	BKAD
					Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	**16,18%**	**21,00%**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya (Fungsi Penunjang Keuangan)	BKAD
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	1. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	1.Meningkatkan Sarana Prasarana, SDM, dan Akses serta Mutu Pelayanan Kesehatan.	Umur Harapan Hidup	AKI	**87.5/100.000 KH**	**85/100.000 KH**	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
								Program Upaya kesehatan masyarakat		
					AKB	**8,35/ 1.000 KH**	**8,0/ 1.000 KH**	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
					Net Death Rate	**18,98/ 1.000 pasien**	**16,5/ 1.000 pasien**	Program Peningkatan pelayanan rumah sakit	Kesehatan	RSUD
								Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	**3.34 jiwa**	**3,04 Jiwa**	Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	DINAS PENGENDA-LIAN PENDU-DUK, KB, PEMBERDA-YAAN MASYARAKAT, DAN DESA
		2 Peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang berimbang	1. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan secara berkelanjutan.		Prevalensi Balita Gizi Buruk	**0,38%**	**0,37%**	Program Perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
					Ketersediaan Energi	**3.072 kkal/kapita/hari**	**3.100 kkal/kapita/hari**	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian /Perkebunan)	Ketahanan Pangan	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Ketersediaan Protein	**77,80 kkal/kapita/hari**	**78,36 gr/kapita/hari**			
					Skor Pola Pangan Harapan	**93,1**	**93,16**			
		3. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat		Angka Kesakitan/ Insiden *Rate* (IR) DBD	**150/ 100.000 penduduk**	**110/ 100.000 penduduk**	Program Pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
					Prevalensi Penderita HIV	**<0,5**	**0,1**	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		4. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Meningkatkan prestasi olahraga		Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi	**24%**	**30%**	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.	Kepemudaan dan Olahraga	DINA PENDIDIKAN,

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti			Program peningkatan sarpras olahraga		PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing pendidikan.	1. Memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin.	Angka Harapan Lama sekolah	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni	APK SD:94,5% APK SMP:91,5% APM SD:83,02% SMP:67,64%	APK SD: 96,5% SMP: 96% APM SD: 84,65% SMP: 68,20%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Angka Melanjutkan (Ke SMP/SLTA)	ke SMP 100% ke SMA 90.13%	Ke SMP: 100%, ke SMA: 100%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (jenjang SMP)	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.74 tahun	9 tahun	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	Ranking IV DIY (SD)	Ranking I DIY (SD)	Program Peningkatan Prestasi Akademik	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Ranking III DIY (SMP)	Ranking I DIY (SMP)			
					Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	5 Buah	26 Buah			
					Persentase Peningkatan Pemustaka yang	28%	33%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKA-AN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					berkunjung ke Perpustakaan					
		2. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar	1. Meningkatkan pemenuhan standar nasional pendidikan.		Persentase kelulusan	SD:99.9% SMP:100 %	SD: 100 SMP:100	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			2. Meningkatkan pendidikan berbasis budi pekerti.		Angka Putus Sekolah	SD 0.02% SMP: 0,02%	SD:0,02% SMP: 0,02%	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		3. Penguatan fungsi keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak	1. Meningkatkaan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini		APK PAUD	APK PAUD: 98,78%	APK PAUD: 98,95%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	1. Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat.	1. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha	Angka Kemiskinan	Angka Pengangguran	4,1%	2,8%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	DISNAKER-TRANS

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		2. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu	1. meningkatkan kesejahteraan keluarga		Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	13,9%	12,49%	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PENGENDALI-AN PENDUDUK, KB, PEMBERDA-YAAN MASYA-RAKAT, DAN DESA
					Nilai Tukar Petani	101,1	102	Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Per-kebunan)	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3. Validasi data warga kurang mampu	1. Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	14%	12,50%	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya	Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Indeks Desa Membangun	85	24	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PENGENDA-LIAN PENDU-DUK, KB, PEMBERDA-YAAN MASYARAKAT, DAN DESA

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	1. Peningkatan daya saing produk daerah	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekspor	6,85%	7%	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	DINAS PERDAGANG-AN
					Jumlah Pasar Tipe A,	0	4 unit	Program Penataan Pasar Rakyat Program Pemberdayaan Pedagang	Perdagangan	DINAS PERDAGANG-AN
					Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perdagangan	N/A	5,95 %	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	DINAS PERDAGANG-AN
			2. Meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi.		Pertumbuhan Investasi	8,43 %	9,5 %	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
			3. Meningkatkan kontribusi belanja		Percepatan Belanja Pemerintah	51%	75%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Penun-jangLainnya (Fungsi Penun-jang Keuangan)	BKAD
		2. Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat	1. Mengurangi kesenjangan pendapatan	Gini Ratio	Upah Mininum Kabupaten	Rp. 1.163.800	Rp. 1.773.479	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	DISNAKER-TRANS

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								Program Penempatan Tenaga Kerja		
			2. Meningkatkan usaha produktif masyarakat yang kompetitif		Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	N/A	180 unit	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUS-TRIAN
					Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	N/A	10 unit	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUS-TRIAN
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata	1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.500.114 orang	6.780.706 orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	DINAS PARIWISATA
			2. Meningkatkan keragaman destinasi pariwisata		Lama Tinggal Wisatawan	1,1 hari	2,2hari	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	DINAS PARIWISATA
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Akselerasi pengembangan industri kreatif	1. Meningkatkan kualitas produk, SDM dan Kelembagaan UMKM Kreatif	Cakupan industri kreatif	Pertumbuhan industri	1,56%	2%	Program pengembang an industri kecil dan menengah Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Perindustrian	DINAS KOPE-RASI, USAHA KECIL MENE-NGAH, DAN PERINDUS-TRIAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			2. Meningkatkan pengembangan sumber daya energi		Cakupan Pengembangan Potensi Ketersediaan Energi	0%	75%	Program Potensi Energi	Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS KOPE-RASI, USAHA KECIL MENE-NGAH, DAN PERINDUS-TRIAN
8	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	1. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	1. Intensifikasi dan diversifikasi usaha tani	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Produksi Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	230.860 ton	232.272,99 ton	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Produksi Tanaman Hortikultura	14.363,65 ton	15.502,70 ton	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	Produksi tanaman Perkebunan	14.458,93 ton	14.655,19 ton	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
		2. Pengembangan peternakan berbasis industri	Meningkatkan kualitas sumberdaya peternakan	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Peningkatan Produksi daging	14.142,37 ton	14.790,70 ton	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Pertanian	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
								Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak		

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
9	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	1. Optimalisasi sumber daya perikanan	Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan dan sarana dan prasarana	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Peningkatan Produksi Perikanan	12.106 ton	13.577 ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
								Program Pengembangan Perikanan Tangkap		
								Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	1.Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan sarana dan prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat.	1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	84,01%	76,08 %	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKER-JAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	76%	84%	Program Pembangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKER-JAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			2. Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat.		Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	42%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PEKER-JAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Persentase kecukupan air irigasi	78%	83,16%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKER-JAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		
		2. Peningkatan keselamatan transportasi	Meningkatkan pencegahan kecelakaan transportasi		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	5%	1,83%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	DINAS PERHUBUNG-AN
								Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.	Meningkatkan pengendalian kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	30,69	56	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Udara (IKUd)	46,47	90	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Tutupan Lahan	24,29	61,2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
					Volume sampah yang tertangani	410.000 m3	470.000 m3	Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Pengembangan edukasi kebencanaan	1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.	Desa Tangguh Bencana	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Benca-na yang meme-nuhi respon time 15 menit	90%	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	BPBD
					Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,19%	5,20%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan keten-traman, keter-tiban umum, dan perlindungan masyarakat	BPBD
			2. Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana		Persentase Relokasi Warga	N/A	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;	Urusan keten-traman, keter-tiban umum, dan perlindungan masyarakat	BPBD
					Presentase penanganan banjir	13,52%	47,68%	Program pengendalian banjir	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKER-JAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	N/A	4	Program Perencanaan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
			2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang		Persentase cakupan pengendalian tata ruang	70%	80%	1. Program pemanfaatan ruang 2. Program Pengendalian tata ruang	Penataan Ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			3. Meningkatkan status kepemilikan tanah		Cakupan Sertifikasi Tanah	N/A	100%	Program Peningkatan Pelayanan Pertanahan	Pertanahan	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama	1. Mendorong terciptanya situasi kondusif dalam kehidupan beragama	Angka Kriminalitas	Jumlah intoleransi di masyarakat	N/A	0 Kasus	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	1. Meningkatkan pemahaman hukum		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	**0 %**	100 %	Program Peningkatan Keamanan dan Kenya-manan Lingkungan	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP
								Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		
								Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan		
					Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak	0,38	0,38	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDA-YAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG-AN ANAK
					Jumlah Pemuda Pelopor	4 Orang	4 Orang	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	PD Penanggungjawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
15	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	1.Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan	1.Mengoptimalkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Cakupan Pelestarian adat dan tradisi	N/A	30%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN
					Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	N/A	24%	Program Pengembangan Nilai Budaya		
								Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		

BAB VII.
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bantul berisi skema dan asumsi kapasitas kemampuan pendanaan daerah dan program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*out come*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari ABPD Kabupaten Bantul. Namun juga oleh sumber pendapatan lainnya (APBN, APBD Propinsi DIY dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 7.2 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul. Kemudian untuk Target Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2016 dan 2017 mengacu pada realisasi capaian kinerja program, sedangkan Target Kinerja Tahun 2018-2021 merupakan target kinerja yang akan dicapai oleh PD baik yang tetap (sesuai dengan target kinerja awal RPJMD), maupun yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan capaian kinerja terakhir.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021 dapat dilihat dari proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat pada tahun 2013-2017 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 7.1.

Sedangkan program-program untuk pencapaian visi dan misi, indikator kinerja, pagu indikatif target, serta Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2016-2021 Kabupaten Bantul

No	KAPASITAS RILL/BELANJA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		REALISASI	REALISASI	APBD	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	**2.283.360.217.511,65**	**2.341.720.668.366,99**	**2.254.021.531.900,71**	**2.292.087.907.674,25**	**2.327.926.385.012,65**	**2.387.223.504.549,49**
	BELANJA	**2.016.543.978.974,11**	**2.076.742.163.062,60**	**2.205.525.940.400,71**	**2.258.837.907.674,25**	**2.287.601.385.012,65**	**2.346.898.504.549,49**
A.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.265.890.290.230,00**	**1.116.642.511.784,00**	**1.225.125.698.360,46**	**1.224.273.785.315,25**	**1.206.710.118.163,28**	**1.211.962.674.357,65**
1.	Belanja Pegawai	1.032.505.302.997,00	825.306.291.768,00	878.610.267.094,40	881.882.472.436,29	885.106.121.885,01	889.388.244.322,71
2	Belanja Hibah	31.862.069.500,00	50.474.188.248,00	55.370.075.410,00	61.362.588.000,00	43.129.900.893,83	43.129.900.893,83
3	Belanja Bantuan Sosial	3.267.350.000,00	1.650.300.000,00	8.648.200.000,00	8.396.720.000,00	3.867.694.000,00	3.847.694.000,00
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.429.995.580,00	14.330.194.685,00	17.564.212.350,00	20.785.351.792,90	22.508.675.133,44	23.499.108.890,11
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	185.304.699.853,00	222.760.211.526,00	249.184.016.671,00	246.097.726.251,00	246.097.726.251,00	246.097.726.251,00
6	Belanja Tidak Terduga	520.872.300,00	2.121.325.557,00	15.748.926.835,06	5.748.926.835,06	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
B	**BELANJA LANGSUNG**	**750.653.688.744,11**	**960.099.651.278,60**	**980.400.242.040,25**	**1.034.564.122.359,00**	**1.080.891.266.849,37**	**1.134.935.830.191,84**
1.	Belanja Pegawai	44.678.753.435,00	69.976.098.898,00	93.280.876.740,00	98.061.521.672,93	102.842.166.605,85	107.984.274.936,14
2.	Belanja Barang dan Jasa	421.914.402.647,16	557.504.286.927,46	571.940.966.193,20	601.252.940.710,60	630.564.915.228,00	662.093.160.989,40
3.	Belanja Modal	284.060.532.661,95	332.619.265.453,14	315.178.399.107,05	335.249.659.975,48	347.484.185.015,52	364.858.394.266,30

Sumber: BKAD Data diolah, 2018

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1	**URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR**																	
1.01	**Pendidikan**																	
1.01 - 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	Jumlah Lembaga PAUD yang aktif / Jumlah lembaga PAUD yg ada x100		93	95	2.666.300.000	95	14.094.482.259	96	2.986.277.033	96	2.715.640.000	97	2.837.244.687	97	2.979.106.922	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.01 - 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini						3.750.000											kecamatan Pundong
	Program Pendidikan Menengah								177.057.500	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.01 - 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase peningkatan kompetesi guru/ kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	Jumlah guru SD yang bersertifikasi / Jumlah semua guru SD x100		42	50	32.703.253.850	55	57.753.346.407	55.5	57.635.919.600	56	69.024.489.700	56	72.115.363.855	57	75.721.132.048	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase peningkatan kompetesi guru/ kepala sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	Jumlah guru SMP yang bersertifikasi / Jumlah semua guru SMP x100		46	48		53		53.5		54		54		54		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	Jumlah sarana pembelajaran dan sarana fisik / Jumlah saran ideal x100		90	95.22		95.72		96.22		96.72		97.22		97.72		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	Jumlah sarana pembelajaran dan sarana fisik / Jumlah saran ideal x100		90	94.45		95		95.5		96		96.5		97		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase penyelenggaran pendidikan dasar SD/MI sesuai SPM	Jumlah SD yang menerapkan kurikulum baru / Jumlah semua SD x100		75	77.14		77.64		78.14		78.64		79.14		79.64		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase penyelenggaran pendidikan dasar SMP/MTs sesuai SPM	Jumlah SMP yang menerapkan kurikulum baru / Jumlah semua SMP x100		61	63.9		64.4		64.9		65.4		65.4		65.9		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	Terselenggaranya lomba peningkatan bakat minat/prestasi siswa		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.01 - 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase peningkatan kompetesi guru/ kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	Jumlah guru SD yang bersertifikasi / Jumlah semua guru SD x100		0	0	5.240.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
1.01 - 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Cakupan pelayanan kependidikan		persen	100		5.325.000											kecamatan Srandakan
1.01 - 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase peningkatan kompetesi guru/ kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	Jumlah guru SD yang bersertifikasi / Jumlah semua guru SD x100		0	0	1.505.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Sanden
1.01 - 18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga Pendidikan Non Formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif / Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yg ada x100		90	90	3.320.110.000	90	1.514.193.800	91	1.598.650.000	91	2.074.955.000	2.074.955.000	2.167.870.207	2.074.955.000	2.276.263.718	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.01 - 18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga Pendidikan Non Formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif / Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yg ada x100		0	0	3.420.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
1.01 - 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentasi kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	Jumlah ketersediaan pendidik yang bersertifikat, jumlah siswa dan sekolah		65	65	324.978.100	67	1.355.698.012	67	37.947.837.000	68	48.867.560.000	48.867.560.000	51.055.819.252	48.867.560.000	53.608.610.215	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1.01 - 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	Jumlah SD Sekolah Standar Nasional / Jumlah semua SD x100		18	20	534.690.000	22	603.100.150	24	1.216.205.000	26	1.106.575.000	28	1.156.126.747	30	1.213.933.085	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	Jumlah SMP Sekolah Standar Nasional / Jumlah semua SMP x100		33	36		39		42		45		48		51		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.01 - 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					90	5.850.000											Kecamatan Banguntapan
1.01 - 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah manajemen pelayanan pendidikan		0	90	5.850.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
1.01 - 23	Program Peningkatan Nilai Akademik	Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	Peringkat jumlah nilai rata-rata mata pelajaran US/M SD/MI Kabupaten	Peringkat	4	4		4	-	3	3.899.400.500	3	3.783.175.000	2	3.952.583.247	1	4.150.212.410	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Peringkat jumlah nilai rata-rata mata pelajaran UN SMP/MTs Kabupaten	Peringkat	3	4	0	4		2		2		1		1		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.02	**Kesehatan**														-		-	
1.02 - 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR)	Jumlah kasus JOO tidak diberi antibiotik dibagi jumlah total kasus JOO ditambah jumlah kasus myalgia tidak diinjeksi / Jumlah total kasus myalgia / 2 kemudian x100		96	95	9.159.252.117	95	11.629.485.000	95	6.251.350.000	95	5.559.403.000	95	5.808.349.644	95	6.098.767.126	Dinas Kesehatan
1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah workshop manajemen puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Puskesmas	0	0	67.767.121.897	5	75.918.604.228	27	78.113.100.802	27	85.982.000.175	27	89.832.221.210	27	94.323.832.270	Dinas Kesehatan
		Cakupan Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	Puskesmas	3	3	424.270.000	27	1.196.734.000	27	332.990.000	27		27		27		Dinas Kesehatan
		Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Jumlah Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Puskesmas	27	27	300.895.000	27	201.763.750	27	155.685.000	27		27		27		Dinas Kesehatan
		Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	cakupan Pelayanan RS Tipe D	presentase	-	-	0	-	-	50	2.400.000.000	100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan koordinasi upaya kesehatan masyarakat	Jumlah koordinasi kesehatan masyarakat yang terlaksana/Jumlah koordinasi x 100		0	90	6.562.500	0	0		0	0		0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan koordinasi upaya kesehatan masyarakat	Jumlah koordinasi kesehatan masyarakat yang terlaksana/Jumlah koordinasi x 100		0	90	9.435.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yg dilaksanakan, Evaluasi Pengendalian masalah DB4MK, dan Sosialisasi bidang kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	15	8.950.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Imogiri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						8.000.000											kecamatan Srandakan
1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yg dilaksanakan, Evaluasi Pengendalian masalah DB4MK, dan Sosialisasi bidang kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	20	4.140.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Sanden
1.02 - 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	Jumlah peserta PKP yang mendapatkan sertifikat PIRT / Jumlah peserta PKP x100		70	80	100.800.000	80	119.000.000	80	102.210.000	80	155.000.000	80	161.940.805	80	170.037.845	Dinas Kesehatan
		Persentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	Jumlah hasil pemeriksaan BBPOM yang ditindaklanjuti / Seluruh pemeriksaan dari BBPOM x100		100	100	100.800.000	100	119.000.000	100	102.210.000	100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	Jumlah desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	Desa	70	71	3.043.390.000	72	3.802.000.000	73	2.378.912.000	74	1.770.450.000	75	1.849.729.661	75	1.942.216.144	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah siswa pada usia pendidikan dasar yang dilakukan penjaringan kesehatan / Jumlah seluruh siswa pada usia pendidikan dasar x100		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat		persen	100		3.637.500											Kecamtan Pundong
1.02 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah promosi kesehatan		0	95	8.850.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
1.02 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah promosi kesehatan		0	90	8.550.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
1.02 - 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pesentase prevalensi balita stunting	Jumlah balita stunting sesuai standar (TB/U) / Jumlah balita ditimbang x100		12	11.9	709.339.000	11.8	725.000.000	11.7	865.350.000	11.6	2.902.157.000	11.5	3.032.113.804	11.4	3.183.719.494	Dinas Kesehatan
		Persentase cakupan balita ditimbang	Jumlah Balita yang diukur (TB dan BB) / Jumlah seluruh balita x100		78	80		80		80		80		80		80		Dinas Kesehatan
1.02 - 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian PMTAS TK	Jumlah anak TK PMT dibagi jumlah seluruh anak TK X 100	persen	87,39	87,39	3.807.104.400	89,8	3.972.854.400	90	3.718.790.000	-		-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
1.02 - 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	Desa	3	5	306.345.000	5 Desa	531.427.000	15 Desa	563.960.000	27 Desa	2.787.216.000	40 Desa	2.912.025.817	54 Desa	3.057.627.107	Dinas Kesehatan
		Angka Bebas Jentik (ABJ)	Jumlah tempat-tempat terbebas jentik dibanding seluruh tempat yang diperiksa dikali 100	presentase	26	83	321.860.000	86.51	295.748.000	50	381.375.000	65		70		75		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1.02 - 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular																	
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, wania/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan Lapas) yg mendapat pemeriksaan HIV	presentase	26	30	116.603.000	35	341.740.000	50	367.840.000	65	1.407.225.000	70	1.470.239.669	75	1.543.751.653	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah semua penderita TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai DOTS dibanding jumlah seluruh kasus TB (dewasa dan anak) dikali 100	presentase	76	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	Persentase Desa UCI	presentase	100	100	104.812.000	100	100.000.000	100	410.725.000	100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02 - 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	15	15	744.221.000	27	1.475.166.000	27	418.720.000	27	1.264.397.300	27	1.321.016.233	27	1.387.067.044	Dinas Kesehatan
		jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas menyusun Profil Kesehatan	Puskesmas	27	27	150.500.000	27	93.000.000	27	82.530.000	27		27		27		Dinas Kesehatan
		Jumlah Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Akreditasi Rumah Sakit	Rumah Sakit	8	8	0	9	*	10	261.602.000	11		12		13		Dinas Kesehatan
1.02 - 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	jumlah peserta PBI jamkesda	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mendapat pembiayaan kesehatan / Jumlah masyarakat kurang mampu x100		90	100	18.025.300.000	100	17.296.460.000	100	17.871.460.000	100	21.423.348.000	100	22.382.672.335	100	23.501.805.951	Dinas Kesehatan
1.02 - 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	Jumlah sarana prasarana puskesmas memenuhi standar / Jumlah puskesmas x100		50	50	27.047.945.079	60	15.431.356.500	70	13.786.692.300	80	17.074.783.300	90	17.839.381.584	100	18.731.350.664	Dinas Kesehatan
1.02 - 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	BOR	Jumlah hari perawatan / Jumlah tempat tidur x 365 hari		77	79,5	26.913.803.896	71,68	13.575.965.208	80	55.955.170.000	80	15.405.855.000	80	16.095.719.703	80	16.900.505.688	RSUD Panembahan Senopati
		LOS	Jumlah lama dirawat keseluruhan pasien / Jumlah pasien yang keluar	hari	5	5,1		5,01		6		6		6		6		RSUD Panembahan Senopati
		TOI	Jumlah tempat tidur x 365 hari - jumlah hari perawatan / Jumlah pasien yang keluar	hari	1	1,09		1,63		2		2		2		2		RSUD Panembahan Senopati
		BTO	Jumlah Pasien yang keluar / Jumlah tempat tidur	kali	70	57,05		52,22		50		50		50		50		RSUD Panembahan Senopati
1.02 - 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPT Jaminan Kesehatan Daerah	Jumlah institusi yang bermitra dengan Dinas Kesehatan	institusi pendidikan	0	50	413.112.500	91 institusi	758.980.000	91 institusi	626.080.000	91 institusi		91 institusi		91 institusi		Dinas Kesehatan
		Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan	Jumlah institusi pendidikan yang menyampai-kan laporan hasil kemitraan dibagi jumlah institusi	presentase	32	30	116.762.500	60	274.480.000	70	218.080.000	80	430.140.000	90	449.401.404	100	471.871.475	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
		laporan hasil kemitraan	pendidikan yang bermitra pada tahun yang sama dikali 100															
1.02 - 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah seluruh bayi baru lahir x100	presentase	96	92	33.100.000	92	35.000.000	100	136.000.000	100	134.720.000	100	140.752.679	100	147.790.313	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar / jumlah seluruh balita x100	presentase	84	80		80		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02 - 29	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentanse prevalensi Balita stunting	Jumlah balita stunting sesuai standar (TB/U)/Jumlah balita ditimbang x 100%	presentase		11,9	709.339.000	11,8	725.000.000	11,7	865.350.000	11,6	2.902.157.000	11,5	3.032.113.804	11,4	3.183.719.494	Dinas Kesehatan
		Persentase cakupan Balita ditimbang	Jumlah Balita yang diukur (TB dan BB)/ Jumlah seluruh Balita x 100%	presentase		80		80		80		80		80		80		Dinas Kesehatan
1.02 - 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pemberian PMTAS PAUD	jumlah status gizi baik anak PAUD dibagi jumlah seluruh anak PAUD X 100	persen	87,19	87,19	1.286.700.400	89,6	2.019.000.000	90,14	2.005.398.250	-	0	-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
1.02 - 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan lansia		persen	100	2	2.680.000											Kecamatan Dlingo
1.02 - 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Puskesmas Santun Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	Puskesmas	16	17	18.595.000	18	100.000.000	19	125.075.000	20	147.000.000	21	153.582.570	22	161.261.698	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah lansia memperoleh pelayanan kesehatan / Seluruh lansia x100		NA	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02 - 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	Jml ibu hamil yg memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar / Sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun x100		91	95	1.779.050.000	95	1.810.650.000	100	2.240.605.000	100	5.003.012.000	100	5.227.043.797	100	5.488.395.987	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jml ibu bersalin yg memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar / Sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun x100		100	99		99		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Desa memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	Jumlah Desa yang memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	posbindu	35	40		50		60		70		73		75		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1.02 - 35		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan dikali 100	presentase	100	100	108.000.000	0	546.567.000	100	579.025.000	100	2.309.854.800	100	2.413.288.676	100	2.533.953.110	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang diobati sesuai standar dibagi jml seluruh penderita hipertensi yg ditemukan	presentase	100	100		0		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM)	Jumlah penderita DM yang diobati sesuai standar dibagi jml seluruh penderita DM yg ditemukan	presentase	100	100		0		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ yang mendapat pelayanan sesuai standar dibagi jml seluruh ODGJ di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu	presentase	100	100		0		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02 - 37	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Capaian SPM	Jumlah indikator yang tercapai / Jumlah seluruh indikator yang ada x100		76	76,4	136.859.310.826	82	137.070.813.437	82	152.000.000.000	84	126.000.000.000	86	131.642.202.431	88	138.224.312.552	RSUD Panembahan Senopati
		Capaian Evaluasi Kinerja	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78	-	-	74.71		80		80		80		80		RSUD Panembahan Senopati
		Nilai AKIP	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	-	-	-	-		84		85		85		85		RSUD Panembahan Senopati
1.03	**Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**														-		-	
1.03 - 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	Jumlah Dokumen Tata Ruang Yang Sudah Diperdakan	dokumen	0	-'	-	2	1,025,579,497.00	2	2,066,207,100.00	3	1.274.100.000	4	1.331.153.414	4	1.397.711.084	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.03 - 16	Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan kajian pemanfaatan ruang	jumlah kajian pemanfaatan ruang	dokumen	1	1	36610000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Administrasi Perekonomian
1.03 - 16	Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan kajian pemanfaatan ruang	jumlah kajian pemanfaatan ruang	dokumen	1	1	36.610.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Perekonomian
1.03 - 16	Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah koordinasi dan monitoring pelaksanaan perijinan IMB, HO, SPPL, dll	Jumlah koordinasi dan monitoring	Kegiatan	0	2	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
1.03 - 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	Jumlah penanganan pelanggaran / Jumlah pelanggaran x 100		0	-	-	71	100.000.000	72	394.200.000	75	1.581.555.000	77	1.652.376.059	80	1.734.994.862	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.03 - 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Cakupan jembatan tertangani	Jumlah jembatan tertangani	unit	N/A	3	3.118.770.500	-	-	10	9.285.775.000	10	0	12	-	15	-	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03 - 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan sarana prasarana kebinamargaan	Jumlah sarana prasarana kebinamargaan tertangani	unit	--	-	-	-	-	1	380.000.000	2	2.752.875.000	2	2.876.147.048	2	3.019.954.400	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03 - 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase saluran irigasi berfungsi baik	Jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik / Total panjang saluran irigasi x100		79	79	18.466.503.210	80	46.075.630.000	80,5	14.600.000.000	81	20.012.296.950	81.5	20.908.435.287	82	21.953.857.052	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03 - 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan penyediaan air baku	Jumlah pananganan saluran pengambil dan pembawa	unit	0	--	-	5	60.000.000	7	70.000.000	9	133.750.000	11	139.739.243	13	146.726.205	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengembangan,																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1.03 - 26	Program Pengembangan Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	Jumlah sumber/mata air yang termanfaatkan	lokasi	10	11	80.792.535	21	1.095.000.000	26	948.241.000	31	1.358.825.000	36	1.419.672.347	41	1.490.655.964	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03 - 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	Jumlah IPAL komunal terbangun	unit	26	30	15.142.425.744	35	16.597.250.000	40	19.801.975.500	45	13.631.224.000	50	14.241.621.819	55	14.953.702.910	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03 - 28	Program Pengendalian Banjir	Cakupan lokasi penanganan banjir	Jumlah lokasi banjir genangan yang tertangani	lokasi	16	18	14.470.420.023	18	11.455.880.000	18	9.247.722.000	18	7.887.509.800	18	8.240.707.633	18	8.652.743.015	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03 - 31	Program Pembangunan Gedung	Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	Jumlah gedung dalam kondisi baik / Total jumlah gedung pemerintah		80	80	-	80	9.999.953.418	82	10.651.550.000	82	10.465.450.000	84	10.934.086.408	84	11.480.790.729	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03 - 35	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	Jumlah kilometer panjang jalan yang tertangani dalam satu tahun	km	30	15	58.468.981.000	15	91.768.480.000	15	43.821.465.000	17	76.002.482.600	17	79.405.826.981	17	83.376.118.330	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03 - 36	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Cakupan drainase jalan kabupaten tertangani	Panjang drainase tertangani	M	N/A	400	874.019.700	400	2.343.821.000	400	8.604.275.000	500	11.164.152.200	500	11.664.076.063	500	12.247.279.866	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03 - 38	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan	Panjang jalan desa tertangani / Panjang jalan desa x100		N/A	12.20	48.799.775.875	13.41	43.375.091.821	14.63	24.103.475.000	15.85	24.109.921.200	17.07	25.189.548.629	18.29	26.449.026.060	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.03 - 39	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	Usaha jasa konstruksi kriteria baik / Jumlah usaha jasa konstruksi x100		N/A	-	-	-	-	70	1.189.851.000	75	1.210.996.000	80	1.265.223.655	85	1.328.484.838	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan																	Kecamtan Piyungan
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**														-		-	
1.04 - 15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah RTLH tertangani / Total RTLH x100		14	26	1.504.860.673	42	3.104.163.500	46	3.320.701.000	49	2.844.035.000	52	2.971.389.136	55	3.119.958.593	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 - 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah kawasan kumuh tertangani dalam tahun n	lokasi	N/A	-	-	-	-	1	450.400.000	2	758.600.000	2	792.569.641	2	832.198.123	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04 - 17	Program Pengelolaan Area Pemakaman	Cakupan Pengembangan TPU	Jumlah TPU terbangun	unit	1	1	1.400.000.000	1	1.125.000.000	703.350.000	1	797.800.000	797.800.000	1	833.524.993	1	875.201.242	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.05	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**														-		-	
1.05 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pengendalian keamanan lingkungan	Cakupan wilayah pengendalian keamanan lingkungan	Kecamatan	0	17	20.205.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Linmas terhadap Jumlah RT	jumlah linmas / Jumlah RT x100		90	95	196.787.900	96	281.260.150	97	455.890.000	98	654.690.000	99	684.006.615	100	718.206.946	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				8.000.000											Kecamatan Sedayu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1.05 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan peran serta LINMAS dan masyarakat dalam pengamanan lingkungan		persen	100		5.800.000											Kecamatan Srandakan
1.05 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		0	90	11.400.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
1.05 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		0	90	21.791.500	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
1.05 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Koordinasi dan Patroli keamanan lingkungan wilayah Kec. Imogiri	Jumlah peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	kali	0	8	4.845.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
1.05 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		0	70	6.140.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
1.05 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		0	80	13.475.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Sanden
1.05 - 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Jumlah pelanggaran Kantrantibmas yang ditindaklanjuti / jumlah sasaran x100		100	100	516.152.400	100	297.850.000	100	486.380.000	100	716.080.000	100	748.145.622	100	785.552.903	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 - 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan / Jumlah target peserta pembinaan wawasan kebangsaan x100		0	100	183.918.750	100	351.571.650	100	400.588.200	100	326.550.000	100	341.172.708	100	358.231.343	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan / Jumlah target peserta pembinaan wawasan kebangsaan x100															Bagian Hukum dan Protokol
1.05 - 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pengembangan Wawasan Kebangsaan				37.100.000											Kecamatan Sedayu
	Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan						19.100.000											Kecamatan Sedayu
1.05 - 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan peningkatan kebangsaaan		persen	100	7	50.000.000											Kecamatan Dlingo
1.05 - 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan peningkatan kebangsaaan		persen	100		30.650.000											kecamatan Srandakan
1.05 - 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan peningkatan kebangsaaan		persen	100		49.580.000											Kecamatan Pundong
1.05 - 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan peningkatan kebangsaaan		persen	100		13.100.000											Kecamatan Srandakan
1.05 - 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pengembangan Wawasan Kebangsaan		0	90	41.925.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
1.05 - 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pengembangan Wawasan Kebangsaan		0	90	25.499.400	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
1.05 - 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pengembangan Wawasan Kebangsaan		0	90	25.350.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Sanden
1.05 - 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Kegiatan Pengiriman Anggota Linmas dan PNS Kec. Imogiri untuk partisipasi kegiatan TMMD	Jumlah kegiatan pengiriman anggota linmas dan PNS yang telah dilaksanakan	Kegiatan	0	2	53.700.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
1.05 - 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pengembangan Wawasan Kebangsaan		0	90	29.175.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
1.05 - 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan/toleransi umat beragama	Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan/toleransi umat beragama	Jumlah pengembangan wawasan kebangsaan/toleransi umat beragama		0	90	9.150.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Piyungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1.05 - 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Peningkatan dan Pemupukan Rasa Nasionalisme kebangsaan	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Peningkatan dan Pemupukan Rasa Nasionalisme kebangsaan	Jumlah Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Peningkatan dan Pemupukan Rasa Nasionalisme kebangsaan		0	90	4.992.500	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
1.05 - 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase FKUB aktif	Jumlah FKUB aktif / Jumlah FKUB x100		0	50	203.592.000	75	88.121.850	100	123.753.000	100	123.490.000	100	129.019.806	100	135.470.796	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan koordinasi FKUB-		0	100	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
1.05 - 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah macam kegiatan Koordinasi FKUB, Safari Tarawih Ramadhan dan Fasilitasi kegiatan Santunan Anak Yatim Piatu	Jumlah macam kegiatan Koordinasi FKUB, Safari Tarawih Ramadhan dan Fasilitasi kegiatan Santunan Anak Yatim Piatu	Kegiatan	0	3	15.490.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
1.05 - 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase FKDM tingkat kecamatan	Jumlah FKDM / Jumlah kecamatan x100		0	25	185.298.263	82	272.357.000	90	279.470.000	100	217.685.000	100	227.432.800	100	238.804.440	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase FKDM tingkat kecamatan	Jumlah FKDM / Jumlah kecamatan x100		0	100	3.920.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
1.05 - 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase FKDM tingkat kecamatan	Jumlah FKDM / Jumlah kecamatan x100		0	100	6.840.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
1.05 - 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)	Peringkat perbandingan tahun ini dengan tahun lalu	Angka	0	3	39.799.850	3	66.636.525	4	66.250.000	4	92.950.000	4	97.112.244	4	101.967.856	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Peningkatan pemahaman pekat		persen	100	2	13.260.000											Kecamatan Dlingo
1.05 - 21	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Peningkatan pemahaman pekat		persen	100		2.300.000											Kecamatan Srandakan
1.05 - 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Angka penyakit masyarakat	Peringkat perbandingan tahun ini dengan tahun lalu	Angka	0	3	5.660.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
1.05 - 21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Jumlah pemilih yang berpartisipasi / Jumlah pemilih yang memiliki hak pilih x100		0	0	149.975.300	0	111.477.250	0	275.335.000	75	372.605.000	0	389.290.023	75	408.754.524	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan sosialisasi politik		persen	100	2	7.540.000											Kecamatan Dlingo
1.05 - 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan sosialisasi politik		persen	100													Kecamatan Pundong
1.05 - 21	Program pendidikan politik masyarakat	Cakupan koordinasi politik masyarakat-	Jumlah koordinasi politik masy dibagi jumlah koordinasi x 100-		0	100	5.335.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Sanden
1.05 - 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk / 75 desa x100		20	20	1.339.442.847	29,33	2.758.031.405	-	3.646.130.000	-	3.281.900.000	-	3.428.861.462	-	3.600.304.535	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		"Persentase Sekolah Siaga Bencana (Satuan: Persentase)"	Jumlah sekolah siaga bencana yang terbentuk / Jumlah sekolah x100		2,69	2,69		3,19										Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Jumlah sekolah siaga bencana yang terbentuk	Sekolah	2	2						2		2		2		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 - 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sosialisasi tanggap bencana	Jumlah Rapat	Kegiatan	0	90	18.700.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1.05 - 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sosialisasi tanggap bencana	Jumlah Rapat	Kegiatan	0	4	2.830.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
1.05 - 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sosialisasi tanggap bencana	Jumlah Rapat	Kegiatan			2.880.000											Kecamatan Sedayu
1.05 - 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan pelayanan kebencanaan		persen	100	2	8.952.000											Kecamatan Dlingo
1.05 - 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan pelayanan kebencanaan		persen	100		3.262.000											Kecamatan Srandakan
1.05 - 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sosialisasi tanggap bencana	Jumlah Rapat	Kegiatan	0	6	6.601.000	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
1.05 - 23	Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Cakupan kawasan Tertib	Jumlah Lokasi Kawasan Tertib	lokasi	n/a	8	132.073.000	14	239.334.000	18	403.990.000	22	566.262.000	26	591.618.864	30	621.199.807	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 - 24	Program Penegakan Perda	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak	Jumlah Pelanggaran perda yang ditindak / Jumlah Sasaran x100		n/a	-	-	100	194.270.000	100	242,085.000	100	332.184.000	100	347.058.995	100	364.411.945	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 - 25	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	Jumlah SDM dan Sarpras Penanggulangan Kebakaran/Jumlah Kebutuhan SDM dan Sarpras kebakaran x 100		90						226.000.000	98	717.100.000	99	749.211.297	100	786.671.861	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 - 26	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Rawan Bencana	Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi	Jumlah penyiapan lahan relokasi	Lokasi	1	-	-	-	-	-	811.959.500	2	2.797.000.000	2	2.922.247.938	2	3.068.360.335	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.27	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	80	500.000.000	90	550.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.28	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	-	-jumlah ketersediaan data dibagi jumlah kebutuhan data dikali 100	-		-	-	-	-	-	-	0	80	300.000.000	90	330.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	**Sosial**														-		-	
1.06 - 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	Jumlah KK miskin yang diberikan bantuan rasta : jumlah total KK miskin x100		40	50	1.270.403.750	52	2.056.271.000	53	1.576.930.000	55	1.630.169.995	57	1.703.168.004	60	1.788.326.404	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06 - 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	Jumlah KK miskin yang diberikan bantuan rasta : jumlah total KK miskin x100			96,386	16.000.000											Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
1.06 - 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah kegiatan SosialisasibagiPMKS	Jumlah kegiatan	Kegiatan	0	2	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
1.06 - 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Jumlah kegiatan SosialisasibagiPMKS	Jumlah kegiatan		0	90	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
1.06 - 15	Program Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.					2	3.850.000											Kecamatan Dlingo
1.06 - 15	Program Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.	Cakupan pemberdayaan masyarakat miskin		persen	100		3.320.000											Kecamatan Pundong
1.06 - 15	Program Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.	Jumlah kegiatan SosialisasibagiPMKS	Jumlah kegiatan	Kagiatan	18.802.500	0	2.155.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
1.06 - 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya																	Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1.06 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi		70	90	1.300.008.000	90	614.142.500	90	1.869.960.000	90	2.088.570.750	90	2.182.095.662	90	2.291.200.446	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Koordinasi, Monitoring tentang Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi, Monitoring	Kagiatan	0	4	5.920.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
1.06 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Koordinasi, Monitoring tentang Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi, Monitoring	Kegiatan	0	2	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
1.06 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pelayanan sosial kemasyarakatn		persen	100		8.400.000											Kecamatan Srandakan
1.06 - 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok mandiri / Jumlah kelompok keseluruhan x100		30	50	477.585.000	55	499.900.000	60	1.029.215.000	65	1.210.498.400	70	1.264.703.773	75	1.327.938.962	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06 - 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Target kegiatan Masyarakat yang di fasilitasi	Jumlah Target kegiatan	Kegiatan	0	12	16.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
1.06 - 22	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	Jumlah peserta pemohon jaminan / Jumlah peserta pemohon jaminan yang dilayani x100		90	100	-	100	-	100	1.404.742.500	100	1.233.871.915	100	1.289.123.940	100	1.353.580.137	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06 - 48	Program penegakan perda dan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penyuluhan napza	Jumlah penyuluhan napza yang terlaksana / Jumlah rencana penyuluhan napza x100		100	100	-	100	200.000.000	100	150.000.000	100	0	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR														-		-	
2.01	**Tenaga Kerja**														-		-	
2.01 - 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat pelatihan / Jjumlah pendaftar pelatihan x100		70	70	560.903.080	72	2.791.666.880	75	1.810.581.000	77	2.084.536.000	80	2.177.880.239	85	2.286.774.251	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01 - 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang terserap informasi jumalah kerja / Jumlah pencari kerja x100		75	75	61.413.745	77	182.895.900	80	200.943.500	82	543.425.000	85	567.759.237	87	596.147.199	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01 - 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	Nilai KHL	Rupiah	1.297.700	1.297.700	436.454.501	1.404.760	716.951.400	1.570.150	867.360.100	1.578.389	923.964.500	1.673.093	965.339.061	1.773.479	1.013.606.015	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01 - 18	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan / Jumlah pendaftar penempatan x100		75	75	248.828.194	77	343.379.700	80	558.444.480	82	360.000.000	85	376.120.578	87	394.926.607	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01 - 19	Program Perluasan Kerja	Persentase tenaga kerja yang berwirausaha	jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan / Jumlah pendaftar x100		62	62	12.563.630.499	65	14.845.976.050	67	18.053.040.000	70	18.981.365.000	72	19.831.338.839	75	20.822.905.781	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**														-		-	
2.02 - 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	Desa dan Kecamatan yang sudah layak anak		25	30	243.640.000	40	495.020.000	50	398.080.000	60	259.364.100	70	270.978.265	80	284.527.178	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 - 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah perempuan di lembaga pemerintahan/jum-lah pekerja di lembaga pemerintahan x 100	kegiatan	20	30	14.980.000	30	50.000.000	30	56.600.000	30	223.064.990	30	233.053.703	30	244.706.388	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.02 - 16	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah Rakor / Pertemuan Rutin PKK Tingkat Kecamatan, dan Fasilitasi kegiatan PKK / organisasi perempuan	Jumlah Rakor	kali	0	20	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
2.02 - 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah perempuan di lembaga pemerintahan/jum-lah pekerja di lembaga pemerintahan x 100	kegiatan		1	10.019.800											Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
2.02 - 16	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender		persen	100	4	18.320.000											Kecamatan Dlingo
2.02 - 16	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender		persen	100		14.800.000											Kecamatan Pundong
2.02 - 16	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender		persen	100		8.850.000											Kecamatan Srandakan
2.02 - 16	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah Rakor / Pertemuan Rutin PKK Tingkat Kecamatan, dan Fasilitasi kegiatan PKK / organisasi perempuan	Jumlah Rakor	kali	0	20	19.999.700	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
2.02 - 16	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Rakor / Pertemuan Rutin PKK Tingkat Kecamatan, dan Fasilitasi kegiatan PKK / organisasi perempuan	Jumlah Rakor	kali	0	18	11.475.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
2.02 - 16	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah Rakor / Pertemuan Rutin PKK Tingkat Kecamatan, dan Fasilitasi kegiatan PKK / organisasi perempuan	Jumlah Rakor	kali	0	20	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
2.02 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	jumlah korban uang diadukan / jumlah korban yang ditangani x100		80	100	229.680.000	100	339.650.000	100	482.570.000	100	474.499.000	100	495.746.773	100	520.534.112	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	jumlah korban uang diadukan / jumlah korban yang ditangani x100			100	244.235.500											Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
	Program Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pemberdayaan perempuan		persen	100		2.021.000											Kecamatan Srandakan
2.03	**Pangan**														-		-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.03 - 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	Jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	Kelompok	9	9	1.697.192.500	9	1.112.167.750	9	719.590.000	9	722.015.000	9	754.346.387	9	792.063.707	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka Ketersediaan Pangan Pokok	Jumlah ketersediaan pangan pokok	Ton	438	450		37.669		460		465		470		475		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
2.03 - 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Cakupan rekomendasi evaluasi kebijakan ketahanan pangan	jumlah rekomendasi evaluasi kebijakan ketahanan pangan	Laporan	1	2	31.120.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Perekonomian
2.03 - 15	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Cakupan peningkatan ketahanan pangan		persen	100	100	4.300.000											Kecamatan Kretek
2.03 - 15	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Tercapainya ketahanan pangan		Persentase	100		1.860.000											Kecamatan Pundong
2.03 - 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Cakupan rekomendasi evaluasi kebijakan ketahanan pangan	jumlah rekomendasi evaluasi kebijakan ketahanan pangan	Laporan	1	0	3.420.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
2.04	**Pertanahan**														-		-	
2.04 - 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat / Seluruh bidang tanah x100															Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
2.04 - 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat / Seluruh bidang tanah x100															Bagian Administrasi Pemerintahan
2.04 - 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat / Seluruh bidang tanah x100		0	-	-	84	580,995,000	88	555,558,506.00	92	169.815.000	96	177.419.211	100	186.290.172	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.04 - 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Angka penanganan konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang tertangani / Jumlah pengaduan konflik pertanahan tahun yang bersangkutan x100	Angka	0	-	-	10		10	8,100,000.00	15	33.225.000	15	34.712.795	20	36.448.435	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.04 - 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Angka penanganan konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang tertangani / Jumlah pengaduan konflik pertanahan tahun yang bersangkutan x100	Angka														Bagian Administrasi Pemerintahan
	Program pembangunan system pendaftaran tanah						1536000											Kecamatan Srandakan
2.05	**Lingkungan Hidup**														-		-	
2.05 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok pengelola sampah (Satuan: kelompok)	127+(nx3) kelompok	Kelompok	127	130	530.970.350	133	4.808.700.000	136	21.763.200.000	139	8.531.488.250	142	8.913.523.042	145	9.359.199.194	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo (Satuan: mg/L)	Hasil Analisa Laboratorium	mg/lt	7,25	7,25	874.428.727	7,3	1.849.843.000	7,35	3.475.000.000	7,4	7.724.954.000	7,45	8.070.872.684	7,5	8.474.416.319	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terciptanya kelestarian lingkungan hidup		Persentase	100		2.600.000											Kecamatan Pundong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.05 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pelayanan pengendalian lingkungan		Persen	100		3.500.000											Kecamatan Srandakan
2.05 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring tentang Masalah Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan	Kegiatan	0	4	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
2.05 - 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis) (Satuan: Ha/tahun)	Jumlah penambahan luas tutupan lahan	ha/tahun	0,5	0,5	924.579.500	1	1.104.485.000	1	4.276.000.000	1	3.974.552.000	1	4.152.529.992	1	4.360.156.491	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah yang telah ditetapkan melalui SK Kepala sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten	sekolah	36	56	187.972.690	76	630.890.000	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah kajian pengembangan potensi SDA	Realisasi penyusunan kajian pengembangan potensi SDA	dokumen	0	1	73.720.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Perekonomian
2.05 - 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Abntul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL)	Kegiatan yang memiliki dokumen UKL UPL	Dokumen	328	392	187.972.690	462	64.630.000	542	383.000.000	632	837.285.000	732	874.778.107	842	918.517.012	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Angka penurunan konsentrasi SO2 di udara ambien	Hasil Analisa Laboratorium	Ãµg/NmÂ³	37	36	52.703.220	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Angka penambahan luasan RTH-Taman di 7 kecamatan	mÂ²/tahun	m2	720	1000	45.649.000	250	964.584.700	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**														-		-	
2.06 - 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan Kartu Keluarga	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga / Jumlah Kepala Keluarga x100		100	100	172.188.910	100	2.619.997.500	100	2.622.558.000	100	2.913.340.500	100	3.043.798.094	100	3.195.987.999	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemilikan KTP_EL	Jumlah Kepemilikan KTP-EL / Jumlah wajib KTP x100		95	96.22	208.346.500	97	2.908.016.090	97,5		98		98,5		99		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 - 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Sosialisasi terkait dg Kependudukan	Jumlah kegiatan	kali			2.800.000											Kecamatan Sedayu
2.06 - 16	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan kependudukan		persen	100		3.900.000											Kecamatan Srandakan
2.06 - 16	Program Penataan Administrasi Kependudukan					2	1.800.000											Kecamatan Dlingo
2.06 - 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Sosialisasi terkait dg Kependudukan	Jumlah kegiatan	kali	0	2	1.427.500	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
2.06 - 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Sosialisasi terkait dg Kependudukan	Jumlah kegiatan	kali	0	4	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.06 - 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Sosialisasi terkait dg Kependudukan	Jumlah kegiatan	kali	0	3	9.302.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
2.06 - 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan Sosialisasi terkait dg Kependudukan	Jumlah kegiatan	kali	0	2	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
2.06 - 16	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 thn / Jumlah kelahiran usia 0-18 tahun x100		87	90,48	1.955.184.120	92	1.081.775.000	93	615.000.000	94	1.244.214.300	95	1.299.929.450	96	1.364.925.923	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kepemilikan Akta Kematian	Jumlah Pencari akta kematian Tahun N / Jumlah Kematian Tahun N x100		-			55		60		65		70		75		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 - 17	Program Pengelolaan Data Kependudukan	Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	Jumlah Instansi yang diberi hak akses / Jumlah instansi yang mengajukan ijin pemanfaatan data x100		-	-	-	75	-	80	521.925.000	85	476.375.000	90	497.706.779	95	522.592.118	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**														-		-	
2.07 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan pemberdayaan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemberdayaan dibagi jumlah desa keseluruhan x100		10	13.33	46.939.500	13.33	378.800.000	13.33	674.352.810	20	737.840.000	20	770.880.021	20	809.424.022	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
2,07 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					1	0											Kecamatan Imogiri
2.07 - 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi	desa	5	7	667.715.000	7	1.327.638.000	7	734.940.000	7	748.287.000	7	781.794.831	7	820.884.573	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
2,07 - 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan					4	0											Kecamatan Imogiri
2.07 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	jumlah desa sasaran program peningkatan partisipasi masyarakat dibagi jumlah desa x100		22	30	1.378.658.400	30	1.428.462.000	30	1.553.525.000	30	1.754.923.100	30	1.833.507.476	30	1.925.182.850	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
2.07 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		0	95	14.975.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
2.07 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Musrenbangdes	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kegiatan	0	6	8.920.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
2.07 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Musrenbangdes	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kegiatan	0	2	3.360.000	4	14.010.000	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sedayu
2.07 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Musrenbangdes	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kegiatan	0	1	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
2.07 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Musrenbangdes	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kegiatan	0	0	0	2	8.020.000	5	45.000.000	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.07 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Capaian partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa		Persentase	100		9.600.000											Kecamatan Srandakan
2.07 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					80	187.000.000											Kecamatan Jetis
2.07 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Musrenbangdes	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kegiatan	NA	NA	0	3	36.000.000	NA	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Dlingo
2.07 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	jumlah desa sasaran program peningkatan partisipasi masyarakat dibagi jumlah desa x100	Kegiatan														Bagian Administrasi Pembangunan
2.07 - 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Cakupan desa sasaran P2WKSS	Jumlah Desa yang disasar P2WKSS dibagi jumlah desa keseluruhan x100		2	4	103.880.000	4	115.000.000	5,33	69.300.000	5,33	165.580.000	5,33	172.994.570	5,33	181.644.299	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
2.07 - 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Cakupan Koordinasi Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah koordinasi peningkatan peran perempuan di Perdesaan		0	90	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
2.07 - 20	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah jenis program pemberdayaan dibagi jumlah layanan dikali 100		100	100	281.900.000	100	347.000.000	100	276.750.000	100	5.733.789.200	100	5.990.544.750	100	6.290.071.988	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
		Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT	Jumlah lembaga penyalur PMT	lembaga								2390		2400		2410		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**														-		-	
2.08 - 15	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) dikali 100		74	76,23	60.350.000	76,4	2.639.945.000	76,6	5.688.568.600	-	5.523.635.600	-	5.770.980.602	-	6.059.529.632	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
						-	-	-	-	-	-	76,8		77		77,2		
2.08 - 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	Jumlah siswa sekolah yang diberi sosialisasi	siswa	1500	1500	102.750.000	1600	120.885.000	1700	155.225.000	-	170.650.000	-	178.291.602	-	187.206.182	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
						-	-	-	-	-	-	1800		1900		2000		
2.08 - 17	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase kepesertaan KB MKJP	Jumlah peserta KB jangka panjang (MKJP) dibagi jumlah PA dikali 100		35	35	110.100.000	36	100.725.000	-	-	-	115.900.000	-	121.089.931	-	127.144.427	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
						-	-	-	-	-	-	38		39		40		
2.08 - 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan pelayanan kader IMP	Jumlah desa yang terlayani Kader IMP dibagi jumlah desa dikali 100 Persentase		55	60	41.725.000	70	51.740.000	80	41.940.000	-	75.365.000	-	78.739.798	-	82.676.788	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
						-	-	-	-	-	-	90		100		100		
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					70,379	156.903.000											Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan					120	25.420.900											Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah anggota UPPKS dibagi jumlah sasaran dikali 100	Warga binaan	60	-	-	-	-	-	-	240	27.500.000	300	28.731.433	360	30.168.005	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	Program kerjasama informasi dengan mas media	Cakupan media sosialisasi	Jumlah media sosialissi		NA	-	-	100	1.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
2.08 - 23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL)	Jumlah keluarga sasaran bina keluarga sejahtera	Kelompok	17	-	-	-	-	-	-	-	157.275.000	-	164.317.678	-	172.533.562	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
						-	-	-	-	-	-	34		34		51		
2.08 - 26	Program Pengembangadan Analisa Data dan Dampak Kependudukan	Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat	jumlah data yang terisi dibagi data yang seharusnya terisi dikali 100		85	100	595.090.000	100	246.560.000	100	278.436.400	-	259.608.400	-	271.233.504	-	284.795.180	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
						-	-	-	-	-	-	100		100		100		
2.09	**Perhubungan**														-		-	
2.09 - 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	Jumlah APILL - Jumlah APILL yang rusak dibagi jumlah total APILL x100	Persentase	80	90	541.900	91	543.800	92	2.060.705.000	93	1.488.959.000	1.488.959.000	1.555.633.667	1.488.959.000	1.633.415.351	Dinas Perhubungan
2.09 - 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum yang layak jalan	Jumlah angkutan umum yang ada - Jumlah angkutan umum yang melanggar saat terjaring operasi / Jumlah angkutan umum yang x100	Persentase	74	80	1.883.065	80,25	2.664.550.000	80,5	853.500.000	80,5	865.276.000	81	904.022.527	81,25	949.223.653	Dinas Perhubungan
2.09 - 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan tower yang berijin	Persentase tower yang berijin dibagi jumlah seluruh tower dikali 100 persen		100	-	-	98,81	250.415.000	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.09 - 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ketersediaan simpul transportasi yang memadai	Jumlah simpul transportasi berupa halte, park and ride, terminal yang terbangun dibagi kebutuhan simpul transportasi berupa halte, park and ride, terminal x100	Persentase	34	34	99.499.000	42	102.200.000	53	151.675.000	63	164.075.000	164.075.000	171.422.177	164.075.000	179.993.286	Dinas Perhubungan
2.09 - 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan rambu jalan kabupaten	Jumlah rambu yang terpasang di jalan kabupaten dibagi jumlah kebutuhan rambu di jalan kabupaten kali 100	Persentase	8	9,8	7.216.727.002	12	20.579.917.572	-	-	-	20.147.209.000	-	21.049.388.616	-	22.101.858.047	Dinas Perhubungan
		Persentase ketersediaan LPJU	Jumlah LPJU yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan LPJU di jalan kabupaten dikalikan seratus Persentase	Persentase	0	--	-	-	-	31	9.318.350.000	35		40		44		Dinas Perhubungan
2.09 - 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji dibagi Jumlah kendaraan bermotor wajib uji x100	Persentase	80	85	520.274.508	85,5	1.342.500.000	86	1.020.175.000	86,5	902.795.000	87	943.221.604	87,5	990.382.685	Dinas Perhubungan
2.09 - 21	Pengembangan Kelalu Lintasan	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah pelanggar lalu lintas yang terjaring operasi dibagi jumlah pengguna jalan yang terjaring operasi lalu lintas x100	Persentase	-	-	-	--	-	10	3.274.975.000	12	3.224.391.000	14	3.368.777.244	16	3.537.216.106	Dinas Perhubungan (untuk tahun 2016 dan 2017 kegiatan yang mendukung program tersebut masih melekat di program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas)
2.10	**Komunikasi dan Informatika**														-		-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.10 - 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	Persentase pengembangan infrastruktur / Jumlah seluruh infrastruktur x100		60	60	5.616.010.160	70	7.067.222.000	72	14.068.633.200	72	15.091.580.000	75	15.767.371.662	78	16.555.740.245	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	Jumlah warehaouse data tahun n dikurangi jumlah ware house data n-1 dibagi jumlah ware house data n-1 x100		40	40		45		50		52		55		60		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 - 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah jaringan aplikasi sistem informasi yang dipelihara	Jumlah realisasi aplikasi sistem informasi yang dipelihara															Bagian Humas dan Protokol
2.10 - 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah jaringan aplikasi sistem informasi yang dipelihara	Jumlah realisasi aplikasi sistem informasi yang dipelihara															Bagian Hukum dan Protokol
2.10 - 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah jaringan aplikasi sistem informasi yang dipelihara	Jumlah realisasi aplikasi sistem informasi yang dipelihara	aplikasi	2	6	44.721.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Umum
2.10 - 16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	Sistem informasi dan layanan publik yang memiliki peraturan/ keseluruhan sistem informasi dan layanan publik x 100															Bagian Humas dan Protokol
2.10 - 16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Prosentase penningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	Sistem informasi dan layanan publik yang memiliki peraturan/ keseluruhan sistem informasi dan layanan publik x 100		60	-	-	65	165.495.000	65	1.218.773.200	67	901.765.000	70	942.145.482	75	989.252.756	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 - 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	Jumlah SDM yang berbasis TI dibagi jumlah seluruh SDM yang ada x100		45	45	71.949.500	46	89.847.000	47	78.062.500	48	90.620.000	49	94.677.908	50	99.411.803	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 - 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah terselenggaranya forum kesandian	Realisasi frekuensi forum kesandian dibagi target frekuensi forum kesandian x100		100	100	4.701.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Umum
2.10 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan	jumlah sosialisasi tahun n-1 dibagi jumlah sosialisasi tahun N x100		62	62	16.967.500	65	2.083.082.200	67	2.193.493.200	70	1.959.960.000	72	2.047.725.802	75	2.150.112.092	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Jumlah publikasi melalui Media Massa	Jumlah publikasi melalui media massa	kegiatan	10	10	357.188.000	10	603.650.000	-	-	-	0	-	-	-	-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.10 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Cakupan sosialisasi pembangunan melalui media massa	Jumlah kegiatan sosialisasi melalui media massa	paket	0	10	107.628.875	2	25.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.10 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Cakupan sosialisasi pembangunan melalui media massa	Jumlah kegiatan sosialisasi melalui media massa	paket														Bagian Humas dan Protokol
2.10 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Cakupan sosialisasi pembangunan melalui media massa	Jumlah kegiatan sosialisasi melalui media massa	paket		12 paket	12.000.000											Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
2.10 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Cakupan sosialisasi pembangunan melalui media massa	Jumlah kegiatan sosialisasi melalui media massa	paket	0	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
2.11	**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**														-		-	
2.11 - 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	unit usaha	50	20	152.066.000	20	135.000.000	50	504.184.000	60	417.275.000	70	435.960.318	80	457.758.333	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
2.11 - 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Cakupan rekomendasi dan kajian evaluasi kebijakan perdagangan, industri dan jasa	Jumlah rekomendasi dan kajian evaluasi kebijakan perdagangan, industri dan jasa	dokumen	0	1	30.380.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Perekonomian
2.11 - 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Jumlah kegiatan Promosi Produk unggulan UKM melalui kegiatan Bantul Ekspo	Jumlah kegiatan	Kegiatan			11.200.000											Kecamatan Sedayu
2.11 - 15	Program Penciptaan iklim usaha usaha kecil Menengah yang kondusif	Terlaksananya fasilitasi perijinan UMKM		persen	100		16.080.000											Kecamatan Pundong
2.11 - 15	Program Penciptaan iklim usaha usaha kecil Menengah yang kondusif	Terlaksananya fasilitasi perijinan UMKM		persen	100		22.040.000											Kecamatan Srandakan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	Program peningkatan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil menengah						1.500.000											Kecamatan Sedayu
2.11 - 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Jumlah kegiatan Promosi Produk unggulan UKM melalui kegiatan Bantul Ekspo	Jumlah kegiatan	Kegiatan	0	1	11.945.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
2.11 - 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Jumlah kegiatan Promosi Produk unggulan UKM melalui kegiatan Bantul Ekspo	Jumlah kegiatan	Kegiatan	0	1	7.913.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
2.11 - 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Jumlah kegiatan Promosi Produk unggulan UKM melalui kegiatan Bantul Ekspo	Jumlah kegiatan	Kegiatan	0	1	5.820.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
2.11 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	unit usaha	100	100	191.855.000	100	200.000.000	100	847.556.000	200	494.850.000	300	517.009.078	400	542.859.532	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
2.11 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan kelompok dan pengrajin	Jumlah kelompok dan pengrajin	kelompok/ pengrajin	90	90	35.150.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Perekonomian
2.11 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang dikembangkan berbasis kewirausahaan dibagi jumlah UKM dikali 100 persen		0	90	9.450.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
2.11 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang dikembangkan berbasis kewirausahaan dibagi jumlah UKM dikali 100 persen		0	50	40.165.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
2.11 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang dikembangkan berbasis kewirausahaan dibagi jumlah UKM dikali 100 persen		0	4	700.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
2.11 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					1	11.240.000											Kecamatan Dlingo
2.11 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan pengembangan kewirausahaan		persen	100		4.240.000											Kecamatan Pundong
2.11 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan pengembangan kewirausahaan		persen	101		14.975.000											Kecamatan Srandakan
2.11 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang dikembangkan berbasis kewirausahaan dibagi jumlah UKM dikali 100 persen		0	25	12.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.11 - 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan partisipasi produk Usaha Mikro	Jumlah produk Usaha Mikro Baru yang dilibatkan dalam promosi	jenis	0	-	-	3	818.984.000	3	128.318.000	3	87.300.000	3	91.209.240	3	95.769.702	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		Cakupan produktivitas IKM dan UMKM	Jumlah produksi IKM dan UMKM dibagi Jumlah sumber daya yang ada x100		70	70	810.268.000	-		-		-		-		-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
2.11 - 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan kelompok KUPK penerima dana bergulir pengembangan ekonomi produktif masyarakat	Jumlah kelompok KUPK penerima dana bergulir pengembangan ekonomi produktif masyarakat	kelompok	47	47	82.080.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Perekonomian
2.11 - 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Jumlah Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM		0	75	7.530.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
2.11 - 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan pengembangan UMKM		persen	100	2	11.040.000											Kecamatan Dlingo
2.11 - 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Cakupan pengembangan UMKM		persen	100		3.850.000											kecamatan Pundong
2.11 - 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Cakupan pengembangan UMKM		persen	100		15.400.000											kecamatan Srandakan
2.11 - 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Cakupan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Jumlah Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM		0	95	9.750.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
2.11 - 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT dibagi jumlah Koperasi aktif x100		0	70	789.989.000	74.8	1.655.440.000	80	684.250.000	85	1.009.207.800	90	1.054.399.504	95	1.107.119.479	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
							0		0		0							
		Cakupan peningkatan koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah koperasi x100		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
2.12	**Penanaman Modal**														-		-	
2.12 - 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor yang berinvestasi	Jumlah investor yang menanamkan modal di tahun n	invsetor	8	8	852.020.000	8	494.189.200	9	333.225.000	10	479.600.000	11	501.076.193	12	526.130.002	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.12 - 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan pemberdayaan kerjasama dengan BUKP	Jumlah pemberdayaan kerjasama dengan BUKP	BUKP	17	17	200.092.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Perekonomian
2.12 - 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi tahun sekarang dikurangi realisasi investasi tahun lalu dibagi jumlah realisasi investasi tahun lalu kali 100		843	8,45	227.610.000	8,5	148.771.000	8,75	137.875.000	9	140.550.000	9,25	146.843.742	9,5	154.185.930	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.12 - 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Jumlah jenis izin yang dilayani dalam aplikasi SIM / Jumlah jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan x100		100	-	-	100	216.350.000	100	324.075.355	100	105.400.000	100	110.119.747	100	115.625.734	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.12 - 31	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Cakupan penetapan pelayanan perizinan	Jumlah izin yang ditetapkan / Jumlah pemohon x100		100	100	970.499.934	100	851.135.000	100	806.586.000	100	532.197.575	100	556.029.055	100	583.830.508	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah permohonan izin yang dilayani / Jumlah pemohon x100		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		Cakupan penyelesaian permasalahan perizinan	Jumlah permasalahan perizinan yang terselesaikan / Jumlah seluruh permasalahan perizinan x100		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		Jumlah keluhan pelayanan permohonan izin	Jumlah pengaduan terhadap pelayanan CS	orang	-	-		-		-		-		-		-		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		Persentase penyelesaian pelayanan perizinan sesuai SOP	Hasil Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		77	78		78,5		79		79,5		80		80,5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.12 - 31	Program peningkatan pengelolaan perijinan/penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Jumlah program peningkatan pengelolaan perijinan/penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Jumlah program		0	1	12.825.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**														-		-	
2.13 - 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelajar	Jumlah event / kegiatan pemuda pelajar	kegiatan	2	3	295.035.000	3	364.860.000	3	793.000.000	3	837.540.000	3	875.044.526	3	918.796.752	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.13 - 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peran serta pemuda dalam kegiatan Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengiuti kegiatan kepemudaan	orang	500	500	792.910.000	500	1.478.610.000	500	2.612.698.500	500	2.071.557.000	500	2.164.320.047	500	2.272.536.050	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.13 - 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengiuti kegiatan kepemudaan	orang	20	25	19.625.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
2.13 - 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan peningkatan peran kepemudaan		persen	100		4.380.000											Kecamatan Srandakan
2.13 - 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	orang	50	60	65.920.000	60	72.250.000	60	85.695.000	60	74.410.000	60	77.742.034	60	81.629.136	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.13 - 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan cabor yang difasilitasi dan di berdayakan	Jumlah cabor yang difasilitasi dan di berdayakan	cabang olahraga	34	36	295.000.000	36	78.000.000	36	73.550.000	36	78.506.780	36	82.022.265	36	86.123.379	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.13 - 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan cabang olah raga yang ikut kompetisi	Jumlah cabang olah raga yang ikut kompetisi	cabang olahraga	22	23	2.324.092.000	23	11.368.065.000	23	8.402.828.100	23	8.612.319.549	23	8.997.973.916	23	9.447.872.612	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.13 - 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Kegiatan Senam Bersama yg diselenggarakan dan lomba- lomba olahraga yang difasilitasi	Jumlah Kegiatan	kali	0	12	13.125.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
2.13 - 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Kegiatan Senam Bersama yg diselenggarakan dan lomba- lomba olahraga yang difasilitasi	Jumlah Kegiatan	kali	0	0	16.370.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
2.13 - 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rasio sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabang olahraga	Perbandingan sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibagi jumlah cabang olahraga	Angka	01.40	01.40	2.500.875.000	01.40	8.440.146.636	02.40	3.147.256.700	02.40	5.802.236.974	02.40	6.062.057.574	02.40	6.365.160.452	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.13 - 21	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan Koordinasi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah koordinasi pembinaan olahraga		0	90	17.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
2.13 - 21	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan Koordinasi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah koordinasi pembinaan olahraga		0	90	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
2.13 - 21	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Cakupan pelayanan keolahragaan		persen	100	4	10.060.000											Kecamatan Dlingo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.13 - 21	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Cakupan pelayanan keolahragaan		persen	100		3.637.500											Kecamatan Pundong
2.13 - 21	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Cakupan pelayanan keolahragaan		persen	100		14.620.000											Kecamatan Srandakan
2.13 - 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Cakupan Koordinasi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah koordinasi pembinaan olahraga		0	90	8.280.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
2.14	**Statistik**														-		-	
2.14 - 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan updating dan validasi data monografi kecamatan, batas wilayah, toponimi	Jumlah dokumen data monografi, batas wilayah dan toponimi yang tervalidasi dibagi jumlah target seluruh dokumen data monografi, batas wilayah dan toponimi x100		0	54	108.359.150	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Pemerintahan
	Program perencanaan pembangunan daerah	Dokumen Rencana kerja	Jumlah dokumen	dokumen	NA	NA	0	1	2.280.000	0	0	0	0	0	-	0	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Penyajian Data Statistik Daerah	Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data statistik daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	200.935.000	7	221.028.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14 - 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan updating dan validasi data monografi kecamatan, batas wilayah, toponimi	Jumlah dokumen data monografi, batas wilayah dan toponimi yang tervalidasi dibagi jumlah target seluruh dokumen data monografi, batas wilayah dan toponimi x100	dokumen		1	498.334.400											Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
2.14 - 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah data statistik yang digunakan dibagi jumlah statistik yang ada dikali 100 persen		0	100	4.575.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
2.14 - 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah data statistik yang digunakan dibagi jumlah statistik yang ada dikali 100 persen		0	100	2.407.500	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
2.14 - 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah data statistik yang digunakan dibagi jumlah statistik yang ada dikali 100 persen	Buah	0	2	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
2.14 - 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah data statistik yang digunakan dibagi jumlah statistik yang ada dikali 100 persen		0	100	3.730.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
2.14 - 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah data statistik yang digunakan dibagi jumlah statistik yang ada dikali 100 persen				840.000											Kecamatan Sedayu
2.14 - 15	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah					3	1.110.000											Kecamatan Dlingo
2.14 - 15	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan informasi pembangunan kecamatan		persen	100		2.380.000											Kecamatan Srandakan
2.14 - 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan informasi pembangunan kecamatan		persen	100		560.000											Kecamatan Pundong
2.14 - 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah data statistik yang digunakan dibagi jumlah statistik yang ada dikali 100 persen		0	100	3.690.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
2.15	**Persandian**														-		-	
2.15 - 01	Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani-	Jumlah gangguan kemanan informasi yang tertangani dibagi jumlah semua gangguan keamnan informasi X100	-	-	-	-	-	-	-	-	85	709.133.577	86	740.888.142	87	777.932.549	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16	**Kebudayaan**														-		-	
2.16 - 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan peristiwa seni budaya.	Jumlah pertunjukan dan festival seni budaya yang diselenggaran.	Kali	273	350	3.166.500.000	450	11.592.000.000	19	905.000.000	236	4.669.190.000	250	4.878.273.454	300	5.122.187.126	Dinas Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.16 - 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan peningkatan peristiwa seni budaya.	Jumlah pertunjukan dan festival seni budaya	Kali	2	2	11.252.500	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
2.16 - 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan peningkatan peristiwa seni budaya.	Jumlah pertunjukan dan festival seni budaya	Kali	2	2	20.160.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
2.16 - 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan pengelolaan keragaman budaya		persen	100		6.695.000											Kecamatan Pundong
2.16 - 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan pengelolaan keragaman budaya		persen	100		8.400.000											Kecamatan Srandakan
2.16 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah macam kegiatan kesenian budaya	Kali	0	2	15.980.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
2.16 - 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan jumlah peristiwa budaya	Jumlah peristiwa budaya	Dok	0	-	-	2	94.000.000	.	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan
2.16 - 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah macam kegiatan kesenian budaya	Kegiatan			9.300.000											Kecamatan Sedayu
2.16 - 17	Program Pengelolaan keragaman budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya		persen	100	2	36.890.000											Kacamatan Dlingo
2.16 - 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah macam kegiatan kesenian budaya	Kegiatan	0	3	22.475.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
2.16 - 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah macam kegiatan kesenian budaya daerah yg dilestarikan : Mocopatan, Kirab Hari Jadi, Kirab Siwur	Jumlah macam kegiatan kesenian budaya	Kegiatan	0	3	29.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
2.16 - 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Peningkatan kerjasama pengelolaan kebudayaan daerah	Jumlah kerjasama kebudayaan yang diselenggarakan	Angka	0	-	-	-	-	1	65.000.000	1	47.900.000	1	50.044.933	1	52.547.179	Dinas Kebudayaan
2.16 - 20	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pelestarian warisan budaya tak benda	Angka	0	-	-	-	-	4	210.000.000	5	287.170.000	6	300.029.296	7	315.030.761	Dinas Kebudayaan
2.16 - 21	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dibagi Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah kali 100	Angka	0	-	-	-	-	200%	225.000.000	300%	703.125.000	400%	734.610.505	500%	771.341.030	Dinas Kebudayaan
2.17	**Perpustakaan**														-		-	
2.17 - 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	Jumlah perpustakaan sekolah dan desa yang telah terakreditasi Nasional	Angka	2	2	1.126.477.170	2	691,706,890	4	1,617,628,500	6	1.888.992.601	8	1.973.580.527	10	2.072.259.553	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 - 16	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	Hasil survey kepuasan pemustaka/masyar akat	Nilai	-	-	-	84	178,920,060	81	427,785,000	82,5	471.770.000	83	492.895.570	90	517.540.349	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18	**Kearsipan**														-		-	
2.18 - 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	Jumlah OPD dan Desa dengan pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kondisi antara daftar arsip dengan penyimpanan fisik arsip sesuai	Angka	-	17	145.089.800	40	41.823.650	25	131.328.000	30	377.446.588	34	394.348.414	38	414.065.835	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 - 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Cakupan pemeliharaan jaringan aplikasi TNDE	Jumlah realisasi pemeliharaan jaringan aplikasi TNDE	aplikasi	0	1	22.395.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Umum
2.18 - 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Cakupan arsip statis yang diakuisisi	Jumlah arsip statis yang diakuisisi dibagi jumlah target arsip statis yang akan di akuisisi x100		-	20	249.669.300	26	299,056,480	20	715,860,000	22	950.233.286	24	992.784.148	26	1.042.423.355	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 - 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Cakupan pendataan dan penataan dokumen arsip	Jumlah dokumen arsip yang tertata/jumlah rencana dokumen arsip yang tertata x100	bulan	12	12	56.771.000	12	52.613.000	-	-	-	0	-	-	-	-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.18 - 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Cakupan volume arsip yang terdata	Jumlah realisasi volume arsip yang terdata	meter lari	0	20	15.370.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Umum
2.18 - 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan tentang Penatalaksanaan Kearsipan kecamatan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	4	700.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah atk arsip dan pelaksanaan rapat		paket	1	2	2.840.000											Kecamatan Dlingo
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Cakupan pmeliharaan arsip		persen	100	100	1.400.000											Kecamatan Sewon
2.18 - 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengguna arsip	Hasil survey Indeks Kepuasan Pelayanan Pengguna Arsip (OPD)	Angka	72	75	150.162.900	81,63	81.645.000	81	407.500.000	82,5	207.675.000	83	216.974.559	84	227.823.287	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3 URUSAN PILIHAN														-		-	
3.01	**Kelautan dan Perikanan**														-		-	
3.01 - 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Cakupan pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Kelompok	95	100	49.780.000		0		0		0		-		-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.01 - 16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Cakupan peningkatan luas Kawasan konservasi kelautan dan perikanan	Jumlah Luas Kawasan Konservasi Kelautan dan Perikanan	Hektar	7	7.45	274.901.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.01 - 19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Cakupan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat berwawasan maritim	Jumlah Kelompok Masyarakat Berwawasan Maritim	Kelompok	1	1	45.733.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.01 - 20	Program pengembangan budidaya perikanan	Cakupan produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11.365	11363,72	996.196.109	12027,22	2.970.017.869	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.01 - 20	Program pengembangan budidaya perikanan	Cakupan kajian perikanan budidaya	jumlah kajian perikanan budidaya	rekomendasi	1	1	14.480.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Perekonomian
3.01 - 20	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah kegiatan Gapokdakan yang difasilitasi	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	2	3.425.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
3.01 - 21	Program pengembangan perikanan tangkap	Cakupan produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	741	827,5	345.508.400	885,35	1.103.869.950		-	--	0	--	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.01 - 22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan peningkatan metode Penyuluhan	Jumlah pengembangan metode penyuluhan	Jenis	1	1	102.167.650	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.01 - 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Cakupan volume produk olahan ikan	Jumlah Volume Produk Olahan Ikan	Ton	0	129,1	725.892.680	263	46.615.000	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.01 - 24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Peningkatan Kawasan Khusus Perikanan	Jumlah kawasan khusus budidaya perikanan	Kawasan	1	1	48.060.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.01 - 26	Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Kelautan Perikanan	Persentase pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan kelautan dan perikanan	Jumlah sarana prasarana dan kelembagaan kelautan dan perikanan yang tersedia dibagi Jumlah sarana prasarana dan kelembagaan kelautan dan perikanan yang dibutuhkan x100		55	60	1.228.137.857	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
3.01 - 27	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Cakupan produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	741	-	-	-	-	773	2.413.174.850	792	2.325.667.600	812	2.429.809.563	833	2.551.300.042	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
			Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	11.365	-	-	-		12074		12312		12554		12801		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.02	**Pariwisata**														-		-	
3.02 - 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Cakupan Promosi Pariwisata	Jumlah promosi wisata / Jumlah promosi yang direncanakan x100		60	65	854.500.000	70	2.005.089.000	72	1.321.655.000	75	2.075.650.000	80	2.168.596.329	90	2.277.026.146	Dinas Pariwisata
3.02 - 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Cakupan pelayanan kepariwisataan		persen	100		2.222.500											Kecamatan Srandakan
3.02 - 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah penambahan sarpras destinasi wisata	obyek wisata	2	18	5.253.470.000	32	10.663.003.500	3	3.040.300.000	3	9.678.523.500	3	10.111.921.824	3	10.617.517.915	Dinas Pariwisata
3.02 - 17	Program pengembangan Kemitraan	Cakupan Mitra Pariwisata	Jumlah kemitraan pariwisata	Kemitraan	4	2	355.800.000	2	606.700.000	3	720.650.000	3	1.496.448.000	3	1.563.458.020	3	1.641.630.921	Dinas Pariwisata
3.03	**Pertanian**														-		-	
3.03 -	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Sarana kelembagaan		27 Kelompok	485.568.000	29	1560260399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.03 -	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Cakupan pelayanan peningkatan pertanian		persen	100	5	4435000											Kecamatan Imogiri
3.03 -	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Cakupan pelayanan peningkatan pertanian		persen	100	90	4350000											Kecamatan Kretek
3.03 -	Program Pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan	Tersedianya sarana kelembagaan			1 tahun	22.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.03 - 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rasio Revenue Cost Ratio	Jumlah pendapatan petani dibagi jumlah biaya petani	Angka	1	1.1	18.924.105.791	1.2	-	-	--	-	0	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.03 - 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan hasil penjualan produk hasil pertanian	(Hasil transaksi di Bantul Expo th n - hasil transaksi tahun n-1)/ hasil transaksi tahun n-1 x 100		7	8	59.375.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.03 - 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase Pembentukan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) baru	Jumlah UPJA baru yg terbentukpd th n /jumlah kelompok (calon UPJA) yang dilatih pd th n x100		18	20	1.087.458.559	-	-	-	-	-	0	-	-	--	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.03 - 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Angka Produktivitas Padi (GKG)	Jumlah produksi padi per luas panen	Kuintal/Ha	67	60,27	3.158.331.275	62.56	9.705.118.827	65.61	4.015.363.870	65.64	4.447.471.900	65.67	4.646.626.954	65.70	4.878.958.301	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka Produktivitas jagung (pipil kering)	Jumlah produksi jagung per luas panen	Kuintal/Ha	59	68,42		71.67		59.52		59.55		59.58		59.61		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka Produktivitas kedelai (wose)	Jumlah produksi kedelai per luas panen	Kuintal/Hektar	15	16,12		14.39		15.87		15.89		15.91		15.93		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka Produktivitas bawang merah	Jumlah produksi bawang merah per luas panen	Ton/Hektar	8	8.1		11.19		10.87		10.88		10.89		10.90		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka Produktivitas pisang	Jumlah produksi pisang per luas panen	ku/pohon	6	8		6.8		6.90		7.10		7.30		7.50		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka Produktivitas cabe merah	Jumlah produksi cabe merah per luas panen	Ton/Ha	2	3.6		1.55		2.92		2.95		2.98		3.01		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka Produktivitas Tembakau (rajang kering)	Jumlah produksi tembakau per luas panen	ku/ha (rajang kering)	5	5.95		7.36		7.40		7.45		7.50		7.55		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)	Jumlah produksi tebu per luas panen	ku/ha (hablur)	38	34.91		40.2		39.63		39.65		39.70		39.90		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka Produktivitas Kelapa (kopra)	Jumlah produksi kelapa per luas panen	ku/ha (kopra)	12	10.73		12.35		12.45		12.50		12.55		12.60		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Cakupan luas tanam kakao	Jumlah luas tanam	Ha	62	70		100		130		160		190		210		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
3.03 - 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Kelompok	25	28	17.185.000	30	184.522.900	32	462.294.500	34	598.230.000	36	625.018.371	38	656.269.290	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.03 - 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Cakupan PAD UPT RPH	Jumlah pendapatan dari pemotongan ternak di UPT RPH	Rupiah	80.000.000	66.827.500	643.393.500	72.740.000	962.681.950	-	667.625.000	-	948.374.761	-	990.842.399	-	1.040.384.519	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Cakupan pelayanan kesehatan ternak	Jumlah pelayanan kesehatan ternak	ekor	4.526	5500		4.960		6.200		6.400		6.600		6.800		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Cakupan PAD UPT Puskeswan	Jumlah pendapatan atas pelayanan kesehatan ternak di UPT Puskeswan	Rupiah	41.250.000	138.738.000		101.863.100		-		-		-		-		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	Jumlah kasus penyakit hewan menular	Kasus	0	0		0		0		0		0		0		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Persentase penurunan jumlah kasus Avian Influenza (AI) terlapor	Jumlah kasus AI tahun N dikurangi tahun N-1 dibagi tahun N-1 x100		5	5		-		-		-		-		-		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	Jumlah pengawasan pangan asal hewan yang dilaksanakan dibagi jumlah pangan hewan x 100 Persentase		32	30		35		-		-		-		-		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	Jumlah ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	ekor	3.245	3560		4500		4550		5000		5500		6000		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.03 - 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Angka produksi telur	Jumlah Produksi telur	Ton				7193	397.004.000	9181	502.641.000	9600	796.100.000	10200	831.748.868	10.700	873.336.311	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka produksi susu	Jumlah Produksi susu	Liter				1780		430000		480000		530000		580.000		
3.03 - 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Angka produksi telur	Jumlah Produksi telur	Ton	7.572	8072	1.129.342.500	-	877.534.100	-	181.223.750	-	278.403.750	-	290.870.499	-	305.414.023	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Angka produksi susu	Jumlah Produksi susu	Liter	304.662	365126		-		-		-		-		-		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
		Angka Populasi Ternak	Jumlah populasi ternak dihitung berdasarkan data Jumlah populasi ternak (sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras	Unit Ternak	114.582	133956		108875		-		-		-		-		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman	Jumlah pengawasan pangan asal hewan yang dilaksanakan		-	-	-	-	*	44		45	0	46		47		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.03 - 30	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Pengembangan Infrastruktur irigasi	Jumlah Pengembangan Infrastruktur irigasi	Unit	15	-		-		16		20		22		25		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air	Hektar	1.650	-	-	-	-	2000	3.044.755.750	2000	5.960.634.250	2000	6.227.547.782	3000	6.538.925.171	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	Jumlah penguatan kelembagaan petani pemakai air	Kelompok	5	-		-		10		10		10		10		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.05	**Energi dan Sumber Daya Mineral**														-		-	
3.05 - 18	Program Potensi Energi	Cakupan Pengembangan Potensi Energi	Jumlah energi yang dikembangkan dibagi jumlah potensi energi yang ada x100		0		0	20	60.000.000	40	127.343.500	60	103.815.000	80	108.463.772	100	113.886.960	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
3.06	**Perdagangan**														-		-	
3.06 - 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya)yang ditera/tera ulang	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dibagi dg potensi alat yang wajib ditera/tera ulang x100		N/A	-	-	10,56	1.578.454.040	7	2.430.450.000	7,5	1.707.720.760	8	1.784.191.444	8,5	1.873.401.017	Dinas Perdagangan
3.06 - 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor	Jumlah nilai ekspor	US$	66.626.177	7	-	79200365,6	1.406.401.550	75.180.000	1.724.005.000	76.722.600	1.472.510.000	80.653.182	1.538.448.091	82.998.905	1.615.370.496	Dinas Perdagangan
3.06 - 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan omset	Omset tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100		5,2	5,6	2.759.834.686	-	-	-	-	-	159.828.000	-	166.984.999	-	175.334.249	Dinas Perdagangan
3.06 - 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase deviasi harga komoditas strategis	Rata-rata harga komoditas strategis tahun n - rata-rata harga tahun n-1 / Rata-rata harga komoditas strategis tahun n-1 x100		-	-	-	3,96	205.091.100	5	369.000.000	≤ 5		≤ 5	-	≤ 5	-	Dinas Perdagangan
3.06 - 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Cakupan kawasan pedagang kaki lima	Jumlah kawasan yang tertata bagi pedagang kaki lima sampai dengan tahun n	kawasan	-	-	-	1	55.849.000	2	1.700.875.000	3	1.375.259.500	4	1.436.842.774	5	1.508.684.912	Dinas Perdagangan
3.06 - 20	Program Pemberdayaan Pedagang	Peningkatan kualitas SDM pedagang	Jumlah pedagang yang dilatih dibagi jumlah total pedagang dikali 100		20	56,4	158.600.000	-	-	-	-	-	921.446.071	-	962.707.859	-	1.010.843.252	Dinas Perdagangan
3.06 - 20		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Jumlah omset pedagang pasar rakyat tahun n â€" jumlah omset pasar tahun n-1 / jumlah omset pedagang tahun n-1 x100		-	-	-	3,5	875.195.000	4.4	1.098.125.000	4,6		4,8		5		Dinas Perdagangan
3.06 - 20	Program Pemberdayaan Pedagang	Jumlah pedagang	Jumlah pedagang	Orang	0	20	6.948.780	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
3.06 - 22	Program Penataan Pasar Rakyat	Persentase kondisi pasar rakyat baik	Jumlah pasar dengan kondisi baik dibagi total jumlah pasar rakyat x100		-	-	-	-	-	69.70	9.159.665.629	7273,00%	7.035.291.161	7576,00%	7.350.327.168	7879,00%	7.717.843.526	Dinas Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
3.06 - 23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai PAD	Jumlah PAD	Rupiah	3.690.777.725	2.893.491.150	28.414.000	2.725.000.000	10.764.000	-	-	-	0	--	-	-	-	Dinas Perdagangan
3.06 - 21	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Cakupan Penyampaian Informasi kepada Masyarakat yang berkaitan dengan perdagangan	Jumlah informasi yang disampaikan dibagi jumlah jenis informasi perdagangan dikali 100	Persen	100	100	29.600.000	100	71.400.000	--	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Perdagangan
3.06 - 24	Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pembebasan tanah pasar dari status tanah kas desa menjadi tanah milik pemda	Jumlah lokasi pasar yang tanahanya menjadi milik pemda	Lokasi	2	2	3,970,000,000	2	3.987.450.000	--	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Perdagangan
3.06 - 25	Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	cakupan jumlah kondisi pasar baik	Jumlah pasar yang direhab/yang dibangun dibagi jumlah total pasar dikali 100	Persen	43,75	56,25	1.033.325.000	66,67	8.606.475.000	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Perdagangan
3.07	**Perindustrian**														-		-	
3.07 - 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Cakupan usaha yang terstandarisasi	Jumlah unit usaha IKM yang memiliki standarisasi	unit usaha	0	10	165.840.000	10	159.150.000	10	585.700.000	20	282.985.000	30	295.656.894	50	310.439.739	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
3.07 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Nilai produksi	Jumlah Nilai Produksi tahun N dikurangi nilai produksi tahun N-1 dibagi nilai Produksi tahun N-1 x100		2	3	7.222.089.102	3,53	7.098.585.000	04.48	2.257.075.000	5	1.056.275.000,00	6	1.103.574.344	7	1.158.753.061	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		Persentase IKM Non Sentra yang dikembangkan	Jumlah IKM Non sentra yang dikembangkan dibagi jumlah IKM Non Sentra yang ada x100		4	-	-	3,53	7.098.585.000	4.48	2.257.075.000	5		6		7		
3.07 - 18	Program penataan struktur industri	Cakupan kerjasama pemenuhan bahan baku industri	Jumlah kerjasama pemenuhan bahan baku industri antar pelaku usaha industri	Industri Kecil Menengah	0	1	88.430.000	2	26.868.000	2	2.499.053.000	2	317.345.000	2	331.555.514	2	348.133.289	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
3.07 - 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase Pengembangan Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri yang dikembangkan dibagi jumlah sentra industri yang ada x100		0	5	449.008.600	8	650.000.000	20	850.000.000	30	938.600.000	50	980.629.930	80	1.029.661.427	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
3.08	**Transmigrasi**														-		-	
3.08 - 18	Program Transmigrasi Umum	Persentase penempatan transmigrasi	Jumlah KK yang ditempatkan dibagi jumlah pendaftar x100		60	60	955.540.194	63	330.962.650	65	516.849.500	67	496.901.500	70	519.152.443	72	545.110.065	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN**														-		-	
4.01	**Administrasi Pemerintahan**														-		-	
4.01 - 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah raperda terbahas/target raperda x 100	Prosentase	94	94	8.543.901.775	94	12.929.090.296	80	20.988.685.000	80	20.705.453.983	80	21.632.631.465	80	22.714.263.039	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01 - 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase cakupan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan umum x100															Bagian Hukum dan Protokol
4.01 - 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase cakupan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan umum x100		0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Pemerintahan
4.01 - 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase cakupan dukungan pelayanan kedinasan kepda/wakepda	Jumlah realisasi kegiatan pelayanan kepda/wakepda dibagi jumlah target kegiatan kepda/wakepda dikali 100 Persentase		0	93,8	149.887.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.01 - 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase cakupan koodinasi dukungan pelayanan kedinasan kepda/wakepda	Jumlah realisasi kegiatan pelayanan kepda/wakepda dibagi jumlah target kegiatan kepda/wakepda dikali 100 Persentase	0	0	100	1.710.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
4.01 - 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Perda Prakarsa DPRD	Jumlah raperda prakarsa DPRD terbahas/target raperda prakarsa DPRD x100		100	100	1.757.422.387	100	2.673.856.850	-	-	-	0	-	-	-	-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01 - 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan	Realisasi perda yang ditetapkan dibagi target penyusunan Raperda x100															Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
4.01 - 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan	Realisasi perda yang ditetapkan dibagi target penyusunan Raperda x100		0	7000%	0	8000%	640.680.150	8500%	696.100.000	9000%	649.655.200	9500%	678.746.360	9500%	712.683.678	Bagian Hukum
4.01 - 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan rancangan produk hukum	jumlah rancangan produk hukum	Dokumen	3	3	140.210.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Bagian Administrasi Perekonomian
4.01 - 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan rancangan produk hukum	jumlah rancangan produk hukum	Dokumen	1	1	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
4.01 - 26	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan/ operasional penegakan perda	Cakupan rancangan produk hukum	jumlah rancangan produk hukum	Dokumen	0	1	5.104.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
4.01 - 36	Program pembinaan pemerintahan umum	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan		90	100	3.419.470.000	100	112.238.250	100	303.030.000	--	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Pemerintahan
4.01 - 38	Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah seluruh perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh perikatan kerjasama kali seratus persen		0	-	-	100	84.039.250	100	117.385.000	100	70.682.000	100	73.847.096	100	77.539.451	Bagian Administrasi Pemerintahan
4.07 - 39	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90Persentase	Jumlah OPD yang realisasi anggaran diatas 90 dibagi jumlah seluruh OPD x100		90	90	-	90	223,506,574	90	244,575,250	90	301.275.000	90	314.765.909	90	330.504.204	Bagian Administrasi Pembangunan
4.07 - 40	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD	Jumlah SOP yang disusun dibagi jumlah SOP yang seharusnya disusun x100		0	20	269.600.000	40	396,182,000	60	477,043,200	80	310.352.500	100	324.249.894	100	340.462.389	Bagian Organisasi
4.07 - 41	Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP	Jumlah acara kedinasan yang sesuai SOP dibagi jumlah seluruh acara kedinasan x100		0	-	-	100	566.950.000	100	561.613.000	100	596.658.000	100	623.375.978	100	654.544.777	Bagian Humas dan Protokol
4.07 - 42	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Data Pendukung LPPD tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah data yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan data kali serratus persen		90	3	-	3.05	-	3.10	-	3.15	736.496.200	3.20	769.476.046	3.25	807.949.849	Bagian Administrasi Pemerintahan
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat																	Bagian Organisasi
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Rata-rata Persentase Capaian kinerja aparatur/pegawai	Rata-rata jumlah poin pekerjaan pegawai dibagi dengan standar jumlah poin x100															Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Rata-rata Persentase Capaian kinerja aparatur/pegawai	Rata-rata jumlah poin pekerjaan pegawai dibagi dengan standar jumlah poin x100		NA	100	495.862.300	100	237,712,300	100	182,159,000	100	129.555.300	100	135.356.707	100	142.124.542	Bagian Organisasi
	Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Cakupan pengawasan pertambangan		persen	100	12	10.620.000											Kecamatan Kretek
4.07 - 29	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Cakupan Kelembagaan yg efektif dan efisien	Besaran kelembagaan yang dapat dibentuk sesuai dengan skor kelembagaan dalam PP 18 tahun 2016 dibagi dengan jumlah kelembagaan yang telah dibentuk x100		110	100	185.542.150	100	145,954,500	100	158,785,500	100	121.440.000	100	126.878.008	100	133.221.909	Bagian Organisasi
4.07 - 44	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah	Persentase penyusunan peraturan perundang undangan	Jumlah Perdes yg disusun tepat waktu dibagi jumlah desa		0	83	1.109.760.000	83	1.166.376.000	87	1.316.297.500	89	953.368.500	91	996.059.755	92	1.045.862.742	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	Pembinaan Pemerintah Desa	undangan desa(RKPDes APBDes) tepat waktu	dibagi jumlah desa dikali 100															Desa
4.07 - 49	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	Nilai kriteria pelaporan kinerja dari KemenPANRB	Nilai	1.106	11,06	-	11.2	719,094,045	12	774,832,500	12.5	0,00	13	-	13.5	-	Bagian Administrasi Pembangunan
4.07 - 50	Program Pengembangan Analisi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase dokumen analisis kajian bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen analisis kajian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah dokumen alisis kajian yang dihasilkan		0	3	1.116.486.058	4	6.240.685.000	4	7.527.975.625	4	8.459.500.889	4	8.838.312.131	4	9.280.227.737	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
4.07 - 45	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara e-tendering	Jumlah proses pengadaan yang mendapatkan pemenang lelang/ jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa yang memenuhi persyaratan x 100		N/A	-	-	100	859.072.500	100	906.290.000	100	1.205.535.000	100	1.259.518.115	100	1.322.494.021	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
4.07-45	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase peraturan daerah yang disusun	Jumlah peraturan daerah yang disusun dibagi jumlah peraturan daerah yang direncanakan sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah kali seratus persen		0	7000%	821.701.303	9000%	568.349.000	9500%	744.245.000	9500%		9500%	-	9500%	-	Bagian Hukum
4.07 - 46	Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan dokumen kajian bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti dibagi jumlah dokumen kajian yang dihasilkan	Angka	0	-	613.000.000	3	588.382.500	4	293.840.000	4	557.600.000	557.600.000	582.568.985	557.600.000	611.697.434	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
4.07 - 47	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh kajian x100		0	-	-	33	555.300.000	33	506.605.000	66	595.540.900	66	622.208.855	100	653.319.298	Bagian Administrasi Perekonomian
		BUMD yang sehat	Jumlah BUMD yang sehat / jumlah seluruh BUMD x 100		66.6	-		66.6		66.6								Bagian Administrasi Perekonomian
4.02	**Pengawasan**														-		-	
4.02 - 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Nilai PMPRB Online	Nilai PMPRB Online	Nilai	60	60	1.981.691.400	61	2.398.630.650	62	2.754.562.715	63	2.597.983.400	64	2.714.319.497	65	2.850.035.472	Inspektorat
		Persentase Jumlah OPD yang SPIP yang baik	Jumlah OPD yang nilai SPIP baik per jumlah seluruh OPD dikali 100		-	-		-		20		30		40		50		
		Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	Jumlah Kasus Pengaduan yang ditindak lanjuti per Jumlah Seluruh Kasus Pengaduan dikali 100		100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	Jumlah Temuan eksternal dan internal yg ditindaklanjuti per Jumlah Seluruh Temuan eksternal dan internal dikali 100		90	89.5		90		90.5		91		91.5		92		
4.02 - 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																	Bagian Administrasi Pemerintahan
4.02 - 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH																	Bagian Administrasi Pembangunan
4.02 - 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Cakupan peningkatan pelayanan pengawasan		persen	100		2.207.500											Kecamatan Srandakan
4.03	**Perencanaan**														-		-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.03 - 15	Program pengembangan data/informasi	Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	Jumlah data yang terisi dibagi seluruh kebutuhan data x100		80	80	150.185.000	90	423.415.000	90	366.510.000	95	252.870.000	100	264.193.363	100	277.403.031	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 - 15	Program pengembangan data/informasi	Tingkat Kualitas Pengelolaan Data	Jumlah Peningkatan Kualitas	Jenis	N/A	-	-	4	130.945.500	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
4.03 - 16	Program Kerjasama Pembangunan	Cakupan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	jumlah kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	dokumen kerjasama	24	24	38.725.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Perekonomian
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data statistik	Persentase data statistik daerah yang tersedia dibagi jumlah data yang harus tersedia			80	65.700.000											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan komunikasi media massa	Persentase informasi melalui media massa dibagi dengan jumlah informasi			90	30.600.000											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi			1	150.000.000											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 - 16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah	Kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah dibagi seluruh kerjasama x100		6.656	66,56	14.225.000	73,73	784.690.000	75,33	126.150.000	80	237.900.000	80	248.553.016	86,67	260.980.666	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah					2 dok	1.000.000											Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah																	Bagian Hukum dan Protokol
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah																	Bagian Humas dan Protokol
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah																	Bagian Administrasi Pembangunan
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah																	Bagian Hukum
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan dokumen renstra	Jumlah dokumen renstra		-	78	2.408.800	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran	tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran		100	100	1.550.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Administrasi Perekonomian
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	0		4.761.560	79	1.050.000	0	0	0	0	0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan dokumen renja	Jumlah dokumen renja	dokumen	0	2	38.250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Umum
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Jumlah Persentase capaian sasaran perangkat daerah dibagi jumlah sasaran perangkat daerah x100		94	94.05	1.365.496.000	94.20	1.358.403.180	94,35	2.324.349.500	94,5	1.800.105.000	94,75	1.880.712.594	94,9	1.974.748.223	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian Program Kegiatan Renstra dan Renja	Jumlah program di RENJA dibagi dengan jumlah jumlah program di RENSTRA x100		0	100	4.120.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah/Renstra	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Dokumen	0	6	3.995.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah/Renja	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Dokumen	0	6	2.574.500	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Dokumen	0	6	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Dokumen	6	6	11.425.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Dokumen	0	6	12.910.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Dokumen	0		1.075.000											Kecamatan Sedayu
4.03 - 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					1	19.580.000											Kecamatan Dlingo
4.03 - 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						7.950.000											Kecamatan Pundong
4.03 - 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						9.530.000											Kecamatan Srandakan
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Dokumen	0	6	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
4.03 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Renstra dan Renja	Dokumen	0	6	11.020.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
4.07 - 49	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	Nilai kriteria pelaporan kinerja dari KemenPANRB	0,00	Bagian Administrasi Pembangunan							12.05	748.409.000,00	13	781.922.294	13.05	821.018.409	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 - 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	Jumlah Persentase capaian sasaran bidang pembangunan ekonomi dibagi jumlah sasaran daerah x100		90	90.00	1.129.556.000	90.00	658.972.395	100	803.430.000	100	1.466.360.700	100	1.532.023.429	100	1.608.624.601	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 - 23	Program perencanaan	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	Jumlah Persentase capaian sasaran bidang pembangunan		90	90.00	861.122.000	90.00	1.076.597.350	100	1.132.739.500	100	858.840.000	100	897.298.326	100	942.163.243	Badan Perencanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
[illegible]	sosial dan budaya	[illegible] bidang sosial budaya	sosial budaya dibagi jumlah sasaran daerah x100		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pembangunan Daerah
4.03 - 24	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah Persentase capaian sasaran bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam dibagi jumlah sasaran daerah x100		90	90.00	51.273.000	90.00	438.876.200	100	767.400.000	100	739.025.000	100	772.118.085	100	810.723.989	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Perumahan	Tersedianya dokumen kajian kebijakan pengembangan perumahan	Persentase dokumen kebijakan pengembangan perumahan yang tersedia			100	160.415.000											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen mengenai rencana tata ruang	Persentase dokumen perencanaan tata ruang			100	542.345.000											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Lingkunga Sehat	Cakupan tatanan kabupaten sehat	Persentase tatanan kabupaten sehat yang dicapai			80	37.010.500											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 - 26	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	Jumlah OPD dengan hasil renja predikat tinggi dibagi seluruh OPD x100		91	91.00	67.500.000	92.00	145.586.000	93.00	193.120.000	93.50	156.445.000	94.00	163.450.511	94.50	171.623.036	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 - 27	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	Jumlah IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat dibagi jumlah IPTEKMAS yang ditemukan x100		75	75.00	64.750.000	78.00	123.873.350	78.00	212.900.000	78.00	207.720.000	78.50	217.021.574	78.50	227.872.652	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.04	**Keuangan**														-		-	
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	Tgl ditandangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD yg diatur dalam peraturan perundang-undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)	Angka	1	1	565.449.700	1	534.909.640	1	479.561.000	1		1		1		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam tahun n	Angka	2	2		2		2		2		2		2		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun n-1 dikurangi jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun x100		0	5		5		5		5		5		5		Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	Waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dibanding dengan waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dalam peraturan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)	Angka	1	1	372.899.700	1	315.938.426	1	373.416.000	1	10.175.952.370	1	10.631.625.253	1	11.163.206.515	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Cakupan penerapan keuangan berbasis akrual	(Jumlah SKPD yang menerapkan berbasis akrual dibagi dengan jumlah SKPD) x100		50	60		75		80		85		90		95		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	Jumlah transaksi yang dikoreksi	Angka	-	-	-	-		100		90		90		85		Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persntase Capaian Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PAD dibagi target PAD x100		0	100	2.486.246.869	100	2.842.334.912	100	3.311.731.685	100		100		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	Pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun n dikurangi pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun n-1 dibagi pendapatan pajak daerah tahun n-1 x100		0	8	1.135.933.276	9	1.091.228.700	9	2.415.541.200	9		9		9		Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	Jumlah SKPD dengan penyerapan anggaran belanja daerah diatas target Kabupaten dibagi Jumlah SKPD x100		0	53	209.619.622	25	165.357.550	30	187.740.000	35		40		50		Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan tertib pengelolaan keuangan daerah	Realisasi tertib laporan pengelolaan keuangan dibagi target tertib laporan pengelolaan keuangan x100		0	100	16.006.500	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Umum
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi tertib laporan pengelolaan keuangan dibagi target tertib laporan pengelolaan keuangan x100		0	95	4.275.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi tertib laporan pengelolaan keuangan dibagi target tertib laporan pengelolaan keuangan x100		95	95	795.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi tertib laporan pengelolaan keuangan dibagi target tertib laporan pengelolaan keuangan x100		0	95	5.232.500	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi tertib laporan pengelolaan keuangan dibagi target tertib laporan pengelolaan keuangan x100		0	95	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan		persen	100		1.050.000											Kecamatan Pundong
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan		persen	100	4												Kecamatan Imogiri
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan		persen	100		7.000.000											kecamatan Srandakan
4.04 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi tertib laporan pengelolaan keuangan dibagi target tertib laporan pengelolaan keuangan x100		12 paket	99.067.220												Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
4.04 - 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan OPD	Persentase Pemahaman Bendahara Tentang Prosedur dan Tatacara Pengelolaan Keuangan		--	80	7.210.750	80	126.365.100	-	-	-	0	-	-	-	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.04 - 18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/ADD	Jumlah Koordinasi / Sosialisasi/ Monitoring dan Pembinaan tentang Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	1	11.970.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
4.04 - 18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Koordinasi / Sosialisasi/ Monitoring dan Pembinaan tentang Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	1		0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
4.04 - 18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Koordinasi / Sosialisasi/ Monitoring dan Pembinaan tentang Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	1	8.760.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
4.04 - 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Koordinasi / Sosialisasi/ Monitoring dan Pembinaan tentang Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	1	5.880.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
4.04 - 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan peningkatan kemitraan kebangsaaan		persen	100		2.940.000											Kecamatan Pundong
4.04 - 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan desa		persen	100	2	12.406.000											Kecamatan Dlingo
4.04 - 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan desa		persen	100		3.740.000											Kecamatan Srandakan
4.04 - 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Koordinasi / Sosialisasi/ Monitoring dan Pembinaan tentang Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Kegiatan	Kegiatan														Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pengelolaan Barang Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tercatat dibagi Jumlah Keseluruhan Aset x100		98	100	6.920.000	100	70.115.000	-	-	-	0	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
4.04 - 30	Program Pengelolaan Barang Daerah	Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1	Selisih antara jumlah aset per 31 Desember dengan jumlah aset hasil audit BPK dibagi jumlah aset hasil audit BPK x100		90	99.94	609.454.161	100	557.433.430	100	862.589.030	100	837.615.959	100	875.123.886	100	918.880.080	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.05	**Kepegawaian dan Diklat**														-		-	
		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	Jumlah Kasus yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus yang masuk x 100		-	100		100		100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	Jumlah PNS yang tertib administrasi dan dokumen kepegawaian dibagi jumlah total aparatur dikali 100		-	-		-		81		82		83		84		
		Persentase pemenuhan kebutuhan ASN dalam jabatan	Jumlah Kebutuhan dibagi jumlah seluruh pegawai x 100		17	17		17.6		-		-		-		-		
		Persentase Penempatan ASN	Jumlah aparatur yang ditempatkan dalam jabatan dibagi jumlah		84	94		81.55		-		-		-		-		
		Persentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun	Jumlah usulan yang tepat watu dibagi jumlah usulan x 100		100	100		-		-		-		-		-		
		Peresentase keakuratan data ASN	Jumlah data yang update dibagi jumlah seluruh data		15	15		-		-		-		-		-		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.05 - 34	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	ASN	x 100				1,185,018,710		297,639,310		621,236,150		528.769.000		552.446.950		580.069.298	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase verifikasi pengusulan penghargaan ASN	Jumlah usulan yang diverifikasi dibagi jumlah usulan x 100		76	76		-		-		-		-		-		
		Persentase ketepatan waktu verifikasi usulan tambahan penghasilan	Jumlah usulan yang diverifikasi tepat waktu dibagi jumlah usulan x 100		0	98		-		-		-		-		-		
		Persentase permohonan ijin belajar dan tugas belajar sesuai kompetensi	Jumlah permohonan ijin belajar dan tugas belajar dibagi jumlah pegawai x 100		91	91		-		-		-		-		-		
		Persentase penilaian potensi dan kompetensi	Jumlah pegawai yang dinilai potensinya dibagi jumlah pegawai x 100		19	19		-		-		-		-		-		
		Prosentase penanganan disiplin pegawai	Jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang masuk x 100		100	100		-		-		-		-		-		
		Persentase ketepatan waktu verifikasi PAK	Jumlah usulan PAK yang diverifikasi dibagi jumlah usulan x 100		100	100		-		-		-		-		-		
4.05 - 36	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase penempatan aparatur dalam jabatan	Jumlah aparatur yang ditempatkan dalam jabatan sesuai dengan formasi dibagi jumlah aparatur x100		-	-	-	-	-	86	582,468,200	86	802.760.000	87	838.707.099	87	880.642.454	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4.07	**Fungsi Lainnya**														-		-	
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Cakupan sertifikasi pelayanan perizinan sesuai standar mutu	Sertifikasi ISO versi 9001	sertifikat	1	1	90.414.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	0	1	-	1	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Jumlah Rakor Muspika Kec.Imogiri	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan	0	4	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan			2.880.000											Kecamatan Sedayu
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan														Bagian Administrasi Pemerintahan
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan														Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan						5.025.000											Kecamatan Pundong
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan						3.075.000											Kecamatan Srandakan
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah rapat koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan	10	10	17.924.500	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah	Jumlah rapat koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan	20	20	32.797.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Kasihan
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah rapat koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan	0	7	7.360.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan	0	5	5.240.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Sanden
4.07 - 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah rapat koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan	0	10	17.633.400	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
	Program Peningkatan Kapsitas Kinerja Aparatur Pemerintahan, Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah rapat koordinasi	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan	0	0	17.105.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Piyungan
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Nilai Angka	70	70	18.999.000	90,06	33.499.000	95,09	22.400.000	90	15.270.000	90	15.953.781	90	16.751.470	Kecamatan Dlingo
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		0	0	0	79.99	23.600.000	85	49.900.000	88	13.350.000	89	13.947.805	90	14.645.195	Kecamatan Imogiri
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan masyarakat	Nilai IKM		70	70	12.743.700	75	23.090.000	80	37.765.000	83	39.075.000	85	40.824.754	87	42.865.992	Kecamatan Pandak
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		75	80	4.104.000	82	33.010.000	83	34.310.000	85	32.215.000	87	33.657.568	89	35.340.446	Kecamatan Sewon
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		78.03	78.03	0	93,18	3.500.000	97,58	16.000.000	98	8.100.000	98,00	8.462.713	98,00	8.885.849	Kecamatan Bantul
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		0	100	1.855.000	100	1.855.000	100	6.890.000	100	12.075.000	100	12.615.711	100	13.246.497	Kecamatan Pajangan
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Angka	0	0	0	80	15.615.000	85	25.300.000	90	20.272.000	93	21.179.768	95	22.238.756	Kecamatan Pundong
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		76	0	0	80	5.562.500	85	12.000.000	90	7.250.000	93	7.574.651	95	7.953.383	Kecamatan Bambanglipuro
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Angka	76	77,83	0	80,45	14.400.000	85	49.050.000	90	8.850.000	90	9.246.298	90	9.708.612	Kecamatan Banguntapan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	angka	0	0	0	95	44.739.753	95	39.060.000	95	61.000.000	96	63.731.542	96	66.918.120	Kecamatan Kasihan
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		0	100	46.080.000	100	40.000.000	100	50.500.000	100	37.700.000	100	39.388.183	100	41.357.592	Kecamatan Kretek
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Angkat	78	78	9.075.000	80	4.650.000	83	21.450.000	86	8.500.000	89	8.880.625	92	9.324.656	Kecamatan Piyungan
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Angka	75	82	14.000.000	82	6.020.000	85	51.900.000	87	17.800.000	89	18.597.073	90	19.526.927	Kecamatan Sedayu
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		75	82	22.493.524	82	23.600.000	85	30.300.000	87	22.500.000	89	23.507.536	90	24.682.913	Kecamatan Jetis
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		81,85	81,85	11.685.000	96,6	20.840.000	96,58	21.000.000	90	15.175.000	90	15.854.527	90	16.647.254	Kecamatan Pleret
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		0	75	0	78	5.000.000	80	16.000.000	83	13.773.750	85	14.390.530	87	15.110.057	Kecamatan Sanden
4.07 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		75	78	8.180.000	80	4.875.000	81	6.500.000	85	5.500.000	85	5.746.287	87	6.033.601	Kecamatan Srandakan
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		60	100	134.820.000	100	138.600.000	100	153.600.000	100	153.050.000	100	159.903.485	100	167.898.659	Kecamatan Kretek
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		85	80	49.592.500	85	111.437.500	90	109.920.000	95	227.275.000	100	237.452.235	100	249.324.846	Kecamatan Sewon
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		5	6	4.435.000	95	91.768.940	95	130.697.500	95	107.898.500	96	112.730.128	96	118.366.635	Kecamatan Kasihan
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		70	73	122.010.000	75	89.529.500	77	101.474.500	78	114.824.500	80	119.966.270	81	125.964.584	Kecamatan Pandak
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		0	0	0	85	116.037.500	90	128.490.000	93	131.900.000	94	137.806.401	95	144.696.721	Kecamatan Pundong
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		0	0	0	80	54.800.000	85	76.800.000	100	89.250.000	100	93.246.560	100	97.908.888	Kecamatan Imogiri
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		0	0	0	0	94.134.000	0	86.950.000	0	80.278.500	0	83.873.322	0	88.066.988	Kecamatan Bantul
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		0	0	0	85	137.200.000	87	217.600.000	90	119.012.500	95	124.341.806	98	130.558.897	Kecamatan Sanden
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		62	65	95.085.000	70	122.400.000	75	79.950.000	80	105.650.000	85	110.380.942	90	115.899.989	Kecamatan Jetis
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		0	0	0	90	161.300.000	90	118.655.000	95	92.631.000	100	96.778.959	100	101.617.907	Kecamatan Banguntapan
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		NA	NA	0	80	127.894.000	81	99.495.000	82	93.390.000	83	97.571.947	85	102.450.544	Kecamatan Dlingo
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		90	90	49.243.500	90	84.542.653	90	76.337.725	90	64.590.000	92	67.482.300	95	70.856.415	Kecamatan Srandakan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		0	70	8.500.000	75	34.740.000	80	59.550.000	85	44.900.000,00	90	46.910.594	95	49.256.124	Kecamatan Sedayu
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		80	80	0	85	107.515.000	90	194.490.000	93	121.475.000	94	126.914.576	95	133.260.305	Kecamatan Bambanglipuro
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		0	80	125.702.000	9 0	309.803.500	90	217.875.000	90	12.575.000	90	13.138.101	90	13.795.006	Kecamatan Pajangan
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		75	75	109.250.000	75	114.312.000	80	186.800.000	85	123.750.000	90	129.291.449	95	135.756.021	Kecamatan Pleret
4.07 - 37	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitasi sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi /jumlah fasilitasi sosial kemasyarakatan x100		78	78	183.881.513	82	106.340.000	85	120.900.000	90	132.550.000	95	138.485.507	100	145.409.783	Kecamatan Piyungan
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	173.775.000	100	181.556.538	100	190.634.364	Kecamatan Banguntapan
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan pelayanan pemerintahan umum kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		85	85	61.320.000	87	203.900.500	90	219.725.000	95	0	97	-	100	-	Kecamatan Jetis
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		70	80	92.842.500	78	232.835.000	79	161.692.500	80	0	82	-	85	-	Kecamatan Pandak
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		100	100	89.092.400	100	271.812.500	100	246.631.750	100	0	100	-	100	-	Kecamatan Srandakan
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		80	80	32.035.500	100	180.812.000	100	155.305.000	100	0	100	-	100	-	Kecamatan Sewon
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		100	0	0	100	184.377.500	100	185.700.000	100	0	100	-	100	-	Kecamatan Bantul

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		0	0	0	80	292.730.000	85	236.100.000	100	0	100	-	100	-	Kecamatan Imogiri
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		0	60	48.331.400	70	59.789.500	80	52.069.500	8 0	0	90	-	100	-	Kecamatan Pajangan
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah program prioritas yang diusulkan sesuai dengan prioritas program kabuapten di bagi jumlah program prioritas yang diusulkan x 100		0	0	0	95	248.680.260	95	178.360.000	95	0	96	-	96	-	Kecamatan Kasihan
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		0	75	0	80	180.116.300	85	194.100.000	90	0	100	-	100	-	Kecamatan Sanden
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah program prioritas yang diusulkan sesuai dengan prioritas program kabuapten di bagi jumlah program prioritas yang diusulkan x 100		0	100	67.920.000	100	205.314.500	100	124.375.000	100	0,00	100	-	100	-	Kecamatan Sedayu
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		0	100	74.784.000	100	256.619.000	100	283.426.000	100	0	100	-	100	-	Kecamatan Kretek
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		0	0	0	80	174.980.500	85	223.525.000	88	0	90	-	95	-	Kecamatan Pundong
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		75	75	0	100	84.690.000	100	93.159.000	100	0	100	-	100	-	Kecamatan Bambanglipuro
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		0	0	0	85	74.656.500	90	252.160.000	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		75	NA	0	85	200.401.000	90	135.510.000	95	0	100	-	100	-	Kecamatan Dlingo
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		0	76	101.802.000	80	237.396.500	85	229.500.000	90	0	95	-	100	-	Kecamatan Piyungan
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDEs,RKPDes,APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x100		90	90	235.578.500	100	255.985.000	90	250.550.000	95	0	100	-	100	-	Kecamatan Pleret
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	80	-	83	48.225.000	85	87.560.000	88	0	90	0	90	0	Kecamatan Banguntapan
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	-	-	85	20.970.000	90	14.000.000	95	0	100	0	100	0	Kecamatan Bantul
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	80	95.701.000	85	200.401.000	90	135.510.000	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Dlingo
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	80	187.000.000	80	208.300.500	85	164.200.000	88	0	90	0	90	0	Kecamatan Jetis
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	80	-	85	248.680.260	87	178.360.000	90	0	95	0	97	0	Kecamatan Kasihan
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	70	92.842.500	82	232.835.000	83	161.692.500	84	0	86	0	87	0	Kecamatan Pandak
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	76	101.802.000	80	237.396.500	85	229.500.000	90	0	95	0	100	0	Kecamatan Piyungan
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali		NA	67	2.940.000	80	113.350.500	90	128.490.000	93	0	94	0	95	0	Kecamatan Pundong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
		dengan protap	kecamatan kali seratus persen															
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	100	67.920.000	80	205.314.500	90	128.550.000	95	0	100	0	100	0	Kecamatan Sedayu
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	-	-	85	292.730.000	90	236.100.000	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Imogiri
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	-	-	80	187.931.500	85	146.277.000	90	0	100	0	100	0	Kecamatan Bambanglipuro
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	100	-	100	114.312.000	80	186.800.000	85	0	90	0	95	0	Kecamatan Pleret
4.07 - 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	75	2.394.000	80	2.850.000	85	5.250.000	88	0	90	0	95	0	Kecamatan Sewon
4.07 – 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	100	89.092.400	100	271.812.500	100	246.631.750	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Srandakan
4.07 – 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen		NA	80	126.794.000	80	256.619.000	85	251.590.000	90	0	95	0	95	0	Kecamatan Kretek
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	224.905.000	100	234.976.107	100	246.724.913	Kecamatan Pajangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	166.888.500	100	174.361.664	100	183.079.748	Kecamatan Sanden
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	135.950.000	100	142.037.757	100	149.139.645	Kecamatan Sedayu
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	242.400.000	100	253.254.523	100	265.917.249	Kecamatan Sewon
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	223.675.000	100	233.691.029	100	245.375.580	Kecamatan Srandakan
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	0	100	-	100	-	Kecamatan Banguntapan
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	207.100.000	100	216.373.811	100	227.192.501	Kecamatan Pundong
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	178.399.500	100	186.388.120	100	195.707.526	Kecamatan Bantul

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	212.970.000	100	222.506.665	100	233.631.999	Kecamatan Kretek
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	145.592.000	100	152.111.520	100	159.717.096	Kecamatan Bambanglipuro
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	177.800.000	100	185.761.775	100	195.049.863	Kecamatan Jetis
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	200.650.000	100	209.634.983	100	220.116.733	Kecamatan Imogiri
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	191.675.000	100	200.258.088	100	210.270.993	Kecamatan Pandak
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	130.995.000	100	136.860.875	100	143.703.919	Kecamatan Dlingo
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	134.400.000	100	140.418.349	100	147.439.267	Kecamatan Kasihan
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	192.035.000	100	200.634.209	100	210.665.920	Kecamatan Pleret

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.07-43	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa di Kecamatan x 100		0	0	0	0	0	0	0	95	200.780.000	100	209.770.805	100	220.259.345	Kecamatan Piyungan
4.07 – 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	0	0	82	36.250.000	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Imogiri
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	0	0	0	0	80	65.000.000	100	97.450.000	100	101.813.751	100	106.904.439	Kecamatan Imogiri
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		75	75	0	80	16.387.500	84	74.778.000	86	33.750.000	88	35.261.304	90	37.024.369	Kecamatan Bambanglipuro
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	0	0	0	0	84	22.000.000	95	20.000.000	96	20.895.588	96	21.940.367	Kecamatan Kasihan
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	0	0	90	22.287.700	90	70.685.000	90	70.170.000	90	73.312.169	90	76.977.778	Kecamatan Pajangan
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		93	93	20.295.000	100	18.715.000	100	25.550.000	100	40.320.000	100	42.125.505	100	44.231.780	Kecamatan Sewon
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	0	0	80	21.930.000	84	36.325.000	86	46.000.000	88	48.059.852	90	50.462.844	Kecamatan Pundong
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		70	75	53.006.400	80	32.525.000	83	69.980.000	85	84.800.000	87	88.597.292	88	93.027.156	Kecamatan Pandak
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	0	0	80	25.260.000	85	34.350.000	90	49.275.000	90	51.481.504	10 0	54.055.579	Kecamatan Bantul

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	80	2.880.000	82	7.200.000	85	49.000.000	87	11.000.000.00	90	11.492.573	100	12.067.202	Kecamatan Sedayu
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		82	82	72.510.500	82	77.140.000	84	54.222.050	86	53.151.000	88	55.531.069	90	58.307.623	Kecamatan Srandakan
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	100	84.121.000	100	40.770.000	100	34.500.000	100	33.850.000	100	35.365.782	100	37.134.071	Kecamatan Kretek
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	0	0	80	50.000.000	80	155.000.000	9 0	125.685.000	90	131.313.097	100	137.878.752	Kecamatan Sanden
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		80	80	66.655.000	82	53.140.000	85	131.958.000	88	123.250.000	90	128.769.059	100	135.207.512	Kecamatan Jetis
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	70	15.650.500	80	20.600.000	84	79.950.000	86	62.800.000	88	65.612.145	90	68.892.753	Kecamatan Pleret
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		75	75	14.400.000	80	30.090.000	85	52.700.000	90	58.025.000	95	60.623.324	100	63.654.490	Kecamatan Piyungan
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		NA	NA	0	80	68.673.500	85	64.857.500	95	53.500.000	100	55.895.697	100	58.690.482	Kecamatan Dlingo
4.07 - 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	0	0	85	0	90	45.155.000	95	53.395.000	100	55.785.995	100	58.575.295	Kecamatan Banguntapan
4.07 - 52	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	0	0	80	2.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pundong
4.07 - 52	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	0	0	80	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Imogiri
4.07 - 52	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		75	75	14.400.000	80	30.090.000	85	52.700.000	90	0	95	0	100	0	Kecamatan Piyungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.07 - 52	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100		0	0	0	95	9.075.000	0	0	0	0	0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
5	**PROGRAM/KEGIATAN PADA SETIAP OPD**														-		-	
1.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	0	80	1.314.342.640	83	2.441.327.469	81	3.016.123.012	84	5.269.886.991	82	5.505.869.286	85	5.781.162.750	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	84	83.5	2.599.365.000	84.0	3.489.683.000	84.25	3.905.867.400	84.35	5.162.091.160	84.55	5.393.246.424	84.75	5.662.908.745	Dinas Kesehatan
1.03 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	0	80	1.124.988.548	81	1.474.241.900	82	975.160.000	83	4.462.439.017	84	4.662.264.289	85	4.895.377.503	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.05 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	0	86	126.464.705	76.04	328.578.552	82	403.828.800	83	423.152.756	84	442.101.276	85	464.206.340	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	0	74.54	1.523.499.910	81	1.826.862.804	82	2.175.964.000	83	2.345.958.180	84	2.451.008.743	85	2.573.559.180	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	75	75	1.855.213.314	79	2.752.019.714	80	4.334.553.500	85	4.804.815.130	87	5.019.971.794	90	5.270.970.383	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	0	75	297.700.700	77	738.216.400	78	1.216.243.995	80	2.384.182.492	82	2.490.944.716	85	2.615.491.952	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	80	80	313.869.044	81	1.427.874.324	82	1.327.524.090	83	2.259.873.455	84	2.361.069.197	85	2.479.122.657	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.04 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	75	80	0	80	399,137,165.00	82	1,121,249,400.00	81	1.403.782.343	82	1.466.642.852	83	1.539.974.995	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.05 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	72	80	264.128.044	81	4.166.958.300	82	6.750.000.000	83	6.523.811.000	84	6.815.943.240	85	7.156.740.402	Dinas Lingkungan Hidup
2.06 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	75	80	435.734.896	81	682.065.050	82	1.246.600.000	83	3.195.853.750	84	3.338.962.113	85	3.505.910.219	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.08 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	80	80	0	81	1.134.830.300	82	2.076.921.300	83	2.315.687.700	84	2.419.382.770	85	2.540.351.908	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
2.09-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	80	80	768.707.083	81	1.418.978.500	82	1.248.364.900	83	2.010.092.700	84	2.100.103.414	85	2.205.108.584	Dinas Perhubungan
2.10-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	80	80	1.726.304.000	80	565.993.000	81	1.248.364.900	82	1.431.523.057	83	1.495.625.778	84	1.570.407.067	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	74	0	317.900.000	81	824.763.440	82	1.233.060.084	83	1.183.575.552	84	1.236.575.337	85	1.298.404.103	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
2.12 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	76	76,34	242.866.650	82	943.330.200	83	1.082.350.150	84	1.679.776.153	85	1.754.995.495	85	1.842.745.270	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.16 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	79	80	0	81	453.175.000	82	1.036.400.000	83	859.041.668	84	897.509.025	85	942.384.476	Dinas Kebudayaan
2.17 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	78	80	546.592.328	81	457.827.900	82	944.206.000	83	1.166.599.705	83	1.218.839.322	84	1.279.781.288	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	78	80	1.349.400.500	81	2.684.896.720	82	3.478.929.000	83	3.450.859.200	84	3.605.386.551	85	3.785.655.878	Dinas Pariwisata
3.03 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	90	91	0	92	1.516.291.775	93.5	1.592.106.364	95	3.146.164.270	96	3.287.047.569	97	3.451.399.948	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.06 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	77	0	0	77	3.996.198.894	82	6.389.715.712	83	8.485.014.279	84	8.864.967.995	85	9.308.216.395	Dinas Perdagangan
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	78	80	121.297.500	81	555.396.989	82	366.435.000	83	467.825.500	84	488.774.438	85	513.213.160	Bagian Administrasi Pemerintahan
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Presentase	78	80	70.330.000	81	330.529.000	82	329.722.500	83	376.839.700	84	393.714.350	85	413.400.067	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	72	82.7	155.887.839	80,97	550.878.228,00	82	523.360.000	83	402.768.200	84	420.803.912	85	441.844.108	Bagian Hukum
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	80	80	0	80.97	317.478.241	82	364,440,000	83	240.272.840	84	251.032.110	85	263.583.715	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	75	78	98.060.000	100	234.046.000	100	261.790.000	100	403.176.000	100	421.229.973	100	442.291.472	Bagian Administrasi Perekonomian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	0	0	0	78	313.210.000	78	478.710.000	78	555.684.000	78	580.567.187	78	609.595.547	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	76	78	231.693.900	81	587,578,385	82	376,920,570	82	404.018.800	82	422.110.513	82	443.216.039	Bagian Organisasi
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	75	80	3.911.056.360	82	4.625.727.708	83	4.473.174.925	85	4.517.097.500	87	4.719.370.345	89	4.955.338.862	Bagian Umum
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	76	80	195.650.000	100	382.580.400	100	491.524.000	100	481.256.710	100	502.807.089	100	527.947.444	Bagian Humas dan Protokol
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	75	80	0	78	263.124.100	82	313.146.000	83	350.837.042	84	366.547.309	85	384.874.674	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	73	80	1.277.390.534	81	1.322.603.066	82	3.387.201.000	83	2.931.420.500	84	3.062.687.705	85	3.215.822.091	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	74	76,6	183.881.513	81,25	390.207.400	82	282.193.000	83	398.910.200	84	416.773.153	85	437.611.811	Kecamatan Banguntapan
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	73.99	73.99	176.078.450	76	253.678.000	77	280.850.000	78	301.915.000	79	315.434.568	80	331.206.296	Kecamatan Piyungan
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Niilai Angka	73	75	163.816.450	76	205.802.500	77	300.081.600	78	308.876.000	79	322.707.277	80	338.842.641	Kecamatan Dlingo
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	0	70,13	183.001.563	79,09	178.122.974	77	235.500.000	78	274.160.000	79	286.436.716	80	300.758.552	Kecamatan Imogiri
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	70	80	116.705.660	81	138.297.000	82	190.482.000	83	262.322.000	84	274.068.618	85	287.772.049	Kecamatan Pandak
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	74	78	0	0	226.205.000	0	319.921.000	0	293.093.388	0	306.217.929	0	321.528.826	Kecamatan Bantul
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	65	75	163.300.000	76	164.900.000	77	140.700.000	78	311.930.000	79	325.898.033	80	342.192.935	Kecamatan Kretek
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	80	80	101.993.200	81	154.916.940	82	241.758.000	83	280.543.000	84	293.105.543	85	307.760.820	Kecamatan Bambanglipuro
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	75	78	207.205.544	78	326.519.111	79	303.812.500	80	327.970.000	80	342.656.295	80	359.789.109	Kecamatan Jetis
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka		80	100.896.332	81	127.700.121	82	273.565.000	83	319.816.575	84	334.137.764	85	350.844.653	Kecamatan Kasihan
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	0	87	159.530.500	94	96.421.000	77	226.348.000	78	253.010.000	85	264.339.632	90	277.556.614	Kecamatan Pleret
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	76	80	158.821.204	76	190.376.082	80	298.472.000	80	327.282.248	80	341.937.746	80	359.034.633	Kecamatan Pajangan
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	120.683.800	80	164.207.500	81	215.320.000	83	259.400.000	83	285.406.948	84	298.187.295	85	313.096.660	Kecamatan Sanden
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	0	80	215.546.780	82	333.228.869	83	468.524.500	85	477.000.000	87	498.359.766	89	523.277.755	Kecamatan Sedayu
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	80	80	86.526.571	81	282.993.500	82	331.480.000	83	308.889.600	84	322.721.486	85	338.857.560	Kecamatan Sewon
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	76	76	111.477.917	78,76	129.734.501	79	192.230.975	80	260.020.000	80	271.663.536	81	285.246.712	Kecamatan Srandakan
4.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	70	80	244.628.718	81	147.789.777	82	216.981.000	83	251.725.000	84	262.997.091	85	276.146.945	Kecamatan Pundong
4.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	73	73	902.763.750	74	727.242.250	75	799.956.475	76	776.726.500	77	811.507.834	78	852.083.226	Inspektorat
4.03 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	74	80,02	872.225.865	81,91	1.484.831.000	82	2.670.744.000	83	2.288.269.300	84	2.390.736.591	85	2.510.273.420	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.04 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	78	79,88	20.488.086.916	81	24.287.625.867	82	22.507.649.296	83	27.097.061.545	84	28.310.451.279	85	29.725.973.843	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.05-1	Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	78	79	437.260.466	81	1.049.843.939	81	1.797.674.235	81	1.384.013.771	81	1.445.989.056	81	1.518.288.508	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
1.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		78	92	833.587.100	95	1.049.841.947	98	1.673.176.536	100	1.048.772.100	100	1.095.735.469	100	1.150.522.242	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
1.02 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		90	90	2.061.466.500	92	2.901.087.650	94	2.193.042.500	96	1.675.723.500	98	1.750.761.367	100	1.838.299.435	Dinas Kesehatan
-1.02 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	-	-	72.10	593.641.000	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD Panembahan Senopati
1.03 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		80	92	7.556.311.510	94	11.993.619.312	96	3.312.300.000	98	3.471.500.000	100	3.626.951.633	100	3.808.299.214	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.05 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	92	63.725.355	95	259.431.095	98	58.350.000	100	384.800.000	100	402.031.107	100	422.132.662	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		90	90	566.592.680	90	634.148.472	93	1.232.133.000	95	1.116.125.000	98	1.166.104.390	100	1.224.409.610	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan sarana prasarana : sarana dan prasarana yang terpenuhi x 100		50	49	721.571.771	87	5.362.131.658	90	4.251.400.000	95	3.615.898.000	100	3.777.815.686	100	3.966.706.471	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kebutuhan sarana prasarana : sarana dan prasarana yang terpenuhi x 100		0	85	203.400.000	85	291.575.000	90	1.238.925.000	93	1.695.668.000	95	1.771.598.969	97	1.860.178.918	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		92	92	725.830.341	95	1.025.384.233	98	617.872.800	100	1.028.289.000	100	1.074.335.148	100	1.128.051.906	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.04 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	n/a	0	10000%	414,491,100.00	10000%	850,157,000.00	10000%	984.430.000	10000%	1.028.512.169	10000%	1.079.937.778	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.05 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		85	90	570.317.775	95	3.857.900.000	98	4.580.900.000	100	3.213.312.200	100	3.357.202.342	100	3.525.062.459	Dinas Lingkungan Hidup
2.06 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		90	92	623.669.596	95	2.060.050.000	98	1.634.785.000	100	1.101.690.000	100	1.151.023.000	100	1.208.574.150	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.08 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		92	92	0	95	1.646.150.000	98	2.089.017.500	100	2.117.832.500	100	2.212.667.736	100	2.323.301.122	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
2.09-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		74	92	634.346.107	95	1.464.618.500	98	3.410.774.000	100	2.559.712.500	100	2.674.334.850	100	2.808.051.592	Dinas Perhubungan
2.10-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		80	90	2.900.964.594	85	4.220.214.500	90	714.755.000	93	759.950.000	96	793.980.093	98	833.679.098	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	90	523.800.000	95	771.545.000	96	236.641.000	97	599.204.600	98	626.036.613	100	657.338.444	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
2.12 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	96	420.600.000	96	607.700.000	97	437.650.000	98	1.122.599.460	99	1.172.868.773	100	1.231.512.211	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.16 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		90	92	0	95	912.825.000	95	625.500.000	95	297.050.000	95	310.351.716	95	325.869.302	Dinas Kebudayaan
2.17 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		90	92	832.094.414	95	1.031.685.000	98	1.232.460.000	100	1.653.415.000	100	1.727.453.906	100	1.813.826.601	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.02 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		90	92	625.810.870	93	1.395.525.000	95	1.310.650.000	96	521.240.000	98	544.580.806	100	571.809.847	Dinas Pariwisata
3.03 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		85	86	0	90	1.547.520.500	92	1.624.896.525	94	529.575.000	96	553.289.042	98	580.953.495	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.06 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		90	-	0	95	1.252.032.276	98	994.150.000	100	1.092.122.940	100	1.141.027.533	100	1.198.078.910	Dinas Perdagangan
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	100	79.252.500	100	31.111.999	100	170.935.000	100	81.295.000	100	84.935.340	100	89.182.107	Bagian Administrasi Pemerintahan
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	90	86.500.000	99	130.589.000	99	68.000.000	100	52.500.000	100	54.850.918	100	57.593.464	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / jumlah sarpras aparatur ideal x 100		0	80	30.488.500	85	31.728.300,00	90	40.875.000,00	90	32.340.000	95	33.788.165	95	35.477.574	Bagian Hukum
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		92	92	0	95	269,396,497	95	156,145,000	97	115.145.000	100	120.301.122	100	126.316.178	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	90	66.178.000	100	63.140.000	100	76.340.000	100	63.924.000	100	66.786.477	100	70.125.801	Bagian Administrasi Perekonomian
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	0	0	100	179.850.000	100	316.050.000	100	472.890.000	100	494.065.723	100	518.769.009	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		90	100	34.203.750	100	37.420.000	100	56.000.000	100	52.200.000	100	54.537.484	100	57.264.358	Bagian Organisasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	99,48	3.318.194.667	84,1	4.038.768.946	100	4.643.581.000	100	3.467.070.000	100	3.622.323.260	100	3.803.439.423	Bagian Umum
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	100	98.731.575	100	90.024.600	100	93.977.000	100	109.000.000	100	113.880.953	100	119.575.001	Bagian Humas dan Protokol
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	90	0	70	532.252.000	100	218.840.000	100	184.996.000	100	193.280.007	100	202.944.007	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		92	92	1.374.586.122	95	1.550.712.410	98	2.105.890.000	100	1.826.931.400	100	1.908.740.263	100	2.004.177.277	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		90	90	101.802.000	95	157.577.500	98	220.700.000	100	221.250.000	100	231.157.439	100	242.715.311	Kecamatan Banguntapan
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		85	90	226.575.550	93	158.856.500	95	182.280.000	96	161.134.900	97	168.350.422	100	176.767.943	Kecamatan Dlingo
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	90	208.588.500	95	206.858.000	98	180.000.000	100	163.160.000	100	170.466.204	100	178.989.515	Kecamatan Imogiri
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	Jumlah Sarpras Aparatur/Sarpras aparatur Edial X 100		85	90	165.019.400	95	151.880.000	98	182.800.000	100	140.720.000	100	147.021.355	100	154.372.423	Kecamatan Pandak
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		85	90	0	95	110.250.000	100	162.950.000	100	182.797.524	100	190.983.085	100	200.532.239	Kecamatan Bantul
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	90	179.000.000	0	85.500.000	0	149.461.000	0	180.550.000	0	188.634.918	0	198.066.664	Kecamatan Kretek
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		90	90	190.476.000	89	156.301.000	90	212.250.000	92	226.735.000	93	236.888.054	95	248.732.456	Kecamatan Bambanglipuro
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		95	97	150.850.000	97	100.420.389	97	166.980.000	99	188.880.000	99	197.337.930	100	207.204.827	Kecamatan Jetis
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	92	172.140.000	93	218.179.860	98	227.730.000	100	225.882.000	100	235.996.857	96	247.796.700	Kecamatan Kasihan
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	100	236.117.200	99	87.515.000	98	164.200.000	100	180.720.000	100	188.812.530	100	198.253.157	Kecamatan Pleret
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	90	155.966.300	95	123.075.300	90	205.160.000	95	205.160.000	95	214.346.938	95	225.064.285	Kecamatan Pajangan
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		196.244.000	95	209.600.000	95	185.875.000	95	264.000.000	95	239.850.000	95	250.590.335	95	263.119.852	Kecamatan Sanden
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	89	219.029.000	90	201.963.280	93	127.500.000	95	147.100.000	97	153.687.047	100	161.371.400	Kecamatan Sedayu
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		80	80	153.159.000	95	178.419.800	98	331.480.000	100	153.605.400	100	160.483.755	100	168.507.943	Kecamatan Sewon
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		95	95	191.013.211	95	221.284.809	98	230.026.158	100	234.720.100	100	245.230.722	100	257.492.258	Kecamatan Srandakan
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	90	186.876.500	89	171.797.300	90	201.166.400	92	179.553.000	93	187.593.273	95	196.972.936	Kecamatan Pundong
4.01 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		77	77	149.227.750	80	95.898.591	85	125.095.000	90	131.700.000	95	137.597.445	100	144.477.317	Kecamatan Piyungan
4.02 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		90	1	381.200.000	2	225.550.000	3	248.105.000	4	218.500.000	5	228.284.295	6	239.698.510	Inspektorat
4.03 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		90	90	590.967.220	95	1.173.125.000	95	1.513.650.000	95	839.650.000	100	877.249.010	100	921.111.461	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100			184 stell	179.741.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.04 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	90	2.237.246.307	95	7.601.860.578	98	2.721.222.865	100	5.698.983.000	100	5.954.179.950	100	6.251.888.948	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.05 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur / Jumlah sarpras aparatur ideal x100		0	90	177.566.414	90	5.506.735.000	90	523.988.000	95	838.211.000	95	875.745.573	95	919.532.851	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2.09 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	Jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai		0	0	167.804.000	0	278.850.000	0	226.650.000	0		0	-	0	-	Dinas Perhubungan
2.09 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	Jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai			184 stell	179.741.000											Kecamatan Sedayu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.09 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	Jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai		0	0	109.240.000	0	50.445.000	0	89.375.000	0	127.750.000	0	133.470.566	0	140.144.095	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	Jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai		0	0	148.302.600	0	321.437.850	0	259.800.000	0	85.000.000	0	88.806.248	0	93.246.560	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.03-6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	Jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai		0	0	14.400.000	0	5.000.000	0	0	0		0	-	0	-	Kecamatan Banguntapan
2.05 - 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		0	90	0	70	52.385.000	0	0	0		0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
1.01 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		0	100	346.928.000	100	599.439.000	100	921.619.150	100	916.357.500	100	957.391.425	100	1.005.260.996	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.02 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		70	70	17.615.750	75	239.288.800	80	225.300.000	85	171.200.000	90	178.866.231	95	187.809.542	Dinas Kesehatan
1.02 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	Kecamatan Bantul
1.05 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		100	100	9.900.000	100	188.666.000	100	180.000.000	100	156.772.000	100	163.792.154	100	171.981.761	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		100	100	17.042.500	100	107.520.000	100	205.000.000	100	368.500.000	100	385.001.203	100	404.251.263	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		0	80	0	85	17.425.000	87	40.000.000	90	78.575.000	93	82.093.540	95	86.198.217	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.04 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		0	n/a	0	n/a	n/a	100	59,800,000.00	100		100	-	100	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
2.08 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		100	100	0	100	2.090.000	100	0	100		100	-	100	-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
2.09-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		0	78	41.610.000	100	171.800.000	100	311.400.000	100	236.700.000	100	247.299.280	100	259.664.244	Dinas Perhubungan
2.11 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		0	90	104.575.000	80	114.920.000	85	99.767.850	90	124.510.000	95	130.085.481	100	136.589.755	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
2.12 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		100	100	35.100.000	100	86.200.000	100	97.749.950	100	98.275.000	100	102.675.694	100	107.809.479	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.16 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		100	100	0	100	0	60	48.000.000	65	63.950.000	70	66.813.642	80	70.154.324	Dinas Kebudayaan
2.17 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		100	100	99.697.750	100	119.745.000	100	90.000.000	100	186.500.000	100	194.851.355	100	204.593.923	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.03 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		85	86	0	87	22.500.000	87.5	30.000.000	88	25.500.000	88.5	26.641.874	89	27.973.968	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.06 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		90	0	0	100	91.837.500	100	100.875.000	100	110.962.500	100	115.931.332	100	121.727.899	Dinas Perdagangan
4.01 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		100	100	426.646.842	100	633.951.528	100	141.000.000	100	135.000.000	100	141.045.217	100	148.097.478	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.01 - 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	0	-	Bagian Umum
4.01 - 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		0	100	19.600.000	100	137.500.000	100	93.977.000	100		100	-	100	-	Bagian Humas dan Protokol
4.01 - 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur		0	90	14.400.000	100	10.700.000	0	0	100		100	-	100	-	Kecamatan Banguntapan
4.01 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur		0	0	0	0	0	0	0	0		60	-	80	-	Kecamatan Piyungan
4.01 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur		0	90	0	-	0	-	0	100		100	-	100	-	Kecamatan Dlingo
4.01 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		0	90	0	0	0	0	0	100	11.154.000	100	11.653.469	100	12.236.143	Kecamatan Sanden
4.01 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		75	75	5.500.000	78	5.500.000	78	5.417.000	80	5.890.000	85	6.153.751	85	6.461.438	Kecamatan Srandakan
4.01 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur /Jumlah Pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang Idial X 100		70	70	8.675.000	75	60.875.000	77	10.875.000	78	11.850.000	80	12.380.636	81	12.999.667	Kecamatan Pandak
4.02 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		1	1	200.385.550	2	149.440.600	3	164.384.660	4	157.480.000	5	164.531.857	6	172.758.450	Inspektorat
4.03 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		80	90	27.150.000	25	205.000.000	40	433.000.000	50	420.400.000	60	439.225.253	80	461.186.516	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.04 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur / jumlah pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur yang ideal x100		0	100	6.780.000	100	8.990.000	100	18.687.500	100	135.706.250	100	141.783.092	100	148.872.247	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.05 - 33	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	Jumlah aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi dibagi jumlah total aparatur x100		0	7	3.203.134.886	8.93	2,530,134,886	9	4,893,003,000	9	8.867.267.000	10	9.264.337.757	10	9.727.554.645	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat dibagi jumlah pegawai x 100		7	7		0		0		0		0		0		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					90	7.275.000											Kecamatan Banguntapan
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					8	6.900.000											Kecamatan Imogiri
1.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	78	128.090.000	79	562.681.000	80	689.384.100	81	297.400.000	82	310.717.389	83	326.253.258	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.02 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	73	74	448.534.000	75	287.726.600	76	306.167.625	77	359.167.625	78	375.250.930	79	394.013.477	Dinas Kesehatan
1.03 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	78	78	0	79	0	80	65.000.000	81	16.650.000	82	17.395.577	83	18.265.356	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.05 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen laporan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	5	3.980.000	5	4.158.222	5	4.366.133	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	N/A	0	N/A	0	73	17.300.000	75	6.050.000	77	6.320.915	79	6.636.961	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	0	0	0	0	0	54.175.500	81	13.650.000	82	14.261.239	83	14.974.301	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	70	24.449.500	75	6.000.000	79	8.161.100	80	73.650.000	83	76.948.002	82	80.795.402	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	78	78	27.150.500	79	28.880.000	80	15.375.000	81	189.225.000	82	197.698.379	83	207.583.298	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.04 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	n/a	0	n/a	n/a	80	147.470.000	83	128.625.000	85	134.384.748	88	141.103.986	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.05 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	73	78	2.506.700	79	56.500.000	80	67.300.000	81	14.500.000	82	15.149.301	83	15.906.766	Dinas Lingkungan Hidup
2.06 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	70	78	99.153.000	79	99.550.500	80	147.615.500	81	179.873.000	82	187.927.602	83	197.323.982	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.08 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	78	78	0	79	16.750.000	80	51.425.000	81	127.500.000	82	133.209.372	83	139.869.840	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
2.09-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	78	78	5.270.600	79	26.100.000	80	25.000.000	81	23.226.000	82	24.266.046	83	25.479.348	Dinas Perhubungan
2.10-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	0	0	0	0	75	39.040.000	78	72.200.000	80	75.433.072	81	79.204.725	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	0	357.390.050	79	204.596.000	80	163.688.416	85	749.838.000	90	783.415.284	95	822.586.048	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
2.12 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	76,34	82.496.100	80	10.000.000	81	126.190.000	82	113.500.000	83	118.582.460	84	124.511.583	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2.16 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	7.787	78	0	79	30.500.000	80	170.000.000	81	96.612.000	82	100.938.226	83	105.985.137	Dinas Kebudayaan
2.17 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	78	5.301.500	79	0	80	15.000.000	81	36.054.396	82	37.668.890	83	39.552.334	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.02 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	7.787	0	0	78	6.350.000	80	8.000.000	81	3.250.000	82	3.395.533	83	3.565.310	Dinas Pariwisata
3.06 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	78	78,55	28.414.000	79	36.311.100	80	178.750.000	81	199.525.000	82	208.459.607	83	218.882.587	Dinas Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Capaian	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	75	80	2.794.200	82	176.566.975	83	92.835.000	85	90.409.500	87	94.457.982	89	99.180.881	Bagian Umum
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	78	1.915.000	100	0	100	0	100		100	-	100	-	Bagian Humas dan Protokol
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	78	78	54.825.000	79	42.224.000	80	68.980.000	81	58.840.000	82	61.474.819	83	64.548.560	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai hasil evaluasi kinerja	Angka	0	70,8	3.510.000	77,7	3.150.000	80	7.600.000	85	8.000.000	88	8.358.235	90	8.776.147	Kecamatan Banguntapan
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	73,75	74	1.200.000	75	14.400.000	76	12.425.000	77	11.375.000	78	11.884.365	79	12.478.584	Kecamatan Dlingo
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	84,87	5.400.000	75	3.160.000	76	5.000.000	84	5.000.000	85	5.223.897	86	5.485.092	Kecamatan Imogiri
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	70	74	2.210.000	75	5.210.000	76	5.210.000	77	5.210.000	78	5.443.301	79	5.715.466	Kecamatan Pandak
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	73	74	0	75	0	75	7.000.000	77	6.300.000	78	6.582.110	79	6.911.216	Kecamatan Bantul
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	69.74	10.000.000	75	10.000.000	76	10.000.000	77	10.000.000	78	10.447.794	79	10.970.184	Kecamatan Kretek
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	69.74	69.74	2.420.000	75	3.562.500	76	6.500.000	77	3.500.000	78	3.656.728	79	3.839.564	Kecamatan Bambanglipuro
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka nilai evaluasi Kinerja	Angka	80	80,5	4.187.500	81,67	3.000.000	82,25	60.000.000	85	5.400.000	85	5.641.809	87	5.923.899	Kecamatan Jetis
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	94	6.950.000	100	5.950.000	76	6.500.000	77	6.500.000	78	6.791.066	79	7.130.619	Kecamatan Pleret
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	75	855.000	0	1.567.500	90	4.800.000	95	3.230.000	95	3.374.637	95	3.543.369	Kecamatan Pajangan
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	4.300.000	65	3.365.000	66	12.000.000	68	6.000.000	69	5.300.000	70	5.537.331	80	5.814.197	Kecamatan Sanden
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	89	1.534.000	90	1.158.000	93	2.040.000	95	2.400.000	97	2.507.471	100	2.632.844	Kecamatan Sedayu
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	74	74	5.320.000	75	11.640.000	77	5.850.000	79	5.250.000	81	5.485.092	83	5.759.346	Kecamatan Piyungan
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	0	0	75	765.000	76	1.650.000	77	2.250.000	78	2.350.754	79	2.468.291	Kecamatan Sewon
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	74	74	7.476.000	0	0	76	5.500.000	77	4.680.000	78	4.889.568	79	5.134.046	Kecamatan Srandakan
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	74	0	0	75	600.000	76	1.000.000	77	450.000	78	470.151	79	493.658	Kecamatan Pundong
4.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	74	74	0	0	0	0	0	77	3.500.000	78	3.656.728	79	3.839.564	Kecamatan Kasihan
4.03 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	83	83.00	5.430.000	84.00	15.000.000	85.00	20.000.000	86.00	20.000.000	87.00	20.895.588	88.00	21.940.367	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.04 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Angka	0	75,92	11.532.937	79	7.826.475	80	156.215.880	81	301.515.880	82	315.017.575	83	330.768.454	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.05-6	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	69.1	78	3.486.500	78	9.930.000	78	10.950.000	79	11.500.000	79	12.014.963	79	12.615.711	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

BAB VIII.
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program pembangunan daerah secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolok ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam dokumen perubahan RPJMD ini berupa indikator kinerja yang terdiri dari **Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021** (Sasaran Daerah) dan **Indikator Kinerja Perangkat Daerah** (Sasaran PD) yang telah mengakomodir Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul. Penetapan indikator kinerja daerah yang merupakan ukuran

terhadap keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.1.
Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**											
A	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**											
1	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,1**	**5,06**	**5,1**	**5,4**	**5,45**	**5,5**	**5,6**	**5,6**	**IKU Bupati**	
2	**Pemerataan Pendapatan**	**Angka**	**0,3177**	**0,3967**	**0,41**	**0,3093**	**0,39**	**0,38**	**0,37**	**0,37**	**IKU Bupati**	
B	**Fokus Kesejahteraan Masyarakat**											
	Indeks Pembangunan Manusia	**Angka Indeks**	**77,99**	**78,42**	**78,67**	**79,32**	**79,83**	**80,34**	**80,85**	**80,85**	**IPM termasuk indikator tujuan**	
3	**Angka Kemiskinan**	**%**	**15,16**	**14,55**	**14,07**	**12,13**	**10,86**	**9,59**	**8,32**	**8,32**	**IKU Bupati**	
C	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**											
4	Cakupan Pelestarian adat dan tradisi	%	-	-	-	21	24	27	30	30		Dinas Kebudayaan
5	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	%	24	25	26	27	28	29	30	30		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
II	**Aspek Pelayanan Umum**											
A	**Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**											
	Urusan Pendidikan											
6	**Angka Harapan Lama sekolah**	**Tahun**	**15**	**13,55**	**14,73**	**15,4**	**15,23**	**15,38**	**15,54**	**15,54**	**IKU Bupati**	
7	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	%	24	25	26	27	28	29	30	30		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
8	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,74	8.79	8.84	8.89	8.94	8.99	9	9		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
9	Angka Partisipasi Kasar (APK)											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	- APK SD/MI	%	94,5	96,11	96,15	96,2	96,3	96,4	96,5	96,5		
	- APK SMP/MTs	%	91,5	95,1	95,15	95,2	95,25	95,3	96	96		
10	APK PAUD	%	98,78	98,7	98,75	98,8	98,85	98,9	98,95	98,95		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
11	APM SD/MI											Dinas Pendidikan,
	- APM SD/MI	%	83.02	84,09	84.2	84,45	84,55	84,65	84,75	84,75		

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	- APM SMP/MTs	%	67.64	67.64	67.7	67,9	68	68,2	68,22	68,22		Pemuda dan Olahraga
12	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	Angka (SD)	Ranking IV DIY	-	-	Ranking III DIY	Ranking II DIY	Ranking II DIY	Ranking I DIY	Ranking I DIY		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
13	Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Angka (SMP)	Ranking III DIY	-	-	Ranking II DIY	Ranking II DIY	Ranking I DIY	Ranking I DIY	Ranking I DIY		
14	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	Buah	5	-	-	5	6	7	8	26		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
15	Presentase Kelulusan											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	SD/MI	%	99.9	100	100	100	100	100	100	100		
	SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
16	Angka Melanjutkan											Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	90.13	100	100	100	100	100	100	100		
17	Angka Putus Sekolah											Dinas Pendidikan,
	SD/MI	%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	SMP/MTs	%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		Pemuda dan Olahraga
18	**Umur Harapan Hidup**	**Tahun**	**73,24**	**73,44**	**73,47**	**73,3**	**73,60**	**73,65**	**73,70**	**73,70**	**IKU Bupati**	
19	AKI	Per 100.000 KH	87.5	96,77	72,8	85	85	85	85	85		Dinas Kesehatan,
20	AKB	Per 1000 KH	8.35	7,65	8,74	8,2	8,2	8,0	8,0	8,0		Dinas Kesehatan,
21	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,38	0,40	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37		Dinas Kesehatan,
22	Prevalensi pemderita HIV	Angka	<0,5	<0,083	<0,09	<0,5	<0,2	0,5	<0,5	<0,15		Dinas Kesehatan
23	Angka Kesakitan/Insidence Rate (IR) DBD	Per 100.000 penduduk	150	237,75	57,98	130	120	110	100	100		Dinas Kesehatan
24	Net Death Rate (permil)	Per 1000 Pasien	18,98	18,69	16,98	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5		RSUD
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
25	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur**	**Klasifika-si**	**N/A**	**N/A**	**71,57**	**74**	**76**	**78**	**80**	**80**	**IKU Bupati**	
26	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	72,12	82,79	74,18	74,58	75,08	75,58	76,08	76,08		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												dan Kawasan Pemukiman
27	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	76	80	80	82	82	84	84	84		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
28	Persentase kecukupan air irigasi	%	78	81,12	81,16	81,66	82,16	82,66	83,16	83,16		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
29	Presentase penanganan banjir	%	13,52	20,30	24,90	27,34	34,12	40,90	47,68	47,68		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

-

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
30	**Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	%	**79**	**70**	**70,24**	**70,35**	**72,5**	**75**	**80**	**80**	**IKU Bupati**	
31	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Dokumen	-	-	2	2	3	4	4	4		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
32	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	%	70	-	71	72	75	77	80	80		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
33	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	%	42	50,13	79,69	80	90	100	100	100		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat											
34	**Angka Kriminalitas**	**Persen**	**0,04**	**0,061**	**0,074**	**0,035**	**0,070**	**0,065**	**0,06**	**0,06**	**IKU Bupati**	
35	Persentase Penegakan Perda	%	NA	57	60	63	66	69	72	72		Satuan Polisi Pamong Praja
36	Persentase Penyelesaian	%	NA	100	100	100	100	100	100	100		Satuan Polisi

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Pelanggaran Keamana, Ketentraman, dan Ketertiban (K3)											Pamong Praja
37	Jumlah intoleransi di masyarakat	Kasus	N/A	0	0	0	0	0	0	0		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
38	Persentase pemilih yang berpartisipasi	%	70,5	-	-	-	75	-	75	75		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
39	**Desa Tangguh Bencana**	**Desa**	**18**	**15**	**29,33**	**25,34**	**38,66**	**45,33**	**52**	**52**	**IKU Bupati**	
40	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	%	19	94	97	98	99	100	100	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
41	Persentase Relokasi Warga	%	-	9,09	27,28	45,46	63,64	81,82	100	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
42	Persentase Sekolah Siaga Bencana	%	2,99	2,69	3,19	3,7	4,2	4,7	5,2	5,2		Badan Penanggulangan Bencana

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												Daerah
	Urusan Sosial											
43	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	14	13.5	13.25	12.75	12.75	12.75	12.50	12.50		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
44	Persentase Penanganan NAPZA	%	3,8	4	5	-	-	-	-	-		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
B	**Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**											
	Urusan Tenaga Kerja											
45	Angka Pengangguran	%	4.1	3,0	3,1	2,2	3,0	2,9	2,8	2,8		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
46	Rasio kekerasan Perempuan dan Anak	Rasio	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Urusan Pangan											
47	Ketersediaan energi	kkal/kapita/hari	3.072	3.079	2.993	3.085	3.090	3.095	3.100	3.100		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
48	Ketersediaan protein	kkal/kapita/hari	77,80	75	78.36	72.4	72.6	72.8	73	78,36		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
49	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	93,1	92,60	90.80	93,40	93,50	93,60	93,70	93,16		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
50	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Kelompok	25	27	29	31	33	35	37	37		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Urusan Pertanahan											
51	Cakupan Sertifikasi Tanah	%	-	-	84	88	92	96	100	100		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Urusan Lingkungan Hidup											
52	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Angka**	**38**	**31,35**	**45,1**	**50**	**56**	**63**	**72**	**72**	**IKU Bupati**	
53	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	30,69	32	35	40	45	50	56	56		Dinas Lingkungan Hidup
54	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	46,47	55	60	65	70	80	90	90		Dinas Lingkungan Hidup
55	Indeks Tutupan Lahan	Angka	24,29	27,5	33,85	40,21	46,57	52,93	61,2	61,2		Dinas Lingkungan Hidup
56	Volume sampah yang tertangani	ribu m3	410	420	430	440	450	460	470	470		Dinas Lingkungan Hidup

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil											
57	Persentase cakupan kepemilikan KTP	%	96,22	100	100	-	-	-	-	-		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
58	Presentase cakupan kepemilikanakte kelahiran usia 0-18 tahun	%	79	80	85	-	-	-	-	-		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
59	Rata-rata Cakupan Kepemlikikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	-	-	-	87	89	91	92	92		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
60	Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	%	-	-	-	80	85	90	95	95		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
61	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	80,18	81	80,25	80,30	80,35	81	81		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
62	Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa Mandiri	12	14	16	18	20	22	24	24		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
63	Persentase Kategori Keluarga Kurang Sejahtera	%	13,9	13,49	13,2	12,9	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
64	Rata-rata Jumlah Jiwa dalam Keluarga (jiwa)	Jiwa	3,34	3,29	3,2	3,2	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat,

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												dan Desa
65	Total Fertility Rate (TFR)	%	-	-	-	-	2,08	2,07	2,06	2,06		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
	Urusan Perhubungan											
66	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	%	5	5	6	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83		Dinas Perhubungan
	Urusan Komunikasi dan Informatika											
67	Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan *Digital Government Services* (DGS)	%	60	60	70	75	80	85	90	90		Dinas Komunikasi dan Informatika
68	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	-	-	75	77	80	83	85	85		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
69	Cakupan Jumlah KUKM yang Naik Kelas	Unit	N/A	-	192	180	180	180	180	180		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
70	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Unit	-	-	180	180	180	180	180	180		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
71	Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	-	10	10	10	10	10	10	10		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Urusan Penanaman Modal											
72	Pertumbuhan Investasi	%	8,43	8:05	8:06	8:08	8:09	9	9:05	9:05		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												Terpadu
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga											
73	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	4	4	4	4	4	4	4	4		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Urusan Kebudayaan											
74	**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Angka**	**35**	**54,8**	**57,01**	**60**	**75**	**80**	**85**	**85**	**IKU Bupati**	
75	Jumlah desa budaya	Desa	6	9	10	12	14	16	18	18		Dinas Kebudayaan
76	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	Persen	-	-	-	21	24	27	30	30		Dinas Kebudayaan
	Urusan Perpustakaan											
77	Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	%	28	28,5	29	30	31	32	33	33		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Urusan Kearsipan											
78	Persentase SKPD yang menyelenggaraan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik	%	27	27	33	46	52	61	70	70		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**											
	Urusan Kelautan dan Perikanan											
79	**Pertumbuhan produksi perikanan**	**%**	**1,20**	**0,35**	**5,92**	**1,35**	**1,40**	**1,45**	**1,50**	**1,50**	**IKU Bupati**	
80	Produksi Perikanan	ton	12.106	12.191,22	12.912,57	13.022	13.198	13.383	13.577	13.577		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Urusan Pariwisata											
81	**Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan**	**%**	**4,85**	**12,03**	**21,59**	**7**	**22**	**23**	**24**	**24**	**IKU Bupati**	
82	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.500.114	2.800.800	3.405.685	3.644.083	4.445.781	5.468.311	6.780.706	6.780.706		Dinas Pariwisata
83	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,9	1,6	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,2		Dinas Pariwisata

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Urusan Pertanian											
84	**Pertumbuhan produksi tanaman pangan**	**%**	**0,1001**	**9,94**	**0,1133**	**0,1015**	**0,1020**	**0,1025**	**0,1030**	**0,1030**	**IKU Bupati**	
85	**Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura**	**%**	**0,75**	**14,09**	**7,94**	**1,05**	**1,08**	**1,10**	**1,125**	**1,125**	**IKU Bupati**	
86	**Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan**	**%**	**0,09**	**7,8**	**0,17**	**0,20**	**0,25**	**0,30**	**0,35**	**0,35**	**IKU Bupati**	
87	**Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)**	**%**	**0,45**	**4,24**	**20,52**	**0,70**	**0,80**	**0,90**	**1,00**	**1,00**	**IKU Bupati**	
88	Produksi Daging	ton	14.142,37	14.742,55	15.151,00	14.398,44	14.513,63	14.644,26	14.790,70	14.790,70		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
89	Produksi Tanaman pangan	ton	230.860	215.622,67	215.867,00	231.560,21	231.796,40	232.034,00	232.272,99	232.272,99		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
90	Produksi Tanaman Hortikultura	ton	6356,46	14.363,65	15.503,70	6553,93	6624,39	6697,25	6772,60	6772,60		Dinas Pertanian,

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												Pangan, Kelautan dan Perikanan
91	Produksi Tanaman Perkebunan	ton	14458,93	14.466,77	14.490,78	14.524,09	14.560,40	14.604,08	14.655,19	14.655,19		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral											
92	Cakupan Pengembangan Potensi Ketersediaan Energi	%	0	0	75	76	77	78	78	90		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Urusan Perdagangan											
93	Pertumbuhan Ekspor	%	7,04	7	7	7	7	7	7	7		Dinas Perdagangan
94	Jumlah Pasar Tipe A	Unit	0	1	1	1	2	3	4	4		Dinas Perdagangan
95	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori	%	7,04	7,63	4,61	4,76	5,33	5,62	5,95	6,95		Dinas Perdaganga

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Perdagangan											n
	Urusan Perindustrian											
96	**Cakupan Industri Kreatif**	%	**22**	**39**	**41,11**	**35**	**45**	**47**	**50**	**50**	**IKU Bupati**	
97	Pertumbuhan industri	%	1,56	2	3,4	1,7	3.4	3	4	2		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustri an
D	**Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**											
98	**Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)**	**Klasifikas i**	**N/A**	**7,45 (Baik)**	**75 (Baik)**	**70 (Baik)**	**7,5 (Baik)**	**8,0 (Baik)**	**8,5 (Sangat Baik)**	**8,5 (Sangat Baik)**	**IKU Bupati**	
	Fungsi Penunjang Perencanaan											
99	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	%	-	-	94,35	94,5	94,75	94,9	95	95		Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
100	Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja Program OPD	%	-	-	90	90,40	90,75	91,10	91,50	91,50		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Fungsi Penunjang Keuangan											
101	Opini Pemeriksaan BPK	Predikat	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)		Badan Keuangan dan Aset Daerah
102	Percepatan Belanja Pemerintah	%	51	48	60	65	68	70	75	75		Badan Keuangan dan Aset Daerah
103	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	20.21	21	22	23	24	25	26	26		Badan Keuangan dan Aset Daerah
104	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	%	16.18	17	17.5	18	19	20	21	21		Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan											
105	Presentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	%	84	84,00	89,00	90,00	90.50	91,00	91,30	91,30		Badan Kepegawaian, Pendidikan

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												dan Pelatihan
106	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	%	73	73,55	81,32	81,50	81,70	81,80	82,00	82,00		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Fungsi Penunjang Lainnya											
	Fungsi Penunjang Pengawasan											
107	Nilai Maturitas SPIP	Level	Level 1 (1,92)	Level 1 (1,92)	Level 2 (2,0)	Level 3(2,5)	Level 2 (3,1)	Level 3 (3,2)	Level 3 (3.3)	Level 3 (3.3)		Inspektorat
	Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan											
108	Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	Angka	57,3	65	70	72	70	71	73	73		SETDA
109	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78.13	79	80	81	82	83	84	84		SETDA
110	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,2 (Sangat Tinggi)	3,3 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,5 (Sangat Tinggi)	3,6 (Sangat Tinggi)	3,7 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)		SETDA
111	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	70,26(BB)	73,66 (BB)	77,90 (BB)	83 (A)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	82 (A)		SETDA
112	Persentase Belanja Pegawai	%	58.90	55	52	49	48	45	45	45		SETDA

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
113	Prosentase Raperda yang disetujui bersama	%	100	80	80	80	80	80	100	100		Sekretariat DPRD
	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum											
114	IKM Kecamatan	%	60	70	80	85	90	90	90	90		Kecamatan
115	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	%	80	80	85	90	95	100	100	100		Kecamatan
116	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	70	75	80	85	88	90	90	90		Kecamatan
117	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	60	70	80	85	90	100	100	100		Kecamatan
III	**Aspek Daya Saing**											
118	Nilai Tukar Petani	Angka	101,1	101,2	102,4	101,6	101,8	101,9	102	102		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
119	Persentase Layanan Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan SOP	%	56,88	75	-	-	-	-	-	-		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
												Terpadu
120	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	%	-	-	77	79	81	83	85	85		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
121	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	77	78	78,5	79	79,5	80	80,5	80,5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
122	Upah Mininum Kabupaten	Rp	1.163.800	1.297.700	1.404.760	1.527.150	1.578.389	1.679.093	1.773.479	1.773.479		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si

Tabel 8.2.
Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum Per Kecamatan Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Ketera-ngan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	IKM Kecamatan	Angka	76	77,83	80,45	85	90	90	90	90		Kecamatan Banguntapan
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	%	NA	90	100	90	95	100	100	100		Kecamatan Banguntapan
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	NA	80	83	85	88	90	90	90		Kecamatan Banguntapan
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	NA	75	95	85	90	100	100	100		Kecamatan Banguntapan
5	IKM Kecamatan	Angka	60	70	80	80	85	90	90	90		Kecamatan Kasihan
6	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	%	80	80	85	85	90	95	100	100		Kecamatan Kasihan
7	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	70	75	80	80	85	88	90	90		Kecamatan Kasihan
8	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	60	70	80	80	85	90	100	100		Kecamatan Kasihan

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Ketera-ngan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
9	IKM Kecamatan	Angka	60	80	80	85	90	90	90	90		Kecamatan Pajangan
10	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	%	80	75	85	90	95	100	100	100		Kecamatan Pajangan
11	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	70	75	80	85	88	90	90	90		Kecamatan Pajangan
12	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	60	60	80	85	90	100	100	100		Kecamatan Pajangan
13	IKM Kecamatan	Angka	NA	70	80	85	90	90	90	95		Kecamatan Pandak
14	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu.	%	NA	80	85	90	95	100	100	100		Kecamatan Pandak
15	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.	%	NA	75	80	85	88	90	90	95		Kecamatan Pandak
16	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.	%	NA	70	80	85	90	100	100	100		Kecamatan Pandak
17	IKM Kecamatan	%	60	70	80	85	90	90	90	90		Kecamatan Srandakan

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Ketera-ngan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
18	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu.	%	80	80	85	90	95	100	100	100		Kecamatan Srandakan
19	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.	%	70	75	80	85	88	90	90	90		Kecamatan Srandakan
20	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.	%	60	70	80	85	90	100	100	100		Kecamatan Srandakan
21	IKM Kecamatan	Angka	60	70	80	85	90	90	90	90		Kecamatan Bantul
22	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu.	%	80	80	85	90	95	100	100	100		Kecamatan Bantul
23	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.	%	70	75	80	85	88	90	90	90		Kecamatan Bantul
24	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.	%	60	70	80	85	90	100	100	100		Kecamatan Bantul
25	IKM Kecamatan	Angka	-	80	98	86	90	90	90	90		Kecamatan Jetis
26	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu.	%	-	100	100	90	84	95	96	96		Kecamatan Jetis

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Ketera-ngan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
27	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.	%	-	100	100	87	89	90	90	90		Kecamatan Jetis
28	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.	%	-	70	80	85	86	95	95	95		Kecamatan Jetis
29	IKM Kecamatan	Angka	NA	66.70	93.78	85	90	90	90	90		Kecamatan Piyungan
30	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	%	NA	67.20	78.42	90	95	100	100	100		Kecamatan Piyungan
31	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	NA	75	100	85	88	90	90	90		Kecamatan Piyungan
32	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	NA	70	100	85	90	100	100	100		Kecamatan Piyungan
33	IKM Kecamatan	Angka	78	79	80	82	83	85	90	90		Kecamatan Sanden
34	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat	%	80	83	85	87	90	100	100	100		Kecamatan Sanden

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Ketera-ngan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	waktu											
35	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	70	72	80	82	84	85	90	90		Kecamatan Sanden
36	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	60	65	80	85	90	100	100	100		Kecamatan Sanden
37	IKM Kecamatan	Angka	NA	80	97	85	90	90	90	90		Kecamatan Pleret
38	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	%	NA	100	100	90	93	95	96	96		Kecamatan Pleret
39	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes-	%	NA	100	100	85	88	90	90	90		Kecamatan Pleret
40	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	NA	70	80	85	90	93	95	95		Kecamatan Pleret
41	IKM Kecamatan	Angka	NA	79,99	89.83	85	90	90	90	90		Kecamatan Imogiri
42	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan	%	NA	50	75	90	95	100	100	100		Kecamatan Imogiri

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Ketera-ngan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	pelaporan tepat waktu											
43	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	NA	45	70	85	88	90	90	90		Kecamatan Imogiri
44	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	NA	40	60	85	90	100	100	100		Kecamatan Imogiri
45	IKM Kecamatan	Angka	NA	75	80	85	90	93	95	95		Kecamatan Bambanglipuro
46	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	%	NA	81	85	90	95	100	100	100		Kecamatan Bambanglipuro
47	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	NA	78	80	85	88	90	90	90		Kecamatan Bambanglipuro
48	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	NA	80	80	85	90	100	100	100		Kecamatan Bambanglipuro
49	IKM Kecamatan	Angka	60	70	80	85	90	93	95	95		Kecamatan Pundong

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Ketera-ngan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
50	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	%	80	80	85	90	93	94	95	95		Kecamatan Pundong
51	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	70	75	80	85	88	90	95	95		Kecamatan Pundong
52	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	60	70	80	85	86	88	90	90		Kecamatan Pundong
53	IKM Kecamatan	Angka	NA	79,2	93	85	90	90	90	90		Kecamatan Sedayu
54	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	%	NA	100	80	90	95	100	100	100		Kecamatan Sedayu
55	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	NA	70	80	85	88	90	90	90		Kecamatan Sedayu
56	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	NA	61,5	65	85	90	100	100	100		Kecamatan Sedayu
57	IKM Kecamatan	Angka	NA	80	80	85	86	87	89	89%		Kecamatan Sewon

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Ketera-ngan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
58	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	%	NA	80	85	90	94	95	96	96%		Kecamatan Sewon
59	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	NA	80	83	84	85	86	90	90%		Kecamatan Sewon
60	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	NA	70	73	74	70	96	95	95%		Kecamatan Sewon
61	IKM Kecamatan	Angka	NA	78	80	85	90	93	95	95		Kecamatan Kretek
62	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	%	NA	80	85	90	95	100	100	100		Kecamatan Kretek
63	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	NA	80	80	85	90	95	90	90		Kecamatan Kretek
64	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	NA	77	80	84	86	88	90	90		Kecamatan Kretek
65	IKM Kecamatan	Angka	NA	80.94	95,06	85	90	90	90	90		Kecamatan Dlingo

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Ketera-ngan	PD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
66	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	%	NA	80	85	90	95	100	100	100		Kecamatan Dlingo
67	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	NA	75	80	85	88	90	90	90		Kecamatan Dlingo
68	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	NA	70	75	85	90	100	100	100		Kecamatan Dlingo

BAB IX.
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunyang masih akan diacu untuk perencanaan 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021). Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan, dan program Kepala Daerah yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 secara terpadu, sinergis dan konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada lima tahun mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 ditentukan oleh komitmen seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Komitmen tersebut diwujudkan dengan sikap konsistensi Perangkat Daerah dalam mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dijadikan acuan didalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan kondisi masyarakat Bantul yang yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan kemanusiaan, kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Visi	Misi 1	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	PD Penanggung Jawab	
"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	1. Inspektorat 2. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 3. Sekretariat Daerah 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 6. Kecamatan 7. Dinas Komunikasi dan Informatika	8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9. Satuan Polisi Pamong Praja 10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 11. Sekretariat DPRD 12. Bappeda 13. Badan Keuangan dan Aset Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Inspektorat	Terwujudnya transparasi efektifitas dan efisiensi birokrasi	Nilai Maturitas SPIP	Level 1 (1,92)	Level 2 (2,0)	Level 2 (2,5)	Level 2 (3,1)	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,3)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Nilai PMPRB Online	Nilai PMPRB Online	Nilai PMPRB Online	60	1.981.691.400	61	2.398.630.650	62	2.754.562.715	63	2.597.983.400	64	2.714.319.497	65	2.850.035.472
														Meningkatnya implementasi SPIP pada OPD	Persentase Jumlah OPD yang SPIP yang baik	Jumlah OPD yang nilai SPIP baik per jumlah seluruh OPD dikali 100 %	-		-		20		30		40		50	
														Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	Jumlah Kasus Pengaduan yang ditindak lanjuti per Jumlah Seluruh Kasus Pengaduan dikali 100%	100		100		100		100		100		100	
														Meningkatnya jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti	Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	Jumlah Temuan eksternal dan internal yg ditindaklanjuti per Jumlah Seluruh Temuan eksternal dan internal dikali 100%	89,5		90		90,5		91		91,5		92	
				Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar	Presentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	84,00	89,00	90,00	90,50	91,00	91,30	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Cakupan dokumen renstra	Jumlah dokumen renstra	78	2.408.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	73,55	81,32	81,50	81,70	81,80	82,00	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	Jumlah Kasus yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus yang masuk x 100%	100	1.185.018.710	100	297.639.310	100	621.236.150	100	528.769.000	100	552.446.950	100	580.069.298
														terpenuhinya administrasi dan dokumen kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	Jumlah PNS yang tertib administrasi dan dokumen kepegawaian dibagi jumlah total aparatur dikali 100%	-		-		81		82		83		84	
														meningkatnya pemenuhan kebutuhan aparatur dalam jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN dalam jabatan	Jumlah Kebutuhan dibagi jumlah seluruh pegawai x 100%	17		17.6		-		-		-		-	
														meningkatnya kesesuaian penempatan aparatur dalam jabatan	Persentase Penempatan ASN	Jumlah aparatur yang ditempatkan dalam jabatan dibagi jumlah aparatur x 100%	94		81.55		-		-		-		-	
															Persentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun	Jumlah usulan yang tepat watu dibagi jumlah usulan x 100%	100		-		-		-		-		-	
															Peresentase keakuratan data ASN	Jumlah data yang update dibagi jumlah seluruh data x 100%	15		-		-		-		-		-	
															Persentase verifikasi pengusulan penghargaan ASN	Jumlah usulan yang diverifikasi dibagi jumlah usulan x 100%	76		-		-		-		-		-	
															Persentase ketepatan waktu verifikasi usulan tambahan penghasilan	Jumlah usulan yang diverifikasi tepat waktu dibagi jumlah usulan x 100%	98		-		-		-		-		-	
															Persentase permohonan ijin belajar dan tugas belajar sesuai kompetensi	Jumlah permohonan ijin belajar dan tugas belajar dibagi jumlah pegawai x 100%	91		-		-		-		-		-	
															Persentase penilaian potensi dan kompetensi	Jumlah pegawai yang dinilai potensinya dibagi jumlah pegawai x 100%	19		-		-		-		-		-	
															Prosentase penanganan disiplin pegawai	Jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang masuk x 100%	100		-		-		-		-		-	
															Persentase ketepatan waktu verifikasi PAK	Jumlah usulan PAK yang diverifikasi dibagi jumlah usulan x 100%	100		-		-		-		-		-	
													Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Presentase penempatan aparatur dalam jabatan	Persentase penempatan aparatur dalam jabatan	Jumlah aparatur yang ditempatkan dalam jabatan sesuai dengan formasi dibagi jumlah aparatur x100%	-	-	-	-	86	582.468.200	86	802.760.000	87	838.707.099	87	880.642.454
				Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	65	70	72	70	71	73	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Meningkatnya pengendalian dan kebijakan	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	Jumlah SKPD yang realisasi anggaran diatas 90% dibagi jumlah SKPD x100%	90	0	90	223.506.574	90	244.575.250	90	301.275.000	90	314.765.909	90	330.504.204
													Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Peningkatan kinerja aparatur/pegawai	Capaian kinerja aparatur/pegawai	Rata-rata jumlah poin pekerjaan pegawai dibagi standar jumlah poin pekerjaan x100%	100	495.862.300	100	237.712.300	100	182.159.000	100	129.555.300	100	135.356.707	100	142.124.542
													Program Pemanfaatan Ruang	cakupan kajian pemanfaatan ruang	Cakupan kajian pemanfaatan ruang	Jumlah kajian pemanfaatan ruang	1	36.610.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	80	81	82	83	84	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	Meningkatnya penyusunan SOP Sesuai Tugas/fungsi OPD	Persentase ketersediaan SOP dalam pelaksanaan kegiatan	Jumlah SOP yang disusun dibagi jumlah SOP yang seharusnya disusun x100%	20	269.600.000	40	396.182.000	60	477.043.200	80	310.352.500	100	324.249.894	100	340.462.389
													Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya kualitas kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP	Jumlah penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP dibagi jumlah seluruh penyelenggaraan acara kedinasan x100%	-	-	100	566.950.000	100	561.613.000	100	596.658.000	100	623.375.978	100	654.544.777
													Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	rekomendasi evaluasi kebijakan ketahanan pangan	Cakupan rekomendasi evaluasi kebijakan ketahanan pangan	jumlah rekomendasi evaluasi kebijakan ketahanan pangan	2	31.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	rekomendasi pengembangan potensi sumberdaya alam	Jumlah kajian pengembangan potensi SDA	Realisasi penyusunan kajian pengembangan potensi SDA	1	73.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terpeliharanya aplikasi sistem informasi	Jumlah jaringan aplikasi sistem informasi yang dipelihara	Jumlah realisasi aplikasi sistem informasi yang dipelihara	6	44.721.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Sekretariat Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,3 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,5 (Sangat Tinggi)	3,6 (Sangat Tinggi)	3,7 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terwujudnya forum komunikasi kesandian	Jumlah terselenggaranya forum kesandian	Realisasi frekuensi forum kesandian dibagi target frekuensi forum kesandian x100%	100	4.701.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Rekomendasi dan kajian evaluasi kebijakan perdagangan, industri dan jasa	Cakupan rekomendasi dan kajian evaluasi kebijakan perdagangan, industri dan jasa	Jumlah rekomendasi dan kajian evaluasi kebijakan perdagangan, industri dan jasa	1	30.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	cakupan kelompok dan pengrajin	Cakupan kelompok dan pengrajin	Jumlah kelompok dan pengrajin	90	35.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	kelompok KUPK penerima dana bergulir pengembangan ekonomi produktif masyarakat	Cakupan kelompok KUPK penerima dana bergulir pengembangan ekonomi produktif masyarakat	Jumlah kelompok KUPK penerima dana bergulir pengembangan ekonomi produktif masyarakat	47	82.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	cakupan pemberdayaan kerjasama dengan BUKP	Cakupan pemberdayaan kerjasama dengan BUKP	Jumlah pemberdayaan kerjasama dengan BUKP	17	200.092.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terfaksanannya updating dan validasi data monografi kecamatan, batas wilayah, toponimi	Cakupan updating dan validasi data monografi kecamatan, batas wilayah, toponimi	Jumlah dokumen data monografi, batas wilayah dan toponimi yang tervalidasi dibagi jumlah target seluruh dokumen data monografi, batas wilayah dan toponimi x100%	54	108.359.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Pemeliharaan jaringan aplikasi TNDE	Cakupan pemeliharaan jaringan aplikasi TNDE	Jumlah realisasi pemeliharaan jaringan aplikasi TNDE	1	22.395.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terdata dan tersusunnya arsip di Bagian Umum	Cakupan volume arsip yang terdata	Jumlah realisasi volume arsip yang terdata	20	15.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program pengembangan budidaya perikanan	cakupan kajian perikanan budidaya	Cakupan kajian perikanan budidaya	jumlah kajian perikanan budidaya	1	14.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya cakupan pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase cakupan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan umum x100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya dukungan pelayanan kedinasan kepada/wakepda	Persentase cakupan dukungan pelayanan kedinasan kepda/wakepda	Jumlah realisasi kegiatan pelayanan kepda/wakepda dibagi jumlah target kegiatan kepda/wakepda dikali 100 Persentase	93,8	149.887.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan EKPPD	Persentase ketersediaan data pendukung LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah data pendukung LPPD yang terpenuhi dibagi jumlah data pendukung yang dibutuhkan sesuai dengan IKK kali seratus peresen	-	-	-	-	100	385.725.000	100	736.496.200	100	769.476.046	100	807.949.849
													Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan EKPPD	Persentase ketersediaan data pendukung LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah data pendukung LPPD yang terpenuhi dibagi jumlah data pendukung yang dibutuhkan sesuai dengan IKK kali seratus peresen	100		100		100		100	736.496.200	100	769.476.046	100	807.949.849
													Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah		Persentase sertifikasi tanah		-	3.419.470.000	-	112.238.250	100	303.030.000	100	-	100	-	100	-
													Program peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintahan															
													Program perencanaan pembangunan daerah															
													Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah															
													Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan															
													Program peningkatan kedinasan kepala daerah/wakil daerah															
													Program pengembangan data/informasi/statistik daerah															
													Program pembinaan pemerintahan umum	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan se-Kabupaten Bantul	Persentase cakupan hasil tindak lanjut koordinasi pemerintahan umum	Jumlah tindak lanjut koordinasi dibagi rekomendasi hasil koordinasi pejabat daerah kali seratus persen	-	-	-	-	100	303.030.000	-	-	-	-	-	-
													Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah	Meningkatnya kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah seluruh perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh perikatan kerjasama kali seratus persen	-	-	100	84.039.250	100	117.385.000	100	70.682.000	100	73.847.096	100	77.539.451
													Program Penyelengaaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	Meningkatnya penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa	Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa(RKPDes APBDes) tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun peraturan perundangan desa tepat waktu (Desember tahun sebelumnya) dibagi dengan jumlah desa kali seratus persen	100	1.109.760.000	100	1.166.376.000	100	1.316.297.500	100	953.368.500	100	996.059.755	100	1.045.862.742
													Program Pengembangan Analis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase dokumen analisis kajian bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen analisis kajian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah dokumen alisis kajian yang dihasilkan	3	1.116.486.058	4	6.240.685.000	4	7.527.975.625	4	8.459.500.889	-	-	-	-
													Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase dokumen kajian bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persentase kajian bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Jumlah kajian bidang kesra yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kajian yang ada kali seratus persen	0	613.000.000	100	588.382.500	100	293.840.000	100	557.600.000	100	9.420.881.116	100	9.891.925.171

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	73,66 (BB)	77,90 (BB)	83 (A)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Meningkatnya pengendalian dan kebijakan	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90 Persentase	Jumlah OPD yang realisasi anggaran diatas 90% dibagi jumlah seluruh OPD x100%	90	0	90	223.506.574	90	244.575.250	90	301.275.000	90	314.765.909	90	330.504.204
													Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	Meningkatnya penyusunan SOP Sesuai Tugas/fungsi OPD	Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD	Jumlah SOP yang disusun dibagi jumlah SOP yang seharusnya disusun x100%	20	269.600.000	40	396.182.000	60	477.043.200	80	310.352.500	100	324.249.894	100	340.462.389
													Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya kualitas kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP	Jumlah acara kedinasan yang sesuai SOP dibagi jumlah seluruh acara kedinasan x100%	-	-	100	566.950.000	100	561.613.000	100	596.658.000	100	623.375.978	100	654.544.777
													Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Terciptanya kelembagaan yang efektif dan efisisen	Cakupan Kelembagaan yg efektif dan efisien	Besaran kelembagaan yang dapat dibentuk sesuai dengan skor kelembagaan dalam PP 18 tahun 2016 dibagi dengan jumlah kelembagaan yang telah dibentuk x100%	100	185.542.150	100	145.954.500	100	158.785.500	100	121.440.000	100	126.878.008	100	133.221.909
													Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	Nilai kriteria pelaporan kinerja dari KemenPANRB	11,06	0	11.2	719.094.045	12	774.832.500	-	-	-	-	-	-
													Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Meningkatnya pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Jumlah proses pengadaan barang dan jasa yang mendapatkan pemenang dibagi jumlah seluruh paket pengadaan barang dan jasa yang memenuhi persyaratan	-	-	98	859.072.500	97	906.290.000	98	1.205.535.000	99	1.259.518.115	100	1.322.494.021
													Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kualitasa kuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase produk hukum daerah yang disusun	Jumlah peraturan daerah yang disusun dibagi jumlah peraturan daerah yang direncanakan sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah kali seratus persen	100%	821.701.303	100%	568.349.000	100%	744.245.000	100%	649.655.200	100%	678.746.360	100%	712.683.678
													Program Kerjasama Pembangunan	fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /lembaga	Cakupan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	jumlah kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	24	38.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program perencanaan pembangunan daerah	kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran	tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran	100	1.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen renja	Cakupan dokumen renja	Jumlah dokumen renja	2	38.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program pelayanan administrasi perkantoran		Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Jumlah realisasi surat masuk dan keluar yang tertangani dengan tertib dibagi jumlah surat masuk dan keluar kali seratus persen	80		81		82		83		84		85	
													program peningkatan sarana dan prasrana aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras kantor dalam kondisi baik dibagi jumlah sarpras kantor kali seratus persen	100		100		100		100		100		100	
													program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Prosentase penerbitan surat perintah membayar (SPM) sesuai aturan	Jumlah penerbitan SPM yang sesuai aturan dibagi jumlah penerbitan SPM kali seratus persen	100		100		100		100		100		100	
					Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Belanja Pegawai	55	52	49	48	45	45	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Terciptanya kelembagaan yang efektif dan efisisen	Kelembagaan yang efektif dan efisien	Right Sizing/kesesuaian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	100	185.542.150	100	145.954.500	100	158.785.500	100	121.440.000	100	126.878.008	100	133.221.909
													Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	meningkatnya kebijakan perekonomian daerah	Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh kajian x100%	-	-	33	555.300.000	33	506.605.000	66	595.540.900	66	622.208.855	100	653.319.298
														meningkatnya lembaga ekonomi daerah	BUMD yang sehat	Jumlah BUMD yang sehat dibagi total BUMD x 100%	-		66,7		66,7		-		-		-	
													Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya tertib pengelolaan keuangan daerah	Cakupan tertib pengelolaan keuangan daerah	Realisasi tertib laporan pengelolaan keuangan dibagi target tertib laporan pengelolaan keuangan x100%	100	16.006.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Persentase SKPD yang menyelenggaraan kearsipan sesuai standar	27,00	33,00	46,00	52,00	61,00	70,00	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya pelayanan kearsipan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengguna arsip	Hasil survey Indeks Kepuasan Pelayanan Pengguna Arsip (OPD)	75	150.162.900	81,63	81.645.000	81	407.500.000	82,5	207.675.000	83	216.974.559	84	227.823.287
													Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Meningkatnya sistem adminiatrasi kearsipan	Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	Jumlah OPD dan Desa dengan pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kondisi antara daftar arsip dengan penyimpanan fisik arsip sesuai	17	145.089.800	20	41.823.650	25	131.328.000	30	377.446.588	34	394.348.414	40	414.065.835
													Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Meningkatnya cakupan akuisisi arsip statis	Cakupan arsip statis yang diakuisisi	Jumlah arsip statis yang diakuisisi dibagi jumlah target arsip statis yang akan di akuisisi x100%	20	249.669.300	26	299.056.480	20	715.860.000	22	950.233.286	24	992.784.148	26	1.042.423.355
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Meningkatnya pelayanan perijinan dan non perijinan	Persentase Layanan Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan SOP	75	-	-	-	-	-	Program optimaliasi pemanfaatan teknologi informasi	Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan yang cepat dan akurat, sekaligus data perizinan dan non perizinan yang valid dan lengkap.	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Jumlah jenis izin yang dilayani dalam aplikasi SIM / Jumlah jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan x100%	100	0	100	216.350.000	100	324.075.355	100	105.400.000	100	110.119.747	100	115.625.734
						Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	-	77	79	81	83	85	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Cakupan penetapan pelayanan perizinan	Jumlah izin yang ditetapkan / Jumlah pemohon x100%	100	970.499.934	100	851.135.000	100	806.586.000	100	532.197.575	100	556.029.055	100	583.830.508
															Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah permohonan izin yang dilayani / Jumlah pemohon x100%	100		100		100		100		100		100	
															Cakupan penanganan permasalahan perizinan	Jumlah permasalahan perizinan yang terselesaikan / Jumlah seluruh permasalahan perizinan x100%	100		100		100		100		100		100	
															Jumlah keluhan pelayanan permohonan izin	Jumlah pengaduan terhadap pelayanan CS	-		-		-		-		-		-	
															Hasil survey IKM	Hasil Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	78		78,5		79		79,5		80		80,5	
				Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	70	80	85	90	90	90	Program Pelayanan Peningkatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat	cakupan pelayanan PATEN, UMK	Rata-rata peningkatan cakupan pelayanan PATEN dan UMK di 17 Kecamatan	60,9	14.925.224	85,9	303.856.253	87,7	490.325.000	89,8	338.405.750	90,6	353.559.351	91,75	371.237.319
					Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Meningkatnya tertib penyusunan APBDes	Rata-rata persentase kesesuaian penyusunan APBDes sesuai dengan protap	Jumlah persentase kesesuaian protap masing-masing desa dibagi jumlah seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen	82,50	827.805.900	87,50	2.845.628.760	87,50	2.520.236.250	-	-	-	-	-	-
					Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Terciptanya harmonisasi APBDes dengan RPJMDes	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes (cakupan pemerintahan umum kecamatan)	Jml desa yg menyusun RKPDes sesuai RPJMDes dibagi jml seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen	61,5	803.706.300	90,6	3.345.096.560	92,1	3.211.888.750	-	-	-	-	-	-
					Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Terciptanya harmonisasi APBDes dengan RPJMDes	Persentase kesesuaian RKPDes dengan RPJMDes (cakupan pemerintahan umum kecamatan)	Jml desa yg menyusun RKPDes sesuai RPJMDes dibagi jml seluruh desa dalam kecamatan kali seratus persen	-	-	-	-	-	-	95	3.139.990.000	100	3.280.596.819	100	3.444.626.660
					Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Meningkatnya pembinaan sosial kemasyarakatan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	Jumlah seluruh fasilitas sosial kemasyarakatan yang terlaksana dibagi jumlah fasilitas sosial kemasyarakatan dikali 100%	53,0	571.662.013	83,5	1.306.047.153	86,6	1.371.652.725	90,0	910.523.500	92,7	951.296.182	94,7	998.860.991
					Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	Meningkatnya keselarasan program pembangunan tingkat kecamatan	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas kabupaten	Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total program prioritas usulan x100	54,2	329.518.400	73,9	520.968.700	81,6	1.066.010.550	85,8	1.016.421.000	87,5	1.061.935.707	89,6	1.115.032.492

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya informasi yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya Good government	Prosentase OPD yang menerapkan layanan unggulan Digital Government Service (DGS)	60	70	75	80	85	90	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan layanan pengendalian tower	Cakupan tower yang berijin	Persentase tower yang berijin dibagi jumlah seluruh tower dikali 100 persen	-	-	98,81	250.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	Persentase pengembangan infrastruktur / Jumlah seluruh infrastruktur x100%	60	5.616.010.160	70	7.067.222.000	72	14.068.633.200	72	15.091.580.000	75	15.767.371.662	78	16.555.740.245
															Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	Jumlah warehaouse data tahun n dikurangi jumlah ware house data n-1 dibagi jumlah ware house data n-1 x100%	40		45		50		52		55		60	
													Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	Meningkatnya pengelolaan persandian dan informasi daerah	Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani-	Jumlah gangguan kemanan informasi yang tertangani dibagi jumlah semua gangguan keamnan informasi X100%	-	-	-	-	-	-	85	709.133.577	86	740.888.142	87	777.932.549
													Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	Jumlah SDM yang berbasis TI dibagi jumlah seluruh SDM yang ada x100%	45	71.949.500	46	89.847.000	47	78.062.500	48	90.620.000	49	94.677.908	50	99.411.803
						Index kualitas layanan informasi publik	-	75	77	80	83	85	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Meningkatnya cakupan layanan informasi kepada masyarakat	Prosentase penningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	Sistem informasi dan layanan publik yang memiliki peraturan/ keseluruhan sistem informasi dan layanan publik x 100%	-	-	65	165.495.000	65	1.218.773.200	67	901.765.000	70	942.145.482	75	989.252.756
													Program kerjasama informasi dengan mass media	Meningkatnya jangkauan sosialisasi pembangunan,	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan	jumlah sosialisasi tahun n-1 dibagi jumlah sosialisasi tahun N x100%	62	16.967.500	65	2.083.082.200	67	2.193.493.200	70	1.959.960.000	72	2.047.725.802	75	2.150.112.092
													Program Penyajian Data Statistik Daerah	Meningkatnya pengumpulan pengelolan dan analisa data statistik daerah.	Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data statistik daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	7	200.935.000	7	221.028.500
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan KTP	100	100	-	-	-	-	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya jaringan pelayanan administrasi kependudukan melalui desa, lembaga dan masyarakat	Kepemilikan Kartu Keluarga	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga / Jumlah Kepala Keluarga x100%	100	172.188.910	100	2.619.997.500	100	2.622.558.000	100	2.913.340.500	100	3.043.798.094	100	3.195.987.999
						Presentase cakupan kepemilikanakte kelahiran usia 0-18 tahun	80	85	-	-	-	-			Kepemilikan KTP_EL	Jumlah Kepemilikan KTP-EL / Jumlah wajib KTP x100%	96.22	208.346.500	97	2.908.016.090	97,5		98		98,5		99	
						Rata-rata Cakupan Kepemlikikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	87	89	91	92	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 thn / Jumlah kelahiran usia 0-18 tahun x100%	90,48	1.955.184.120	92	1.081.775.000	93	1.160.153.500	94	1.244.214.300	95	1.299.929.450	96	1.364.925.923
						Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	-	-	80	85	90	95			Kepemilikan Akta Kematian	Jumlah Pencari akta kematian Tahun N / Jumlah Kematian Tahun N x100%			55		60		65		70		75	
						Indeks Kepuasan Masyarakat	80,18	81	80,25	80,30	80,35	81	Program Pengelolaan Data Kependudukan	Jumlah prosentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	Jumlah Instansi yang diberi hak akses / Jumlah instansi yang mengajukan ijin pemanfaatan data x100%	0	0	75	0	80	521.925.000	85	476.375.000	90	497.706.779	95	522.592.118
				Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya implementasi Perda	Persentase Penegakan Perda	57	60	63	66	69	72	Program Penegakan Perda	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak	Jumlah Pelanggaran perda yang ditindak / Jumlah Sasaran x100%	-	-	100	194.270.000	100	242.085.000	100	332.184.000	100	347.058.995	100	364.411.945
				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase pemilih yang berpartisipasi	-	-	-	75	-	75	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Jumlah pemilih yang berpartisipasi / Jumlah pemilih yang memiliki hak pilih x100%	0%	149.975.300	0%	111.477.250	0%	275.335.000	75%	372.605.000	0%	389.290.023	75%	408.754.524

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Sekretariat DPRD	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang disetujui bersama	80	80	80	80	80	100	Program perencanaan pembangunan daerah				2 dok	1.000.000										
													Program kerjasama informasi dengan mas media	Tersosialisasikannya kegiatan DPRD melalui media massa	Jumlah publikasi melalui Media Massa	Jumlah publikasi melalui media massa	10	357.188.000	10	603.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya pendataan dan penataan dokumen arsip	Cakupan pendataan dan penataan dokumen arsip	Jumlah dokumen arsip yang tertata/jumlah rencana dokumen arsip yang tertata x100%	12	56.771.000	12	52.613.000	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terlaksananya pembahasan rancangan perda sesuai propemperda	Prosentase pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah raperda terbahas/target raperda x 100%	94	8.543.901.775	94	12.929.090.296	80	20.988.685.000	80	20.705.453.983	80	21.632.631.465	80	22.714.263.039
													Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan Rancangan perda prakarsa DPRD	Persentase Rancangan Perda Prakarsa DPRD	Jumlah raperda prakarsa DPRD terbahas/target raperda prakarsa DPRD x100%	100	1.757.422.387	100	2.673.856.850	-	-	-	-	-	-	-	-
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	-	94,35	94,5	94,75	94,9	95	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya pelayanan informasi pembangunan	Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	Jumlah data yang terisi dibagi seluruh kebutuhan data x100%	80	150.185.000	90	423.415.000	90	366.510.000	95	252.870.000	100	264.193.363	100	277.403.031
													Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya pelayanan informasi data/statistik	Cakupan ketersediaan data statistik	Persentase data statistik daerah yang tersedia dibagi jumlah data yang harus tersedia	80	65.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pelayanan informasi melalui media massa	Cakupan komunikasi media massa	Persentase informasi melalui media massa dibagi dengan jumlah informasi	90	30.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Kerjasama Pembangunan	Terwujudnya penellitian dan kerjasama yang berdaya guna	Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah	Kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah dibagi seluruh kerjasama x100%	66,56	14.225.000	73,73	758.301.000	75,33	126.150.000	80	237.900.000	80	248.553.016	86,67	260.980.666
													Program perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya sinergitas dan kinerja perencanaan pembangunan yang optimal	Persentase Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Jumlah Persentase capaian sasaran perangkat daerah dibagi jumlah sasaran perangkat daerah x100%	94.05	1.365.496.000	94.20	1.358.403.180	94,35	2.324.349.500	94,5	1.800.105.000	94,75	1.880.712.594	94,9	1.974.748.223
													Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya capaian kinerja bidang pembangunan perekonomian	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	Jumlah Persentase capaian sasaran bidang pembangunan ekonomi dibagi jumlah sasaran daerah x100%	90.00	1.129.556.000	90.00	658.972.395	100	803.430.000	100	1.466.360.700	100	1.532.023.429	100	1.608.624.601
													Program perencanaan sosial dan budaya	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan sosial budaya	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	Jumlah Persentase capaian sasaran bidang pembangunan sosial budaya dibagi jumlah sasaran daerah x100%	90.00	861.122.000	90.00	1.076.597.350	100	1.132.739.500	100	858.840.000	100	897.298.326	100	942.163.243
													Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Meningkatnya capaian kinerja prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah Persentase capaian sasaran bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam dibagi jumlah sasaran daerah x100%	90.00	51.273.000	90.00	438.876.200	100	767.400.000	100	739.025.000	100	772.118.085	100	810.723.989
													Program Perencanaan Perumahan	Terwujudnya pengendalian peremahan	Tersedianya dokumen kajian kebijakan pengembangan perumahan	Persentase dokumen kebijakan pengembangan perumahan yang tersedia	100%	160.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya perencanaan tata ruang	Tersedianya dokumen mengenai rencana tata ruang	Persentase dokumen perencanaan tata ruang	100%	542.345.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya cakupan tatanan kabupaten sehat	Cakupan tatanan kabupaten sehat	Persentase tatanan kabupaten sehat yang dicapai	80%	37.010.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	Nilai kriteria pelaporan kinerja dari KemenPANRB	-	-	-	-	-	-	12.5	748.409.000	13	781.922.294	13.5	821.018.409
													Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	Jumlah IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat dibagi jumlah IPTEKMAS yang ditemukan x100%	75.00	64.750.000	78.00	123.873.350	78.00	212.900.000	78.00	207.720.000	78.50	217.021.574	78.50	227.872.652
					Meningkatnya Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Persentase Rata-rata capaian target kinerja program OPD	-	90,00	90,40	90,75	91,10	91,50	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya pengendalian capaian kinerja program OPD yang optimal	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	Jumlah OPD dengan hasil renja predikat tinggi dibagi seluruh OPD x100%	91.00	67.500.000	92.00	145.586.000	93.00	193.120.000	93.50	156.445.000	94.00	163.450.511	94.50	171.623.036

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	1	1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	Tgl ditandangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD yg diatur dalam peraturan perundang-undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)	1	565.449.700	1	534.909.640	1	479.561.000	1	1.017.595.237	1	1.063.162.525	1	1.116.320.652
															Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam tahun n	2		2		2		2		2		2	
															Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun n-1 dikurangi jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun x100%	5		5		5		5		5		5	
													Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis Akrual	Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	Waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dibanding dengan waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dalam peraturan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)	1	372.899.700	1	315.938.426	1	373.416.000	1	610.557.142	1	637.897.515	1	669.792.391
															Presentase penerapan akrual basis oleh OPD dengan benar	(Jumlah SKPD yang menerapkan berbasis akrual dibagi dengan jumlah SKPD) x100%	60		75		80		85		90		95	
															Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	Jumlah transaksi yang dikoreksi	-	-	-	-	100		90		90		85	
													Program Pengelolaan Barang Daerah	Terinventarisasinya aset daerah PD	Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1	Selisih antara jumlah aset per 31 Desember dengan jumlah aset hasil audit BPK dibagi jumlah aset hasil audit BPK x100%	99.94	609.454.161	100	557.433.430	100	862.589.030	100	837.615.959	100	875.123.886	100	918.880.080
													Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan OPD	Persentase Pemahaman Bendahara Tentang Prosedur dan Tatacara Pengelolaan Keuangan	80	7.210.750	80	126.365.100	-	-	-	-	-	-	-	-
					Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	17	17,5	18	19	20	21	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	Pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun n dikurangi pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun n-1 dibagi pendapatan pajak daerah tahun n-1 x100%	8	1.135.933.276	9	1.091.228.700	9	2.415.541.200	9	2.645.747.616	9	2.764.222.565	9	2.902.433.694
						Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21	22	23	24	25	26	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah	Jumah Realisasi PAD dibagi target PAD x100%	100	2.486.246.869	100	2.842.334.912	100	3.311.731.685	100	5.393.254.756	100	5.634.761.384	100	5.916.499.453

Visi	Misi 2	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	PD Penanggung Jawab
"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD 3. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa 4. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	AKI per 100.000 kelahiran hidup	96,77	72,8	85	85	85	85	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Persentase pelayanan kesehatan ibu	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar/Sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun x 100%	95	1.779.050.000	95	1.810.650.000	100	2.240.605.000	100	5.003.012.000	100	5.227.043.797	100	5.488.395.987
															Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar/Sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun x 100%	99		99		100		100		100		100	
						AKB per 100.000 kelahiran hidup	7,65	8,74	8,2	8,2	8,0	8,0	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Meningkatnya kesehatan Balita	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar/Jumlah seluruh bayi baru lahir x 100%	92	33.100.000	92	35.000.000	100	136.000.000	100	134.720.000	100	140.752.679	100	147.790.313
															Persentase pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar/Jumlah seluruh balita x 100%	80		80		100		100		100		100	
						Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,4	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	Program perbaikan gizi masyarakat	Meningkatnya status gizi Balita	Persentanse prevalensi Balita stunting	Jumlah balita stunting sesuai standar (TB/U)/Jumlah balita ditimbang x 100%	11,9	709.339.000	11,8	725.000.000	11,7	865.350.000	11,6	2.902.157.000	11,5	3.032.113.804	11,4	3.183.719.494
															Persentase cakupan Balita ditimbang	Jumlah Balita yang diukur (TB dan BB)/ Jumlah seluruh Balita x 100%	80		80		80		80		80		80	
					Meningkatnya Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Hidup Sehat	Prevalensi penderita HIV	<0,083	<0,09	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Respon dugaan potensial KLB kurang dari 24 jam	Angka Bebas Jentik (ABJ)	Jumlah tempat-tempat terbatas jentik dibanding seluruh tempat yang diperiksa dikali 100%	83	321.860.000	86,51	295.748.000	50	381.375.000	65	620.235.964	70	648.009.749	75	680.410.236
														Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Meningkatnya penemuan kasus HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna NAPZA, dan warga binaan Lapas) yang mendapat pemeriksaan HIV	30	116.603.000	35	341.740.000	50	367.840.000	65	466.792.225	70	487.694.893	75	512.079.638
														Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah semua penderita TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai DOTS dibanding jumlah seluruh kasus TB (dewasa dan anak) dikali 100%	100		100		100		100		100		100	
														Pelayanan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0 sampai 11 bulan di satu desa	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	Persentase desa UCI	100	104.812.000	100	100.000.000	100	410.725.000	100	320.196.811	100	334.535.027	100	351.261.778

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Hidup Sehat	Angka Kesakitan/Insidence Rate (IR) DBD	237,75	57,98	130	120	110	100	Program obat dan perbekalan kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	persentase Penggunaan Obat Rasional (POR)	Jumlah kasus JOO tidak diberi antibiotik dibagi jumlah total kasus JOO ditambah jumlah kasus myalgia tidak diinjeksi/Jumlah total kasus myalgia/2 kemudian dikali 100%	95	9.159.252.117	95	11.629.485.000	95	6.251.350.000	95	5.559.403.000	95	5.808.349.644	95	6.098.767.126
													Program upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Jumlah workshop manajemen Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	0	67.767.121.897	5	75.918.604.228	27	78.113.100.802	27	85.982.000.175	27	89.832.221.210	27	94.323.832.270
															Cakupan Puskemas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	3	424.270.000	27	1.196.734.000	27	332.990.000	27		27		27	
															Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Jumlah Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27	300.895.000	27	201.763.750	27	155.685.000	27		27		27	
															Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	Cakupan pelayanan RS Tipe D	-	-	-	-	50	2.400.000.000	100		100		100	
													Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya pengawasan obat dan makanan	Persentase peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	Jumlah peserta PKP yang mendapatkan sertifikat PIRT/Jumlah peserta PKP x 100%	80	100.800.000	80	119.000.000	80	102.210.000	80	77.500.000	80	137.500.000	80	151.250.000
															Persentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	Jumlah hasil pemeriksaan BBPOM yang ditindaklanjuti/Seluruh pemeriksaan dari BBPOM x 100%	100	100.800.000	100	119.000.000	100	102.210.000	100	77.500.000	100	132.500.000	100	140.500.000
													Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya desa siaga	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	Jumlah desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	71	3.043.390.000	72	3.802.000.000	73	2.378.912.000	74	1.770.450.000	75	1.849.729.661	75	1.942.216.144
															Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah siswa pada usia pendidikan dasar yang dilakukan penjaringan kesehatan/Jumlah seluruh siswa pada usia pendidikan dasar x 100%	100		100		100		100		100		100	

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan/Insidence Rate (IR) DBD	237,75	57,98	130	120	110	100	Program pengembangan lingkungan sehat	Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat	jumlah desa melaksanakan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	5	306.345.000	5 Desa	531.427.000	15 Desa	563.960.000	27 Desa	2.787.216.000	40 Desa	2.912.025.817	54 Desa	3.057.627.107
													Program standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatnya mutu dan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	15	744.221.000	27	1.475.166.000	27	418.720.000	27	694.011.994	27	725.089.424	27	761.343.895
															Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas menyusun profil kesehatan	27	150.500.000	27	93.000.000	27	82.530.000	27	136.790.241	27	142.915.624	27	150.061.405
															Jumlah akreditasi Rumah Sakit	Jumlah akreditasi Rumah Sakit	8	-	9	-	10	261.602.000	11	433.595.065	12	453.011.185	27	475.661.744
													Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Terlaksananya pembiayaan kesehatan masyarakat kurang mampu	Jumlah peserta PBI Jamkesda	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mendapat pembiayaan kesehatan/Jumlah masyarakat kurang mampu x 100%	100	18.025.300.000	100	17.296.460.000	100	17.871.460.000	100	21.423.348.000	100	22.382.672.335	100	23.501.805.951
													Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Terpenuhinya sarana prasarana Puskesmas sesuai standar	Persentase sarana prasarana Puskesmas memenuhi standar	Jumlah sarana prasaarana Puskesmas memenuhi standar/Jumlah Puskesmas x 100%	50	27.047.945.079	60	15.431.356.500	70	13.786.692.300	80	17.074.783.300	90	17.839.381.584	100	18.731.350.664
													Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Meningkatnya kemitraan masyarkat, swasta dan institusi pendidikan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPT Jaminan Kesehatan Daerah	Jumlah institusi yang berimtra dengan Dinas Kesehatan	50	413.112.500	91 institusi	758.980.000	91 institusi	626.080.000	91 institusi	323.423.488	91 institusi	337.906.193	91 institusi	354.801.502
															Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan dibagi jumlah institusi pendidikan yang bermitra pada tahun yang sama dikali 100%	Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan dibagi jumlah institusi pendidikan yang bermitra pada tahun yang sama dikali 100%	30	116.762.500	60	274.480.000	70	218.080.000	80	106.716.512	90	111.495.212	100	117.069.972
													Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatnya kesehatan Lanjut Usia	Cakupan Puskesmas Santun Lansia	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	17	18.595.000	18	100.000.000	19	125.075.000	20	147.000.000	21	153.582.570	22	161.261.698
															Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah lansia memperoleh pelayanan kesehatan/seluruh lansia x 100%	100		100		100		100		100		100	
													Program peningkatan pencegahan penyakit tidak menular	Terlaksananya deteksi dini penyakit tidak menular	Jumlah desa memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	Jumlah desa yang memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	400	108.000.000	50	546.567.000	60	579.025.000	70	1.407.225.000	73	1.470.239.669	76	1.543.751.653
															Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan dikali 100%	100		0		100		100		100		100	
															Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang diobati sesuai standar dibagi jumlah seluruh penderita hipertensi yang ditemukan	100		0		100		100		100		100	
															Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita DM yang diobati sesuai standar dibagi jumlah seluruh penderita DM yang ditemukan	100		0		100		100		100		100	
															Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ yang mendapat pelayanan sesuai standar dibagi jumlah seluruh ODGJ di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu	100		0		100		100		100		100	

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	RSUD Panembahan Senopati	Menurunnya Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	Net Death Rate (per mil)	18,69	16,98	16,8	16,7	16,6	16,5	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya efisiensi dan mutu pelayanan dilingkup pelayanan medik, penunjang medik serta keperawatan dan mutu	BOR	Jumlah hari perawatan / Jumlah tempat tidur x 365 hari	79,5	26.913.803.896	71,68	13.575.965.208	80	55.955.170.000	80	15.405.855.000	80	16.095.719.703	80	16.900.505.688
															LOS	Jumlah lama dirawat keseluruhan pasien / Jumlah pasien yang keluar	5,1		5,01		6		6		6		6	
															TOI	Jumlah tempat tidur x 365 hari - jumlah hari perawatan / Jumlah pasien yang keluar	1,09		1,63		2		2		2		2	
															BTO	Jumlah Pasien yang keluar / Jumlah tempat tidur	57,05		52,22		50		50		50		50	
													Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja	Capaian SPM	Jumlah indikator yang tercapai / Jumlah seluruh indikator yang ada x100%	76,4	136.859.310.826	82	137.070.813.437	82	152.000.000.000	84	126.000.000.000	86	131.642.202.431	88	138.224.312.552
															Capaian Evaluasi Kinerja	Nilai Evaluasi Kinerja	-	-	78,71		80		80		80		80	
															Nilai AKIP	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	-	-	-		84		85		85		85	
													Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	-	-	72,10	593.641.000	-	-	-	-	-	-	-	-
				Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (jiwa)	3,29	3,20	3,20	-	-	-	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		Cakupan updating dan validasi data monografi kecamatan, batas wilayah, toponimi	Jumlah dokumen data monografi, batas wilayah dan toponimi yang tervalidasi dibagi jumlah target seluruh dokumen data monografi, batas wilayah dan toponimi x100	1	498.334.400										
													Program pelayanan kontrasepsi	Meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang	Persentase kepesertaan KB MKJP	Jumlah peserta KB jangka panjang (MKJP) dibagi jumlah PA dikali 100%	35	110.100.000	36	100.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program keluarga berencana	Meningkatnya peserta keluarga berencana aktif	Cakupan peserta keluarga berencana aktif	Jumlah peserta keluarga berencana aktif dibagi jumlah pasangan usia subur x 100%	76,23	60.350.000	76,4	2.639.945.000	76,6	5.688.568.600	-	-	-	-	-	-
													Program pengembangan analisa data dan dampak kepundudukan	ketersediaan data kependudukan dan keluarga sejahtera semakin cepat	Cakupan sistem aplikasi pencataan dan pelaporan yang dibuat	jumalah data yang terisi dibagi data yang seharusnya terisi x 100%	100	595.090.000	100	246.560.000	100	278.436.400	-	-	-	-	-	-
													Program kesehatan reproduksi remaja	Menurunnya angka perkawinan dini	Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	Jumlah siswa sekolah yang diberi sosialisasi	1500	102.750.000	1600	120.885.000	1700	155.225.000	-	-	-	-	-	-
													Program kerja sama informasi dengan media massa	Meningkatnya cakupan sosialisasi pembangunan kabupaten melalui media massa	Cakupan media sosialissasi	Jumlah media sosialisai	-	-	100	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB meningkat	Cakupan pelayanan kader IMP	Jumlah desa yang terlayani Kader IMP dibagi jumlah desa dikali 100%	60	41.725.000	70	51.740.000	80	41.940.000	-	-	-	-	-	-
						Total Fertilty Rate (TFR)	-	-	-	2,08	2,07	2,06	Program kesehatan reproduksi remaja	Menurunnya angka pernikahan dini	Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	Jumlah siswa sekolah yang diberi sosialisasi	-	-	-	-	-	-	1800	170.650.000	1900	178.291.602	2000	187.206.182
													Program pelayanan kontrasepsi	Meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang	Persentase kepesertaan KB MKJP	Jumlah peserta KB jangka panjang (MKJP) dibagi jumlah PA dikali 100%	-	-	-	-	-	-	38	115.900.000	39	121.089.931	40	127.144.427
													Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB meningkat	Cakupan pelayanan kader IMP	Jumlah desa yang terlayani Kader IMP dibagi jumlah desa dikali 100%	-	-	-	-	-	-	90	75.365.000	100	78.739.798	100	82.676.788
													Program keluarga berencanan	Meningkatnya peserta keluarga berencana aktif	Cakupan peserta keluarga berencana aktif	Jumlah peserta keluarga berencana aktif dibagi jumlah pasangan usia subur x 100%	-	-	-	-	-	-	76,8	5.523.635.600	77	5.770.980.602	77,2	6.059.529.632
													Program pengembangan analisa data dan dampak kepundudukan	ketersediaan data kependudukan dan keluarga sejahtera semakin cepat	Cakupan sistem aplikasi pencataan dan pelaporan yang dibuat	jumalah data yang terisi dibagi data yang seharusnya terisi x 100%	-	-	-	-	-	-	100	265.608.400	100	292.169.000	100	321.386.800
													Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	meningkatnya partipasi masyarakat dalam program ketahanan keluarga	Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia)	jumlah keluarga sasaran bina keluarga sejahtera	-	-	-	-	-	-	34	157.275.000	34	164.317.678	51	172.533.562
													Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi keluarga	cakupan penanganan dalam program pem berdayaan ekonomi keluarga	jumlah anggota usaha peningkatan pendapatan keluaraga sejahtera dibagi jumlah sasaran x 100%	-	-	-	-	-	-	240	27.500.000	300	28.731.433	360	30.168.005

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya keragaman gizi masyarakat	Ketersediaan Energi	3.079 kkal/kapita/hari	2.993kkal/kapita/hari	3.085 kkal/kapita/hari	3.090 kkal/kapita/hari	3.095 kkal/kapita/hari	3.100 kkal/kapita/hari	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	Peningkatan ketahanan	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	Jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9	1.697.192.500	9	1.112.167.750	9	719.590.000	9	722.015.000	9	754.346.387	9	792.063.707
						Ketersediaan Protein	75 gr/kapita/hari	78,36 gr/kapita/hari	72,4 gr/kapita/hari	72,6 gr/kapita/hari	72,8 gr/kapita/hari	73 gr/kapita/hari																
						Skor Pola Pangan Harapan	92,60	90,80	93,40	93,50	93,60	93,70			Angka ketersediaan pangan pokok	Jumlah ketersediaan pangan pokok	450		37669		460		465		470		475	
					Meningkatnya kualitas dan kuantitas olahraga	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	25	26	27	28	29	30	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga	Meningkatnya pemberdayaan olahraga	Cakupan cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	Jumlah cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	36	295.000.000	36	78.000.000	36	73.550.000	36	78.506.780	36	82.022.265	36	86.123.379
													Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Meningkatnya partisipasi olahraga	Cakupan cabang olahraga yang ikut kompetisi	Jumlah cabang olahraga yang ikut kompetisi	23	2.324.092.000	23	11.368.065.000	23	8.402.828.100	23	8.612.319.549	23	8.997.973.916	23	9.447.872.612
													Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga	Rasio sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabang olahraga	Perbandingan sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibagi jumlah cabang olahraga	01.40	2.500.875.000	01.40	8.440.146.636	02.40	3.147.256.700	02.40	5.802.236.974	02.40	6.062.057.574	02.40	6.365.160.452
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	-	-	Ranking III DIY	Ranking II DIY	Ranking II DIY	Ranking I DIY	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan dan tenaga kependidikan berkualitas	Persentasi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	Jumlah ketersediaan pendidik yang bersertifikat, jumlah siswa dan sekolah	65	324.978.100	67	1.355.698.012	67	37.947.837.000	68	48.867.560.000	69	51.055.819.252	70	53.608.610.215
													Progran manajemen pelayanan pendidikan	Sekolah dan masyarakat	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	Jumlah SD Sekolah Standar Nasional/Jumlah semua SD x 100%	20	534.690.000	22	603.100.150	24	1.216.205.000	26	1.106.575.000	28	1.156.126.747	30	1.213.933.085
															Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	Jumlah SMP Sekolah Standar Nasional/Jumlah semua SMP x 100%	36		39		42		45		48		51	
						Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	-	-	Ranking II DIY	Ranking II DIY	Ranking I DIY	Ranking I DIY	Program peningkatan nilai akademik		Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	Peringkat jumlah nilai rata-rata mata pelajaran US/M SD/MI Kabupaten	4	-	4	-	3	3.899.400.500	3	3.783.175.000	2	3.952.583.247	1	4.150.212.410
															Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Peringkat jumlah nilai rata-rata mata pelajaran UN SMP/MTs Kabupaten	4	-	4	-	2		2		1		1	
						Jumlah prestasi non akademik Tingkat Nasional	-	-	5,00	6,00	7,00	8,00	Program pendidikan non formal	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan non formal	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif/Jumlah lembaga pendidikan non formal yang ada x 100%	90	3.320.110.000	90	1.514.193.800	91	1.598.650.000	91	2.074.955.000	92	2.167.870.207	92	2.276.263.718

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	98,7	98,75	98,80	98,85	98,90	98,95	Program pendidikan anak usia dini	Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	Jumlah lembaga PAUD yang aktif/Jumlah lembaga PAUD yang ada x 100%	95	2.666.300.000	95	14.094.482.259	96	2.986.277.033	96	2.715.640.000	97	2.837.244.687	97	2.979.106.922
					Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Angka rata-rata lama sekolah	8,79	8,84	8,89	8,94	9	9	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Peningkatan wajib belajar sembilan tahun	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	Jumlah guru SD yang bersertifikasi/Jumlah semua guru SD x 100%	50	32.703.253.850	55	57.753.346.407	55,5	57.635.919.600	56	69.024.489.700	56	72.115.363.855	57	75.721.132.048
						- APK SD/MI	96,11	96,15	96,20	96,30	96,40	96,50																
						-APK SMP/MTs	95,1	95,15	95,20	95,25	95,30	96,00			Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	Jumlah guru SMP yang bersertifikasi/Jumlah semua guru SMP x 100%	48		53		53,5		54		54		54	
						APM SD/MI	84,09	84,2	84,45	84,55	84,65	84,75			Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	Jumlah sarana pembelajaran dan sara fisik/Jumlah sarana ideal x 100%	95,22		95,72		96,22		96,72		97,22		97,72	
						-APM SMP/MTs	67,64	67,7	67,9	68	68,2	68,22			Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	Jumlah sarana pembelajaran dan sara fisik/Jumlah sarana ideal x 100%	94,45		95		95,5		96		96,5		97	
						Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100	100																
						Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/ MA	100	100	100	100	100	100			Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI sesuai SPM	Jumlah SD yang menerapkan kurikulum baru/Jumlah semua SD x 100%	95,22		95,72		96,22		96,72		97,72		97,72	
					Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Presentase Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100																
						Presentase Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100			Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs sesuai SPM	Jumlah SMP yang menerapkan kurikulum baru/Jumlah semua SMP x 100%	77,14		77,64		78,14		78,64		7914		79,64	
					Meningkatnya Kualitas Sikap dan Mental Peserta Didik	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02																
						Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	Terselenggaranya lomba peningkatan bakat minat /prestasi siswa	63,9		64,4		64,9		95,4		65,4		65,9	
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	28,5	29	30	31	32	33	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas perpustakaan	Cakupan yang memiliki Akreditasi Nasional	Jumlah perpustakaan sekolah dan desa yang terakreditasi Nasional	2	1.126.477.170	2	691706890	4	1.617.628.500	6	1.888.992.601	8	1.973.580.527	10	2.072.259.553
													Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Meningkatnya pelayanan perpustakaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	Hasil survey kepuasan pemustaka/masyarakat	0	0	84	178.920.060	81	427.785.000	82,5	471.770.000	83	492.895.570	90	517.540.349

Visi	Misi 3	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	PD Penanggung Jawab
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Turunnya Masyarakat Yang Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	1. Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi 2. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Petumbuhan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Gini Ratio	1. Dinas Perdagangan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah 4. Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi 5. Dinas Koprasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
				Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan Jumalah Kunjungan Wisataan	Dinas Pariwisata
				Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan Industri Kreatif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
				Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	1. Pertumbuhan produksi tanaman pangan. 2. Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura. 3. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan. 4. Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas).	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikaan
				Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	Pertumbuhan Produksi Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Meningkatnya jumlah lapangan kerja	Angka Pengangguran	3,0	3,1	2,2	3,0	2,9	2,8	Program penempatan tenaga kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan / Jumlah pendaftar penempatan x 100 %	75	248.828.194	77	343.379.700	80	558.444.480	82	360.000.000	85	376.120.578	87	394.926.607
													Program perluasan kerja	meningkatnya tenaga kerja yang berwirausaha	Persentase tenaga kerja yang berwirausaha	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan kewirausahaan dibagi jumlah pendaftar pelatihan x 100%	62	12.563.630.499	65	14.845.976.050	67	18.053.040.000	70	18.981.365.000	72	19.831.338.839	75	20.822.905.781
													Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja	Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang terserap informasi bursa kerja/jumlah pencari kerja dikali 100%	75	61.413.745	77	182.859.900	80	200.943.500	82	543.425.000	85	567.759.237	87	596.147.199
													Program kerja sama dengan media massa	Meningkatnya capaian sosialisai pembangunan melalui media massa	Cakupan sosialisasi pembangunan melalui media massa	Jumlah kegiatan sosialisasi melalui media massa	10	107.628.875	2	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat pelathan dibagi jumlah pendaftar pelatihan x 100%	70	560.903.080	72	2.791.666.880	75	1.810.581.000	77	2.084.536.000	80	2.177.880.239	85	2.286.774.251
													Program trasmigrasi umum	meningkatkan jumlah transmigrasi	Presentase penempatan transmigrasi	Jumlah KK yang ditempatkan dibagi jumlah pendaftar	60	955.540.194	63	330.962.650	65	516.849.500	67	496.901.500	70	519.152.443	72	545.110.065
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan	Presentase katagori keluarga kurang sejahtera	13,49	13,2	12,9	-	-	-	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejatraan sosial	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi keluarga	cakupan penanganan dalam program pem berdayaan ekonomi keluarga	jumlah anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dibagi jumlah sasaran x 100%	-	-	120	30.000.000	180	22.280.000	-	27.500.000	-	28.731.433	-	30.168.005
													Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	meningkatnya partipasi masyarakat dalam program ketahanan keluarga	Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia)	jumlah keluarga sasaran bina keluarga sejahtera	34	168.230.000	34	211.605.000	34	171.450.000	-	157.275.000	-	164.317.678	-	172.533.562
						Indeks desa membangun	14	16	18	20	22	24	program peningkatan keberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Cakupan pemberdayaan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemberdayaan dibagi jumlah desa keseluruhan x100%	13,33	46.939.500	13,33	378.800.000	13,33	674.352.810	20	737.840.000	20	770.880.021	20	809.424.022
													Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Mengingkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah desa sasaran program peningkatan partisipasi masyarakat dibagi jumlah desa x 100%	30	1.378.658.400	30	1.428.462.000	30	1.553.525.000	30	1.754.923.100	30	1.833.507.476	30	1.925.182.850
													Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Meningkatnya jumlah desa sasaran peningkatan peranan wanita menuju keluarga Sehat sejahtera	Cakupan desa sasaran peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	Jumlah desa yang disasar peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera dibagi jumlah desa x 100%	4	103.880.000	4	115.000.000	5,33	69.300.000	5,33	165.580.000	5,33	172.994.570	5,33	181.644.299
													Program pemerdayaan masyarakat	Meningkatnya peran dan pelayanan tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga dalam pemberdayaan masyarakat	cakupan pelayanan tim penggerak kembinaan kesejahteraan keluarga dalam pemberdayaan masyakat	Jumlah jenis program pemberdayaan dibagi jumlah layanan x 100%	100	281.900.000	100	347.000.000	100	276.750.000	100	5.733.789.200	100	5.990.544.750	100	6.290.071.988
														Meningkatnya pelayanan PMT melalui lembaga	Cakupan lambaga yang meneriama penyaluran dana pemberian makanan tambahan	jumlah lembaga penyalur pemberian makanan tambahan							2390		2400		2410	
													Program perbaikan gizi masyarakat	Meningkatnya gizi anak sekolh (TK)	Cakupan pemberian PMTAS TK	Jumlah penerima PMTAS dibagi jumlah anak TK dikali 100 persen	87,39	3.807.104.400	89,8	3.848.988.390	90	3.718.790.000	-	-	-	-	-	-
													Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Meningkatnya gizi anak sekolah (PMTAS PAUD)	Cakupan pemberian PMTAS PAUD	Jumlah status gizi baik anak PAUD dibagi jumlah seluruh anak PAUD x 100%	87,19	1.286.700.400	89,6	2.019.000.000	90,14	2.005.398.250	-	-	-	-	-	-
													Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial		Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	Jumlah KK miskin yang diberikan bantuan rasta : jumlah total KK miskin x100	96,386	16.000.000										
													Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				70,379	156.903.000										
													Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				120	25.420.900										
													Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah perempuan di lembaga pemerintahan/jum-lah pekerja di lembaga pemerintahan x 100	1	10.019.800										
													Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	jumlah korban uang diadukan / jumlah korban yang ditangani x100	100	244.235.500										
													Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	meningkatnya cakupan desa yang memiliki badan usaha milik desa	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi	7	667.751.000	7	1.327.638.000	7	734.940.000	7	748.287.000	7	781.794.831	7	820.884.573

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	Meningkatnya produksi pertanian	Nilai tukar petani	103,2	102,1	101,6	101,8	101,9	102	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya pendapatan petani	Rasio reveneu cost ratio	Jumlah pendapatan petani dibagi jumalah biaya petani	1,1	18.924.105.791	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran produk hasill pertanian	Persentase peningkatan hasil penjualan produk hasil pertanian	(Hasil transaksi di Bantul Expo	8	59.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program pengembangan data/informasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data/Informasi	Tingkat Kualitas Pengelolaan Data	Jumlah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data	0	0	4	130.945.500	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pengelolaan Barang Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tercatat dibagi Jumlah Keseluruhan Aset x100%	100	6.920.000	100	70.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program kerjasama informasi dengan mas media		Cakupan sosialisasi pembangunan melalui media massa	Jumlah kegiatan sosialisasi melalui media massa	12 paket	12.000.000										
													Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi tertib laporan pengelolaan keuangan dibagi target tertib laporan pengelolaan keuangan x100	12 paket	99.067.220										
													Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			Sarana kelembagaan	27 Kelompok	485.568.000	29	1.560.260.399								
													Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan kapasitas penyuluhan	Cakupan peningkatan kemampuan kelembagaan kelas kelompok tani	Jumlah peningkatan kemampuan kelembagaan kelas kelompok tani	28	17.185.000	30	184.522.900	32	462.294.500	34	598.230.000	36	625.018.371	38	656.269.290
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	13.5	13.25	12.75	12.75	12.75	12,50	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Terlayaninya penyandang kesejahteraan sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	90	1.300.008.000	90	614.142.500	90	1.869.960.000	90	2.088.570.750	90	2.182.095.662	90	2.291.200.446
													Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan bantuan sosial	Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan	50	1.270.403.750	52	2.056.271.000	53	1.576.930.000	55	1.630.169.995	57	1.703.168.004	60	1.788.326.404
													Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlayaninya penyandang kesejahteraan sosial	Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok mandiri / Jumlah kelompok keseluruhan x100%	50	477.585.000	55	499.900.000	60	1.029.215.000	65	1.210.498.400	70	1.264.703.773	75	1.327.938.962
													Program pelayanan pendataan jaminan bantuan sosial	Meningkatnya pelayanan pendataan jaminan bantuan sosial	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	Jumlah peserta pemohon jaminan / Jumlah peserta pemohon jaminan yang dilayani x100%	100	-	100	-	100	1.404.742.500	100	1.233.871.915	100	1.289.123.940	100	1.353.580.137
					Meningkatnya penanganan NAPZA	Persentase Penanganan NAPZA	4	5	-	-	-	-	Program penegakan perda dan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Pencegahan penyakit masyarakat	Persentase penyuluhan napza	Jumlah penyuluhan napza yang terlaksana / Jumlah rencana penyuluhan napza x100%	100	-	100	200.000.000	100	150.000.000	100	-	-	-	-	-
		Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	Dinas Perdagangan	Meningkatnya ekspor daerah	Pertumbuhan ekspor	7,00	7,00	7,10	7,15	7,20	7,25	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Meningkatnya peranan ekspor pada sektor perdagangan	Nilai ekspor	Jumlah nilai ekspor	N/A	-	79.200.366	1.406.401.550	75.180.000	1.724.005.000	76.722.600	1.472.510.000	80.653.182	1.538.448.091	82.998.905	1.615.370.496
					Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah Pasar Tipe A	1	1	1	2	3	4	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Tersedianya ruang bagi pedagang kaki lima	Cakupan kawasan pedagang kaki lima	Jumlah kawasan yang tertata bagi pedagang kaki lima sampai dengan tahun n	-	-	1	55.849.000	2	1.700.875.000	3	1.375.259.500	4	1.436.842.774	5	1.508.684.912
													Program pemberdayaan pedagang	Meningkatnya omzet pedagang pasar rakyat	Peningkatan kualitas SDM pedagang	Jumlah pedagang yang dilatih dibagi jumlah total pedagang dikali 100%	56,4	158.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Jumlah omset pedagang pasar rakyat tahun n â€" jumlah omset pasar tahun n-1 / jumlah omset pedagang tahun n-1 x100%	-	-	3,5	875.195.000	4.4	1.098.125.000	4,6	921.446.071	4,8	962.707.859	5	1.010.843.252
													Program penataan pasar rakyat	Meningkatnya jumlah pasar dengan kondisi baik	Persentase kondisi pasar rakyat baik	Jumlah pasar dengan kondisi baik dibagi total jumlah pasar rakyat x100%	-	-	-	-	69.70	9.159.665.629	72,73%	7.035.291.161	75,76%	7.350.327.168	78,79%	7.717.843.526
													Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pembebasan tanah pasar dari status tanah kas desa menjadi tanah milik pemerintah daerah	Pembebasan tanah pasar dari status tanah kas desa menjadi tanah milik pemerintah daerah	Jumlah lokasi pasar yang tanahanya menjadi milik pemerintah daerah	2	3,970,000,000	2	3.987.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Meningkatnya jumlah pasar dengan kondisi baik	cakupan jumlah kondisi pasar baik	Jumlah pasar yang direhab/yang dibangun dibagi jumlah total pasar dikali 100%	56,25	1.033.325.000	66,67	8.606.475.000	-	-	-	-	-	-	-	-

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	Dinas Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan	7,63	4,61	4,76	5,33	5,62	5,95	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya pengawasan dan pelaksanaan tera/tera ulang	Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya)yang ditera/tera ulang	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dibagi dg potensi alat yang wajib ditera/tera ulang x100%	-	-	10,56	1.578.454.040	7	2.430.450.000	7,5	1.707.720.760	8	1.784.191.444	8,5	1.873.401.017
													Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Menjaga stabilitas harga komoditas strategis (15 komoditas)	Pertumbuhan omset	Omset tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100%	5,6	2.759.834.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Menjaga stabilitas harga komoditas strategis (15 komoditas)	Persentase deviasi harga komoditas strategis	Rata-rata harga komoditas strategis tahun n - rata-rata harga tahun n-1 / Rata-rata harga komoditas strategis tahun n-1 x100%	-	-	3,96	205.091.100	5	369.000.000	≤ 5	159.828.000	≤ 5	166.984.999	≤ 5	175.334.249
													Program kerjasama Informasi dengan media massa	Meningkatnya penyampaian informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perdagangan	Cakupan penyampaian Informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perdagangan	Jumlah informasi yang disampaikan dibagi jumlah jenis informasi perdagangan dikali 100%	100	29.600.000	100	71.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Meningkatnya pelayanan perijinan dan non perijinan	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	-	77	79	81	83	85	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan yang cepat dan akurat, sekaligus data perizinan dan non perizinan yang valid dan lengkap	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Jumlah jenis izin yang dilayani dalam aplikasi SIM / Jumlah jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan x100%	-	-	100	216.350.000	100	324.075.355	100	105.400.000	100	110.119.747		115.625.734
						IKM	78	78,5	79	79,5	80	80,5	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Cakupan penetapan pelayanan perizinan	Jumlah izin yang ditetapkan / Jumlah pemohon x100%	100	970.499.934	100	851.135.000	100	806.586.000	100	532.197.575	100	556.029.055	100	583.830.508
															Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah permohonan izin yang dilayani / Jumlah pemohon x100%	100		100		100		100		100		100	
															Cakupan penanganan permasalahan perizinan	Jumlah permasalahan perizinan yang terselesaikan / Jumlah seluruh permasalahan perizinan x100%	100		100		100		100		100		100	
															Jumlah keluhan pelayanan permohonan izin	Jumlah pengaduan terhadap pelayanan CS	-		-		-		-		-		-	
															Hasil survey IKM	Hasil Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	78		78,5		79		79,5		80		80,5	
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Meningkatnya produktivitas kelembagaan KUKM	Cakupan KUKM yang naik kelas	-	192	180	180	180	180	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Meningkatnya permodalan KUKM	Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	20	152.066.000	20	135.000.000	50	504.184.000	60	417.275.000	70	435.960.318	80	457.758.333
													Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru	100	191.855.000	100	200.000.000	100	847.556.000	200	494.850.000	300	517.009.078	400	542.859.532
													Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya produktivitas IKM dan UKM	Cakupan partisipasi produk Usaha Mikro	Jumlah produk Usaha Mikro Baru yang dilibatkan dalam promosi	2	810.268.000	3	818.984.000	3	128.318.000	3	87.300.000	3	91.209.240	3	95.769.702
														Meningkatnya produktivitas IKM dan UKM	Cakupan produktivitas IKM dan UMKM	Jumlah produksi IKM dan UMKM dibagi Jumlah sumber daya yang ada x100%	70	810.268.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Meningkatnya daya saing koperasi	Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	-	10	10	10	10	10	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya kualitas koperasi	Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT dibagi jumlah Koperasi aktif x100%	70	789.989.000	74,8	1.655.440.000	80	684.250.000	85	1.009.207.800	90	1.054.399.504	95	1.107.119.479
															Cakupan peningkatan koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah koperasi x100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Meningkatnya industri daerah	Cakupan ketersediaan energi	-	75	76	77	78	80	Program potensi energi	Meningkatnya ketercukupan energi	Cakupan pengembangan potensi energi	Jumlah energi yang dikembangkan dibagi jumlah potensi energi yang ada x100%		0	20	60.000.000	40	127.343.500	60	103.815.000	80	108.463.772	100	113.886.960
						Pertumbuhan industri	2%	3,4%	1,7%	3,4%	3%	4%	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Meningkatnya standarisasi produk	Cakupan usaha yang terstandarisasi	Jumlah unit usaha IKM yang memiliki standarisasi	10	165.840.000	10	159.150.000	10	585.700.000	20	282.985.000	30	295.656.894	50	310.439.739
													Program pengembangan industri kecil dan menengah	Meningkatnya nilai produksi	Persentase nilai produksi	Jumlah Nilai produksi tahun N dikurangi nilai produksi tahun N-1 dibagi nilai Produksi tahun N-1 x100%	3	7.222.089.102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														Berkembangnya IKM non sentra	Persentase IKM Non Sentra yang dikembangkan	Jumlah IKM Non sentra yang dikembangkan dibagi jumlah IKM Non Sentra yang ada x100%	-	-	3,53	7.098.585.000	4.48	2.257.075.000	5	1.056.275.000	6	1.103.574.344	7	1.158.753.061
													Program penataan struktur industri	Meningkatnya industri kecil menengah	Cakupan kerjasama pemenuhan bahan baku industri	Jumlah kerjasama pemenuhan bahan baku industri antar pelaku usaha industri	1	88.430.000	2	26.868.000	2	2.499.053.000	2	317.345.000	2	331.555.514	2	348.133.289
													Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatnya jumlah sentra industri	Persentase pengembangan sentra industri potensial	Jumlah sentra industri yang dikembangkan dibagi jumlah sentra industri yang ada x100%	5	449.008.600	8	650.000.000	20	850.000.000	30	938.600.000	50	980.629.930	80	1.029.661.427

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah	Perceppatan penyerapan belanja pemerintah	48	60	65	68	70	75	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyerapan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sesuai dengan anggaran kas	Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	Jumlah SKPD dengan penyerapan anggaran belanja daerah di atas target Kabupaten dibagi jumlah SKPD dikali 100%	53	209.619.622	25	165.357.550	30	187.740.000	35	508.797.619	40	531.581.263	50	558.160.326
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Gini Ratio	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Terlaksananya penerapan UMK	Upah Minumum Kabupaten	1.297.700	1.404.760	1.527.150	1.578.389	1.679.093	1.773.479	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Meningkatnya kebutuhan hidup layak	Penetapan nilai kebutuhan hidup layak	nilai kebutuhan hidup layak	1.297.700	436.454.501	1.404.760	716.951.400	1.570.150	867.360.100	1.578.389	923.964.500	1.673.093	965.339.061	1.773.479	1.013.606.015
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Meningkatnya Produktivitas Kelembagaan KUKM	Cakupan KUKM Yang Naik Kelas	192	-	-	-	-	-	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Meningkatnya permodalan KUKM	Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	20	152.066.000	20	135.000.000	50	504.184.000	60	417.275.000	70	435.960.318		457.758.333
													Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru	100	191.855.000	100	200.000.000	100	847.556.000	200	494.850.000	300	517.009.078	400	542.859.532
						Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	-	192	180	195	200	205	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya produktivitas IKM dan UKM	Cakupan partisipasi produk Usaha Mikro	Jumlah produk Usaha Mikro Baru yang diiibatkan dalam promosi	-	-	3	818.984.000	3	128.318.000	3	87.300.000	3	91.209.240	3	95.769.702
														Meningkatnya produktivitas IKM dan UKM	Cakupan produktivitas IKM dan UMKM	Jumlah produksi IKM dan UMKM dibagi Jumlah sumber daya yang ada dikali 100%	70	810.268.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	10	10	10	11	12	13	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatny kualitas koperasi	Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT dibagi jumlah Koperasi aktif dikali 100%	70	789.989.000	74,8	1.655.440.000	80	684.250.000	85	1.009.207.800	90	1.054.399.504	95	1.107.119.479
														Meningkatnya kualitas koperasi	Cakupan peningkatan koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah koperasi x100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	2.800.800	3.405.685	3.644.083	4.445.781	5.468.311	6.780.706	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya sebaran promosi wisata	Cakupan promosi pariwisata	Jumlah promosi wisata dibagi jumlah ideal promosi wisata x 100%	65	854.500.000	70	2.005.089.000	72	1.321.655.000	75	2.075.650.000	80	2.168.596.329	90	2.277.026.146
						Lama Tinggal Wisatawan	1,6	1,8	1,9	2	2,1	2,2	Program pengembangan destinasi pariwisata	Meningkatnya keragaman destinasi wisata	Cakupan peningkatan destinasi pariwisata	Jumlah penambahan sarpras destinasi wisata	18	5.253.470.000	32	10.663.003.500	3	3.040.300.000	3	9.678.523.500	3	10.111.921.824	3	10.617.517.915
													Program pengembangan kemitraan	Meningkatnya sinergitas stakeholder pariwisata	Cakupan mitra pariwisata	Jumlah kemitraan pariwisata	2	355.800.000	2	606.700.000	3	720.650.000	3	1.496.448.000	3	1.563.458.020	3	1.641.630.921

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Tanaman pangan	215.622,67	215.867,00	231.560,21	231.796,40	232.034,00	232272,99	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pertanian	Pengembangan Infrastruktur irigasi	Jumlah Pengembangan Infrastruktur irigasi	0	0	0	0	16	3.044.755.750	20	5.960.634.250	22	6.227.547.782	25	6.538.925.171
															Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air	0	0	0	0	2000		2000		2000		3000	
															Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	Jumlah penguatan kelembagaan petani pemakai air	0	0	0	0	10		10		10		10	
													Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produksi pertanian	Angka produktivitas padi (GKG)	Jumlah produksi padi per luas panen	60,27	3.158.331.275	62,56	9.705.118.827	65,61	4.015.363.870	65,64	4.447.471.900	65,67	4.646.626.954	65,7	4.878.958.301
															Angka produktivitas jagung (pipil kering)	Jumlah produksi jagung per luas panen	68,42		71,67		59,52		59,55		59,58		59,61	
															Angka produktivitas kedelai (wose)	Jumlah produksi kedelai per luas panen	16,12		14,39		15,87		15,89		15,91		15,93	
						Produksi Tanaman Hortikultura	14.363,65	15.503,70	6.553,93	6.624,39	6.697,25	6.772,60	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produksi pertanian	Angka Produktivitas bawang merah	Jumlah produksi bawang merah per luas panen	8,1		11,19		10.87		10.88		10.89		10.90	
															Angka produktivitas pisang	Jumlah produksi pisang per luas panen	8		6,8		6.90		7.10		7.30		7.50	
															Angka produktivitas cabe merah	Jumlah produksi cabe merah per luas panen	3,6		1,55		2.92		2.95		2.98		3.01	
						Produksi Perkebunan	14.466,77	14.490,78	14.524,09	14.560,40	14.604,08	14.655,19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produksi pertanian	Angka produktivitas Tembakau (rajang kering)	Jumlah produksi tembakau per luas panen	5,95		7,36		7.40		7.45		7.50		7.55	
															Angka produktivitas Tebu (hablur gula)	Jumlah produksi tebu per luas panen	34,91		40,2		39.63		39.65		39.70		39.90	
															Angka produktivitas kelapa (kopra)	Jumlah produksi kelapa per luas panen	10,73		12,35		12.45		12.50		12.55		12.60	
															Cakupan luas tanam kakao	Jumlah luas tanam	70		100		130		160		190		210	
													Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase pembentukan unit pelayananpasa alat mesin pertanian (UPJA) baru	Jumlah UPJA baru yg terbentukpd th n /jumlah kelompok (calon UPJA) yang dilatih pd th n x100%	20	1.087.458.559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Produksi Daging	14.742,55	15.151,00	14.398,44	14.513,63	14.644,26	14.790,70	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Penurunan kasus penyakit hewan/ternak	Cakupan PAD UPT RPH	Jumlah pendapatan dari pemotongan ternak di UPT RPH	66.827.500	643.393.500	72.740.000	962.681.950	-	667.625.000	-	948.374.761	-	990.842.399	-	1.040.384.519
														Penurunan kasus penyakit hewan/ ternak	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	Jumlah pelayanan kesehatan ternak	5500		4.960		6.200		6.400		6.600		6.800	
														Penurunan kasus penyakit hewan/ternak	Cakupan PAD UPT Puskeswan	Jumlah pendapatan atas pelayanan kesehatan ternak di UPT Puskeswan	138.738.000		101.863.100		-		-		-		-	
														Penurunan kasus penyakit hewan/ternak	Angka kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	Jumlah kasus penyakit hewan menular	0		0		0		0		0		0	
														Penurunan kasus penyakit hewan/ternak	Persentase penurunan jumlah kasus Avian Influenza (AI) terlapor	Jumlah kasus AI tahun N dikurangi tahun N-1 dibagi tahun N-1 x100%	5		50		-		-		-		-	
														Penurunan kasus penyakit hewan/ternak	Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	Jumlah pengawasan pangan asal hewan yang dilaksanakan dibagi jumlah pangan hewan x 100 Persentase	30		35		-		-		-		-	
														Penurunan kasus penyakit hewan/ternak	Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	Jumlah ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	3560		5264		4550		5000		5500		6000	
													Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan produksi hasil peternakan	Angka produksi telur	Jumlah produksi telur	-	-	7193	397.004.000	9181	502.641.000	9600	796.100.000	10200	831.748.868	10.700	873.336.311
															Angka produksi susu	Jumlah produksi susu	-		178034		430000		480000		530000		580.000	

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Produksi Daging	14.742,55	15.151,00	14.398,44	14.513,63	14.644,26	14.791	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan pemasaran hasil peternakan	Angka produksi telur	Jumlah produksi telur	8072	1.129.342.500	-	877.534.100	-	181.223.750	-	278.403.750	-	290.870.499	-	305.414.023
															Angka produksi susu	Jumlah Produksi susu	365126		-		-		-		-		-	
															Angka populasi Ternak	Jumlah populasi ternak dihitung berdasarkan data Jumlah populasi ternak (sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik) dikonversi dalam satuan ternak. 1 ekor sapi setara dengan 0,76 satuan ternak, 1 ekor kerbau setara dengan 0,91	133956		108875		-		-		-		-	
															Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	Jumlah pengawasan pangan asal hewan yang dilaksanakan dibagi jumlah usaha pangan hewan (los daging di pasar dan peternak sapi perah) x 100 Persen	-		-		44		45		46		47	
		Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	Pertumbuhan Produksi Perikanaan		Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Produksi Perikanan	12.191,22	12.912,57	13.022	13.198	13.383	13.577	Program pengembangan budidaya perikanan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Cakupan produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	11363,72	996.196.109	12027,22	2.970.017.869	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program pengembangan perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Cakupan produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	827,5	345.508.400	885,35	1.103.869.950	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Peningkatan kapasitas penyuluhan kelautan dan perikanan	Cakupan peningkatan metode Penyuluhan	Jumlah pengembangan metode penyuluhan	1	102.167.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Peningkatan produk olahan ikan	Cakupan volume produk olahan ikan	Jumlah Volume Produk Olahan Ikan	129,1	725.892.680	263	46.615.000	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Peningkatan kawasan khusus perikanan	Peningkatan Kawasan Khusus Perikanan	Jumlah kawasan khusus budidaya perikanan	1	48.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Peningkatan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan	Cakupan peningkatan luas kawasan konservasi kelautan dan perikanan	Jumlah luas kawasan konservasi kelautan dan perikanan	7,45	274.901.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Peningkatan pemahaman budaya maritim	Cakupan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat berwawasan maritim	Jumlah kelompok masyarakat berwawasan maritim	1	45.733.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan		Tersedianya sarana kelembagaan		1 tahun	22.440.000										
													Program pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan kelautan perikanan	Peningkatan sarana prasarana dan kelembagaan kelautan perikanan	Persentase pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan kelautan perikanan	Jumlah sarana prasarana dan kelembagaan kelautan dan perikanan yang tersedia dibagi Jumlah sarana prasarana dan kelembagaan kelautan dan perikanan yang dibutuhkan x 100%	60	1.228.137.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan	Cakupan produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	-	-	-	773	2.413.174.850	792	2.325.667.600	812	2.429.809.563	833	2.551.300.042
																Jumlah produksi perikanan tangkap	-		-		12074		12312		12554		12801	

Visi	Misi 4	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	PD Penanggung Jawab
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Indeks Lingkungan Hidup	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Dinas Perhubungan
				Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	82,79	74,18	74,58	75,08	75,58	76,08	Program rehabilitasi/pemelihara an jalan dan jembatan	Meningkatnya penanganan jembatan kabupaten	Cakupan jembatan tertangani	Jumlah jembatan tertangani	3	3.118.770.500	-	-	10	9.285.775.000	-	-	-	-	-	-
													Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya penanganan jalan kabupaten	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	Jumlah kilometer panjang jalan yang tertangani dalam satu tahun	15	58.468.981.000	15	91.768.480.000	15	43.821.465.000	17	76.002.482.600	17	79.405.826.981	17	83.376.118.330
													Program rehabilitasi/pemelihara an jalan dan jembatan	Meningkatnya penanganan jembatan kabupaten	Cakupan jembatan tertangani	Jumlah jembatan tertangani	-	-	-	-	-	-	10	-	12	-	15	-
													Program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Meningkatnya cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan	Panjang jalan desa tertangani / Panjang jalan desa x100%	12.20	48.799.775.875	13.41	43.375.091.821	14.63	24.103.475.000	15.85	24.109.921.200	17.07	25.189.548.629	18.29	26.449.026.060
					Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	80	80	82	82	84	84	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan sarana prasarana kebinamargaan	Jumlah sarana prasarana kebinamargaan tertangani	-	-	-	-	1	380.000.000	2	2.752.875.000	2	2.876.147.048	2	3.019.954.400
													Program pengembangan jasa konstruksi	Peningkatan kompetensi usaha jasa konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	Usaha jasa konstruksi kriteria baik / Jumlah usaha jasa konstruksi x100%	-	-	-	-	70	1.189.851.000	75	1.210.996.000	80	1.265.223.655	85	1.328.484.838
													Program Pembangunan Gedung	Meningkatnya gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	Jumlah gedung dalam kondisi baik / Total jumlah gedung pemerintah x100%	80	5.494.551.900	80	9.999.953.418	82	10.651.550.000	82	10.465.450.000	84	10.934.086.408	84	11.480.790.729
					Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	50,13	79,69	80	90	100	100	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya rumah layakhuni	Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah RTLH tertangani / Total RTLH x100%	26	1.504.860.673	42	3.104.163.500	46	3.320.701.000	49	2.844.035.000	52	2.971.389.136	55	3.119.958.593
													Program Lingkungan Sehat Perumahan	Menurunnya kawasan kumuh	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah kawasan kumuh tertangani dalam tahun n	-	-	-	-	1	450.400.000	2	758.600.000	2	792.569.641	2	832.198.123
													Program Pengelolaan Area Pemakaman	Meningkatnya pengembangan TPU	Cakupan Pengembangan TPU	Jumlah TPU terbangun	1	1.400.000.000	1	1.125.000.000	1	703.350.000	1	797.800.000	1	833.524.993	1	875.201.242
					Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi	81,12	81,16	81,66	82,16	82,66	83,16	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya cakupan penyediaan air baku	Cakupan penyediaan air baku	Jumlah pananganan saluran pengambil dan pembawa	-	-	5	60.000.000	7	70.000.000	9	133.750.000	11	139.739.243	13	146.726.205
													Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya pemanfaatan sumber air/mata air	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	Jumlah sumber/mata air yang termanfaatkan	11	80.792.535	21	1.095.000.000	26	948.241.000	31	1.358.825.000	36	1.419.672.347	41	1.490.655.964
													Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya cakupan penyediaan air minum dan air limbah	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	Jumlah IPAL komunal terbangun	30	15.142.425.744	35	16.597.250.000	40	19.801.975.500	45	13.631.224.000	50	14.241.621.819	55	14.953.702.910
													Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		Persentase saluran irigasi berfungsi baik	Jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik / Total panjang saluran irigasi x100	79	18.466.503.210	80	46.075.630.000	80.5	14.600.000.000	81	20.012.296.950		20.908.435.287		21.953.857.052
													Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemelihar aan Drainase/Gorong-gorong	Meningkatnya jumlah drainase dan gorong-gorong	Cakupan drainase jalan kabupaten tertangani	Panjang drainase tertangani	400	874.019.700	400	2.343.821.000	400	8.604.275.000	500	11.164.152.200	500	11.664.076.063	500	12.247.279.866

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Dinas Perhubungan	Meningkatnya keselamatan transportasi	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	5	6	1,83	1,83	1,83	1,83	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Presentase angkutan umum yang layak jalan	Jumlah angkutan umum yang ada dikurangi angkutan umum yang melanggar saat terjaring operasi dibagi jumlah angkutan umum yang dikalikan seratus persen	80,00	1.883.065	80	2.664.550.000	80,50	853.500.000,00	80,5	865.276.000	81	940.800.000	81,25	1.034.800.000
													Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya fasilitas keselamatan	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	Jumlah APILL - Jumlah APILL yang rusak dibagi jumlah total APILL dikalikan seratus persen	90	541.900	91	543.800	92	2.060.705.000	93	1.488.959.000	94	1.555.633.667	95	1.633.415.351
													Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya fasilitas keselamatan	Persentase ketersediaan LPJU	Jumlah LPJU yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan LPJU di jalan kabupaten dikalikan seratus Persentase	-	-	-	-	31	9.318.350.000	35	20.147.209.000	40	21.049.388.616	44	22.101.858.047
														Meningkatnya ketersediaan kelengkapan lalu lintas jalan	Persentase Ketersediaan rambu jalan kabupaten	Jumlah rambu yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan rambu di jalan dikalikan seratus persen	9,8	7.216.727.002	12	20.579.917.572	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya ketersediaan simpul transportasi	Ketersediaan simpul transportasi yang memadai	Jumlah simpul transportasi berupa halte, *park and ride* , terminal yang terbangun	34	99.499.000	42	102.200.000	53	151.675.000	63	164.075.000	68	171.422.177	79	179.993.286
													Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji dibagi Jumlah kendaraan bermotor wajib uji x 100%	85	520.274.508	85,5	1.342.500.000	86	1.020.175.000	86,5	902.795.000	87	943.221.604	87,5	990.382.685
													Pengembangan Kelalu-Lintasan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan lalu lintas yang aman, tertib, selamat dan lancar	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah pelanggar lalu lintas yang terjaring operasi dibagi jumlah pengguna jalan yang terjaring operasi lalu lintas x100%	-	-	-	-	10	3.274.975.000	12	3.224.391.000	14	3.368.777.244	16	3.537.216.106
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	32	35	40	45	50	56	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo (Satuan: mg/L)	Hasil Analisa Laboratorium	7,25	874.428.727	7	1.849.843.000	7,35	3.475.000.000	7,4	7.724.954.000	7,45	8.070.872.684	7,5	8.474.416.319
						Indeks Kualitas Udara (IKUd)	55	60	65	70	80	90	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Menurunnya konsentrasi SO2 di udara ambien	Angka penurunan konsentrasi SO2 di udara ambien	Hasil Analisa Laboratorium	36	52.703.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Indeks Tutupan Lahan	27,5	33,85	40,21	46,57	52,93	61,2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan Luasan Tutupan Vegetasi/ Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis) (Satuan: Ha/tahun)	Jumlah penambahan luas tutupan lahan	0,5	924.579.500	1	1.104.485.000	1	4.276.000.000	1	3.974.552.000	1	4.152.529.992	1	4.360.156.491
													Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah yang telah ditetapkan melalui SK Kepala sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten	56	187.972.690	76	630.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-
															Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Abntul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL)	Kegiatan yang memiliki dokumen UKL UPL	392		462	64.630.000	542	383.000.000	632	837.285.000	732	874.778.107	842	918.517.012
													Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Peningkatan Luasan Tutupan lahan perkotaan	Angka penambahan luasan RTH-Taman di 7 kecamatan	mÂ²/tahun	1000	45.649.000	250	964.584.700	-	-	-	-	-	-	-	-
						Volume sampah yang tertangani	420	430	440	450	460	470	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya volume sampah yang tertangani	Jumlah kelompok pengelola sampah (Satuan: kelompok)	127+(nx3) kelompok	130	530.970.350	133	4.808.700.000	136	21.763.200.000	139	8.531.488.250	142	8.913.523.042	145	9.359.199.194

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mengurangi resiko bencana	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	94	97	98	99	100	100	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana kebakaran	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	Jumlah SDM dan Sarpras Penanggulangan Kebakaran/Jumlah Kebutuhan SDM dan Sarpras kebakaran x 100%	90	-	94	-	97	226.000.000	98	717.100.000	99	749.211.297	100	786.671.861
													Program Penanganan Kedaruratan Bencana	Meningkatnya ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	jumlah ketersediaan logistik dibagi jumlah kebutuhan logistik dikali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	80	500.000.000	90	550.000.000
													Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kebencanaan	Meningkatnya penyediaan data dan informasi kebencanaan	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	jumlah ketersediaan data dibagi jumlah kebutuhan data dikali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	80	300.000.000	90	330.000.000
						Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,69	3,19	3,7	4,2	4,7	5,2	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk / 75 desa x100%	20	1.339.442.847	29,33	2.758.031.405	-	3.646.130.000	-	3.281.900.000	-	3.428.861.462	-	3.600.304.535
														Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	"Persentase Sekolah Siaga Bencana (Satuan: Persentase)"	Jumlah sekolah siaga bencana yang terbentuk / Jumlah sekolah x100%	2,69		3,19		-		-		-		-	
														Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Jumlah sekolah siaga bencana yang terbentuk	2		2		2		2		2		2	
						Persentase Relokasi Warga	9,09	27,28	45,46	63,64	81,82	100	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Rawan Bencana	Terfasilitasinya masyarakat korban bencana	Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi	Jumlah penyiapan lahan relokasi	-	-	-	-	2	811.959.500	2	2.797.000.000	2	2.922.247.938	2	3.068.360.335
				Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya penanganan banjir	Presentase penanganan banjir	20,30	24,90	27,34	34,12	40,90	47.68	Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya cakupan penanganan banjir	Cakupan lokasi penanganan banjir	Jumlah lokasi banjir genangan yang tertanganI	18	14.470.420.023	18	11.455.880.000	18	9.247.722.000	18	7.887.509.800	18	8.240.707.633	18	8.652.743.015
		Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	-	2	2	3	4	4	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan ruang	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	Jumlah Dokumen Tata Ruang Yang Sudah Diperdakan	-	-	2	1.025.579.497	2	2.066.207.100	3	1.274.100.000	4	1.331.153.414	4	1.397.711.084
						Persentase cakupan pengendalian tata ruang	-	71	72	75	77	80	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	Jumlah penanganan pelanggaran / Jumlah pelanggaran x 100	-	-	71	100.000.000	72	394.200.000	75	1.581.555.000	77	1.652.376.059	80	1.734.994.862
						Cakupan Sertifikasi Tanah	-	84	88	92	96	100	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya persertifikatan tanah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat / Seluruh bidang tanah x100%	-	-	84	580.995.000	88	555.558.506	92	169.815.000	96	177.419.211	100	186.290.172
													Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Tertanganinya konflik pertanahan	Angka penanganan konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang tertanganI / Jumlah pengaduan konflik pertanahan tahun yang bersangkutan x100%	-	-	10		10	8.100.000	15	33.225.000	15	34.712.795	20	36.448.435

Visi	Misi 5	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	PD Penanggung Jawab
"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kondusifitas masyarakat yang stabil	Jumlah intoleransi di masyarakat	-	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan wilayah pengendalian keamanan lingkungan	17	20.205.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan	Persentase cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan / Jumlah target peserta pembinaan wawasan kebangsaan x100%	100%	183.918.750	100%	351.571.650	100%	400.588.200	100%	326.550.000	100%	341.172.708	100%	358.231.343
													Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan kerukunan umat beragama	Persentase FKUB aktif	Jumlah FKUB aktif / Jumlah FKUB x100%	50%	203.592.000	75%	88.121.850	100%	123.753.000	100%	123.490.000	100%	129.019.806	100%	135.470.796
													Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase FKDM tingkat kecamatan	Jumlah FKDM / Jumlah kecamatan x100%	25%	185.298.263	82%	272.357.000	90%	297.470.000	100%	217.685.000	100%	227.432.800	100%	238.804.440
													Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba	Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)	Peringkat perbandingan tahun ini dengan tahun lalu	3	39.799.850	3	66.636.525	4	66.250.000	4	92.950.000	4	97.112.244	4	101.967.856
													Program perencanaan pembangunan daerah	meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Tingkat kesesuaian Program Kegiatan Renstra dan Renja	Jumlah program di RENJA dibagi dengan jumlah jumlah program di RENSTRA x100%	100%	4.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya ketaatan dan kesadaran hukum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, ketentraman, dan ketertiban (K3)	100	100	100	100	100	100	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Jumlah pelanggaran Kantrantibmas yang ditindaklanjuti / jumlah sasaran x100%	100	516.152.400	100	297.850.000	100	486.380.000	100	716.080.000	100	748.145.622	100	785.552.903
													Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat	Cakupan kawasan Tertib	Jumlah Lokasi Kawasan Tertib	8	132.073.000	14	239.334.000	18	403.990.000	22	566.262.000	26	591.618.864	30	621.199.807
													Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya pelayanan perlindungan masyarakat	Rasio Linmas terhadap Jumlah RT	Jumlah Linmas/Jumlah RT x100%	95	196.787.900	96	281.260.150	97	455.890.000	98	654.690.000	99	684.006.615	100	718.206.946
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Rasio kekerasan Perempuan dan Anak	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya kualitas kesetaraan dan keadilan gender	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	Desa dan Kecamatan yang sudah layak anak	30	243.640.000	40	495.020.000	50	398.080.000	60	259.364.100	70	270.978.265	80	284.527.178
													Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya koordinasi dan implementasi Pengarustaman Gender Konvensi Hak Anak dan Kabupaten Layak Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah perempuan di lembaga pemerintahan/jumlah pekerja di lembaga pemerintahan x 100%	30	14.980.000	30	50.000.000	30	56.600.000	30	223.064.990	30	233.053.703	30	244.706.388
													Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	jumlah korban uang diadukan / jumlah korban yang ditangani x100%	100	229.680.000	100	339.650.000	100	482.570.000	100	474.499.000	100	495.746.773	100	520.534.112
				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Jumlah Pemuda Pelopor	4	4	4	4	4	4	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran serta pemuda	Peran serta pemuda dalam kegiatan Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengiuti kegiatan kepemudaan	500	792.910.000	500	1.478.610.000	500	2.612.698.500	500	2.071.557.000	500	77.742.034	500	81.629.136
													Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Meningkatnya Pemuda yang berwirausaha	Cakupan pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	60	65.920.000	60	72.250.000	60	85.695.000	60	74.410.000	60	77.742.034	60	81.629.136
													Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Meningkatnya kegiatan pemuda pelajar	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelajar	Jumlah event/kegiatan pemuda pelajar	3	295.035.000	3	364.860.000	3	793.000.000	3	837.540.000	3	875.044.526	3	918.796.752
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan budaya daerah	Jumlah desa budaya	9	10	12	14	16	18	Program Pengembangan Nilai Budaya	Berkembangnya potensi dan nilai-nilai budaya lokal seni budaya masyarakat	Peningkatan Pariwisata Seni Budaya	Jumlah pertunjukan dan festival seni budaya yang diselenggaran.	350	3.166.500.000	450	11.592.000.000	19	905.000.000	236	4.669.190.000	250	4.878.273.454	300	5.122.187.126
													Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah melalui fasilitasi pelaksanaan pertunjukan dan festival seni budaya.	Peningkatan jumlah peristiwa budaya	Jumlah peristiwa budaya	-	-	2	94.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
						Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	-	-	21	24	27	30	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya kualitas kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Peningkatan kerjasama pengelolaan kebudayaan daerah	Jumlah kerjasama kebudayaan yang diselenggarakan	-	-	-	-	1	65.000.000	1	47.900.000	1	50.044.933	1	52.547.179
													Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	Meningkatnya upaya pelestarian warisan budaya tak benda	Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pelestarian warisan budaya tak benda	-	-	-	-	4	210.000.000	5	287.170.000	6	300.029.296	7	315.030.761
													Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	Meningkatnya upaya pelestarian warisan budaya benda	Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dibagi Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah kali 100%	-	-	-	-	2%	225.000.000	3%	703.125.000	4%	734.610.505	5%	771.341.030